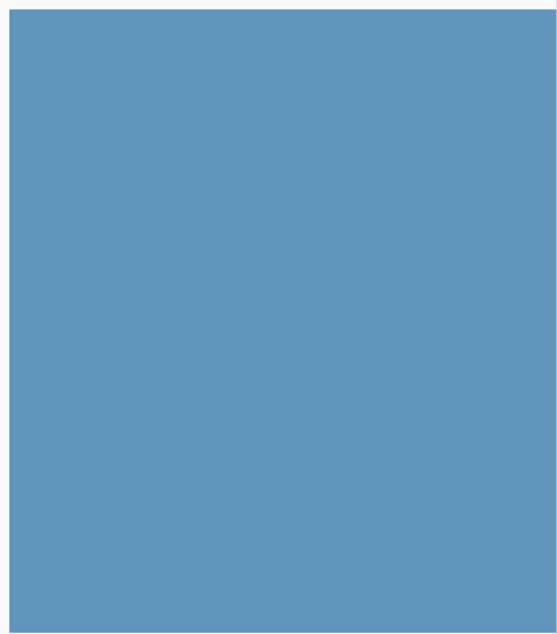




Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan NUSA TENGGARA BARAT 2015



PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
NUSA TENGGARA BARAT

2015

Dewan
Ketahanan Pangan
NTB

Badan
Ketahanan Pangan
NTB

World Food
Programme



GUBERNUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sambutan



Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktu.

Alhamdulillah wasyukurillah, berkat limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, kita semua masih terus diberi kesempatan untuk berkarya dalam segala tindakan nyata untuk mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat kearah yang lebih baik khususnya dalam upaya peningkatan kondisi ketahanan pangan dan gizi.

Berbagai pemikiran dan upaya telah sama-sama kita arahkan di segala tingkatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memberikan kontribusi yang besar bagi upaya menjadikan rakyat lebih sejahtera sejalan dengan Visi Pembangunan Nusa Tenggara Barat 2013-2018 **"Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera"**.

Saya memberikan penghargaan yang tinggi atas kerja keras dari Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan *United Nations-World Food Programme* (UN-WFP) yang telah berhasil meluncurkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) ini dalam 2 (dua) periode tahapan waktu, yaitu Edisi I di Tahun 2010 dan Edisi II pada saat ini. Peta ini menggambarkan kondisi ketahanan pangan dan kerentanannya yang dirinci sampai pada tingkatan Kecamatan, dengan menggunakan indikator yang sama dengan peta pada *Food Security and Vulnerability Atlas 2010* yaitu dimensi Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, Pemanfaatan Pangan dan Kerentanan terhadap kerawanan pangan transien (rawan pangan sementara), sehingga secara langsung dapat dilihat perubahannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pada *Food Security and Vulnerability Atlas* 2010 terdapat 64 kecamatan di Nusa Tenggara Barat berada pada kondisi rawan pangan (61%) dan 41 kecamatan pada kondisi tahan pangan (48%). Sedangkan pada *Food Security and Vulnerability Atlas* 2015 secara umum gambaran yang dihasilkan memberikan perubahan yang baik pada hampir seluruh indikator maupun gambaran menyeluruh (komposit), dari 105 kecamatan di 8 kabupaten, tidak ditemukan kecamatan yang tergolong rawan pangan (Prioritas 1-3) dan 105 kecamatan yang berada pada kondisi tahan pangan (Prioritas 4-6).

Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan kondisi ketahanan pangan wilayah karena berbagai upaya pembangunan yang dilakukan oleh kita semua. Gambaran ini juga sejalan dengan kondisi kemiskinan Nusa Tenggara Barat yang terus menerus berkurang secara signifikan. Namun saya juga menyadari bahwa masih terdapat beberapa permasalahan pangan dan gizi di beberapa wilayah

seperti tingginya angka balita *stunting* (pendek), angka perempuan buta huruf, perubahan iklim, distribusi pangan, gejolak harga, dan lain sebagainya.

Buku ini sangatlah penting karena memuat informasi yang akurat tentang kondisi umum dan identifikasi spesifik terhadap keadaan pangan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan mengetahui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, maka akan dapat menjadi arah dan pedoman bagi pemerintah daerah bersama seluruh pemangku amanah lainnya dalam penyusunan program, strategi dan langkah yang tepat, meningkatkan koordinasi serta mengambil peran optimal dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan keragaman pangan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Mengingat penuntasan permasalahan pangan dan gizi itu bersifat multidimensional, yang tidak dapat dilakukan secara sendiri dan terpisah namun dalam satu tatanan koordinasi yang tepat, cepat, terarah, menyeluruh dan berkesinambungan, maka kami berharap bahwa dokumen ini dapat menjadi penghubung lintas sektor antar SKPD dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghapuskan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.

Harapan Saya, penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini tidak berhenti sampai tingkat provinsi saja, namun dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di tingkat kabupaten/kota sehingga diperoleh potret riil ketahanan dan kerentanan pangan sampai tingkat kelurahan dan desa.

Pada akhirnya, semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam upaya bersama meningkatkan kondisi ketahanan pangan dan gizi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa-masa yang akan mendatang. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan hidayah-NYA kepada kita semua, amin.

Wallahu muwaffiqu Walhadi ila Sabillirasyad.
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, April 2016
Gubernur Nusa Tenggara Barat



Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI

Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjangkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha Esa, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan *United Nations – World Food Programme (UN-WFP)* dapat melakukan pemuktahiran Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ *Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)* Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015.

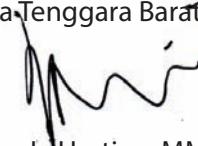
Peta ini menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan dari berbagai dimensi, yang dirinci sampai pada kondisi kecamatan. Secara teknis dapat dijelaskan bahwa persoalan pangan wilayah sangat bergantung pada banyak aspek (multidimensional) sehingga indikator yang dipergunakan untuk menggambarkan kondisi ini terdiri dari dimensi ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan dan kerentanan terhadap kerawanan pangan transien. Gambaran kondisi ketahanan pangan, rekomendasi dan strategi penanganan untuk setiap kabupaten telah dirinci dengan detail untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keberadaan kantong-kantong rawan pangan di seluruh kecamatan-kecamatan di Provinsi NTB.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada UN-WFP Indonesia atas komitmen, dukungan dan kerjasama yang intensif dalam upaya memperbaiki pemantauan kondisi ketahanan pangan di NTB, termasuk dukungannya untuk bersama-sama dengan Tim Teknis FSVA NTB dan kabupaten dalam proses penyusunan laporan sampai peta ini dapat diluncurkan. Juga kepada semua pihak terkait yang telah berperan aktif terhadap penyusunan peta ini, yang telah berproses dalam upaya penerbitannya.

Semoga dengan adanya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2015 ini diharapkan dapat digunakan menjadi salah satu dokumen perencanaan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memantapkan strategi dan kebijakan serta prioritas kegiatan yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi WabaraktuH.

Mataram, April 2016
Kepala Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,


Ir. Hartina, MM
Pembina Utama Madya
NIP.196003121985032008



Kata Pengantar

Pemerintah Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah memprioritaskan penanganan masalah kurang gizi dan ketahanan pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB. Untuk mendukung pemerintah NTB dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015 (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA NTB 2015*) telah mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang paling rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Peta ini merupakan alat yang sangat baik untuk memastikan bahwa kebijakan dan sumber daya yang dikeluarkan dapat memberikan dampak yang maksimal.

FSVA NTB 2015 ini tidak akan mungkin diselesaikan tanpa kerjasama antara anggota Dewan Ketahanan Pangan NTB, Kelompok Kerja FSVA, dan staf dari Badan Ketahanan Pangan, Kantor/Dinas lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten. Atlas ini merupakan hasil investasi dari Pemerintah Provinsi NTB serta bantuan dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia.

Situasi kerawanan pangan di Provinsi NTB telah meningkat dimana tidak ditemukan kecamatan yang tergolong rawan pangan (Prioritas 1-3) di 2015. Hal ini menunjukkan kesuksesan pembangunan di NTB dan Indonesia serta karena pertumbuhan ekonomi yang cepat. Produksi bahan pangan pokok - padi, jagung dan ubi kayu – meningkat signifikan sejak FSVA 2010. Angka kemiskinan provinsi telah menurun, akses jalan dan fasilitas kesehatan telah menjangkau sampai tingkat desa di seluruh NTB.

Meskipun demikian, resiko untuk ketahanan pangan masih ada seperti terlihat pada masih tingginya angka kekurangan gizi kronis dan kemiskinan. Angka kemiskinan provinsi (16% di tahun 2015) lebih tinggi dari angka rata-rata nasional dan mencapai lebih dari 30% di Kabupaten Lombok Utara. Tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat perempuan melek huruf, rendahnya akses air dan sanitasi berkontribusi terhadap kekurangan gizi di NTB.

Hampir satu dari lima perempuan di NTB tidak dapat membaca - merupakan angka buta huruf tertinggi kedua untuk seluruh provinsi di Indonesia. Rendahnya angka perempuan melek huruf di NTB akan membatasi peluang mereka dan sebagai pengasuh utama anak-anak mereka nantinya akan menghambat perkembangan generasi berikutnya. Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) NTB 2014, satu dari tiga anak di bawah lima tahun (balita) di NTB mengalami *stunting* - pendek untuk usia mereka. *Stunting*, merupakan outcome dari kekurangan gizi kronis, berkaitan dengan

resiko bagi peluang kesehatan dan ekonomi dari balita ini dan merupakan tantangan pembangunan yang utama di seluruh Indonesia. Akses air bersih dan sanitasi yang rendah berkontribusi terhadap kekurangan gizi kronis. Di Provinsi NTB, hanya 30 persen rumah tangga yang memiliki akses ke air bersih dan layak minum serta hanya 41 persen yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memadai.

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan menimbulkan resiko serius terhadap ketahanan pangan di NTB. Kekeringan pada tingkat parah sering terjadi di sebagian besar wilayah NTB dan diprediksi akan meningkat frekuensi dan keparahannya di masa mendatang. Adaptasi penghidupan terhadap perubahan iklim, manajemen sumberdaya alam, dan perlindungan lingkungan sangat penting bagi masyarakat untuk berkembang di masa mendatang.

WFP dengan bangga mendukung Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi NTB dalam upaya untuk menyediakan data dan informasi terpercaya yang mengukur perkembangan kemajuan yang telah dicapai sejak FSVA sebelumnya dan termasuk tantangan yang masih ada. Tantangan-tantangan ini, meskipun sulit, namun dapat diatasi melalui kebijakan dan program yang efektif dengan didukung oleh bukti data. WFP berharap FSVA ini dapat menyediakan data dan informasi bagi Pemerintah Provinsi NTB dan pemangku kebijakan lainnya dalam memprioritaskan program ketahanan pangan dan gizi di seluruh wilayah serta nantinya dapat mengurangi kemiskinan dan kekurangan gizi sehingga seluruh masyarakat NTB dapat mencapai potensi mereka.

Perwakilan dan Direktur
United Nations - World Food Programme, Indonesia



Anthea Webb

Ucapan Terima Kasih

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2015 ini merupakan pemutakhiran dari kondisi ketahanan dan kerentanan Pangan NTB tahun 2010. Peta ini dapat diluncurkan tepat pada waktunya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak. Secara khusus terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Dr. TGH. M. Zainul Majdi**, Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi NTB.

Ir. Hj. Hartina, MM Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB telah memberikan kepemimpinan yang sangat baik dalam setiap tahapan penyusunan atlas ini. Kepada Tim Asistensi Nasional, Bapak Dr. Ir. Tjuk Eko Hari Basuki, M.St, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan-Badan Ketahanan Pangan pada Kementerian Pertanian RI, Mr. Amit Wadhwa, Dedi Junadi dan Tarningsih Handayani dari UN-WFP Indonesia atas bantuan teknis dan analisisnya untuk mendukung penyusunan buku ini, dan juga terutama kepada Ir. Rukiah Rahmayu, Moh. Zubirman, SP dan Retno Bintorowati, SP.d dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB untuk kerja kerasnya sehingga buku ini dapat publikasikan dan akan terus diupayakan untuk sosialisasi guna pemanfaatannya kedepan. Peran aktif dari berbagai instansi pemerintah dan institusi non pemerintah, juga masukan-masukan dari kabupaten/kota di NTB merupakan hal yang sangat dihargai. Terima kasih untuk dukungan dana dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia.

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar pemikiran untuk Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	3
1.2 Kerangka konsep ketahanan pangan dan gizi	3
1.3 Metodologi	5
BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN	11
2.1 Perkembangan pertanian NTB	12
2.2 Produksi serealia	16
2.3 Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi	21
2.4 Tantangan untuk ketersediaan pangan	23
2.5 Pencapaian untuk meningkatkan ketersediaan pangan	23
2.6 Kebijakan dan strategi untuk meningkatkan ketersediaan pangan	24
BAB 3 AKSES TERHADAP PANGAN	31
3.1 Akses fisik	32
3.2 Akses ekonomi	34
3.3 Akses sosial	40
3.4 Pencapaian untuk mendukung akses pangan	41
3.5 Strategi untuk peningkatan akses pangan	41
BAB 4 PEMANFAATAN PANGAN	53
4.1 Konsumsi pangan	54
4.2 Akses terhadap fasilitas kesehatan	57
4.3 Rumah tangga dengan akses terhadap air layak minum dan fasilitas sanitasi yang kurang memadai	58
4.4 Perempuan buta huruf	59
4.5 Strategi untuk peningkatan akses terhadap pemanfaatan pangan	60
BAB 5 DAMPAK DARI STATUS GIZI DAN KESEHATAN	69
5.1 Status gizi	69
5.2 Status kesehatan	73
5.3 Pencapaian bidang kesehatan	75
5.4 Strategi untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan kelompok rentan	76
BAB 6 FAKTOR IKLIM DAN LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI KETAHANAN PANGAN	87
6.1 Bencana alam	88
6.2 Variabilitas curah hujan	89
6.3 Kehilangan produksi yang disebabkan oleh kekeringan, banjir dan organisme pengganggu tanaman (OPT)	91

6.4	Deforestasi hutan	92
6.5	Perubahan iklim dan ketahanan pangan	93
6.6	Strategi untuk ketahanan pangan berkelanjutan	95
BAB 7 ANALISIS KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT		109
7.1	Ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat	109
7.2	Perubahan kerentanan terhadap ketahanan pangan kronis, 2010-2015	113
7.3	Kesimpulan	117

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Indikator peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi NTB, 2015	6
Tabel 2.1	Produksi serealia dan umbi-umbian utama (ton), 2006 – 2015	16
Tabel 2.2	Perkembangan produksi padi menurut kabupaten (ha), 2010 – 2014	18
Tabel 2.3	Perkembangan produksi jagung menurut kabupaten (ton), 2010-2014	19
Tabel 2.4	Perkembangan produksi ubi kayu menurut kabupaten (ton), 2010-2014	20
Tabel 2.5	Perkembangan produksi ubi jalar menurut kabupaten (ton), 2010-2014	21
Tabel 3.1	Persentase desa tanpa akses penghubung yang memadai menurut kabupaten (persen)	33
Tabel 3.2	Persentase tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten, 2012-2014	36
Tabel 3.3	Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten, 2011-2013	38
Tabel 3.4	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik per kabupaten (persen), 2013	40
Tabel 3.5	Jumlah penerima dan alokasi raskin menurut kabupaten, 2015	40
Tabel 4.1	Perbandingan AKG dengan tingkat konsumsi energi, 2013 - 2014	55
Tabel 4.2	Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan jumlah penduduk menurut kabupaten, 2013	56
Tabel 4.3	Jumlah dan persentase penduduk menurut golongan pengeluaran dan kriteria AKG, 2013	56
Tabel 4.4	Persentase rumah tangga dengan akses yang sangat terbatas ke air bersih dan sarana pelayanan kesehatan menurut kabupaten, 2013	57
Tabel 4.5	Persentase perempuan buta huruf berusia diatas 15 tahun, 2013	60
Tabel 5.1	Klasifikasi WHO tentang masalah kesehatan masyarakat untuk prevalensi kurang gizi	70
Tabel 5.2	Prevalensi kurang gizi pada balita menurut kabupaten, 2014	72
Tabel 5.3	Angka harapan hidup tingkat kabupaten, 2013	75
Tabel 6.1	Ringkasan tabel kejadian bencana alam, 2005– 2014	89
Tabel 6.2	Luas area puso padi dan jagung akibat banjir, kekeringan dan organisme pengganggu tanaman, 2013-2015 (ha)	91
Tabel 6.3	Luas lahan kritis pada kawasan hutan berdasarkan fungsi hutan (ha), 2013	92
Tabel 7.1	Sebaran kelompok prioritas antar kabupaten (persen)	112
Tabel 7.2	Sebaran kelompok prioritas di dalam tiap kabupaten (persen)	112
Tabel 7.3	Jumlah kecamatan per kelompok prioritas pada FSVA NTB 2010 dan 2015 berdasarkan hasil perhitungan dengan metode <i>cut-off</i>	114
Tabel 7.4	Perubahan tingkat prioritas kecamatan menurut kabupaten, 2010 – 2015	114

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Kerangka konseptual ketahanan pangan dan gizi	4
Gambar 2.1	Produksi beberapa komoditas sayuran, 2010 – 2014 (ton)	14
Gambar 2.2	Produksi beberapa komoditas buah-buahan, 2010 – 2014 (ton)	14
Gambar 2.3	Produksi perikanan, 2009 – 2013 (ton)	15
Gambar 2.4	Produksi ternak, 2010 – 2014 (ekor)	16
Gambar 2.5	Produksi serealia dan umbi-umbian utama, 2006 – 2015 (ton)	17
Gambar 2.6	Luas panen serealia dan umbi-umbian utama, 2008 – 2015 (ha)	17
Gambar 2.7	Total produksi padi menurut kabupaten, 2010 – 2014 (ton)	18
Gambar 2.8	Total produksi jagung menurut kabupaten, 2010 – 2014 (ton)	19
Gambar 2.9	Total produksi ubi kayu menurut kabupaten, 2010 – 2014 (ton)	20
Gambar 2.10	Total produksi ubi jalar menurut kabupaten, 2010 – 2014 (ton)	21
Gambar 3.1	Moda akses ke desa, 2014	34
Gambar 3.2	Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, 2015	36
Gambar 3.3	Percentase rumah tangga pertanian, 2013	37
Gambar 3.4	Koefisien gini dan angka kemiskinan, 2009 - 2014	38
Gambar 5.1	Penyakit terbanyak di puskesmas, 2012	73
Gambar 5.2	Cakupan penderita diare ditangani, 2010 -2012	74
Gambar 6.1	Jumlah kejadian bencana alam menurut kabupaten, 2005 – 2014	89
Gambar 7.1	Jumlah kecamatan rentan di Prioritas 4 menurut kabupaten	110
Gambar 7.2	Jumlah kecamatan rentan di Prioritas 5 menurut kabupaten	111
Gambar 7.3	Jumlah kecamatan rentan di Prioritas 6 menurut kabupaten	111

Daftar Peta

Peta 2.1	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serealia	29
Peta 3.1	Desa tanpa jalan penghubung antar desa yang dapat diakses oleh kendaraan roda empat atau tanpa jalur transportasi air	47
Peta 3.2	Rumah tangga tanpa akses terhadap listrik	49
Peta 3.3	Penduduk hidup di bawah garis kemiskinan	51
Peta 4.1	Desa dengan akses ke fasilitas kesehatan lebih dari 5 kilometer	63
Peta 4.2	Rumah tangga tanpa akses ke air bersih dengan mempertimbangkan jarak >10 meter dari <i>septic tank</i> , yang aman untuk air minum	65
Peta 4.3	Tingkat buta huruf perempuan dengan usia 15 tahun ke atas	67
Peta 5.1	Prevalensi anak di bawah 5 tahun yang memiliki tinggi badan di bawah standar	83
Peta 5.2	Angka harapan hidup	85
Peta 6.1	Jumlah bencana alam dengan dampak potensial pada akses dan pemanfaatan pangan (2001-2014)	99
Peta 6.2	Perubahan curah hujan bulanan dengan kenaikan 1 derajat pada suhu permukaan laut	101
Peta 6.3	Klasifikasi kecamatan yang mengalami perubahan negatif curah hujan bulanan berdasarkan kekuatan sinyal <i>El-Niño Southern Oscillation</i>	103
Peta 6.4	Rata-rata kehilangan produksi padi akibat kekeringan dari tahun 1990-2014	105
Peta 6.5	Rata-rata kehilangan produksi padi akibat banjir dari tahun 1990- 2014	107
Peta 7.1	Kerentanan terhadap kerawanan pangan 2015	123
Peta 7.2	Perubahan status prioritas kecamatan antara FSVA 2010 dan FSVA 2015	125

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Peringkat kecamatan berdasarkan hasil analisis komposit	127
Lampiran 2	Catatan teknis mengenai <i>Metode Small Area Estimation (SAE)</i>	135
Lampiran 3	Metode pembobotan untuk analisa hubungan antar indikator ketahanan pangan FSVA provinsi	143
Lampiran 4	Peta kabupaten di Nusa Tenggara Barat	147

Daftar Singkatan

ABSANO	Gerakan Angka Buta Aksara menuju Nol
ADONO	Gerakan Angka Drop Out menuju Nol
AKE	Angka Kecukupan Energi
AKG	Angka Kecukupan Gizi
AHH	Angka Harapan Hidup
BASNO	Gerakan Buang Air Besar Sembarangan menuju Nol
BBLR	Bayi Berat Badan Lahir Rendah
B2SA	Beragam, Bergizi seimbang dan Aman
BKKBN	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BKP	Badan Ketahanan Pangan
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BMKG	Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPS	Badan Pusat Statistik
BULOG	Badan Urusan Logistik
DKP	Dewan Ketahanan Pangan
ENSO	<i>El Niño/Southern Oscillation</i>
FAO	Badan Pangan dan Pertanian PBB (<i>Food and Agriculture Organization</i>)
FIA	Peta Kerawanan Pangan (<i>Food Insecurity Atlas</i>)
FSVA	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (<i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>)
GKG	Gabah Kering Giling
GP3K	Gerakan Peningkatan Produksi Pertanian berbasis Korporasi
ILO	Organisasi Tenaga Kerja Internasional (<i>International Labor Organization</i>)
IPB	Institut Pertanian Bogor
ISPA	Infeksi Saluran Pernapasan Akut
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
KEMENKES	Kementerian Kesehatan
MJO	Madden Julian Oscillation
NCPR	Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita (<i>Normative Consumption Per Capita Ratio</i>)
NTB	Nusa Tenggara Barat
OPT	Organisme Pengganggu Tanaman
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PCA	Analisis Komponen Utama (<i>Principle Component Analysis</i>)
PHBS	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PHMHS	Penyakit Hewan Menular Strategis
PKH	Program Keluarga Harapan
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PODES	Survei Potensi Desa
PPH	Pola Pangan Harapan
PPL	Penyuluhan Pertanian Lapangan

PSG	Pemantauan Status Gizi
SP	Sensus Penduduk
RAD-PG	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
RAN-PG	Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi
Raskin	Beras untuk Masyarakat Miskin
RISKESDAS	Riset Kesehatan Dasar
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SAE	Small Area Estimation
SAKERNAS	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDG	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>)
SLPTT	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu
SPL	Suhu Permukaan Laut
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UNDP	Badan Program Pembangunan PBB (<i>United Nations Development Programme</i>)
UNICEF	Badan PBB untuk Anak-anak (<i>United Nations Children Fund</i>)
WFP	Badan Pangan Dunia (<i>World Food Programme</i>)
WHO	Organisasi Kesehatan Dunia (<i>World Health Organization</i>)

Ringkasan Eksekutif

1. Latar belakang dan tujuan dari FSVA NTB tahun 2015

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2013-2018 salah satunya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan dan mengembangkan keunggulan daerah. Indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan tersebut salah satunya tergantung pada kondisi ketahanan pangan dan gizi wilayah yang tangguh.

Dalam rangka meningkatkan intervensi sasaran secara geografis dan melakukan pemantuan kondisi yang terkait dengan ketahanan pangan dan gizi wilayah, dibutuhkan satu alat yang berisi data ketahanan pangan dan gizi yang komprehensif dan terupdate, yang dikenal dengan nama Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi NTB (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*). Untuk itu Pemerintah Provinsi NTB melalui Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB dengan dukungan teknis dan pendanaan dari *United Nations-World Food Programme* (WFP) Indonesia, melakukan pemutakhiran Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi NTB Tahun 2015. Peta tersebut digunakan sebagai alat untuk meningkatkan akurasi penentuan sasaran dan alokasi sumberdaya melalui penyediaan informasi penting bagi para penentu kebijakan di dalam proses perencanaan dan penyusunan prioritas program/kebijakan untuk mengurangi kerawanan pangan dan gizi di masa mendatang dari setiap wilayah kabupaten melalui rincian kondisi kecamatan.

Pada pemutakhiran FSVA NTB 2015 ini, kondisi ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi NTB digambarkan secara lengkap pada 105 kecamatan yang tersebar di 8 kabupaten sebagaimana kondisi aktual saat ini. FSVA ini tidak termasuk Kota Mataram dan Kota Bima serta kecamatan di dalamnya, karena kondisi ketahanan pangan di wilayah perkotaan memerlukan indikator dan analisa yang belum ada di FSVA ini.

Pembahasan masalah gizi juga diperluas analisisnya untuk menekankan pentingnya gizi seiring dengan diluncurkannya gerakan *Scaling - Up Nutrition* (SUN) secara resmi oleh Pemerintah Indonesia dan *stunting* juga menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sehingga perlu disupport oleh setiap daerah termasuk Provinsi NTB.

Dalam rangka melakukan analisis yang komprehensif terhadap situasi ketahanan pangan dan gizi yang bersifat multi dimensi, maka ditentukan 9 indikator ketahanan pangan dan gizi. Indikator-indikator ini dipilih berdasarkan ketersediaan data dan mewakili aspek utama dari 3 pilar ketahanan pangan yaitu: ketersediaan pangan, akses ke pangan dan pemanfaatan pangan.

Sebagai tambahan analisis setiap indikator individu, analisa komposit juga dilakukan untuk menggambarkan situasi ketahanan pangan dan gizi secara keseluruhan dimana seluruh kecamatan dikelompokkan kedalam enam prioritas. Kecamatan-kecamatan di Prioritas 1-3 digambarkan dalam

3 gradasi warna merah yang menggambarkan kondisi yang cenderung rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi sedangkan Prioritas 4-6 digambarkan dalam 3 gradasi warna hijau tergolong kecamatan-kecamatan yang tahan pangan. Penting untuk diingat bahwa tidak semua penduduk di kecamatan-kecamatan prioritas tinggi (Prioritas 1-3) tergolong rawan pangan, demikian juga tidak semua penduduk di kecamatan-kecamatan prioritas rendah (Prioritas 4-6) tergolong tahan pangan.

Analisis ketahanan dan kerentanan pangan dan gizi ini dilengkapi juga dengan analisis kerentanan terhadap kerawanan pangan yang berkaitan dengan faktor iklim yang meliputi: data kejadian bencana alam yang memiliki dampak terhadap ketahanan pangan, estimasi hilangnya produksi padi yang disebabkan oleh banjir, kekeringan dan OPT, laju deforestasi hutan dan kekuatan pengaruh *El Niño/Southern Oscillation* (ENSO) yang berakibat terhadap variabilitas curah hujan.

2. Temuan utama

Kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi

Kecamatan-kecamatan dikelompokkan berdasarkan pencapaian terhadap 9 indikator yang meliputi ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, menjadi enam kelompok prioritas yang mencerminkan situasi ketahanan pangan dan gizinya yaitu dari yang paling rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi (Prioritas 1) sampai dengan kelompok yang relatif tahan pangan dan gizi (prioritas 6).

- Kondisi lebih baik ditunjukkan pada FSVA NTB 2015 ini dibandingkan dengan FSVA NTB 2010, dimana pada FSVA NTB 2015 ini tidak ditemukan kecamatan yang tergolong rawan pangan (Prioritas 1-3). Hal ini menunjukkan kondisi NTB secara umum berada pada tingkat tahan pangan.
- Kecamatan-kecamatan Prioritas 4 seluruhnya terdapat di Kabupaten Lombok Utara (lima kecamatan) dan satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Faktor penentu kerentanan pangan di Prioritas 4 adalah tingginya prevalensi balita *stunting*, tingginya angka kemiskinan dan tingginya angka perempuan buta huruf.
- Kecamatan-kecamatan Prioritas 5 tersebar di Kabupaten Lombok Timur (16 kecamatan), Lombok Barat, Lombok Tengah dan Sumbawa masing-masing (10 kecamatan), Bima (9 kecamatan), Dompu (6 kecamatan), dan Sumbawa Barat (1 kecamatan).
- Kecamatan-kecamatan di Prioritas 6 tersebar di Kabupaten Sumbawa (13 kecamatan), Bima (9 kecamatan), Sumbawa Barat (7 kecamatan), Lombok Timur (4 kecamatan), Lombok Tengah dan Dompu masing-masing (2 kecamatan).
- Walaupun tidak ada kecamatan dalam Prioritas 1, 2 dan 3, akan tetapi NTB masih memiliki beberapa tantangan utama yaitu tingginya angka balita *stunting*, tingginya angka perempuan buta huruf, rendahnya angka harapan hidup dan tingginya angka kemiskinan di beberapa kecamatan di NTB.

Ketersediaan pangan

- Produksi serealia dantlng umbi-umbian pokok di Provinsi NTB meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Laju pertumbuhan rata-rata untuk padi yaitu sebesar 4,51 persen/tahun, jagung 32,45 persen/tahun, ubi jalar sebesar 4,85 persen dan ubi kayu sebesar 2,02 persen.

- Sebagian besar produksi padi terkonsentrasi di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah untuk pulau Lombok dan di Kabupaten Sumbawa dan Bima untuk pulau Sumbawa.
- Sebagian besar produksi jagung terkonsentrasi di Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima dan Lombok Timur. Sedangkan sentra produksi ubi jalar dan ubi kayu terdapat di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Bima.
- Berdasarkan indikator Rasio Konsumsi Normatif per Kapita (NCPR), hampir semua kecamatan mengalami surplus dan hanya 5 dari 105 kecamatan (4,8 persen) yang mengalami defisit serealia. Kecamatan-kecamatan tersebut terdapat di Kabupaten Lombok Barat (Gunung Sari dan Batu Layar), masing-masing satu kecamatan di Kabupaten Lombok Utara (Pemenang), Kabupaten Lombok Timur (Selong) dan Kabupaten Sumbawa Barat (Maluk). Kondisi ini berbeda dengan FSVA NTB 2010 dimana terdapat 7 kecamatan (5 di Pulau Lombok dan 2 di Pulau Sumbawa).
- Kecamatan yang mengalami defisit serealia yang tinggi umumnya merupakan wilayah non pertanian akan tetapi kecamatan yang memiliki kegiatan perekonomian yang tinggi termasuk pariwisata dan pertambangan, mempunyai luasan areal tanam serealia yang rendah dan didominasi oleh lahan kering serta alih fungsi lahan yang cukup tinggi.

Akses terhadap pangan

- Perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi NTB dalam waktu sepuluh tahun menunjukkan adanya penurunan sebesar 10,63 persen yaitu dari sebesar 27,17 persen (2006) menurun menjadi sebesar 16,54 persen (2015). Dengan kata lain, rata-rata penurunan persentase penduduk miskin selama 10 tahun terakhir sekitar 1,06 persen per tahun. Akan tetapi penurunan tingkat kemiskinan tidak diikuti dengan penurunan tingkat kesenjangan pendapatan.
- Pada tingkat kabupaten, secara umum telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan pada periode 2011-2013, dimana hanya Kabupaten Lombok Utara yang masih memiliki jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan diatas 30 persen.
- Pada tingkat kecamatan, masih terdapat 14 kecamatan (13,33 persen) yang lebih dari 20 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan atau 5 kecamatan (4,76 persen) yang lebih dari 30 persen penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan pada tahun 2013. Kecamatan dengan kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Lombok Utara (Kecamatan Kayangan, 41 persen) dan kecamatan dengan kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Dompu (Kecamatan Dompu, 12 persen).
- Pada tahun 2014, hanya 1,67 persen desa di NTB yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat pada waktu-waktu tertentu dalam setahun khususnya pada musim penghujan atau tidak memiliki akses terhadap transportasi air yang dapat dilalui perahu sepanjang tahun.
- Hampir seluruh rumah tangga sudah memiliki akses listrik, hanya sekitar 3,03 persen rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap listrik. Kesenjangan antar kabupaten juga semakin menurun, di mana proporsi rumah tangga tanpa akses listrik yang tertinggi berada di Kabupaten Dompu (8,49 persen) dan terendah di Kota Mataram (0,00 persen).

Pemanfaaan pangan

- Tingginya angka perempuan buta huruf, akses yang layak ke fasilitas sanitasi dan air minum yang bersih merupakan permasalahan utama di NTB yang dapat menyebabkan rendahnya *outcome* gizi pada penduduk.
- Angka perempuan melek huruf berhubungan dengan praktik pola pemberian makan dan status gizi anak, meningkat secara signifikan. Pada tahun 2013, sebanyak 19,41 persen perempuan buta huruf di NTB yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 27,03 persen. Akan tetapi, persentase buta huruf di NTB lebih dari dua kali lipat dari rata-rata nasional (8,60 persen) dan kedua tertinggi dari 33 provinsi pada tahun 2013. Hal ini merupakan masalah yang serius, sehingga pemerintah harus melakukan berbagai intervensi yang tepat dan efektif untuk menurunkan angka perempuan buta huruf ini.
- Pada tingkat kabupaten, angka buta huruf tertinggi berada di Kabupaten Lombok Tengah, dimana lebih dari 30 persen perempuan buta huruf dan terendah di Kota Bima (6,27 persen). Sedangkan pada tingkat kecamatan, sebanyak 28 dari 105 kecamatan mempunyai sedikitnya 20 persen perempuan buta huruf.
- Terdapat 29,57 persen rumah tangga di NTB dengan akses yang sangat terbatas ke sumber air minum yang bersih dan aman pada tahun 2013 sedangkan hanya 41,10 persen yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak.
- Sedangkan pada tingkat kecamatan, sebanyak 28,57 persen atau 30 kecamatan yang tersebar di 6 kabupaten yaitu di Kabupaten Sumbawa (13 kecamatan), Sumbawa Barat (8 kecamatan), Lombok Barat dan Lombok Timur masing-masing (3 kecamatan), Lombok Utara (2 kecamatan) dan Lombok Tengah (1 kecamatan) yang masih mengalami hambatan untuk mengakses air minum yang bersih dan aman.
- Seluruh desa di NTB memiliki akses ke fasilitas kesehatan terdekat dalam jangkauan kurang dari 5 km pada tahun 2013. Meskipun demikian, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil masih mengalami kendala untuk mengakses fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas menurut jarak, transportasi maupun ekonomi.
- Rata-rata asupan energi dan protein di NTB selama periode 2010-2014 menunjukkan peningkatan yaitu berturut-turut sebesar sebesar 0,4 persen dan 2,3 persen per tahun. Asupan energi pada tahun 2014 sebesar 2.078 kkal/kapita/hari dan asupan protein sebesar 64,3 gram/kapita/hari atau lebih tinggi dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) nasional yang direkomendasikan.
- Pada tingkat kabupaten, terjadi kesenjangan yang cukup besar terhadap perbandingan AKG dan tingkat konsumsi energi (2013-2014) dimana Kabupaten Lombok Tengah memiliki 82,25 persen penduduk yang memiliki tingkat konsumsi lebih dari 1.800 kkal/kapita/hari (mencapai 90 persen dari standar minimal yang ditargetkan), sedangkan Kabupaten Lombok Utara hanya sebesar 45,84 persen.

Situasi gizi dan kesehatan

- Malnutrisi kronis yang diukur dengan *stunting* (tinggi badan pendek menurut umur), merupakan permasalahan utama di Indonesia dan sangat tinggi angka *stunting* di NTB. Prevalensi *stunting* pada balita tingkat provinsi di tahun 2014 adalah sebesar 36,43 persen (PSG NTB, 2014).

- Pada tingkat kabupaten, menurut klasifikasi WHO, 6 kabupaten memiliki prevalensi *stunting* pada tingkat buruk (30-39 persen), dan 2 kabupaten lainnya memiliki prevalensi *stunting* pada tingkat sangat buruk (>40 persen). Kabupaten yang memiliki angka *stunting* tertinggi adalah Kabupaten Lombok Utara (43,43 persen) dan Bima (41,19 persen).
- Sedangkan pada tingkat kecamatan, terdapat 4 kecamatan (3,44 persen) di NTB yang termasuk dalam klasifikasi baik, 16 kecamatan (13,8 persen) dalam klasifikasi kurang, 46 kecamatan (39,66 persen) dalam klasifikasi buruk dan 49 kecamatan (42,24 persen) dalam klasifikasi sangat buruk.
- Rata-rata angka harapan hidup di NTB pada tahun 2013 adalah 63,21 tahun, mengalami peningkatan dari 61,50 tahun (2010). Pada tingkat kabupaten, dari 10 kabupaten/kota, Kabupaten Bima memiliki angka rata-rata harapan hidup tertinggi (64,69 tahun) dan terendah terdapat di Kabupaten Dompu (62,14 tahun). Pada tingkat kecamatan hanya 41 kecamatan (39,05 persen) yang memiliki angka rata-rata harapan hidup diatas rata-rata provinsi.

Faktor iklim dan lingkungan yang mempengaruhi ketahanan pangan

- Bencana alam, deforestasi hutan dan perubahan iklim global memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan di Indonesia, termasuk di NTB.
- Hampir seluruh kabupaten di NTB memiliki resiko berkurangnya curah hujan yang berkaitan dengan kejadian *El Niño*. Kabupaten yang memiliki resiko kurang curah hujan yang paling tinggi adalah Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa dan Dompu.
- Kabupaten Lombok Tengah dan Bima secara rata-rata mengalami kehilangan paling tinggi karena kekeringan sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Bima secara rata-rata mengalami kehilangan paling tinggi karena banjir.

3. Perubahan pada tingkat Kerentanan terhadap kerawanan pangan antara tahun 2010 dan 2015

Di tingkat provinsi, situasi ketahanan pangan dan gizi di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan antara tahun 2010 dan 2015. Analisis perubahan di tingkat kecamatan untuk sembilan indikator yang dipilih untuk ketahanan pangan dan gizi kronis mengungkapkan bahwa:

- 83 persen kecamatan mengalami peningkatan dalam hal ketersediaan pangan.
- 72 persen kecamatan telah mengurangi kemiskinan.
- 97 persen kecamatan mengalami peningkatan akses terhadap listrik.
- 10 persen kecamatan mengalami peningkatan akses transportasi pada 2015 dan 84 persen lainnya dapat di akses sejak tahun 2010.
- 19 persen kecamatan yang mengalami peningkatan dalam akses terhadap air bersih.
- 20 persen kecamatan telah mengalami peningkatan pada akses terhadap fasilitas kesehatan dan 80 persen kecamatan lainnya mengalami peningkatan akses sejak 2010.
- 92 persen kecamatan telah menaikkan jumlah perempuan melek huruf.

- 88 persen kecamatan memiliki harapan hidup lebih panjang.
- 7 persen kecamatan mengalami penurunan prevalensi *stunting*.

Pada peta FSVA NTB 2015 ini juga dijelaskan perubahan status prioritas kecamatan antara FSVA NTB 2015 dan 2010. Sebanyak 2 kecamatan (1,9 persen) telah berhasil meningkatkan status prioritasnya sebanyak dua tingkat atau lebih dan terdapat 24 kecamatan (22,9 persen) yang menunjukkan perbaikan satu tingkat, yang sebagian besar tersebar di seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Lombok Barat. Sementara 68 kecamatan (64,8 persen) tidak mengalami perubahan pada status prioritasnya, sedangkan 11 kecamatan (10,5 persen) mengalami penurunan status sebanyak satu tingkat yang berada di Kabupaten Bima, Lombok Timur, Lombok Utara dan Sumbawa.

Peningkatan status secara keseluruhan berkaitan dengan peningkatan akses terhadap listrik, akses ke fasilitas kesehatan, akses jalan maupun transportasi air, penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka buta huruf. Sedangkan penurunan situasi ketahanan pangan secara keseluruhan berkaitan dengan tingginya prevalensi balita *stunting*, meningkatnya kemiskinan, dan tingginya angka perempuan buta huruf.

Meskipun kondisi ketahanan pangan untuk sebagian besar masyarakat Provinsi NTB antara tahun 2010 dan 2015 telah mengalami peningkatan, namun demikian, kemajuan ini memiliki resiko stagnasi jika tantangan utama tidak ditangani. Permasalahan dan tantangan yang terus dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut pertambahan penduduk, semakin terbatasnya daya dukung sumberdaya alam, masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha dibidang pangan dan semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor serta masih cukup besarnya proporsi penduduk miskin. Terkait permasalahan tersebut, yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi di NTB yaitu: i) meningkatkan akses ekonomi dan distribusi pangan yang belum merata, melalui program pengurangan kemiskinan; ii) mengurangi angka perempuan buta huruf; iii) akselerasi intervensi untuk pencegahan kekurangan gizi khususnya gizi kronis (*stunting*); iv) meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat; v) meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai dimana nantinya akan dapat meningkatkan outcome gizi; vi) mengatasi kerentanan terhadap resiko perubahan iklim yang semakin meningkat, khususnya berfokus pada peningkatan ketahanan terhadap kekeringan dan banjir.

Aspek ketahanan gizi memerlukan perhatian tersendiri tetapi juga perlu meletakkan aspek gizi menjadi tema sentral yang bersinggungan erat dengan ketiga aspek lainnya. Hal ini mencerminkan pentingnya pengarusutamaan pendekatan yang berbasis gizi untuk program dan kebijakan ketahanan pangan dan gizi. Tantangan-tantangan tersebut membuka peluang-peluang perbaikan di bawah ini:

Akses ekonomi dan distribusi pangan

- Menjamin kelancaran akses dan distribusi pangan hingga ke tingkat rumah tangga terutama bagi masyarakat daerah terpencil dimana distribusi pangan menjadi kendala di musim-musim tertentu melalui perbaikan sarana prasarana utama seperti jalan dan sarana transportasi.
- Stabilitas harga pangan perlu menjadi prioritas mengingat akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan menguatkan posisi tawar petani. Upaya ini juga menuntut adanya pengawasan yang ketat, terutama untuk komoditas pangan pokok karena tingginya angka ekspor dan impor komoditas strategis pangan di NTB.

- Peningkatan alokasi anggaran untuk program bantuan sosial dan reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan sensitivitas gizi dari program, sehingga program tersebut dapat memiliki dampak penting pada akses pangan.
- Melibatkan kaum perempuan secara lebih luas, dimana perempuan bertanggung jawab dalam produksi pangan, pembelian, persiapan, distribusi dan pemberian makanan dalam keluarga, baik dalam desain program pertanian maupun sebagai peserta program, juga berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.

Pencegahan kurang gizi

- Faktor penyebab permasalahan kekurangan gizi berkaitan dengan terbatasnya ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi. Dengan akses yang rendah di NTB maka perbaikan akses air bersih dan layak minum serta sanitasi dan perubahan perilaku perlu dilakukan secara komprehensif.
- Menurut standar WHO, tingkat gizi buruk kronis di NTB berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 36,4 persen. Meningkatkan pemantauan gizi di tingkat kecamatan dan intervensi yang efektif dan sesuai sasaran dapat untuk mencegah meningkatnya gizi buruk akut.
- Mengoptimalkan berbagai strategi intervensi spesifik gizi dan intervensi sensitif gizi yang sudah dilakukan tetapi cakupannya belum maksimal termasuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan mitra pembangunan lainnya termasuk sektor swasta dalam membuat dan mendistribusikan pangan bergizi dengan harga terjangkau oleh keluarga berpendapatan rendah.
- Mengintensifkan sinergitas Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam berbagai agenda dan program pembangunan sanitasi baik di pedesaan maupun di perkotaan dengan memperkuat sisi perubahan perilaku masyarakatnya.
- Rendahnya angka perempuan melek huruf di NTB akan membatasi peluang mereka dan sebagai pengasuh utama anak-anak mereka nantinya akan menghambat perkembangan generasi berikutnya. Untuk meningkatkan angka melek huruf, pemerintah harus meningkatkan efektivitas program ABSANO (Gerakan Angka Buta Aksara menuju Nol) dan ADONO (Gerakan Angka *Drop Out* menuju Nol) melalui peningkatan pemantauan dan evaluasi program tersebut.

Diversifikasi pangan

- Perbaikan diversifikasi pangan dilakukan tidak hanya dengan meningkatkan daya beli masyarakat, akan tetapi juga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pangan yang bergizi dan seimbang bagi kesehatan yang di dukung dengan ketersediaan, kebijakan dan faktor sosial budaya.
- Kebijakan pangan yang mencakup usaha penguatan dan pengamanan kapasitas produksi pangan lokal, pemerataan distribusi pangan, efisiensi perdagangan, dan peningkatan daya beli masyarakat menjadi sesuatu yang mendesak untuk segera diupayakan.
- Proses produksi dan distribusi pangan yang difokuskan pada bahan pangan alternatif selain beras sehingga ketersediaan pangan alternatif tidak dianggap sebagai pelengkap saja.

Perubahan iklim

- Perubahan iklim tetap menjadi ancaman besar bagi ketahanan pangan dan gizi, terutama bagi rumah tangga yang mata pencahariannya bergantung pada sektor pertanian. NTB memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi terkait dengan bencana kekeringan dan banjir. Mengingat iklim meningkat secara drastis, deviasi curah hujan, peningkatan frekuensi dan intensitas perubahan iklim, peningkatan resiko hama tanaman yang berdampak negatif ke petani, membuat sulit bagi para petani untuk memperkirakan kalender pertanian dan berdampak pada rendahnya produksi dan produktivitas tanaman yang pada akhirnya akan mengganggu mata pencaharihan petani secara keseluruhan. Berkaitan dengan tantangan tersebut, strategi manajemen resiko adaptasi iklim yang efektif dan sekaligus mengembangkan sistem ketahanan pangan yang tahan terhadap dampak perubahan iklim jangka panjang menjadi suatu kebutuhan yang penting.
- Pengelolaan air dapat diperkuat melalui peningkatan perencanaan tata ruang dan sistem penggunaan lahan terpadu berbasis bentang lahan ataupun daerah aliran sungai, pengelolaan dan konservasi kawasan ekosistem penting, rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi, dan percepatan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur.
- Peluang lainnya termasuk meningkatkan sistem peringatan dini untuk bencana yang terprediksi (*slow-onset*) dan mendadak (*sudden-onset*), menciptakan program insentif untuk penelitian dan pengembangan dalam upaya meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi iklim.

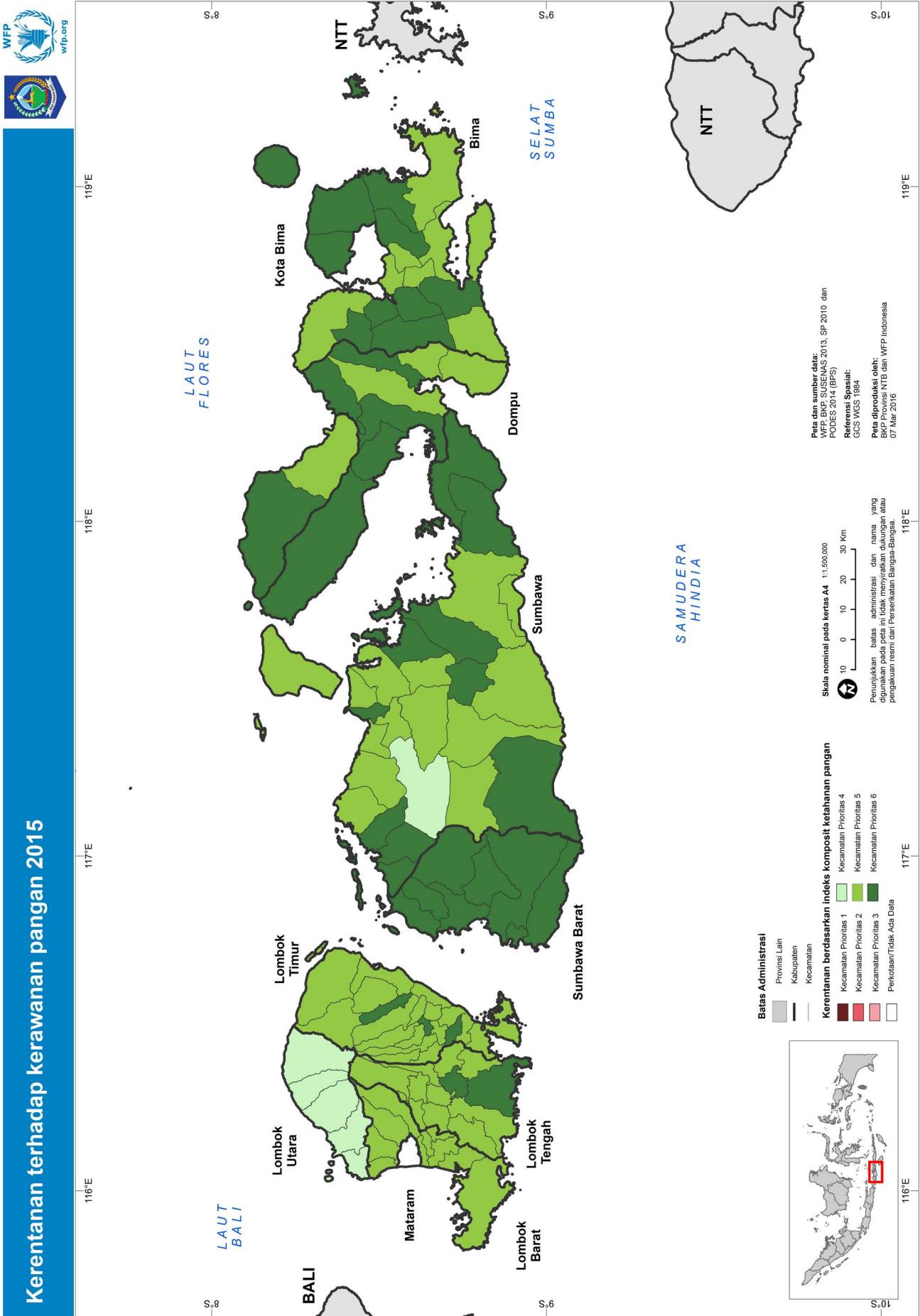
Strategi pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah merumuskan agenda pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat kedaulatan pangan dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis. Arah kebijakan peningkatan kedaulatan pangan sesuai RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 dilakukan dengan lima strategi utama, meliputi:

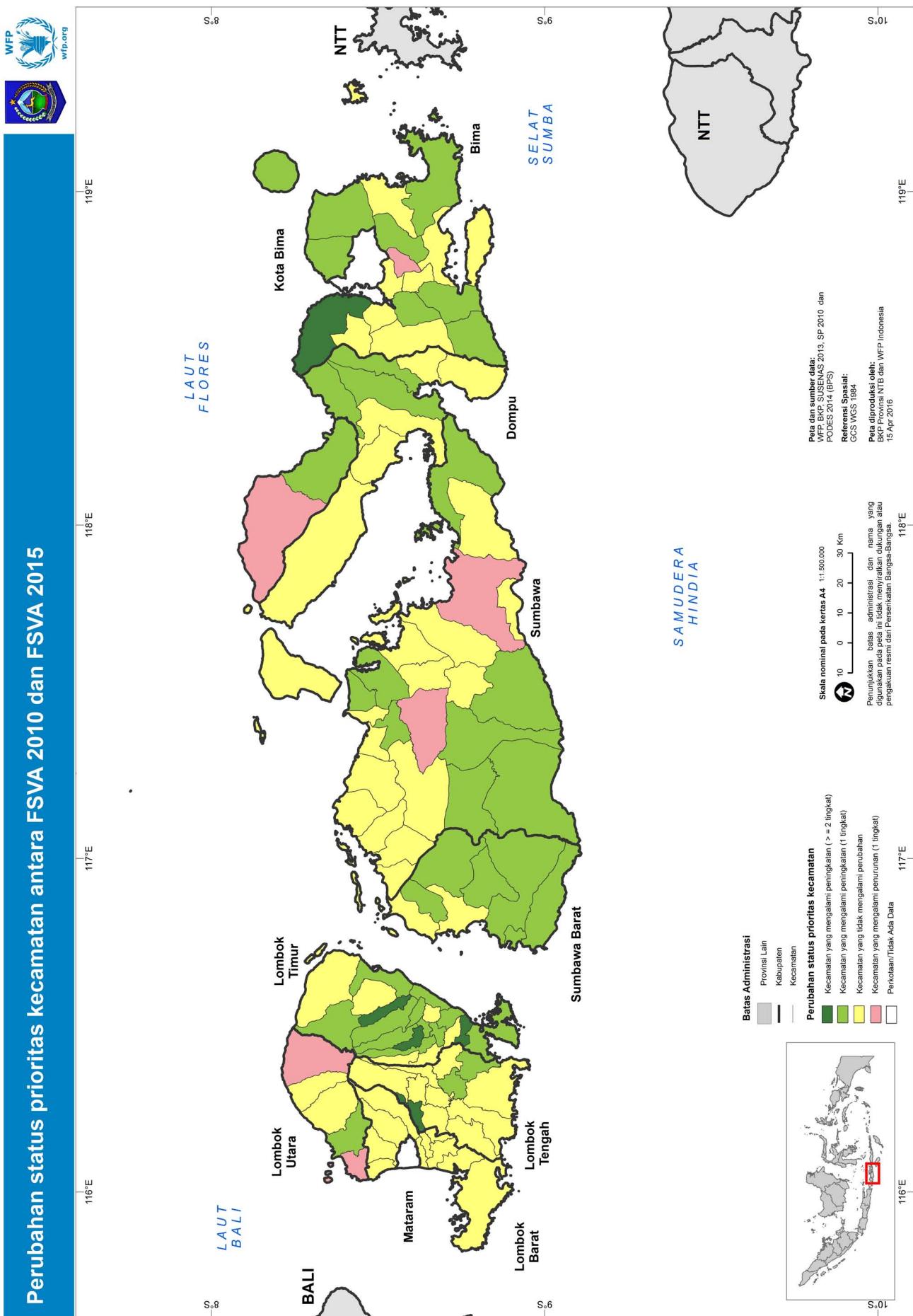
- Intensifikasi produk sumberdaya alam berkualitas yang diarahkan pada tanaman padi dan palawija.
- Ekstensifikasi lahan pertanian yang diarahkan pada lahan kering dan sawah.
- Intensifikasi, diversifikasi tanaman dan hasil ikutannya yang diarahkan pada komoditi padi, jagung, kentang, kedelai, kopi, kakao dan jambu mete.
- Intensifikasi dan diversifikasi produk budidaya perikanan dan kelautan yang diarahkan pada komoditas ekspor rumput laut, udang dan kerapu pada kawasan peruntukan perikanan yang masuk dalam Kawasan Strategis Provinsi.
- Intensifikasi ternak yang diarahkan pada komoditi sapi.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan didukung dengan kapasitas kelembagaan keuangan, NTB memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi pada beberapa tahun mendatang. Hal ini membutuhkan program yang lebih fokus pada upaya pengurangan kemiskinan dan program bermuatan gizi serta diversifikasi makanan.

Kerentanan terhadap kerawanan pangan 2015



Perubahan status prioritas kecamatan antara FSVA 2010 dan FSVA 2015



BAB 1

Pendahuluan



Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan total jumlah penduduk 4,63 juta jiwa yang tersebar di 2 pulau utama dan 280 pulau kecil. Dari 280 pulau kecil yang ada, terdapat 32 pulau yang telah berpenghuni. Total luas wilayah Provinsi NTB mencapai 20.15 ribu km² terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9 5' Lintang Selatan.

Laju pertumbuhan penduduk selama periode 2010-2014 tercatat sebesar 1,40 persen (BPS, 2015), dimana sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah pedesaan. Namun demikian, tren urbanisasi di NTB mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Secara klimatologi, NTB memiliki pola hujan tipe Monsunal, yaitu mempunyai satu puncak musim hujan (antara bulan Oktober – Maret) dan satu puncak musim kemarau (antara bulan April – September) (BPS , 2014). Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh sirkulasi angin monsun (Asia-Australia). Pada saat Monsun Asia, terjadi angin baratan yang melewati Samudera Hindia dan membawa uap air ke daratan NTB sehingga terjadi pembentukan awan dan potensi terjadinya hujan relatif besar di wilayah NTB. Sebaliknya, ketika monsun Australia, terjadi angin timur dengan kandungan uap sedikit (udara kering) melewati NTB sehingga awan sulit terbentuk, yang menyebabkan potensi turunnya hujan kecil sehingga wilayah ini relatif kering. Iklim di NTB juga dipengaruhi oleh *El Niño Southern Oscillation* (ENSO), yang mengakibatkan periode kekeringan dan musim hujan yang lebih panjang (iklim ekstrim). Tahun El Niño biasanya berhubungan dengan kekeringan, sedangkan tahun *La-Niña* berhubungan dengan tingginya curah hujan yang dapat menyebabkan banjir. Dengan iklim seperti disebutkan diatas, NTB berpotensi besar mengalami cuaca ekstrim, yang akan berakibat pada hasil produksi pertanian yang berfluktuasi.

Perekonomian di NTB masih didominasi oleh sektor pertanian dan pertambangan. Dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata kontribusi sektor pertanian sebesar 25,69 persen dan sektor pertambangan sebesar 18,63 persen (BPS , 2013). Untuk tahun 2014, perekonomian NTB mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya, yaitu mengalami penurunan PDRB sebesar 0,09 persen (BPS, 2014).

Provinsi NTB telah menunjukkan kemajuan penting dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Persentase penduduk miskin mengalami penurunan yang sangat signifikan pada September 2015 yaitu sebesar 16,54 persen dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 21,55 persen. Keberhasilan ini menunjukkan kinerja dan upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah NTB telah berjalan dengan baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus menunjukkan tren positif. Saat ini peringkat IPM NTB berada pada posisi 30 dari sebelumnya 33 dari 34 provinsi di Indonesia, diatas Provinsi NTT, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua. Kondisi ini perlu ditingkatkan terus dan hanya dapat dilakukan dengan adanya komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat yang diwujudkan melalui program unggulan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan serta pengembangan infrastruktur strategis.

Pencapaian Provinsi NTB terhadap sejumlah target Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals – MDGs*) tahun 2015 menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tersebut adalah modal dasar untuk menyongsong pembangunan milenium pasca 2015 yaitu *Sustainable Development Goals (SDGs)* tahun 2030, namun demikian masih diperlukan kerja keras untuk melakukan peningkatan di sejumlah indikator yaitu:

- Aspek ekonomi: persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan provinsi (Rp. 335.284 per kapita per bulan untuk perkotaan dan Rp. 313.466 per kapita per bulan untuk pedesaan¹ pada September 2015 masih tinggi yaitu sebesar 16,54 persen). Kondisi kemiskinan penduduk ini perlu mendapat perhatian khusus karena berdampak pada status gizi dan kesehatan masyarakat.
- Aspek pemerataan: turunnya angka kemiskinan yang tidak searah dengan turunnya ketimpangan pendapatan. Terdapat indikasi bahwa turunnya angka kemiskinan justru diikuti dengan meningkatnya ketimpangan, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya koefisien gini dari 0,35 persen pada tahun 2009 menjadi 0,38 persen pada tahun 2014.
- Aspek kesehatan dan sanitasi dasar: (i) Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih dibawah target yang dapat di lihat dari banyaknya kasus pada dua tahun terakhir, yaitu 117 kasus pada tahun 2013 dan 111 kasus pada tahun 2014 dengan proporsi sebesar 107 per 100.000 kelahiran hidup; (ii) masih tingginya prevalensi *stunting* (balita pendek) yaitu sebesar 36,43 persen pada tahun 2014; (iii) penularan infeksi penyakit menular utamanya ATM (AIDS/HIV, TBC dan Malaria) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol; (iv) proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih dan sanitasi masih belum merata.

¹ <http://bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1120>

1.1 Dasar pemikiran untuk peta ketahanan dan kerentanan pangan

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, sangat penting untuk memahami tentang siapa dan berapa banyak yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi, di mana mereka tinggal dan apa yang membuat mereka rentan. Sejak tahun 2003, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, *World Food Programme* (WFP), berusaha untuk memperkuat pemahaman ini melalui pengembangan peta ketahanan pangan dan gizi. Peta ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan memberikan informasi dalam proses pembuatan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan gizi.

Pada tingkat nasional, kemitraan ini menghasilkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) tahun 2005, 2009 dan 2015 dengan analisa di tingkat kabupaten. Hasil dari FSVA nasional tersebut, memberikan kontribusi langsung terhadap perubahan kebijakan penting termasuk integrasi kegiatan yang berhubungan dengan ketahanan pangan dan gizi ke dalam rencana dan alokasi anggaran tahunan pemerintah. Selain itu, keberhasilan FSVA nasional juga mendorong dilakukannya penyusunan peta FSVA di seluruh provinsi yang dirilis dari tahun 2010 sampai tahun 2013 dengan analisa di tingkat kecamatan.

Dibangun dari keberhasilan FSVA NTB 2010, FSVA NTB 2015 ini menyediakan pemutakhiran di waktu yang tepat untuk pemantauan ketahanan pangan dan gizi di tingkat kecamatan dan sebagai acuan pembuatan program dan prioritas untuk masa yang akan datang. Peta ini juga memberikan informasi penting kepada para pembuat keputusan dalam penyusunan program dan kebijakan, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kecamatan, dengan memprioritaskan intervensi pada kecamatan-kecamatan yang lebih rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi.

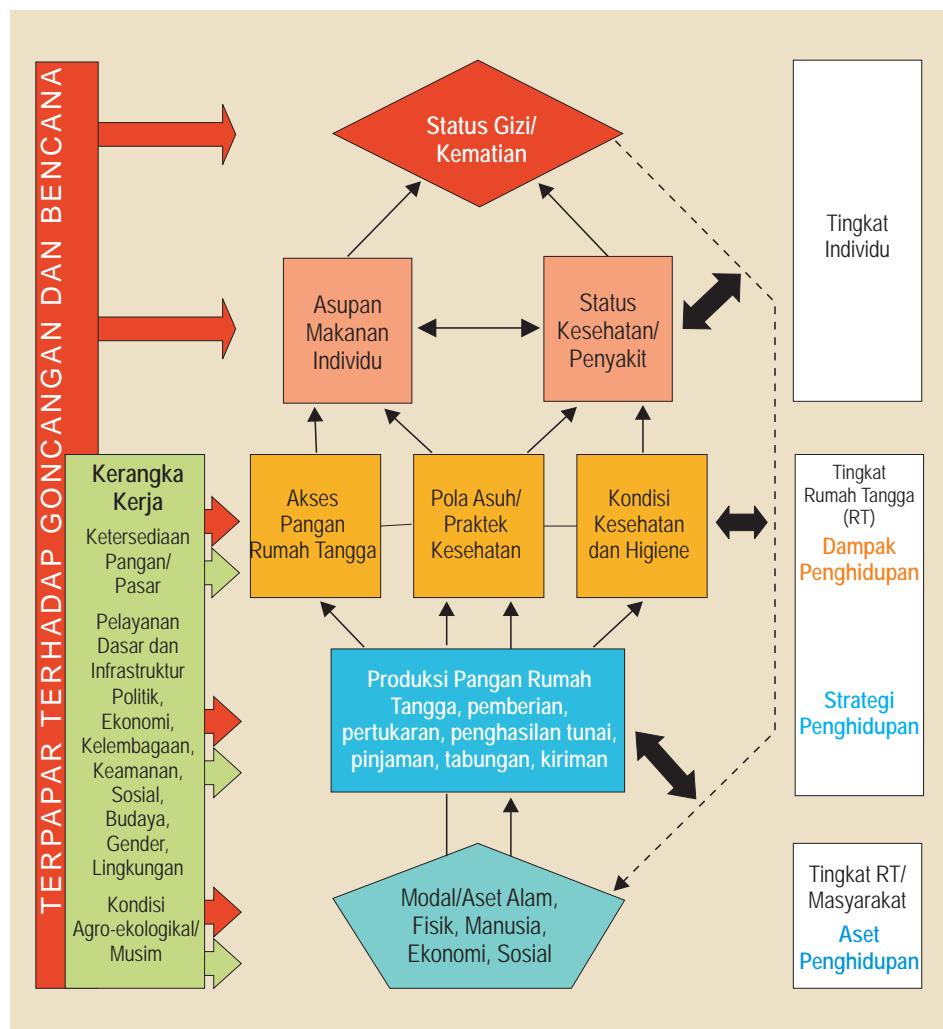
FSVA NTB 2015 merupakan produk dari partisipasi aktif Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB beserta beberapa instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Institut Pertanian Bogor (IPB) serta dukungan teknis dari WFP.

1.2 Kerangka konsep ketahanan pangan dan gizi

Di Indonesia, UU No. 18 tahun 2012 memperbarui definisi Ketahanan Pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Seperti Peta sebelumnya, FSVA NTB 2015 juga berdasarkan pemahaman tentang ketahanan pangan dan gizi sebagaimana disajikan dalam Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan - ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan – serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Gambar 1.1: Kerangka konseptual ketahanan pangan dan gizi



Sumber: WFP, Januari 2009

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat **nasional, regional, kabupaten dan tingkat masyarakat**.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi belum tentu dapat diakses oleh rumah tangga tertentu, jika mereka memiliki ketidakmampuan secara fisik, ekonomi atau sosial, untuk mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga.

Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktik-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam Peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerangka konseptual ketahanan pangan dan gizi menganggap ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan sebagai penentu utama ketahanan pangan dan menghubungkan hal tersebut dengan kepemilikan aset rumah tangga, strategi mata pencaharian dan lingkungan politik, sosial, kelembagaan dan ekonomi. Status ketahanan pangan dari setiap rumah tangga atau individu biasanya ditentukan oleh interaksi berbagai faktor agro-lingkungan, sosial ekonomi dan biologi, dan sampai batas tertentu faktor-faktor politik.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktur dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, dll. **Kerawanan pangan transien** adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3 Metodologi

Kerawanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter yang berbeda yang berada di luar cakupan masalah produksi pangan semata, dengan tidak ada satu ukuran yang langsung dapat mengukur masalah ini. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

13 indikator yang dipilih telah melalui proses penelaahan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Teknis FSVA pusat dan provinsi berdasarkan ketersediaan data di tingkat kecamatan serta kapasitas indikator-indikator tersebut dalam mencerminkan unsur-unsur inti dari tiga pilar ketahanan pangan dan gizi (Tabel 1.1). Selaras dengan FSVA Nasional, FSVA NTB 2015 membagi indikator tersebut menjadi

dua kelompok indikator. **Kelompok indikator pertama** meliputi indikator kerawanan pangan dan gizi kronis yaitu rasio konsumsi pangan terhadap produksi serealia, infrastruktur transportasi dan listrik, akses terhadap air minum dan fasilitas kesehatan, angka harapan hidup, angka perempuan buta huruf dan *stunting* pada balita. **Kelompok indikator kedua** merupakan indikator-indikator kerawanan pangan dan gizi yang berkaitan dengan faktor iklim. Kelompok indikator ini meliputi data kejadian bencana alam yang memiliki dampak terhadap ketahanan pangan, estimasi hilangnya produksi padi yang disebabkan oleh banjir dan kekeringan, laju deforestasi hutan dan kekuatan pengaruh *El Niño/Southern Oscillation* (ENSO) yang berakibat terhadap variabilitas curah hujan.

Dibandingkan dengan 13 indikator yang digunakan dalam FSVA NTB 2010, terdapat beberapa perubahan penting dalam definisi dan penentuan indikator FSVA NTB 2015, yaitu: i) kurangnya akses jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat telah diperluas cakupannya dengan menambahkan kurangnya akses ke transportasi air yang dapat dilalui perahu; ii) kurangnya akses terhadap air minum yang aman telah disesuaikan dengan mengecualikan sumber air minum yang berada dalam jarak 10 meter dari septic tank atau jamban karena memiliki risiko yang lebih besar terkena kontaminasi, iii) *stunting* (tubuh pendek) digunakan sebagai indikator kurang gizi menggantikan *underweight* (kurang berat badan), berdasarkan kemampuannya untuk melihat kekurangan gizi jangka panjang serta agar selaras dengan program pemerintah, diskusi pasca-MDG dan tujuan nasional untuk mengurangi jumlah *stunting*.

Berdasarkan kesepakatan dalam Kelompok Kerja Teknis FSVA Pusat, pendekatan metodologi yang baru diadopsi untuk analisis komposit untuk menghasilkan indikator-indikator yang sesuai. Analisis komposit FSVA provinsi menggunakan metode yang berbeda dengan FSVA nasional. Metode yang digunakan FSVA provinsi adalah berdasarkan ambang batas yang telah ditetapkan untuk setiap indikator dan kelompok prioritas. Metode ini berbeda dengan FSVA nasional dan FSVA provinsi sebelumnya yang menggunakan metode *Principal Component Analysis*, Analisis Gerombol (*Cluster*) dan Analisis Diskriminan untuk menentukan kelompok prioritas. Kelebihan dari metode ini adalah lebih transparan dalam pengelompokan prioritas dan memberikan gambaran untuk pengukuran langsung setiap indikator individu serta kontribusinya terhadap keseluruhan proses pengelompokan prioritas. Penjelasan lebih detail tentang metode komposit tersedia di Lampiran 3.

Indikator komposit ketahanan pangan dan gizi digunakan untuk menunjukkan situasi kerawanan pangan dan gizi kronis, akan tetapi tidak menunjukkan analisis faktor kerawanan pangan dan gizi karena pengaruh faktor akut dan sementara (transien). Dalam laporan ini juga terdapat Bab tersendiri (Bab 6) yang membahas faktor-faktor dinamis terkait dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap kerentanan rumah tangga terhadap kerawanan pangan dan gizi transien, khususnya yang terkait dengan faktor iklim. Analisis kecenderungan pola waktu dan pola geografis dalam empat indikator transien yang terkait dengan lingkungan - kejadian bencana alam, hilangnya produksi padi yang disebabkan oleh banjir dan kekeringan, laju deforestasi hutan dan kekuatan dampak ENSO terhadap pola curah hujan di NTB - memberikan perspektif iklim yang penting untuk ketahanan pangan dan gizi.

Hasil analisis dari 105 kecamatan digambarkan dalam 9 peta indikator individu dan peta komposit dari 9 indikator ketahanan pangan dan gizi pada tingkat kecamatan. Masing-masing kecamatan dikelompokkan dalam 6 prioritas, kelompok yang paling rawan pangan (Prioritas 1) sampai dengan kelompok yang tahan pangan (Prioritas 6) berdasarkan analisis komposit. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi warna merah

menunjukkan variasi tingkat kerawanan pangan tinggi, dan gradasi warna hijau menggambarkan variasi kerawanan pangan rendah. Pada kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dalam hal ketahanan atau kerawanan pangan. Klasifikasi data pada peta untuk indikator individu sama dengan yang digunakan pada FSVA nasional dan FSVA NTB 2010, kecuali untuk indikator *stunting* (balita pendek) yang sekarang menggunakan ambang batas dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk signifikansi kesehatan masyarakat.

Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah kecamatan yang di identifikasi sebagai yang relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 6), tidak berarti semua desa serta penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua desa serta penduduk di kecamatan Prioritas 1 tergolong rawan pangan.

Serupa dengan FSVA nasional dan FSVA NTB 2010, daerah perkotaan tidak termasuk dalam analisis, karena kerawanan pangan dan gizi di daerah perkotaan memerlukan indikator tersendiri yang berbeda. Namun, analisis untuk daerah perkotaan akan menjadi semakin penting karena proses urbanisasi yang terjadi terus menerus dan diperkirakan akan mencapai 62,7 persen dari total penduduk provinsi NTB pada tahun 2035 (BPS, 2013).

Semua data dikumpulkan dari sumber-sumber data sekunder yang tersedia di kecamatan, kabupaten, provinsi dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi serta publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, BAPPEDA, BMKG, BPBD, BKKBN, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Semua data yang digunakan dalam analisis FSVA NTB 2015 berasal dari periode 2010-2014. Beberapa indikator merupakan data di tingkat individu, sedangkan indikator lain merupakan data pada tingkat rumah tangga atau masyarakat. Teknik *Small Area Estimation* (SAE) digunakan pada beberapa indikator untuk mengestimasi data tingkat kecamatan dengan menggunakan data tingkat kabupaten dan rumah tangga berdasarkan bantuan keahlian teknis dari BPS Pusat dan IPB. Catatan mengenai SAE dan aplikasinya dalam FSVA NTB dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 1.1: Indikator Peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi NTB, 2015

Indikator	Definisi dan Perhitungan	Sumber Data
KERENTANAN TERHADAP KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KRONIS		
Ketersediaan Pangan		
Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih “beras + jagung + ubi jalar + ubi kayu”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data rata-rata produksi bersih tiga tahun (2011-2013) padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar pada tingkat kecamatan dihitung dengan menggunakan faktor konversi standar. Untuk rata-rata produksi bersih ubi kayu dan ubi jalar dibagi dengan 3 (faktor konversi serealia) untuk mendapatkan nilai yang ekivalen dengan serealia. Kemudian dihitung total produksi serealia yang layak dikonsumsi. 2. Ketersediaan bersih serealia per kapita per hari dihitung dengan membagi total ketersediaan serealia kecamatan dengan jumlah populasiya (data penduduk tahun 2012). 3. Data bersih serealia dari perdagangan dan impor tidak diperhitungkan karena data tidak tersedia pada tingkat kecamatan . 4. Konsumsi normatif serealia adalah 300 gram/kapita/hari. 5. Kemudian didapatkan rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih serealia per kapita. Rasio lebih besar dari satu menunjukkan daerah defisit pangan dan daerah dengan rasio lebih kecil dari satu adalah surplus untuk produksi serealia. 	Provinsi dalam Angka, BPS atau Dinas/Kantor Ketahanan Pangan tingkat Provinsi dan Kecamatan (Angka Tetap tahun 2011-2013)
Akses Pangan		
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Garis kemiskinan provinsi sebesar Rp 299.866 per kapita per bulan di daerah perkotaan dan Rp 263.167 di pedesaan pada tahun 2013. Metode <i>Small Area Estimation</i> (SAE) digunakan untuk mengestimasi angka kemiskinan pada tingkat kecamatan.	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2013, Sensus Penduduk 2010, PODES (Potensi Desa) 2014, BPS
Persentase desa dengan akses penghubung yang kurang memadai	Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau sarana transportasi air.	PODES (Potensi Desa) 2014, BPS
Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik dari PLN dan/atau non PLN, misalnya generator. Dihitung dengan metode <i>Small Area Estimation</i> (SAE).	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2013, Sensus Penduduk 2010, PODES (Potensi Desa) 2014, BPS
Pemanfaatan Pangan		
Perempuan buta huruf	Persentase perempuan di atas 15 tahun yang tidak dapat membaca atau menulis huruf latin. Dihitung dengan metode <i>Small Area Estimation</i> (SAE).	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2013, Sensus Penduduk 2010, PODES (Potensi Desa) 2014, BPS
Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dan air hujan (tidak termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m. Dihitung dengan metode <i>Small Area Estimation</i> (SAE).	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2013, Sensus Penduduk 2010, PODES (Potensi Desa) 2014, BPS
Persentase desa dengan jarak lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan	Persentase desa dengan jarak lebih dari 5 kilometer dari fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dll).	PODES (Survei Potensi Desa) 2014, BPS
Gizi dan Dampak Kesehatan		
Tinggi badan balita di bawah standar (<i>stunting</i>)	Anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005).	Pemantauan Status Gizi, Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2014

Tabel 1.1 (lanjutan): Indikator Peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi NTB, 2015

Indikator	Definisi dan Perhitungan	Sumber Data
Angka harapan hidup pada saat lahir	Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Dihitung dengan metode <i>Small Area Estimation</i> (SAE).	SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2013, Sensus Penduduk 2010, PODES (Potensi Desa) 2014, BPS
FAKTOR IKLIM DAN LINGKUNGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP KETAHANAN PANGAN		
Bencana alam yang terkait iklim	Bencana alam yang terkait iklim dan terjadi di Indonesia selama tahun 2000-2014 dan perkiraan dampaknya terhadap ketahanan pangan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, 2012-2015
Variabilitas curah hujan	Perubahan curah hujan bulanan yang disebabkan oleh perubahan suhu permukaan laut sebesar satu derajat celcius pada periode tahun 1981-2014.	Curah hujan (1981-2014): CHIRPS – University of California, Santa Barbara. Suhu Permukaan Laut (1981-2014): ERSST v3b - NCEP NOAA
Hilangnya produksi padi	Rata-rata hilangnya produksi padi akibat banjir dan kekeringan (1990-2014)	Direktorat Perlindungan tanaman, Kementerian Pertanian, 1990-2014
Deforestasi	Laju rata-rata perubahan tutupan lahan dari jenis hutan ke jenis non-hutan berdasarkan analisis citra satelit Landsat.	Analisis citra satelit Landsat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2013. *Proyeksi penduduk per provinsi tahun 2010-2035*. Jakarta.
- BPS. 2013b. *Analisis Hasil Pendataan Lengkap Sensus Pertanian 2013 Potensi Pertanian Nusa Tenggara Barat*. Mataram.
- BPS. 2014. *Statistik Indonesia 2014*. Jakarta.
- BPS. 2014. *NTB Dalam Angka*. Mataram.
- BPS. 2015. *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan September 2014*. Jakarta.
- BPS. 2015. Bps.go.id (online)
- Bappenas 2015. *Laporan Nasional Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 33 Provinsi Tahun 2014*. Jakarta.
- Bappeda Provinsi NTB. 2015. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB 2013-2018*.
- Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2010. *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2009*. Jakarta
- IFPRI, Concern Worldwide, Welthungerhilfe & Institute of Development Studies. 2013. *2013 Global Health Index. The Challenge of Hunger: Building Resilience to Achieve Food and Nutrition Security*. Bonn, Germany, Washington, DC, and Dublin, International Food Policy Research Institute (IFPRI).
- Imam Bachtiar. 2004. *Status Terumbu Karang di Provinsi NTB: Sebuah Kajian*. Jurnal Biologi Tropis 5 (1):1-9.
- WFP. 2009. *Emergency Food Security Assessment Handbook, second edition*. Roma.

BAB 2

Ketersediaan Pangan



Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan (termasuk pangan kaya gizi) dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan, termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan, apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Produksi pangan meliputi produksi tanaman pangan seperti sereal dan umbi-umbian, kacang-kacangan, biji minyak, sayuran dan buah-buahan serta peternakan dan perikanan. Produksi tergantung pada berbagai faktor seperti iklim, jenis dan kualitas/kesuburan tanah, curah hujan, sarana pertanian (irigasi, sarana produksi pertanian dan teknologi), kebijakan perdagangan pemerintah, serta insentif bagi petani untuk memproduksi tanaman pangan.

Mengingat sebagian besar bahan pangan yang diproduksi maupun diimpor harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga, maka infrastruktur pasar, distribusi dan perdagangan akan terkait erat dengan ketersediaan pada tingkat regional dan lokal. Ketersediaan dan kondisi sarana transportasi darat dan air juga menjadi faktor penunjang yang sangat penting. Meskipun Provinsi NTB terdiri dari dua pulau besar dan 32 pulau kecil berpenghuni lainnya, transportasi darat lebih dominan dibandingkan dengan transportasi air. NTB telah memiliki dukungan transportasi darat, laut dan udara yang cukup memadai untuk menghubungkan NTB dengan provinsi atau daerah-daerah lain di pulau Jawa, Bali, Sulawesi dan Kalimantan. Meskipun

infrastruktur transportasi berfungsi dengan baik, terdapat banyak ruang untuk perbaikan untuk meningkatkan jaringan distribusi pangan yang berkorelasi positif dengan memperpendek dan efisiensi rantai pemasaran pangan, aksesibilitas dan stabilisasi harga pangan.

Bab ini akan menyajikan penjelasan mengenai aspek ketersediaan pangan di Provinsi NTB pada tingkat kabupaten dengan mengevaluasi data pada semua produk pertanian, termasuk buah, sayuran, peternakan dan perikanan, diikuti dengan analisis yang lebih mendalam terhadap produksi serealia dan umbi-umbian (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar). Kemudian, akan dijelaskan juga mengenai analisis ketersediaan pangan tingkat kecamatan untuk ke empat komoditas serealia yang mencakup 105 kecamatan di 8 kabupaten. Ke empat komoditas serealia ini dipilih karena keterbatasan data komoditas lainnya dan komoditas ini menyediakan hampir 50 persen dari asupan kebutuhan energi per hari pada rata-rata konsumsi pangan orang Indonesia. Data produksi ke empat komoditas tersebut dikumpulkan secara rutin pada tingkat kecamatan. Ketersediaan serealia didapat dengan menghitung rasio antara konsumsi serealia per kapita dan produksi. Indikator ini merupakan salah satu dari sembilan indikator utama untuk analisis kerawanan pangan dan gizi komposit.

Indikator tersebut digunakan untuk mengukur jumlah produksi pangan yang kaya energi, tetapi tidak melihat dari sisi ketersediaan pangan lokal yang kaya gizi. Analisis ini juga tidak memperhitungkan sumber pangan hewani, kacang-kacangan, buah-buahan dan komoditas yang kaya gizi lainnya yang dihasilkan pada tingkat kecamatan. Analisis ini juga tidak mempertimbangkan jumlah pangan yang di impor ke kecamatan, maupun jumlah pangan yang di ekspor keluar dari kecamatan tersebut mengingat data ekspor/impor pada tingkat kecamatan tidak tersedia.

2.1 Perkembangan pertanian NTB

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi lumbung beras nasional. Luas lahan sawah di Provinsi NTB tahun 2014 adalah 256.229 Ha atau 12,84 persen dari keseluruhan luas wilayah dan tersebar di sepuluh kabupaten/kota. Kabupaten dengan luas lahan sawah terbesar adalah Kabupaten Sumbawa (56.191 Ha) yang diikuti dengan Kabupaten Lombok Tengah (54.296 Ha), sedangkan yang tersempit adalah Kota Mataram (2.063 Ha). Dari total lahan sawah yang ada, terbagi dalam beberapa jenis sumber pengairan yaitu lahan sawah dengan irigasi (baik itu teknis, setengah teknis, atau sederhana), tada hujan, ataupun lahan sawah dengan irigasi pasang surut. Lahan sawah yang menggunakan pengairan dengan irigasi seluas 205.131 Ha atau 80,06 persen dari total lahan sawah di NTB. Sedangkan luas lahan sawah tada hujan di NTB adalah 51.093 Ha, dimana 50.545 Ha diantaranya ditanami padi dan 548 Ha ditanami komoditas selain padi (BPS NTB, 2014b).

Sektor pertanian (termasuk peternakan, kehutanan dan perikanan) memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di NTB, yaitu sebesar 23,54 persen pada tahun 2014. Sebagian besar kontribusi ini berasal dari sub-sektor tanaman pangan (42,83 persen), perikanan (17,66 persen), peternakan (16,05 persen), tanaman hortikultura (14,07 persen), tanaman perkebunan (7,26 persen), jasa pertanian dan perburuan (1,74 persen), kehutanan dan penebangan kayu (0,40 persen) (BPS NTB, 2015).

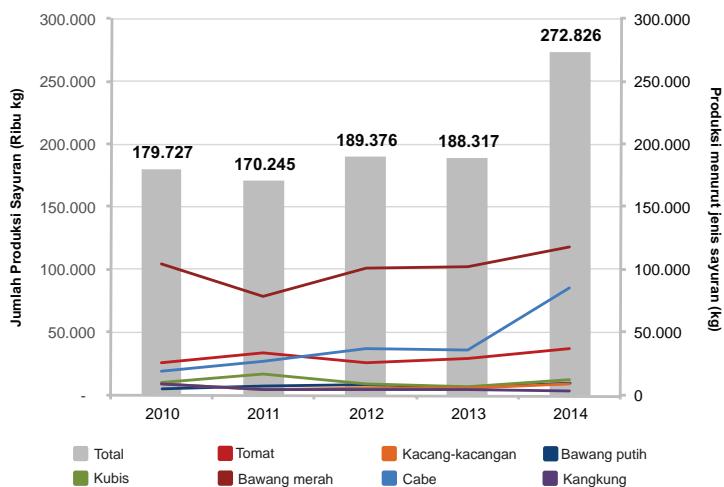
Sektor pertanian juga menunjang perekonomian daerah dalam hal penyerapan tenaga kerja. Pada bulan Februari 2014 sebanyak 45,5 persen penduduk NTB bekerja di sektor pertanian. Persentase ini lebih kecil dibandingkan dengan lima tahun yang lalu yaitu mencapai 47,41 persen. Hasil Sensus Pertanian NTB tahun 2013 menunjukkan bahwa usaha pertanian di NTB didominasi oleh rumah tangga bukan dari perusahaan pertanian berbadan hukum atau pelaku usaha lainnya. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di NTB tahun 2013 sebanyak 600.613 rumah tangga atau mengalami penurunan sebesar 20 persen dari tahun 2003 yang sebanyak 719.875 rumah tangga. Penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian ini terjadi hampir di semua kabupaten/kota, kecuali di Kabupaten Sumbawa Barat. Penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dipicu oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman penduduk, perkantoran, industri, kawasan wisata, dan usaha pertanian menjadi sektor yang dianggap tidak menarik lagi jika dibandingkan dengan sektor usaha lain yang dirasa dapat memberikan pendapatan yang lebih baik. Data statistik juga menunjukkan bahwa rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan masih didominasi oleh rumah tangga petani gurem (petani pengguna lahan dengan luas lahan kurang dari 0,5 hektar) yaitu sebesar 59,58 persen atau sebanyak 350.130 rumah tangga (BPS NTB, 2013b).

Petani yang terlihat sebagai pekerja keras tetapi memiliki penghasilan yang terbatas bahkan cenderung tetap miskin menjadikan regenerasi petani semakin sulit. Perekonomian yang tumbuh cepat cenderung menyebabkan pergeseran lapangan pekerjaan dari sektor pertanian dan pertambangan ke sektor industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, dan jasa-jasa keuangan. Sektor pertanian juga memiliki pertumbuhan pendapatan yang terbatas sehingga tenaga kerja muda memilih untuk bekerja di kota dan bahkan ke negara lain (TKI/TKW) daripada bekerja di sektor pertanian. Pendidikan formal petani yang terbatas juga menjadi salah satu faktor pemicu. Sumber Daya Manusia petani di NTB sangat rendah, 72 persen petani di NTB tidak sekolah atau hanya tamat sekolah dasar (BPS NTB, 2013a).

Beras merupakan kelompok pangan pokok penyedia energi bagi sebagian besar masyarakat NTB. Luas panen padi pada tahun 2014 adalah 433,7 ribu hektar dengan produksi mencapai 2,1 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), yang terdiri dari 1,9 juta ton GKG padi sawah dan 212,5 ribu ton GKG padi ladang. Produksi padi di NTB dalam kurun waktu 2010 – 2014 mengalami peningkatan secara signifikan yaitu sebesar 20 persen (dari 1,77 juta ton menjadi 2,12 juta ton) (BPS NTB, 2015d).

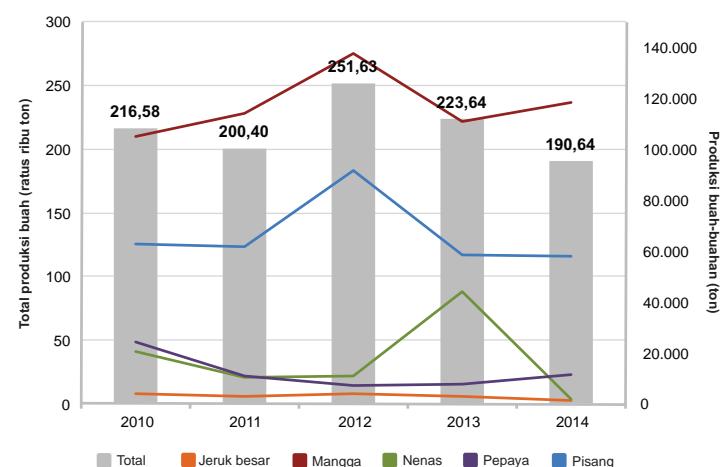
Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber utama dalam penyediaan vitamin dan mineral. Produksi sayur-sayuran mengalami peningkatan dari 179,7 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 272,8 ribu ton pada tahun 2014, atau meningkat rata-rata sebesar 12,95 persen/tahun. Penurunan produksi yang signifikan hanya terjadi pada Kangkung (-14,76 persen). Sebaliknya produksi buah-buahan mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,99 persen/tahun yaitu dari 216,5 ribu ton (2010) menjadi 190,6 ribu ton (2014). Peningkatan produksi hanya terjadi pada komoditas mangga (3,29 persen/tahun). Perkembangan produksi beberapa komoditas sayur-sayuran dan buah-buahan selama periode 2010-2014 di NTB secara umum dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan 2.2.

Gambar 2.1: Produksi beberapa komoditas sayuran, 2010-2014 (ton)



Sumber: Indikator Pertanian Provinsi NTB, BPS 2015

Gambar 2.2: Produksi beberapa komoditas buah-buahan, 2010-2014 (ton)

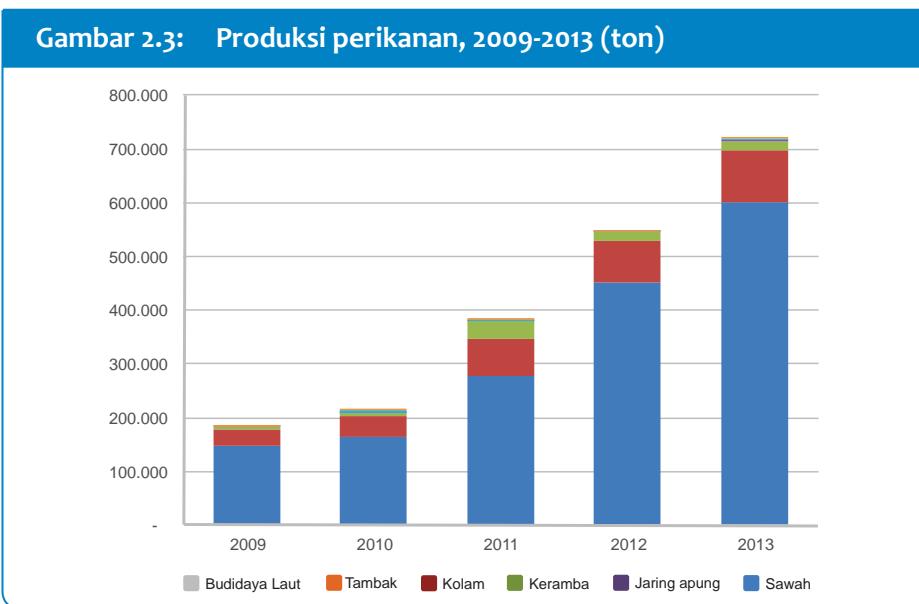


Sumber: Indikator Pertanian Provinsi NTB, BPS 2015

Pada sub sektor perkebunan, komoditi unggulan NTB adalah kopi, jambu mete dan tembakau. Produksi kopi pada tahun 2014 mencapai 5.238 ton atau meningkat 21,75 persen dan jambu mete meningkat sebesar 6,99 persen yaitu dari 17.452 ton (2013) menjadi 18.671 ton (2014). Sedangkan produksi tembakau mengalami penurunan sebesar 11,38 persen dari 38.529 ton (2013) menjadi 34.144 ton (2014). Penurunan produksi tembakau disebabkan menurunnya luas areal tanam sehingga perlu diambil kebijakan agar produktivitas lahan dapat ditingkatkan mengingat pasar untuk tembakau relatif cukup besar (Pemda NTB, 2015).

Perikanan merupakan sumber protein utama dan gizi penting. Kondisi alam dan hidrologis NTB sangat mendukung pengembangan sektor perikanan. Pada tahun 2013 total produksi perikanan mencapai 719,4 ribu ton, jauh meningkat dibandingkan produksi tahun 2009 yang hanya sebesar 182,8 ribu ton. Rumput laut dan kerang mutiara merupakan 2 komoditas sub sektor perikanan yang menjadi andalan NTB dan bernilai ekonomi penting yang secara tidak langsung mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

Produksi rumput laut pada tahun 2014 sebesar 770,4 ribu ton atau meningkat sebesar 1,85 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Demikian juga dengan jumlah pembudidaya dimana terjadi peningkatan sebanyak 562 Rumah Tangga Pembudidaya (RTP) atau sebesar 3,41 persen. Sedangkan untuk kerang mutiara, pada tahun 2013 ekspor mutiara Provinsi NTB sebesar 0,373 ton dengan nilai US\$ 469.065. Pada tahun 2014 jumlah ekspor menurun menjadi 0,295 ton tetapi nilai ekspor meningkat 125 persen menjadi US\$ 1.056.969. Negara tujuan ekspor komoditas kerang mutiara adalah India, Hongkong, Jepang, Singapura, Korea, Perancis, Macau dan China.

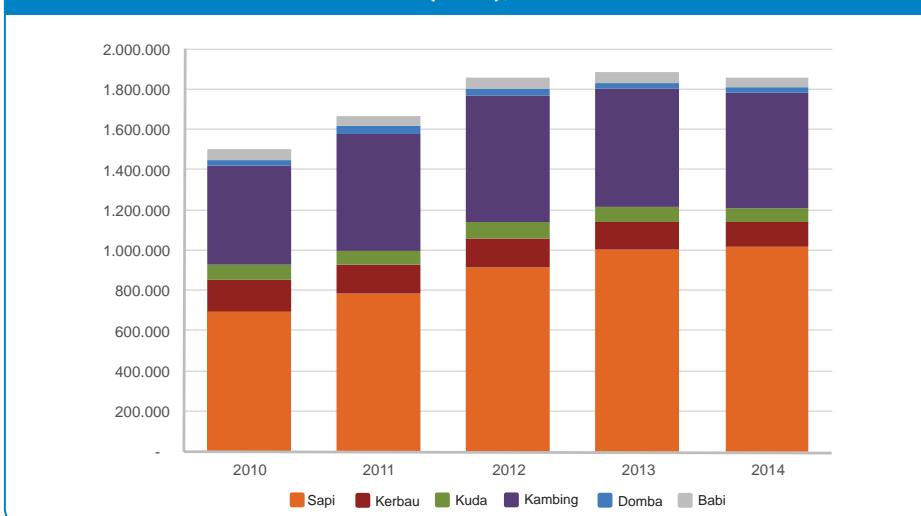


Sumber: Statistik Indonesia 2015, BPS

Sub sektor peternakan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan pertanian yang memiliki nilai strategis dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan sumber protein hewani. Salah satu komoditas unggulan NTB pada sub sektor peternakan adalah sapi. Sejak tahun 2008 pemerintah daerah NTB mengeluarkan program unggulan NTB Bumi Sejuta Sapi (NTB BSS) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Selama lima tahun Program BSS dijalankan (2009-2013) tingkat pertumbuhan populasi sapi mencapai 7-8 persen per tahun. Peningkatan populasi sapi dan induk produktif masih terus terjadi selama periode 2013-2014 yaitu sebanyak 11.062 ekor sapi (1,10 persen) dan 4,978 ekor induk produktif (1,10 persen). Selama periode tahun 2010-2014 produksi sapi meningkat rata-rata sebesar 11,42 persen per tahun dan kambing rata-rata sebesar 4,34 persen/tahun. Sedangkan selama periode yang sama produksi ternak lainnya mengalami penurunan yaitu kerbau (-4,29 persen/tahun), kuda (-3,56 persen/tahun), domba (-4,04 persen/tahun) dan babi (-3,67 persen/tahun).

Secara nasional NTB berperan strategis sebagai daerah sumber bibit dan ternak potong. Kontribusi NTB dalam penyediaan bibit sapi rata-rata 12 ribu ekor/tahun untuk 18 provinsi di Indonesia. Dukungan NTB terhadap Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K) tahun 2014 mencapai 31.728 ton (Dinas Peternakan NTB, 2014). Pengembangan ternak sapi sebagai komoditi unggulan daerah, juga didukung dengan pengembangan komoditi ternak lain yang memiliki potensi dan pangsa pasar yang lebih besar seperti ternak kerbau dan kambing. Perkembangan populasi ternak dirinci menurut jenis ternak di NTB tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4: Produksi ternak (ekor), 2010-2014



Sumber: Indikator Pertanian Provinsi NTB, BPS 2015

2.2 Produksi serealia

Selama sepuluh tahun terakhir, produksi serealia di Provinsi NTB menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan produktivitas akibat pola tanam yang lebih intensif dan penggunaan bahan berkualitas tinggi. Upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mempertahankan produksi khususnya beras di NTB adalah: i) perluasan areal melalui optimalisasi lahan, cetak sawah baru, pembangunan embung dan pengembangan jaringan irigasi; ii) peningkatan produktivitas melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, penggunaan benih dan varietas unggul, penanaman padi pola *System Rice Intensification* (SRI), pemupukan berimbang dan penggunaan pupuk organik; iii) pengamanan produksi melalui pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengembangan antisipasi dampak perubahan iklim; iv) penguatan kelembagaan dan pembiayaan (Pemda NTB, 2015). Dibandingkan dengan padi, jagung memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu sebesar 32,75 persen per tahun, sedangkan laju pertumbuhan padi yaitu sebesar 4,51 persen, ubi jalar sebesar 4,85 persen dan ubi kayu sebesar 2,02 persen selama 10 tahun terakhir (Tabel 2.1 dan Gambar 2.5).

Tabel 2.1: Produksi serelia dan umbi-umbian utama (ton), 2006 - 2015

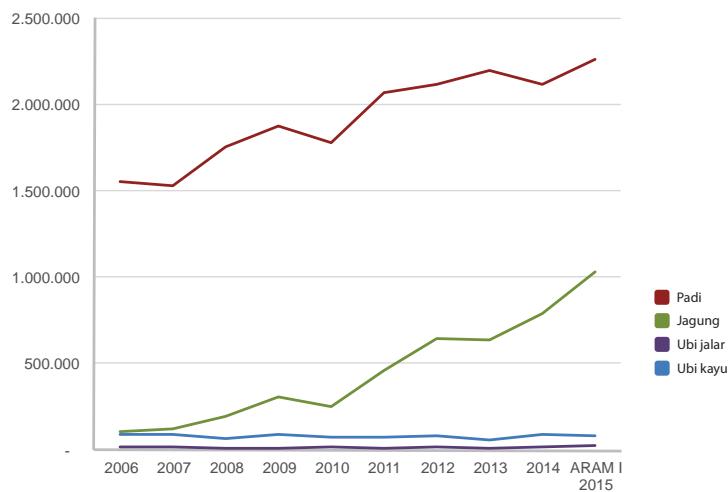
Serealia	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Padi	1.552.628	1.526.347	1.750.675	1.870.773	1.774.499	2.067.137	2.114.231	2.193.698	2.116.637	2.261.871
Jagung	103.963	120.612	196.263	308.863	249.005	456.915	642.674	633.773	785.864	1.031.160
Ubi Kayu	19.373	13.007	10.985	11.276	13.134	11.970	13.232	11.335	19.015	22.411
Ubi Jalar	87.041	88.528	68.386	85.062	70.606	75.367	79.472	59.085	92.643	82.012

Sumber: BPS NTB, 2015d

* Angka Ramalan (ARAM) I - 2015

Berdasarkan angka ramalan 1 tahun 2015, total produksi padi akan mencapai 2,26 juta ton, jagung sebesar 1,03 juta ton, ubi kayu sebesar 82 ribu ton dan ubi jalar sebesar 22 ribu ton (BPS, 2015). Produksi keempat komoditas tersebut lebih tinggi dari angka produksi rata-rata selama 10 tahun terakhir.

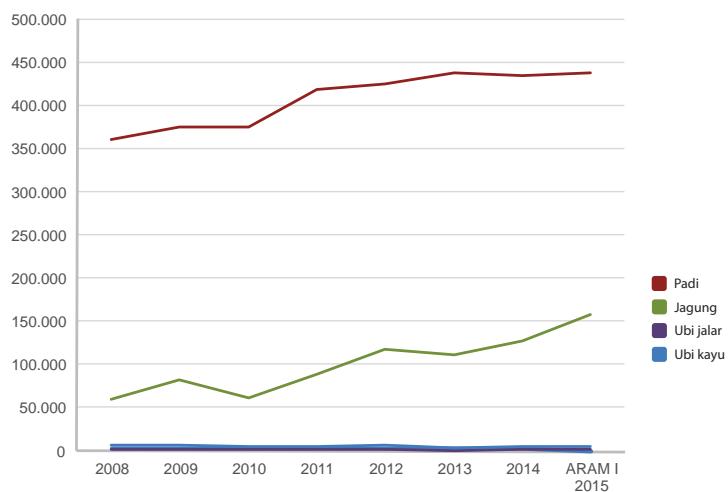
Gambar 2.5: Produksi serealia dan umbi-umbian utama, 2006-2015 (ton)



Sumber: BPS NTB, 2015

Gambar 2.6 menunjukkan perkembangan luas panen serealia dan umbi-umbian selama 8 tahun terakhir. Luas panen padi dan jagung menunjukkan trend peningkatan selama 8 tahun terakhir. Khusus untuk jagung, tidak bisa dipungkiri bahwa meningkatnya areal tanam jagung di NTB tidak lepas dari mitra swasta yang semakin banyak menempatkan kegiatannya di NTB, seperti PT. Sang Hyang Seri maupun PT. Pertani melalui Gerakan Peningkatan Produksi Pertanian berbasis Korporasi (GP3K). Sedangkan luas panen ubi jalar dan ubi kayu menunjukkan trend stagnan.

Gambar 2.6: Luas panen serealia dan umbi-umbian utama, 2008-2015 (ha)



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi NTB, 2015

Padi

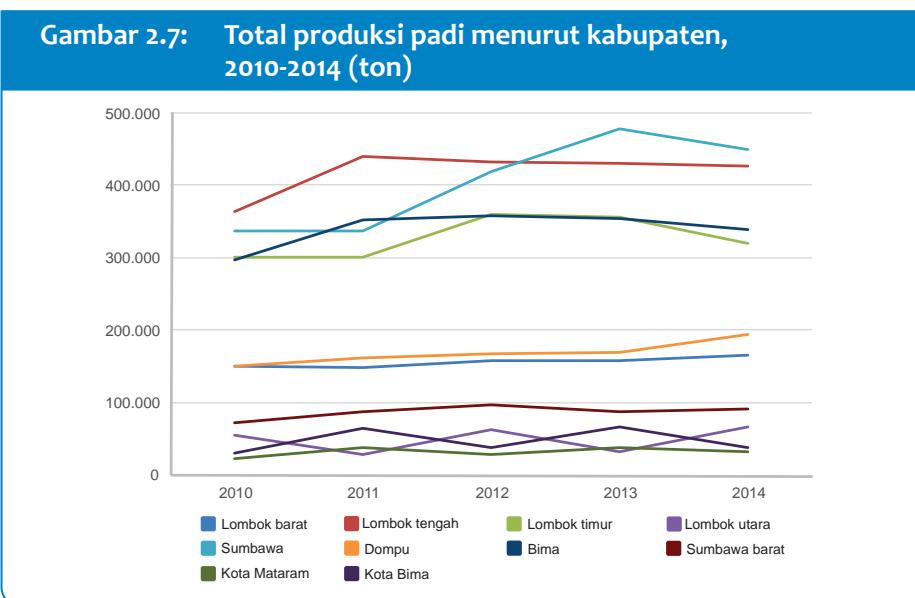
Data produksi padi pada tingkat kabupaten di NTB dalam 5 tahun terakhir (2010 – 2014) disajikan dalam Tabel 2.2. dan Gambar 2.7. Selama periode tersebut produksi padi di NTB menunjukkan tren peningkatan rata-rata sebesar 4,82 persen. Peningkatan produksi padi pada periode 2012-2013 terjadi karena bertambahnya luas panen dari seluas 425.448 hektar (2012) menjadi 438.057 hektar

(2013) dengan rata-rata produksi sebesar 2 juta ton. Pada tahun 2014 terjadi penurunan produksi sebesar 3, 51 persen (77.061 ton) yang disebabkan oleh penurunan produktivitas dan luas panen padi dari 438.057 hektar (2013) menjadi hanya 433.712 hektar (2014) (BPS NTB, 2015a). Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Bima masih menjadi sentra produksi padi di NTB.

Tabel 2.2: Perkembangan produksi padi menurut kabupaten (ton), 2010 – 2014

No	Kabupaten / Kota	Padi				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Lombok Barat	149.316	148.698	157.445	157.445	157.445
2	Lombok Tengah	362.557	440.591	431.549	430.279	430.279
3	Lombok Timur	300.011	300.011	359.564	356.318	356.318
4	Sumbawa	337.417	337.417	418.489	477.776	477.776
5	Dompu	149.555	161.822	166.459	168.124	168.124
6	Bima	297.549	352.973	358.127	354.315	354.315
7	Sumbawa Barat	71.386	87.818	95.548	86.660	86.660
8	Lombok Utara	54.071	27.217	61.533	30.873	30.873
9	Kota Mataram	22.521	38.019	27.328	36.900	36.900
10	Kota Bima	30.116	64.368	38.189	66.138	66.138
	NTB	1.774.499	1.958.934	2.114.231	2.164.828	2.164.828

Sumber: BPS NTB, 2015



Sumber: BPS NTB, 2015

Jagung

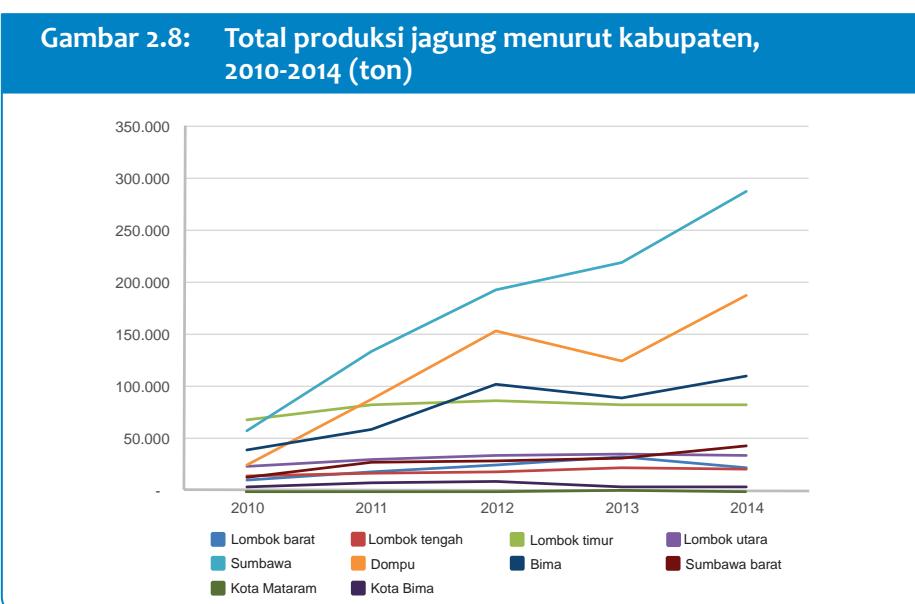
Jagung merupakan salah satu komoditas potensial dan unggulan sebagai bahan pangan pengganti beras, digunakan pada industri makanan dan baku industri ternak, yang banyak diusahakan oleh masyarakat petani di NTB. Komoditas andalan bernilai strategis ini digarap dengan serius oleh pemerintah daerah NTB melalui program percepatan pengembangan agribisnis jagung (2009-2014) yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam rangka memantapkan kemandirian ketahanan pangan daerah dan nasional. Pada tahun 2014, produksi jagung mencapai 785.864 ton, menunjukkan kenaikan sebanyak 152.089 ton (24 persen) dari tahun 2013 (633.775 ton). Pencapaian produksi jagung ini juga di dukung oleh gerakan massal menanam

Tabel 2.3: Perkembangan produksi jagung menurut kabupaten (ton), 2010-2014

No	Kabupaten / Kota	Jagung				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Lombok Barat	9.525	17.091	23.960	31.753	20.758
2	Lombok Tengah	13.830	16.593	17.025	21.033	20.440
3	Lombok Timur	67.628	82.282	85.960	82.173	82.440
4	Sumbawa	57.425	132.554	192.391	218.466	287.258
5	Dompu	24.348	86.978	153.305	124.331	187.125
6	Bima	38.778	58.443	101.482	88.690	109.508
7	Sumbawa Barat	11.542	26.432	27.462	30.882	42.071
8	Lombok Utara	23.020	29.436	33.503	33.935	32.710
9	Kota Mataram	-	-	-	46	0
10	Kota Bima	2.909	7.097	7.586	2.466	3.554
NTB		249.005	456.906	642.674	633.775	785.864

Sumber : BPS NTB, 2015

jagung yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dompu dimana merupakan salah satu contoh pemanfaatan lahan kering yang di nilai berhasil. Perkembangan produksi jagung di NTB menurut kabupaten disajikan dalam Tabel 2.3 dan Gambar 2.8.



Sumber: BPS NTB, 2015

Ubi kayu

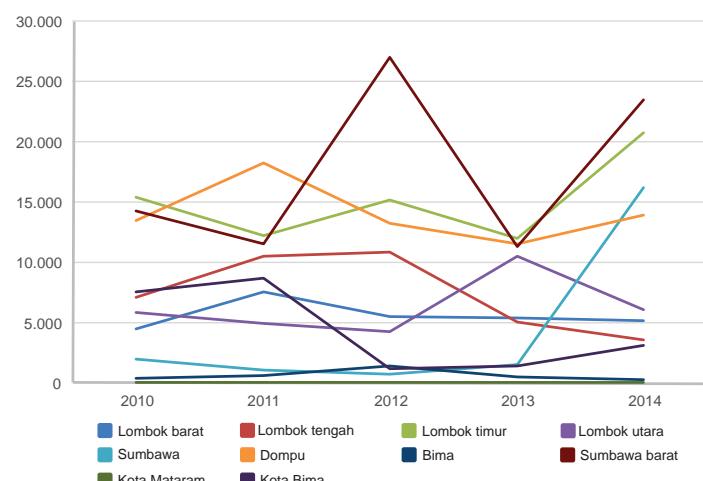
Ubi kayu merupakan salah satu sumber karbohidrat non beras yang penting di beberapa wilayah di NTB. Ubi kayu dapat dikonsumsi dalam bentuk ubi kayu segar, ubi kayu kering (gapplek) dan tepung (tapioka). Secara umum, produksi ubi kayu mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2014, produksi ubi kayu mencapai 93.642 ton atau naik sebesar 50 persen jika dibandingkan dengan produksi ubi kayu pada tahun 2013 yang mencapai 59.086 ton. Penurunan produksi pada tahun 2013 disebabkan karena berkurangnya luas panen dari 5.979 hektar pada tahun 2012 menjadi 3.866 hektar pada tahun 2012. Sentra produksi ubi kayu di NTB yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Bima. Perkembangan produksi ubi kayu di NTB disajikan dalam Tabel 2.4 dan Gambar 2.9.

Tabel 2.4: Perkembangan produksi ubi kayu menurut kabupaten (ton), 2010-2014

No	Kabupaten / Kota	Ubi Kayu				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Lombok Barat	4.504	7.517	5.557	5.396	5.177
2	Lombok Tengah	7.149	10.507	10.841	5.042	3.598
3	Lombok Timur	15.362	12.173	15.217	11.968	20.779
4	Sumbawa	5.830	4.952	4.236	10.500	6.089
5	Dompu	2.012	1.127	718	1.500	16.158
6	Bima	13.497	18.229	13.279	11.531	13.950
7	Sumbawa Barat	353	586	1.376	480	231
8	Lombok Utara	14.297	11.535	27.037	11.295	23.526
9	Kota Mataram	0	-	0	0	0
10	Kota Bima	7.602	8.740	1.211	1.374	3.134
NTB		70.606	75.366	79.472	59.086	92.642

Sumber : BPS NTB, 2015

Gambar 2.9: Total produksi ubi kayu menurut kabupaten, 2010-2014 (ton)



Sumber: BPS NTB, 2015

Ubi jalar

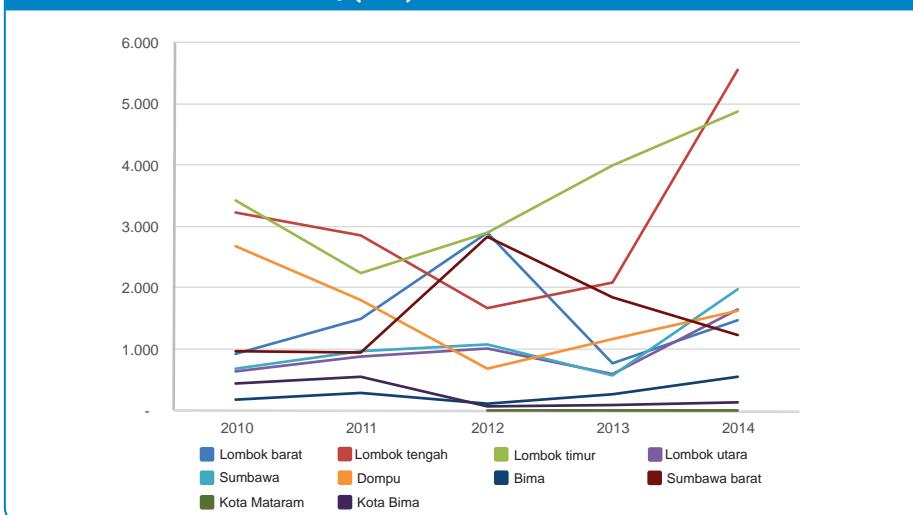
Produksi ubi jalar di Provinsi NTB selama periode tahun 2010 - 2014 mengalami fluktuasi. Produksi ubi jalar pada tahun 2014 mencapai 19.015 ton, naik sebesar 68 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2013 yang mencapai 11.335 ton (Tabel 2.5 dan Gambar 2.10). Tiga kabupaten di Provinsi NTB yang merupakan penghasil ubi kayu terbesar yaitu Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Bima.

Tabel 2.5 : Perkembangan produksi ubi jalar menurut kabupaten (ton), 2010-2014

No	Kabupaten / Kota	Ubi Jalar				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Lombok Barat	911	1.502	2.900	757	1.468
2	Lombok Tengah	3.235	2.842	1.664	2.093	5.559
3	Lombok Timur	3.431	2.236	2.902	3.986	4.864
4	Sumbawa	625	879	1.001	589	1.644
5	Dompu	686	954	1.082	573	1.976
6	Bima	2.667	1.794	676	1.157	1.614
7	Sumbawa Barat	183	284	119	259	539
8	Lombok Utara	965	938	2.832	1.845	1.224
9	Kota Mataram	-	-	-	-	0
10	Kota Bima	431	541	57	76	127
NTB		1.502	11.970	13.233	11.335	19.015

Sumber : BPS NTB, 2015

Gambar 2.10: Total produksi ubi jalar menurut kabupaten, 2010-2014 (ton)



Sumber: BPS NTB, 2015

2.3 Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi

Seperti yang telah dibahas dalam Bab 1, indikator ketersediaan pangan yang digunakan untuk analisis ketahanan pangan komposit adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serealia (*Normative Consumption to Production Ratio-NCPR*). Rasio tersebut menunjukkan apakah suatu daerah surplus atau defisit dalam produksi serealia.

Indikator ini merupakan salah satu dari 9 indikator utama yang digunakan dalam analisis komposit kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi yang mencerminkan ketersediaan pangan di 105 kecamatan. Produksi serealia di tingkat kecamatan dihitung dengan mengambil rata-rata produksi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar masing-masing selama tiga tahun produksi (2011-2013). Data rata-rata produksi bersih serealia dihitung dengan menggunakan faktor konversi standar (benih, pakan dan tercecer). Khusus rata-rata produksi bersih ubi kayu dan ubi jalar dibagi dengan 3 (nilai kalori 3 kg ubi kayu atau ubi jalar setara dengan 1 kg beras atau jagung) untuk mendapatkan

nilai yang ekuivalen dengan serealia (BKP, 2012). Selanjutnya dihitung total produksi serealia yang tersedia untuk dikonsumsi. Ketersediaan bersih serealia per kapita dihitung dengan membagi total produksi serealia di kabupaten tertentu dengan perkiraan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2012. Kemudian dihitung rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serealia. Berdasarkan profil konsumsi Indonesia, konsumsi serealia per kapita per hari adalah 300 gram. Data ketersediaan bersih serealia dari perdagangan (ekspor dan impor) tidak dihitung karena data tersebut tidak tersedia di tingkat kecamatan.

Peta 2.1 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah kecamatan di Provinsi NTB telah mencapai swasembada dalam produksi serealia, yang digambarkan dalam kelompok gradasi warna hijau, sedangkan daerah defisit ditunjukkan dengan kelompok gradasi warna merah. Kondisi iklim, kesesuaian lahan, ketersediaan lahan, bencana alam (kekeringan, banjir, dll) adalah faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap kemampuan kecamatan-kecamatan yang mengalami defisit serealia untuk mencapai swasembada dalam produksi serealia. Walaupun demikian, hal yang penting untuk dicatat bahwa daerah yang mengalami defisit pangan tidak selalu perlu dikhawatirkan, karena daerah tersebut merupakan daerah pengembangan pariwisata (Kecamatan Pemenang, Batu Layar) dan pertambangan (Kecamatan Maluk) yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk untuk membeli serealia dari daerah surplus. Dengan masih tingginya ketergantungan penduduk terhadap produksi pangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangannya dan penurunan jumlah rumah tangga petani pengguna lahan di NTB dibandingkan kondisi 10 tahun yang lalu, maka implikasi dari defisit serealia harus dipelajari dengan seksama (Dinas Pertanian TPH NTB, 2013).

Berdasarkan nilai NCPR sebagaimana ditunjukkan oleh Peta 2.1, dari 105 kecamatan yang dianalisa hampir semua kecamatan mengalami surplus dan hanya 5 kecamatan mengalami defisit. Masing-masing satu kecamatan di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara mengalami defisit tinggi ($NCPR > 1,5$), satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat mengalami defisit sedang ($NCPR 1,25-1,50$) dan masing-masing satu kecamatan di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur yang mengalami defisit ringan ($NCPR 1,00-1,25$). Penyebab defisit serealia pada level kabupaten, khusus di Kabupaten Lombok Utara karena sebagai kabupaten termuda di Provinsi NTB, tingginya arus investasi yang dibarengi dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dalam 5 tahun terakhir berdampak pada menyempitnya lahan pertanian dari 8.300 ha menjadi 6.300 ha.

Penyebab defisit ketersediaan bervariasi antar kecamatan, tetapi pada umumnya meliputi: i) alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, seperti tingginya konversi lahan yang terjadi di Kecamatan Pemenang (Kabupaten Lombok Utara); ii) perluasan areal pertambangan terbuka, seperti yang terjadi di Kecamatan Maluk (Kabupaten Sumbawa Barat); iii) degradasi lahan pertanian; iv) rendahnya produktivitas dalam sistem produksi varietas padi gogo; dan v) kurangnya ketersediaan lahan pertanian dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Untuk semua kecamatan, termasuk yang saat ini memiliki surplus produksi serealia, perubahan iklim menjadi perhatian utama yang berkaitan tingkat deforestasi yang tinggi, kekeringan dan/atau banjir yang menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan tingkat produksi saat ini. Resiko dari fenomena perubahan iklim seperti pola cuaca yang tidak menentu, peningkatan intensitas serangan hama tanaman dan kejadian bencana alam berpotensi mengancam apa yang telah dicapai sejauh ini dan menghambat kemajuan ketahanan pangan dan gizi di NTB.

2.4 Tantangan untuk ketersediaan pangan

Kebutuhan penyediaan pangan terus meningkat baik jumlah maupun kualitasnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, semakin terbatasnya lahan pertanian di NTB dan peningkatan pendapatan masyarakat. Di lain pihak upaya peningkatan produksi pangan di NTB mengalami berbagai tantangan dan kendala antara lain: i) alih guna lahan pertanian menjadi non-pertanian akibat pesatnya pembangunan di luar sektor pertanian, menyebabkan luasan lahan yang subur tidak berfungsi sesuai dengan harapan pembangunan pertanian. Dilain pihak perluasan areal melalui pencetakan sawah baru memerlukan dana yang tidak sedikit dan juga tidak tersedianya sumber air yang memadai; ii) penurunan kualitas tanah dan kesuburan akibat teknik budidaya yang tidak memperhatikan kaidah konservasi; iii) menurunnya dukungan sumberdaya air, terbatasnya jumlah mata air, curah hujan yang semakin menurun setiap tahunnya, sehingga teknologi pertanian tidak dapat diterapkan secara optimal; iv) beberapa organisme pengganggu tanaman masih menjadi kendala yang serius dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan, misalnya tungro, penggerek batang, tikus, wereng coklat dan *blast* pada padi; v) kepemilikan modal petani yang terbatas dan penyediaan Kredit Usaha Tani yang semakin terbatas pula, menyebabkan petani kesulitan menyediakan sarana produksi dan pada akhirnya petani menggunakan anjuran teknologi sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula dalam kegiatan pengolahan hasil produksi pertaniannya; vi) penggunaan sarana produksi on farm yang masih sangat minimal seperti penggunaan benih/varietas unggul bersertifikat, pupuk yang dianjurkan serta obat-obatan atau pestisida alami serta bahan kimia yang bersifat tidak resisten; vii) masih tingginya tingkat kehilangan hasil, yang disebabkan oleh penanganan panen dan pasca panen yang belum memadai; viii) harga sarana produksi yang sangat tinggi dibandingkan dengan harga gabah maupun komoditas lainnya pada saat panen; x) ketersediaan infrastruktur penunjang di pelabuhan laut dan pelabuhan udara yang belum tersedia secara memadai; dan xi) terjadinya anomali iklim khususnya perubahan pola dan intensitas curah hujan yang semakin sulit diramalkan yang menyebabkan bencana banjir dan kekeringan parah dan berulang di beberapa wilayah di NTB (DisperTan TPH NTB, 2013).

2.5 Pencapaian untuk meningkatkan ketersediaan pangan

- Perkembangan ketersediaan total energi untuk konsumsi masyarakat dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,15 persen. Sedangkan perkembangan ketersediaan total protein dalam periode yang sama, mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,66 persen.
- Cadangan pangan (cadangan di provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat) mengalami peningkatan selama periode tahun 2014-2015 yaitu dari 849.243 ton beras menjadi 982.548 ton beras.
- Selama periode tahun 2009-2013 jumlah desa mandiri pangan yang dibentuk sebanyak 229 desa, bertambah 147 desa dari kondisi awal 82 desa di tahun 2008.
- Melalui program pengembangan Agribisnis Jagung terjadi tingkat pertumbuhan produksi jagung 5-10 persen per tahun.
- Tingkat pertumbuhan populasi sapi mencapai 7-8 persen per tahun. Program NTB Bumi Sejuta Sapi juga memberikan kontribusi kepada ketahanan pangan dengan menyumbang 13,7 ribu ton daging dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.
- Kontribusi NTB dalam penyediaan bibit sapi rata-rata 12 ribu ekor pertahun untuk 18 Provinsi

se-Indonesia. Sementara dukungan Provinsi NTB terhadap Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K) tahun 2014 mencapai 31.728 ton.

- Sejumlah penghargaan yang diterima oleh Gubernur/Pemerintah Provinsi NTB di bidang pangan dan gizi: i) Pengembangan Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi (2012); ii) penghargaan Adhi Bhakti Mina Bahari (2012); iii) Adhikarya Pangan Nusantara, atas Prakarsa dan Prestasi dalam mempelopori, meningkatkan dan memberikan keteladanan untuk mewujudkan ketahanan pangan selama tiga tahun berturut-turut (2012-2014).

2.6 Kebijakan dan strategi untuk meningkatkan ketersediaan pangan

Strategi yang berkaitan dengan ketersediaan pangan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2013-2018 yaitu:

- Identifikasi dan inventarisasi data informasi potensi Sumberdaya Alam (SDA).
- Mobilisasi dan fasilitasi Teknologi Tepat Guna.
- Inventarisasi, sosialisasi, fasilitasi dan reklamasi pemanfaatan SDA khususnya daerah pertambangan.
- Revitalisasi dan fasilitasi sarana produksi.
- Intensifikasi produk SDA berkualitas.
- Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi tanaman dan hasil utamanya.
- Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi produk budidaya perikanan dan kelautan.
- Ekstensifikasi dan intensifikasi ternak.

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB 2013-2018 yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan khususnya padi, jagung dan tanaman hortikultura adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dan evaluasi kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) untuk komoditas padi, jagung dan kedelai.
- Meningkatkan pembinaan terhadap petugas untuk budi daya padi, jagung dan kedelai.
- Peningkatan kualitas benih/bibit hortikultura unggulan daerah.
- Perluasan areal tanam dan luas panen tanaman hortikultura.

Dalam dokumen Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB tahun 2013-2018, terdapat beberapa program yang berkaitan dengan ketersediaan pangan yaitu:

- Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- Mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan.
- Mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan.
- Membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi pangan.

- Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.
- Membangun kawasan sentra produksi pangan.

Untuk mewujudkan NTB sebagai daerah sentra produksi peternakan menuju industrialisasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mendukung penyediaan daging nasional, maka disusun strategi seperti yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB tahun 2013-2018 sebagai berikut:

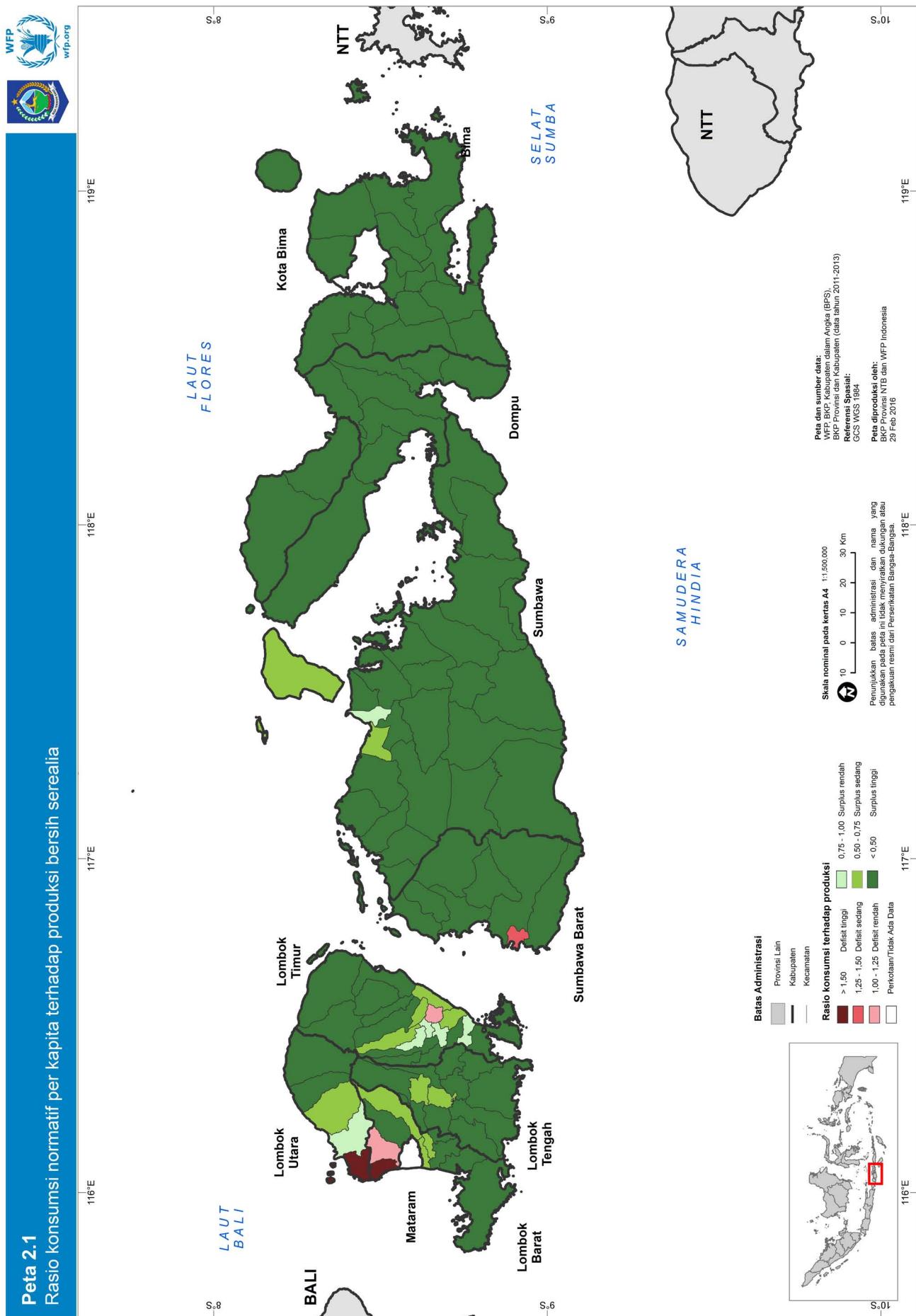
- Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pelatihan sesuai kompetensi dan tugas pokok.
- Peningkatan Populasi dan Kualitas Ternak Sapi melalui koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar leading sektor.
- Meningkatkan Sinergitas, kerjasama lintas sektor dan Integrasi Instansi Rumpun Hijau.
- Pengembangan ternak melalui pemberian bantuan sosial/hibah dalam mendukung program pemberdayaan kelompok masyarakat harus lebih terkoordinir.
- Intensifikasi Status Padang Penggembalaan Ternak Rakyat.
- Optimalisasi surveillance dan vaksinasi secara berkelanjutan dalam meningkatkan kewaspadaan dini (*Early Warning System*) terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
- Peningkatan Peranserta Swasta dalam Membangun Sektor Budidaya atau perbibitan Ternak.
- Peningkatan Akses Masyarakat pada Modal, Tehnologi dan Informasi.
- Pengembangan Infrastruktur Peternakan.
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak.
- Revitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai tempat penyediaan daging Aman Sehat Utuh Halal (ASUH).
- Akreditasi produksi semen beku sebagai bahan kawin suntik dalam meningkatkan kelahiran anak sapi (pedet)
- Akreditasi Rumah Sakit Hewan (RSH) dan Laboratorium Veteriner dalam meningkatkan status kesehatan hewan.
- Pengembangan hijauan makanan ternak dan pakan olahan limbah pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Provinsi NTB. 2014. *Perkembangan Pembangunan Provinsi NTB 2014*. Mataram.
- BKP. 2008, 2009, 2010a, 2011 dan 2012. *Neraca Bahan Makanan tahun 2008-2012*. Jakarta.
- BKP Provinsi NTB. 2015. *Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi NTB tahun 2014*. Mataram.
- BPS. 2010, 2011, 2012 dan 2013a. *Statistik Indonesia*. Jakarta.
- BPS Provinsi NTB. 2013a. *Analisis Sosial Ekonomi Petani di NTB (Analisis Hasil Survei Pendapatan Petani Sensus Pertanian 2013)*. Mataram.
- BPS Provinsi NTB. 2013b. *Laporan Hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (Pencacahan Lengkap)*. Mataram.
- BPS. 2013. *Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Provinsi tahun 2010-2035*. Jakarta.
- BPS Provinsi NTB. 2014a. *Statistik Produksi Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi NTB*. Mataram.
- BPS Provinsi NTB. 2014b. *NTB dalam Angka*. Mataram.
- BPS Provinsi NTB. 2014b. *Luas Lahan Menurut Penggunaanya di Provinsi NTB 2013*. Mataram.
- BPS Provinsi NTB. 2014d. *Berita Resmi Statistik Provinsi NTB No.20/03/52/Th.VIII, 3 Maret 2014*. Mataram.
- BPS Provinsi NTB. 2015a. *Berita Resmi Statistik Provinsi NTB No.47/07/52/Th.IX, 1 juli 2015*. Mataram.
- BPS Provinsi NTB. 2015b. *PDRB Provinsi NTB menurut lapangan usaha 2010-2014*. Mataram.
- BPS Prov NTB. 2015c. *Statistik Daerah Provinsi NTB Tahun 2015*. Mataram
- BPS Provinsi NTB. 2015d. *Indikator Pertanian Provinsi NTB Tahun 2014*. Mataram.
- Dewan Ketahanan Pangan dan WFP. 2010. *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2009*. Jakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2005. *Peta Kerawanan Pangan (FIA) 2005*. Jakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2006. *Kebijakan Nasional untuk Ketersediaan Pangan*. Jakarta.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NT. 2013. *Laporan Tahunan Dispertan TPH Prov. NTB, 2013*. Mataram.
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. 2014. *Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB tahun 2013-2018*. Mataram.
- Direktur Jenderal Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian. 2012. "Acceleration Effort to Achieve 10 million ton of rice surplus and maize and soybean self-sufficiency in 2014", dipresentasikan pada Focus Group Discussion on the International Cooperation on Indonesia Food Security Programme (KIKPI), di Jakarta, 31 July 2012. Jakarta.
- FAO. 2012. *World Review of Fisheries and Aquaculture 2012*. Roma.

- Kementerian Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2010. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014*. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019*. Jakarta.
- OECD. 2012. *OECD Review of Agricultural Policies: Indonesia 2012*, Paris. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
- Pemerintah Daerah NTB. 2015. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur NTB Akhir Tahun Anggaran 2014*. Mataram.
- Pusdatin, Kementerian Pertanian. 2014. *Analisis PDB Sektor Pertanian 2014*. Jakarta.

Peta 2.1
Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serealia



BAB 3

Akses Terhadap Pangan



Akses terhadap pangan merupakan salah satu dari 3 pilar ketahanan pangan. Akses pangan berhubungan dengan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia secara fisik di suatu daerah, akan tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: i) **akses fisik**: infrastruktur pasar, akses untuk mencapai pasar dan fungsi pasar; ii) **akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli makanan yang cukup dan bergizi; dan/atau iii) **akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan mekanisme dukungan informal seperti barter, meminjam atau adanya program dukungan sosial.

Bab ini terbagi menjadi 3 sub-bab yang membahas masing-masing indikator akses pangan. Struktur dalam setiap bagian bervariasi tergantung pada ketersediaan data. Apabila memungkinkan, data pada tingkat kabupaten dan kecamatan untuk berbagai indikator akan dijelaskan terlebih dahulu untuk membangun keterkaitan antar sub-bab. Selanjutnya, perbedaan pada tingkat kabupaten dijelaskan dengan menggunakan indikator *proxy* terpilih yang mencerminkan ketersediaan data di 105 kecamatan di FSVA ini.

- **Akses fisik**: indikator *proxy* utamanya adalah akses terhadap jalan dan atau transportasi air.
- **Akses ekonomi**: terdiri dari 2 indikator *proxy* (persentase penduduk yang hidup dibawah kemiskinan dan akses terhadap listrik).
- **Akses sosial**: program bantuan sosial akan dibahas dalam peta ini meskipun datanya tidak tersedia pada tingkat kecamatan.

3.1 Akses fisik

Kemajuan infrastruktur transportasi menentukan laju perkembangan suatu wilayah. Daerah yang terhubung dengan sarana transportasi yang baik akan menerima dukungan infrastruktur lain yang dapat memperkuat penghidupan masyarakat. Sarana transportasi udara, darat dan air yang memadai sangat penting untuk mengangkut bahan pangan tepat waktu dengan biaya yang efektif, mengurangi resiko biaya perdagangan, dan meningkatkan akses ke pasar. Akses jalan yang memadai akan memastikan berjalannya rantai pasokan, meningkatkan investasi antar sektor dan meningkatkan akses ke pelayanan serta berkontribusi terhadap standar kehidupan secara keseluruhan, khususnya untuk daerah pedesaan. Pengembangan sarana transportasi dan gudang penyimpanan dapat menurunkan harga pangan, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan petani dengan mengurangi biaya-biaya terkait lainnya.

Selain memastikan rantai pasokan pasar berjalan dengan baik, akses jalan juga akan membuka keterisolasian suatu wilayah yang pada akhirnya akan meningkatkan investasi antar wilayah dan antar sektor serta meningkatkan akses ke pelayanan sehingga berkontribusi pada meningkatnya standar kehidupan masyarakat secara menyeluruh, khususnya di wilayah pedesaan. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan berkualitas memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui dampak positif terhadap produktivitas, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan baik disektor pertanian maupun non pertanian. Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) dapat lebih mudah menjangkau petani di wilayah yang lebih terpencil dan luasan lahan yang lebih luas untuk memberikan bantuan teknis dan informasi demi peningkatan produksi. Akses ke pendidikan dapat ditingkatkan karena murid-murid mempunyai kesempatan untuk melakukan perjalanan menuju sekolah yang lebih jauh dan guru-guru lebih bersemangat untuk mengajar di sekolah pedesaan miskin, yang pada gilirannya dapat meningkatkan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Masyarakat pedesaan juga dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Situasi infrastruktur transportasi

Pasca ditetapkannya NTB bersama Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur masuk dalam Koridor V Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025, konektivitas transportasi baik darat, laut dan udara di NTB berkembang cukup pesat dan semakin memantapkan NTB sebagai pintu gerbang pariwisata dan ketahanan pangan nasional. Interkoneksi transportasi darat di Provinsi NTB meliputi ruas jalan nasional sepanjang 632 km, jalan provinsi 1.773 km, dan jalan kabupaten sepanjang 5.197 km. Dari seluruh panjang jalan tersebut, kondisi tingkat kemantapan jalan nasional mencapai 99,69 persen, jalan provinsi mencapai 67,56 persen, dan jalan kabupaten mencapai 58,56 persen (Dinas PU NTB, 2014). Dari sisi kuantitas, ketersediaan jaringan jalan tersebut cukup memadai untuk mendukung transportasi darat. Namun demikian, layanan dan utilitas infrastruktur tersebut dirasakan masih belum optimal terutama oleh masyarakat yang berada di beberapa wilayah pedesaan, dan pulau kecil terpencil.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berupaya secara terus menerus membangun jaringan jalan berkualitas untuk pemerataan tingkat kemantapan infrastruktur jalan antar wilayah dan antar sektor. Dalam rangka mempertahankan kondisi kemantapan jalan provinsi sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya melalui program percepatan penanganan jalan dengan pola tahun jamak melalui dana APBD Provinsi NTB, maka pada tahun 2013-2015 dilaksanakan program sejenis melalui *Program Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM) yang bersumber dari hibah Pemerintah Australia sebesar 40 persen dan APBD Provinsi NTB sebesar

60 persen yang digunakan untuk menangani ruas-ruas jalan strategis provinsi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa (Pemerintah Provinsi NTB, 2015). Selain menerapkan sistem penganggaran tahun jamak, mendorong peningkatan status jalan strategis provinsi menjadi jalan strategis nasional menjadi terobosan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah NTB.

Selain peningkatan sarana prasarana perhubungan darat, upaya yang sama juga telah dan masih dilakukan pada bidang perhubungan udara dan laut untuk menghindari adanya keterlambatan yang sangat lama dan biaya transportasi yang tinggi untuk pengangkutan barang terutama barang kebutuhan pokok yang diantarpulaukan. Penundaan waktu yang lama menyebabkan tingkat kerusakan yang besar dan harga pangan yang tinggi karena permintaan yang tinggi dan rendahnya penyediaan bahan pangan. Kondisi ini juga menghambat para petani kecil di pelosok pedesaan untuk menjual hasil pertanian dengan harga yang layak, karena tingginya biaya transportasi. Karakteristik wilayah NTB yang berupa kepulauan menjadikan konektivitas dan aksesibilitas pelabuhan laut memegang peranan penting terkait dengan jaringan distribusi komoditas pangan dan mobilisasi produk-produk unggulan daerah didalam dan antar provinsi. Terlebih lagi bagi NTB yang masih harus mendatangkan sejumlah barang kebutuhan pokok dari provinsi lain. Pencatatan arus distribusi komoditas pangan dari dan keluar NTB dipantau di 4 pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Sape, Pelabuhan Badas dan Pelabuhan Bima, yang menghubungkan NTB dengan wilayah barat dan timur Indonesia. Data dan informasi distribusi produksi komoditas pangan ini sangat penting untuk diketahui secara aktual, guna mengetahui ketersediaan pangan dan mengambil kebijakan terkait penyediaan pangan serta stabilisasi harga di dalam daerah.

Akses penghubung tingkat kecamatan

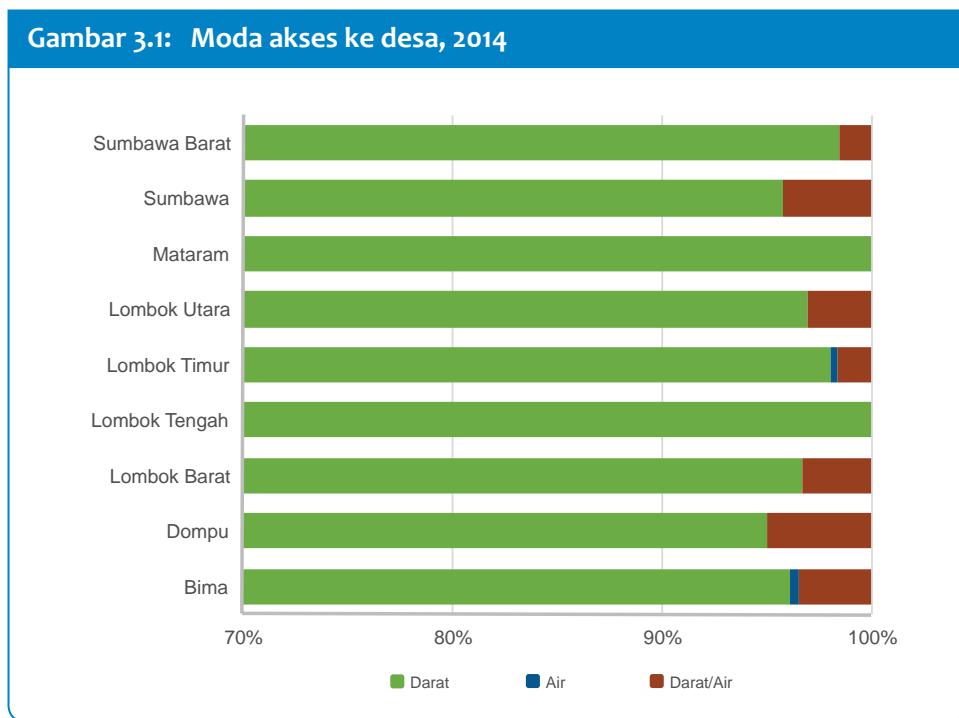
Bagian ini menganalisis tingkat konektivitas level kecamatan berdasarkan data potensi desa yang memiliki akses ke jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun dan akses terhadap transportasi air yang dapat dilalui perahu sepanjang tahun (BPS, 2013b) (Lampiran 1). Pada tahun 2014, sekitar 1,67 persen desa di NTB yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat pada waktu-waktu tertentu dalam setahun khususnya pada musim penghujan atau tidak memiliki akses terhadap transportasi air yang dapat dilalui perahu sepanjang tahun (Tabel 3.1). Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan hasil survei PODES (2011) dimana terdapat sebesar 13,79 persen desa-desa di NTB yang tidak memiliki akses transportasi yang memadai.

Tabel 3.1: Persentase desa tanpa akses penghubung yang memadai menurut kabupaten (persen)

No	Kabupaten / Kota	Persentase desa tanpa akses penghubung yang memadai
1	Lombok Barat	1,64
2	Lombok Tengah	0,00
3	Lombok Timur	1,57
4	Sumbawa	2,59
5	Dompu	0,00
6	Bima	4,82
7	Sumbawa Barat	0,00
8	Lombok Utara	0,00
9	Kota Mataram	0,00
10	Kota Bima	0,00
NTB		1,67

Sumber: PODES 2014, BPS

Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai tertinggi terdapat di Kabupaten Sumbawa (4,82 persen), Kabupaten Bima (2,59 persen) dan sebagian kecil di Kabupaten Lombok Barat (1,64 persen) dan Kabupaten Lombok Timur (1,57 persen) (Gambar 3.1).



Sedangkan pada tingkat kecamatan, masih terdapat 4 dari 105 kecamatan dimana paling tidak 20 persen desa-desanya tidak memiliki akses jalan atau transportasi air yang memadai sepanjang tahun (Lampiran 1). Kecamatan-kecamatan tersebut tersebar di Kabupaten Sumbawa sebanyak tiga kecamatan (Batu Lanteh, Labuhan Badas, dan Ropang) dan Kabupaten Bima satu kecamatan (Langgudu). Kondisi ini menjadi tantangan ke depan bagi Provinsi NTB terkait dengan upaya melanjutkan misi percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang berbasis tata ruang.

3.2 Akses ekonomi

Akses ekonomi terhadap makanan bergizi adalah penentu utama kerawanan pangan dan gizi di Indonesia. Walaupun pangan mungkin tersedia di pasar terdekat, akan tetapi kemampuan rumah tangga untuk membeli pangan tergantung pada pendapatan rumah tangga dan stabilitas harga pangan. Pangan yang bergizi cenderung lebih mahal harganya di pasar. Disisi lain, daya beli rumah tangga miskin terbatas, sehingga sering kali rumah tangga miskin menerapkan strategi "hanya sekedar mengisi perut" dengan jalan membeli pangan pokok yang relatif murah tetapi kurang gizi mikro, protein dan lemak. Strategi ini tentu saja memberikan dampak negatif tidak saja bagi kesehatan anggota keluarga yang rentan yaitu balita, anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, dan ibu hamil dan menyusui Yang akhirnya berpengaruh pada rendahnya kesehatan seluruh anggota keluarga.

Penghidupan

Kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan sebagian besar ditentukan oleh ketahanan strategi penghidupan dan peluang kerja yang tersedia di daerah. Strategi penghidupan di definisikan sebagai kemampuan, modal / aset yang digunakan - alam, fisik, manusia, ekonomi dan sosial - dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu rumah tangga untuk memperoleh kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan.

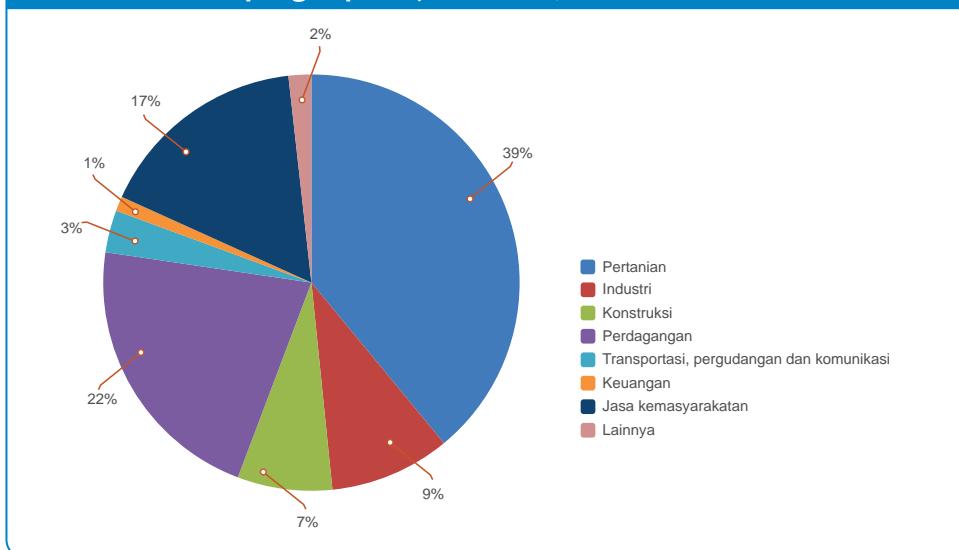
Strategi penghidupan rumah tangga terkait dengan keragaman peluang kerja yang tersedia dan dapat mencakup pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Data lapangan kerja formal tersedia secara triwulan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Sedangkan data pekerjaan informal tidak dipantau secara periodik meskipun terdapat keyakinan bahwa hal itu memberikan kontribusi besar terhadap strategi penghidupan rumah tangga. Di awal tahun 2015, BPS NTB memperkirakan sekitar 530 ribu orang (23,14 persen) penduduk NTB bekerja pada sektor formal dan sekitar 1,76 juta orang (76,86 persen) bekerja pada sektor informal. Komponen pekerja informal terdiri dari penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas dan pekerja tidak bebas di sektor pertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Sebagian besar lapangan pekerjaan sektor informal memberikan penghasilan di bawah rata-rata, tidak ada jaminan sosial serta terkadang harus bekerja pada lingkungan yang berbahaya. Para pekerja di kelompok ini sangat rentan untuk masuk dalam lingkaran kemiskinan karena sifat pekerjaan yang tidak pasti dan umumnya mendapatkan upah yang sangat rendah.

Selaras dengan standar dari Organisasi Tenaga Kerja International (ILO), maka Indonesia telah menggunakan konsep status ketenagakerjaan dan pengangguran terbuka telah di perluas dalam statistik tenaga kerja sejak tahun 2001. Total "Angkatan Kerja" adalah penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun yang pada minggu lalu bekerja, mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha) pada minggu pelaksanaan survei. Status pekerjaan di kelompokkan menjadi 7 kategori yaitu: i) berusaha sendiri; ii) berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar; iii) berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar; iv) buruh/karyawan/pegawai; v) pekerja bebas di pertanian; vi) pekerja bebas di non-pertanian; dan vii) pekerja tak dibayar.

Struktur lapangan pekerjaan bagi penduduk NTB yang bekerja hingga Agustus 2015 tidak mengalami perubahan. Sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor jasa secara berurutan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di NTB (Gambar 3.2).

Di NTB selama periode 2012-2014, TPT mengalami kenaikan sebesar 0,49 persen. Pada periode yang sama, perubahan TPT di tingkat kabupaten yang tertinggi di Kabupaten Lombok Timur (2,47 persen) dan yang terendah terdapat di Kota Mataram (-1,74 persen) (Tabel 3.2). Angka TPT di NTB sangat terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat, yang menunjukkan pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Di lain pihak, pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia produktif agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru belum optimal. Untuk itu, mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan, serta sistem informasi pasar tenaga kerja dan layanan penempatan kerja yang efektif dan responsif menjadi kunci untuk mengatasi persoalan ini.

Gambar 3.2: Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, 2015



Sumber: Berita Resmi Statistik 2015, BPS

Khusus pada bidang pertanian, hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa usaha pertanian di NTB didominasi oleh rumah tangga. Hal ini tercermin dari besarnya jumlah rumah tangga usaha pertanian jika dibandingkan dengan perusahaan pertanian berbadan hukum atau pelaku usaha lainnya. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di NTB tahun 2013 tercatat sebanyak 600.613 rumah tangga, berkurang sebesar 119.262 rumah tangga dari tahun 2003 yang tercatat sebanyak 719.875 rumah tangga. Sedangkan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum tahun 2013 tercatat sebanyak 53 perusahaan dan pelaku usaha lainnya sebanyak 98 unit (BPS NTB, 2013).

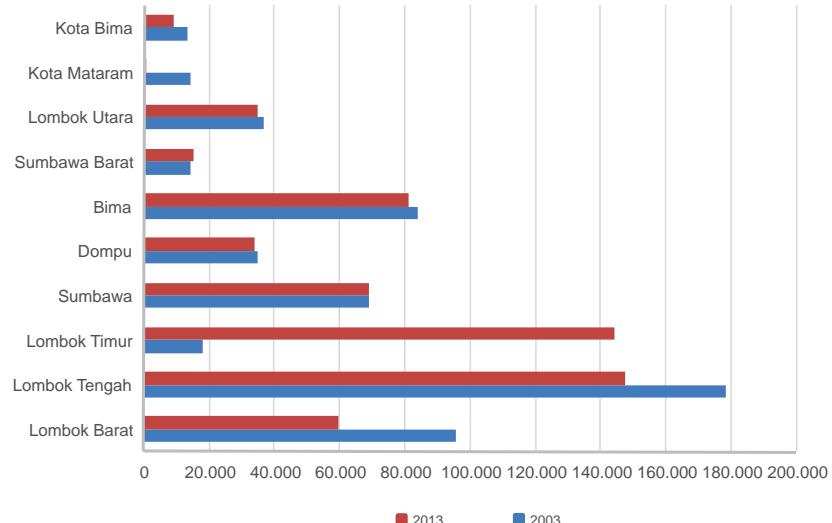
Tabel 3.2 : Persentase tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten, 2012-2014

No	Kabupaten / Kota	2012	2013	2014
1	Lombok Barat	5,3	4,16	4,19
2	Lombok Tengah	5,85	5,46	6,37
3	Lombok Timur	4,69	6,22	7,16
4	Sumbawa	4,97	4,11	4,27
5	Dompu	4,75	5,13	6,51
6	Bima	5,08	4,90	4,10
7	Sumbawa Barat	5,25	6,91	5,71
8	Lombok Utara	3,38	4,02	5,42
9	Kota Mataram	6,53	5,48	4,79
10	Kota Bima	6,36	9,21	8,69
	NTB	5,26	5,38	5,75

Sumber: BPS NTB, 2013-2015

Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak di tahun 2013, yaitu sebanyak 147.455 rumah tangga sedangkan Kabupaten Sumbawa tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum dan jumlah usaha pertanian lainnya yang terbanyak dengan pertumbuhan sebesar 4,03 persen. Peningkatan jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat disebabkan adanya pembukaan lahan transmigrasi, bantuan pemerintah untuk usaha budidaya rumput laut, ternak sapi, pencetakan sawah baru dan pembangunan sarana irigasi (Gambar 3.3).

Gambar 3.3: Persentase rumah tangga usaha pertanian, 2013



Sumber: Statistik Pertanian NTB, BPS, 2013

Kemiskinan

Di NTB, pemerintah menggunakan garis kemiskinan provinsi (Rp 335.284 per orang/bulan untuk daerah perkotaan dan Rp 313.466 per orang/bulan untuk perdesaan pada bulan September 2015 untuk tujuan perencanaan dan penentuan tujuan pembangunan (BPS, 2015).

Perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi NTB dalam waktu sepuluh tahun menunjukkan adanya penurunan sebesar 10,63 persen yaitu dari sebesar 27,17 persen (2006) menurun menjadi sebesar 16,54 persen (2015). Dengan kata lain, rata-rata penurunan persentase penduduk miskin selama 10 tahun terakhir sekitar 1,06 persen per tahun (BPS NTB, 2015b).

Pada tingkat kabupaten, secara umum telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan pada periode 2011-2013, dimana hanya Kabupaten Lombok Utara yang masih memiliki jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan diatas 30 persen (Tabel 3.3). Penyebab masih tingginya kemiskinan di NTB adalah: kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, kondisi alam yang kurang mendukung, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terbatasnya sarana dan prasarana ekonomi masyarakat, terbatasnya tenaga pendamping program masyarakat dan masih banyaknya rumah kumuh.

Sedangkan pada tingkat kecamatan, masih terdapat 14 kecamatan (13,33 persen) yang lebih dari 20 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan atau 5 kecamatan (4,76 persen) yang lebih dari 30 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2013 (Lampiran 1). Kecamatan dengan kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Lombok Utara (kecamatan Kayangan) dan kecamatan dengan kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Dompu (kecamatan Dompu). Kabupaten-kabupaten dengan permasalahan kemiskinan tertinggi harus meningkatkan dan memprioritaskan program penanggulangan kemiskinan.

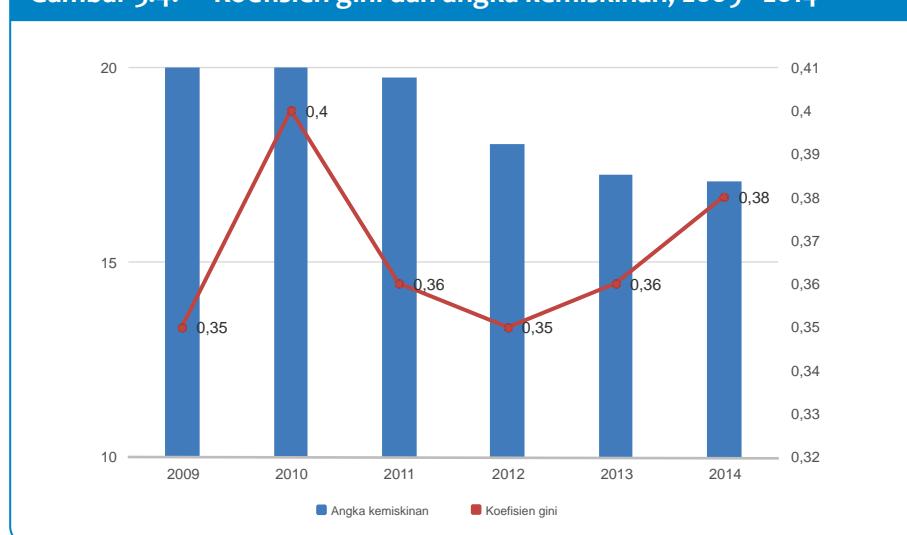
Tabel 3.3 : Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten, 2011-2013

No	Kabupaten / Kota	2011		2012		2013	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Lombok Barat	119.639	19,70	110.542	17,91	110.986	17,43
2	Lombok Tengah	157.983	18,14	146.031	16,71	145.151	16,20
3	Lombok Timur	243.058	21,71	224.692	20,07	219.559	19,16
4	Sumbawa	83.416	19,82	77.085	18,25	73.786	17,04
5	Dompu	40.279	18,17	37.248	16,57	36.397	15,70
6	Bima	78.531	17,66	72.555	16,22	73.832	16,06
7	Sumbawa Barat	23.135	19,88	21.351	17,6	21.710	17,20
8	Lombok Utara	79.545	39,27	73.478	35,97	72.157	34,63
9	Kota Mataram	53.736	13,18	49.633	11,87	46.674	10,75
10	Kota Bima	16.868	11,69	15.620	10,54	15.249	9,91
	NTB	896.190	19,67	828.234	18,02	815.501	17,25

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS NTB, 2015

Penurunan angka kemiskinan di NTB tidak diikuti dengan penurunan kesenjangan antar penduduk miskin dan kaya yang ditunjukkan dengan fluktuasi koefisien gini (koefisien yang menunjukkan ukuran pemerataan pendapatan), dimana antara tahun 2009 – 2014, angkanya berfluktuatif. Pada tahun 2009 koefisien gini sebesar 0,35 sedangkan pada tahun 2014 naik menjadi 0,38 (BPS, 2015b). Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah maupun penduduk miskin (Gambar 3.4).

Gambar 3.4: Koefisien gini dan angka kemiskinan, 2009 - 2014



Sumber: Statistik NTB, 2015

Penurunan angka kemiskinan ini mengindikasikan keberhasilan dari keterpaduan program penanggulangan kemiskinan yang telah diimplementasikan tidak saja oleh Pemerintah Provinsi NTB tetapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan yaitu: 1) Program Bantuan dan Jaminan Sosial, untuk mengurangi beban masyarakat dan keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar; 2) Program Pemberdayaan Masyarakat, untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian dan keterlibatan penduduk miskin dalam pembangunan; 3) Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas dan perluasan usaha, serta membuka akses UMKM terhadap

sumber-sumber dan pasar ekonomi yang lebih luas; dan 4) Program Pro-Rakyat, untuk melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui tiga klaster lainnya. Selain itu, adanya komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan dukungan dari BUMN, dunia usaha dan masyarakat yang meningkat. Khusus kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan lembaga ekonomi desa, pemerintah bekerjasama dengan Yayasan Gerakan Armada Muda Ekonomi Masyarakat (GARUDA EMAS) Mataram melalui program Pemberdayaan Masyarakat Lumbung Bersaing. Program ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur (kecamatan Aikmel), Kabupaten Lombok Barat (kecamatan Kediri) dan Kabupaten Sumbawa Barat (kecamatan Taliwang) (Pemerintah Provinsi NTB, 2015).

Tidak hanya itu, sejumlah program sosial telah diimplementasikan untuk pengentasan kemiskinan di NTB yaitu:

- Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) yang merupakan program pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Program KUBe sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.
- Program penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).
- Santunan kepada kelompok lanjut usia yang disalurkan melalui program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT).
- Bantuan Program Kesejahteraan Sosial Anak Secara Terpadu serta Anak Dengan Kategori Khusus.
- Bantuan sosial kepada para penyandang cacat berat melalui Program Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat.
- Program Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Panti Asuhan yang ada di seluruh kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat.
- Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Akses terhadap listrik

Akses rumah tangga terhadap listrik merupakan suatu indikator pendekatan yang baik untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi dan peluang bagi kondisi kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Pada tahun 2014, hampir seluruh rumah tangga sudah memiliki akses listrik, hanya sekitar 3,03 persen rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap listrik. Secara umum di Provinsi NTB terjadi peningkatan signifikan untuk indikator akses terhadap listrik dibandingkan hasil survei PODES (2008) yang sebanyak 14,63 persen. Kesenjangan antar kabupaten juga semakin menurun, di mana proporsi rumah tangga tanpa akses listrik yang tertinggi berada di Kabupaten Dompu (8,49 persen) dan terendah di Kota Mataram (0,00 persen). Penurunan persentase rumah tangga tanpa akses listrik tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Timur yaitu dari 25,86 persen menjadi 0,72 persen (Tabel 3.4). Peningkatan ini dipicu oleh investasi pada pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan dan upaya mengoptimalkan potensi sumber-sumber energi terbarukan yang melimpah di NTB seperti tenaga air, surya, angin dan panas bumi.

Tabel 3.4: Persentase rumah tangga tanpa akses listrik per kabupaten (persen), 2013

No	Kabupaten / Kota	Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik
1	Lombok Barat	7,48
2	Lombok Tengah	1,05
3	Lombok Timur	0,72
4	Sumbawa	6,26
5	Dompu	8,49
6	Bima	2,76
7	Sumbawa Barat	1,23
8	Lombok Utara	7,93
9	Kota Mataram	0,00
10	Kota Bima	0,58
	NTB	3,03

Sumber: SUSENAS 2013, SP 2010, PODES 2014, BPS (diolah dengan teknik SAE)

3.3 Akses sosial

Program jaring pengaman sosial atau program penanggulangan kemiskinan merupakan aspek penting untuk akses sosial di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menganggarkan Rp 96,66 trilliun (USD 7,16 juta) dalam APBNP 2014 untuk program bantuan sosial penanggulangan kemiskinan (Kemenkeu, 2015b).

Tabel 3.5 : Jumlah penerima dan alokasi raskin menurut kabupaten, 2015

No	Kabupaten / Kota	PAGU RASKIN TAHUN 2015		
		Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTSM)	Pagu Per Bulan (15 kg/ RTSM)	Total Pagu 2015 (kg)
1	Lombok Barat	70.843	1.062.645	12.751.740
2	Lombok Tengah	94.745	1.421.175	17.054.100
3	Lombok Timur	137.973	2.069.595	24.835.140
4	Sumbawa	30.945	464.175	5.570.100
5	Dompu	20.133	301.995	3.623.940
6	Bima	39.204	588.060	7.056.720
7	Sumbawa Barat	9.178	137.670	1.652.040
8	Lombok Utara	30.686	460.290	5.523.480
9	Kota Mataram	9.326	139.890	1.678.680
10	Kota Bima	28.533	427.995	5.135.940
	NTB	471.566	7.073.490	84.881.880

Sumber: <http://biroekonomi.ntbprov.go.id>

Dari semua program bantuan sosial, program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) menjadi program jaring pengaman sosial yang paling efektif menjangkau rumah tangga miskin dan menjadi satu-satunya program berbasis pangan di Indonesia. Pada tahun 2015, jumlah penerima Raskin di NTB sebesar 471.566 rumah tangga yang meliputi sekitar 40 persen penduduk dengan peringkat status kesejahteraan terendah, yang telah mencakup rumah tangga miskin dan hampir miskin. Program Raskin memberikan 15 kg beras bersubsidi setiap bulan kepada penerima manfaat di seluruh kabupaten/kota (Tabel 3.5). Badan Urusan Logistik (BULOG) bertugas mendistribusikan beras sampai ke titik pengiriman ditingkat kabupaten, sedangkan bupati/walikota bertugas untuk

memastikan agar Raskin tersebut dapat diterima penerima manfaat yang berhak. Meskipun program ini telah membangun infrastruktur logistik yang baik dan sangat populer, akan tetapi tidak mengatasi tantangan utama permasalahan gizi di seluruh wilayah di Indonesia, yaitu kurangnya keanekaragaman dan rendahnya kualitas pangan. Program ini masih hanya menggunakan komoditas beras dan tidak memberikan dukungan pada kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui serta anak-anak.

3.4 Pencapaian untuk mendukung akses pangan

- Menurunnya angka kemiskinan dari 1 juta orang (21,55 persen) tahun 2010 menjadi 802 ribu orang (16,54 persen) pada September 2015. Penurunan angka kemiskinan NTB termasuk kategori progresif: Ranking VIII nasional tahun 2011 (1,82 persen) dan Ranking IV nasional Maret 2012 (1,10 persen).
- Melalui program percepatan penanganan jalan dengan pola tahun jamak dari tahun 2010 sampai 2013 dengan panjang jalan yang ditangani sebanyak 43 ruas jalan sepanjang 322,86 km. Pada tahun 2011 Pemerintah Pusat memberikan penghargaan kepada Provinsi NTB sebagai provinsi ketiga terbaik dalam penanganan percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi.
- Meningkatnya rasio elektrifikasi melalui beberapa program berikut: 1) Program Listrik Murah dan Hemat dengan memberikan sambungan listrik gratis pada masyarakat yang sudah dilalui jaringan listrik PLN, namun belum dapat menikmati listrik, dan 2) Program Desa Mandiri Energi, dengan membangun fasilitas untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat secara mandiri bagi wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- Disusunnya Dokumen Rencana Aksi Energi Terbarukan NTB 2010-2025 yang menjadi acuan dalam pengembangan energi terbarukan di Provinsi NTB.
- Penghargaan Anugerah Energi Prabawa tahun 2013 dalam melakukan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi melalui kebijakan/regulasi yang menghasilkan produk fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru.

3.5 Strategi untuk peningkatan akses pangan

Mengingat ketergantungan masyarakat terhadap pasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizinya, maka meningkatkan kemudahan akses dan menjaga daya beli rumah tangga merupakan strategi utama untuk meningkatkan akses pangan dan mencapai ketahanan pangan dan gizi pada umumnya. Meningkatkan daya beli merupakan program multi sektor (*multi-faceted*). Mempertahankan harga pangan yang rendah dan stabil serta pengendalian inflasi, khususnya inflasi bahan pangan strategis, merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.

Meningkatkan penghasilan dan diversifikasi mata pencaharian merupakan faktor yang juga penting untuk meningkatkan daya beli rumah tangga miskin dan rentan pangan. Program penanggulangan atau pengentasan kemiskinan memiliki target kunci untuk mencapai tujuan ini. Penguatan sektor pertanian dengan meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dapat menjadi strategi dalam penanggulangan kemiskinan mengingat sebagian besar penduduk miskin dan penduduk yang rentan terhadap kemiskinan masih mengandalkan sumber penghidupan pada sektor pertanian

dan besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian NTB. Hal ini merupakan program yang kompleks yang membutuhkan strategi investasi komprehensif, termasuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur seperti jalan pedesaan dan pasar untuk meningkatkan integrasi wilayah dan mendorong peningkatan partisipasi sektor swasta dalam pengolahan hasil pertanian, riset dan penyuluhan.

Perluasan usaha *off farm* (jasa perdagangan, pengolahan hasil/industri) yang dapat memberikan peluang peningkatan pendapatan penduduk pedesaan juga perlu ditingkatkan. Misalnya penciptaan lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian seperti sektor pariwisata mengingat posisi geografis NTB yang relatif dekat dengan Provinsi Bali dan memiliki beberapa obyek wisata yang apabila dikemas dengan baik akan dapat menarik banyak kunjungan wisata. Strategi ini akan dapat mengurangi ketergantungan penghidupan masyarakat pada sektor pertanian sekaligus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi lokal yang dimiliki. Namun hal ini perlu dukungan sumberdaya manusia, investasi dan infrastruktur yang memadai, baik bandara, pelabuhan, jalan raya, serta jadwal penerbangan dan pelayaran yang memadai.

Mengacu pada dokumen RAD-PG Provinsi NTB 2011-2015, telah disusun beberapa kegiatan untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam sebagai berikut: 1) pengembangan ketersediaan pangan; 2) pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan; 3) pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar; 4) pengelolaan produksi tanaman padi dan palawija; 5) peningkatan produksi tanaman buah; 6) peningkatan produksi tanaman sayur; 7) peningkatan produksi tanaman obat; 8) peningkatan produksi peternakan; 9) peningkatan produksi perkebunan; dan 10) pembinaan dan pengembangan jaringan usaha dan pemasaran hasil perikanan.

Strategi untuk meningkatkan akses pangan yang lebih detail disusun sebagai berikut (DKP NTB, 2010):

1. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan daya beli pangan beragam dan bergizi seimbang.
2. Peningkatan kelancaran distribusi dan akses pangan melalui:
 - Peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur distribusi.
 - Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pascapanen.
 - Pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan membuka daerah yang terisolir.
 - Pengembangan sistem informasi pasar.
 - Penguatan lembaga pemasaran daerah.
 - Pengurangan hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi.
 - Pencegahan kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulasi.
 - Pemberian bantuan pangan pada kelompok masyarakat miskin dan yang terkena bencana secara tepat sasaran, waktu dan produk.
3. Penjaminan stabilitas harga melalui:
 - Pemberlakuan harga pembelian pemerintah pada komoditas pangan strategis.

- Perlindungan harga domestik dari pengaruh harga dunia melalui kebijakan tarif, impor, kuota impor dan atau pajak ekspor, kuota eksport, subsidi produsen pada komoditas pangan strategis.
 - Pengembangan buffer stock management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis.
 - Pencegahan impor dan ekspor ilegal komoditas pangan.
 - Peningkatan dana talangan pemerintah (provinsi, kabupaten/kota) dalam menstabilkan harga komoditas strategis.
 - Peningkatan peranan lembaga pembeli gabah dan lembaga usaha ekonomi pedesaan.
 - Pengembangan sistem tunda jual.
 - Pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga dan stock minimal bulanan.
4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan miskin dan mengembangkan pangan bersubsidi bagi kelompok khusus yang membutuhkan terutama anak-anak dan ibu hamil yang kurang gizi.

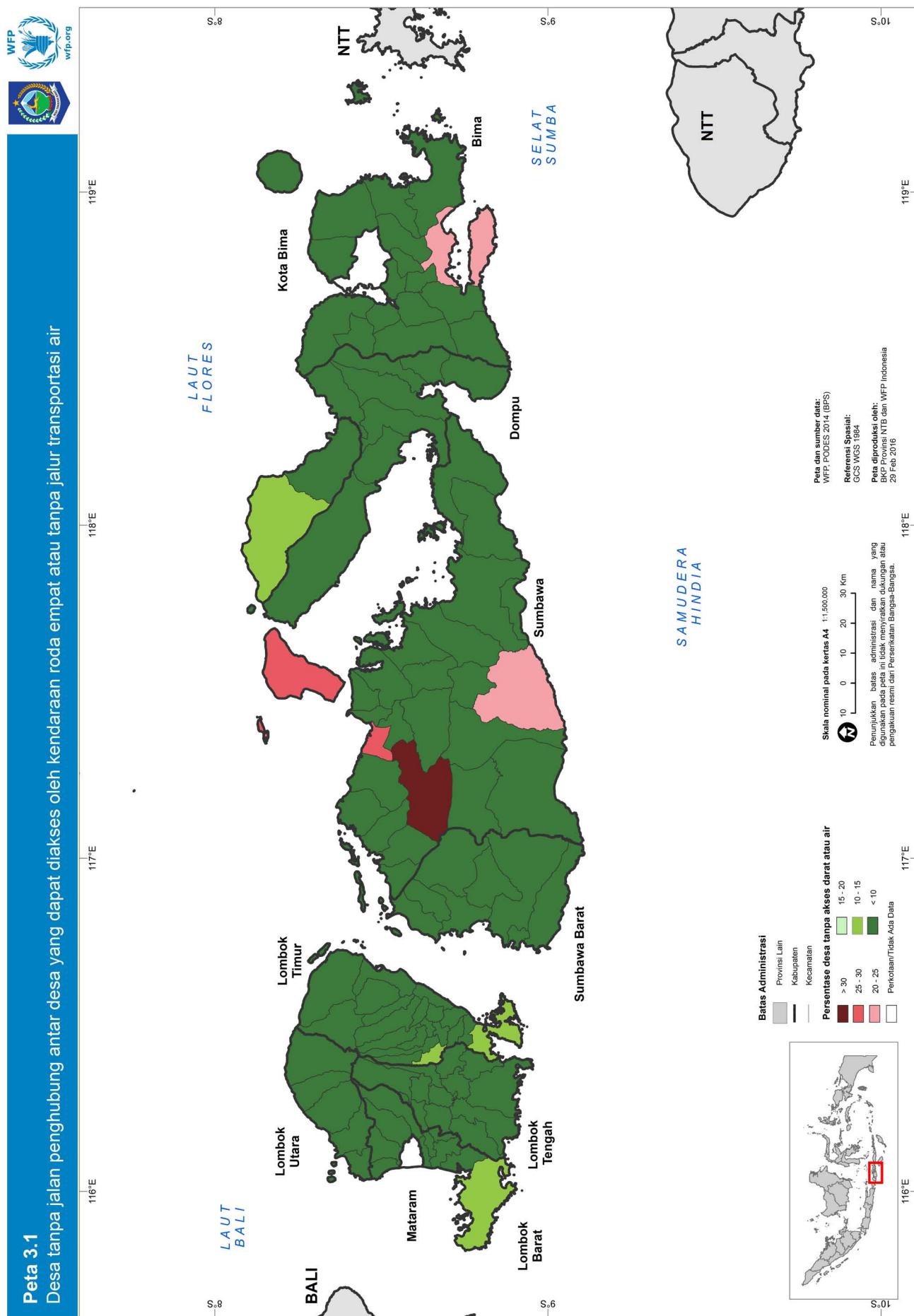
Strategi penurunan angka kemiskinan NTB di dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 didasarkan pada analisis isu-isu strategis terkait kemiskinan meliputi:

- Menopang sektor industri olahan dengan pengembangan keterampilan, bantuan modal dan pemasaran sehingga dapat bersaing dengan daerah lain dan mempunyai nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat.
- Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP).
- Mengembangkan produk olahan lokal dengan meningkatkan teknologi processing dan strategi pemasaran yang baik untuk mengubah image pangan inferior menjadi pangan normal bahkan superior.
- Memperbaiki mekanisme penyaluran modal bagi pelaku UMKM termasuk meningkatkan akses informasi permodalan, SDM, birokrasi dan manajemen UKM untuk menjamin penyaluran modal tepat sasaran.
- Meningkatkan database industri kecil dan menengah agar tersedia di semua kabupaten/kota.
- Mengembangkan potensi peternakan NTB sebagai salah satu daerah produsen sapi nasional dan mendukung pencapaian NTB sebagai daerah swasembada daging.
- Menyeimbangkan jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja melalui pembukaan lapangan kerja baru.
- Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah melalui pengolahan hasil. Hal ini memerlukan dukungan investasi dan teknologi pengolahan modern.
- Pemerataan pembangunan infrastruktur dan utilitas antar wilayah pulau, termasuk layanan telekomunikasi, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.
- Mempersempit ketimpangan pembangunan antar wilayah, disparitas angka kemiskinan, ketimpangan pelayanan sosial dasar yang tersedia seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih.

DAFTAR PUSTAKA

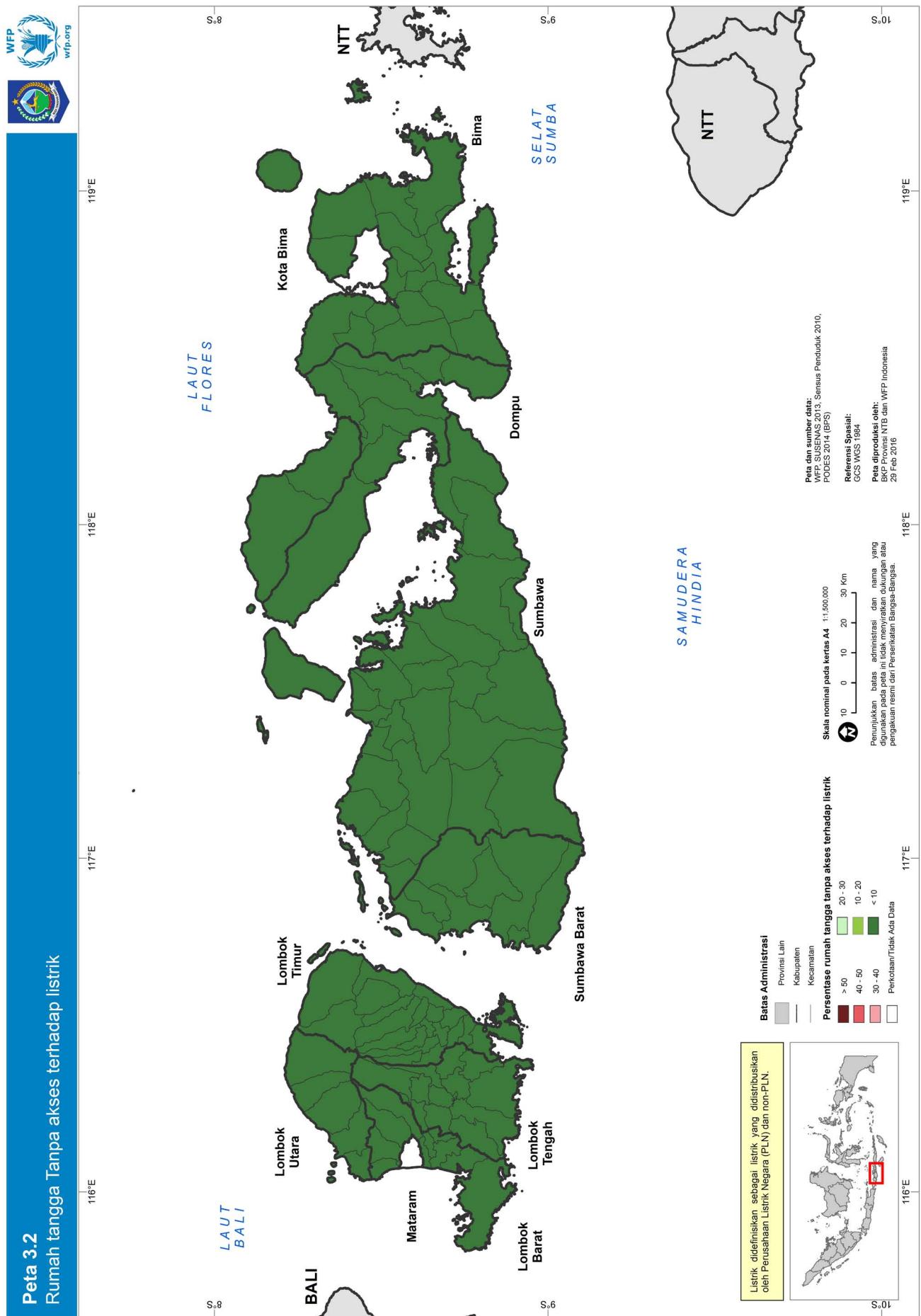
- Asian Development Bank. 2012. *Indikator Kunci untuk Asia dan Pasifik, 2012*. Manila.
- Baldi, G., Martini, E., Catharina, M. et al. 2013. Alat Cost of the Diet (CoD): *Hasil pertama dari Indonesia dan aplikasi untuk diskusi kebijakan tentang ketahanan pangan dan gizi*. Jakarta.
- Bappeda Provinsi NTB. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB 2013-2018*. Mataram.
- Bappeda Provinsi NTB. 2014. *Perkembangan Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2014*. Mataram.
- BKP Provinsi NTB 2015. *LAKIP BKP Provinsi NTB 2014*. Mataram.
- BPS. 2006, 2012, 2013a dan 2014. *Statistik Indonesia*. Jakarta.
- BPS NTB. 2013. *Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap)*. Mataram.
- BPS. 2014. *Survey Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) 2013*. Jakarta.
- BPS NTB. 2015a. *Berita Resmi Statistik No.36/05/52/Th. IX, 5 Mei 2015*. Mataram.
- BPS NTB. 2015b. *Berita Resmi Statistik No. 05 /01/52/TH.X, 4 Januari 2016*. Mataram.
- BPS NTB. 2015c. *Statistik Daerah Provinsi NTB Tahun 2015*. Mataram.
- BAPPENAS/UNDP. 2007. *Laporan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007*. Jakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan & World Food Programme (WFP). 2005. *Peta Kerawanan Pangan Indonesia (FIA) 2005*. Jakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan & World Food Programme (WFP). 2009. *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (FSVA) 2009*. Jakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan & World Food Programme (WFP). 2010. *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (FSVA) NTB 2010*. Mataram.
- Dewan Ketahanan Pangan Provinsi NTB & Pemerintah Provinsi NTB. 2010. *NTB Tahan Pangan 2015*. Mataram.
- Dinas PU Provinsi NTB. 2014. *Berita Advetorial Pekerjaan Umum Desember 2014*. Mataram.
- Food and Agriculture Organization (FAO) & United Nations Development Programme (UNDP). 2009. *Combating Hunger - A Seven Point Agenda*. Colombo, Sri Lanka, UNDP Regional Centre in Colombo and Bangkok, Thailand, FAO Regional Office for Asia and the Pacific.
- Kementerian Keuangan. 2015a. *Anggaran Infrastruktur 2010-2015*. Jakarta. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-seputar-list.asp?apbn=infra>.
- Kementerian Keuangan. 2015b. *Anggaran Kemiskinan 2010-2015*. Jakarta. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-seputar-list.asp?apbn=miskin>.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2007a. *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RANPG) 2006 – 2010*. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2007b. *Strategi Pembangunan Nasional 2005-2025*. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta.
- OECD. 2012. *OECD Review of Agricultural Policies: Indonesia 2012*. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
- Pemerintah Provinsi NTB. 2015. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat Akhir Tahun Anggaran 2014*. Mataram.
- SMERU Research Institute. 2014. *Strategic Review of Food and Nutrition Security in Indonesia page 11*. Jakarta.
- WFP. 2009. *Emergency Food Security Assessment Handbook, 2nd edition*. Rome.
- World Bank. 2013b. *Continuing Adjustment. Indonesia Economic Quarterly October 2013*. Jakarta.
- World Economic Forum. 2013. *The Global Competitiveness Report 2012–2013*. Genewa.

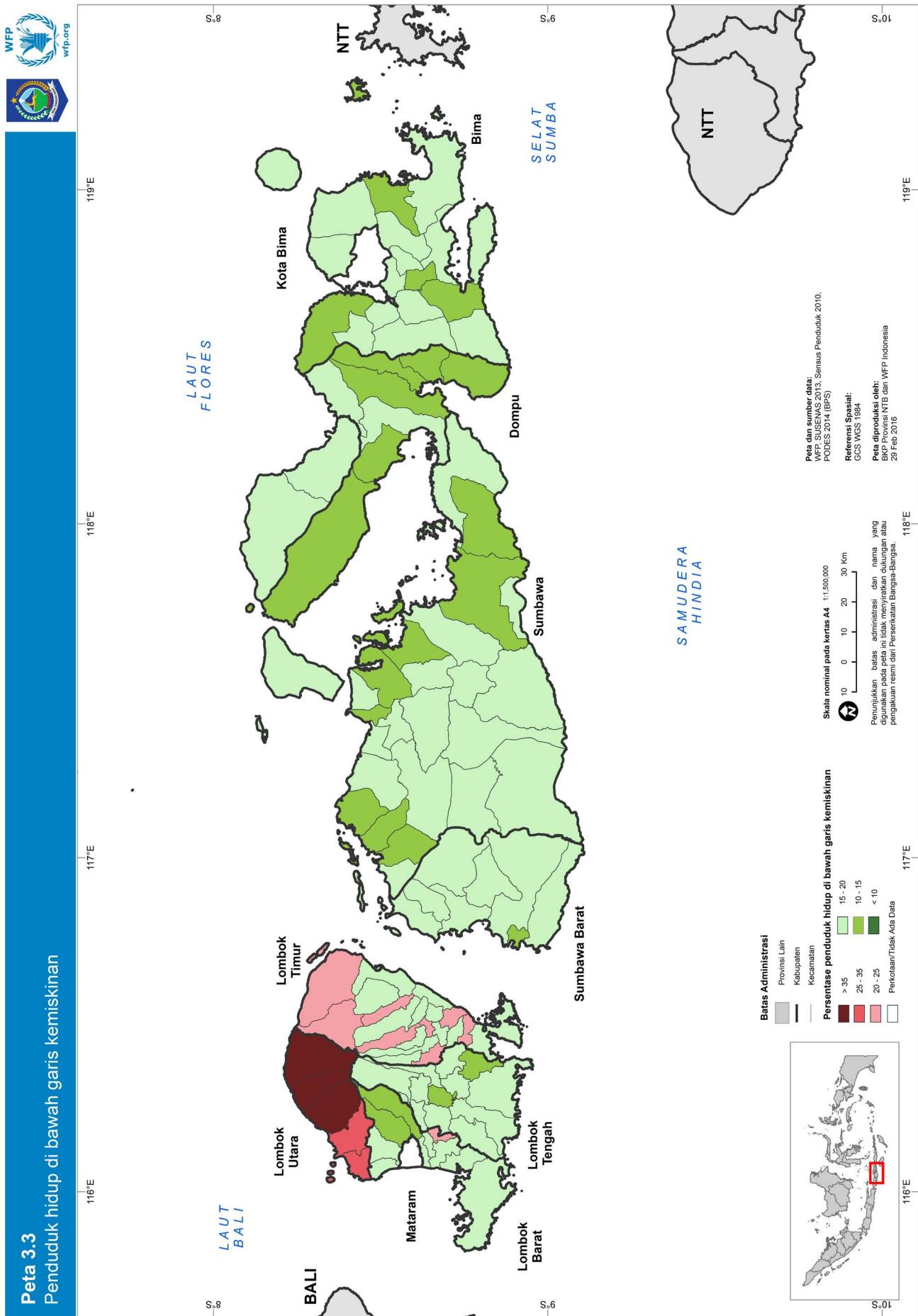


Peta 3.1 Desa tanpa jalan penghubung antar desa yang dapat diakses oleh kendaraan roda empat atau tanpa jalur transportasi air

Peta 3.2
Rumah tangga Tanpa akses terhadap listrik



Peta 3.3
Penduduk hidup di bawah garis kemiskinan



BAB 4

Pemanfaatan Pangan



Pilar ketiga dari ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: i) pemanfaatan pangan yang bisa diakses oleh rumah tangga; dan ii) kemampuan individu untuk menyerap zat gizi – pemanfaatan makanan secara efisien oleh tubuh.

Aspek pemanfaatan pangan tergantung pada: i) fasilitas penyimpanan dan pengolahan makanan; ii) pengetahuan dan praktek yang berhubungan dengan persiapan makanan, pemberian makanan untuk balita dan anggota keluarga lainnya - termasuk yang sedang sakit atau sudah tua - yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu atau pengasuh serta adat/kepercayaan; iii) distribusi makanan dalam anggota keluarga; dan iv) kondisi kesehatan masing-masing individu yang mungkin menurun karena penyakit, kebersihan, air dan sanitasi yang buruk serta kurangnya akses ke fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Bab ini terdiri dari empat bagian. Pada bagian pertama tentang konsumsi pangan, menganalisa data tingkat provinsi tentang angka kecukupan energi dari berbagai kelompok makanan, selanjutnya menganalisa tentang konsumsi penduduk per kabupaten dan per kelompok pengeluaran berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Dua bagian selanjutnya menjelaskan tentang akses ke fasilitas kesehatan dan air bersih dan layak minum, pada tingkat kabupaten lalu dilanjutkan dengan 105 kecamatan yang dianalisa. Indikator-indikator ini dipilih karena pengaruhnya terhadap pemanfaatan zat-zat gizi oleh tubuh yang akhirnya berdampak pada status kesehatan dan gizi individu serta berdasarkan ketersediaan data. Bagian terakhir menjelaskan angka perempuan buta huruf, dimana telah diketahui secara umum bahwa pendidikan ibu berperan dalam memperbaiki pola makan dan gizi rumah tangga khususnya bayi dan anak kecil.

4.1 Konsumsi pangan

Di Provinsi NTB, pada tahun 2014 rata-rata asupan energi harian adalah sebesar 2.078 kkal/kapita/hari, meningkat dari sebesar 2.009 kkal/kapita/hari pada tahun 2010. Konsumsi kalori ini lebih tinggi dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) Nasional yang direkomendasikan yaitu sebesar 2.000 kkal/kapita/hari dan rata-rata konsumsi kalori nasional yaitu sebesar 1.868,7 kkal/kapita/hari (BPS, 2015). Provinsi NTB juga mengalami peningkatan Angka Kecukupan Energi (AKE), yaitu dari 100,5 persen pada tahun 2010 menjadi 103,9 persen pada tahun 2014. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat NTB termasuk dalam kategori normal yaitu berada pada kisaran angka 90-119 persen.

Sedangkan untuk konsumsi protein pada tahun 2014 sebesar 64,3 gram/kapita/hari, meningkat dari tahun 2010 sebesar 59,3 gram/kapita/hari (BKP NTB, 2015). Capaian ini menempatkan NTB sebagai salah satu dari enam provinsi di Indonesia bersama Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DIY, Bali dan Kalimantan Selatan yang telah memenuhi Angka Kecukupan Protein (AKP) yang dianjurkan yaitu sebesar 57 gram.

Perkembangan konsumsi energi dan protein masyarakat NTB selama periode 2010-2014 menunjukkan adanya peningkatan yaitu berturut-turut sebesar 0,4 persen dan 2,3 persen per tahun. Tetapi perkiraan asupan kalori dan protein ini belum memasukkan nilai gizi dari pangan yang diperoleh dari alam terbuka (hutan/buruan). Pada daerah-daerah dimana pangan alami merupakan pangan lokal yang penting, asupan protein dan kalori dari pangan lokal tersebut mungkin saja terabaikan atau tidak terhitung.

Akan tetapi, jika dilihat dari perbandingan pencapaian konsumsi pangan aktual tahun 2013 dan 2014 terhadap standar AKG yang direkomendasikan menunjukkan bahwa konsumsi kelompok padi-padian (beras) sebagai sumber energi masih dominan (Tabel 4.1). Perkembangan konsumsi beras masyarakat NTB tahun 2010 - 2014 menunjukkan penurunan, rata-rata penurunan sebesar 0,46 kg/kapita/tahun, tetapi masih berada dibawah target rata-rata penurunan konsumsi beras nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 1,5 kg/kapita/tahun. Sedangkan pada tahun 2014 konsumsi beras masyarakat NTB mencapai 117,5 kg/kapita/hari, melampaui konsumsi beras ideal (100,3 kg/kapita/hari). Demikian juga persentase kecukupan energi yang lebih tinggi dari standar pola konsumsi pangan ideal. Hal ini mungkin disebabkan oleh pola makan dan kondisi sosial budaya masyarakat yang masih bergantung pada beras sebagai sumber energi utama yang didukung oleh produksi dan ketersediaan beras yang cukup tinggi.

Lain halnya dengan konsumsi 6 kelompok bahan pangan lainnya (umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula), baik dari aspek kuantitas, kualitas dan tingkat keragaman konsumsinya pada tahun 2014 relatif masih rendah dibandingkan dengan standar AKG yang direkomendasikan. Konsumsi umbi-umbian baru mencapai 19,0 gram/kapita/hari, dimana kontribusi ubi kayu adalah yang paling tinggi yaitu sebesar 13,3 gram/kapita/hari. Konsumsi kelompok pangan hewani (ikan, telur, daging unggas, daging ruminansia dan susu) sebesar 118 gram/kapita/hari, masih lebih rendah dari standar konsumsi ideal (150 gram/kapita/hari). Konsumsi kelompok sayur dan buah secara kuantitas menunjukkan adanya peningkatan, namun dari segi kualitas sayur yang banyak dikonsumsi mengandung energi, protein dan karbohidrat yang rendah (golongan A). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar protein yang dikonsumsi masyarakat masih berasal dari pangan nabati yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan pangan hewani. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat (BKP NTB, 2015).

Rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan akses masyarakat untuk memperoleh bahan pangan menjadi menurun sehingga pola konsumsi masyarakat cenderung tidak beragam.

Melihat situasi konsumsi pangan masyarakat NTB tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencapai keragaman konsumsi pangan yang optimal. Kelompok pangan yang telah melampaui AKG (kelompok serealia) perlu dikurangi secara bertahap sebaliknya untuk kelompok pangan diluar serealia perlu ditingkatkan agar mencapai standar keseimbangan dan keragaman pangan yang ideal. Melalui program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif bahan pangan khususnya sumber karbohidrat dapat mengurangi permintaan terhadap beras dan meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui asupan pangan yang lebih beranekaragam. Kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan yang Beragam, Bergizi seimbang dan Aman (B2SA) untuk mendapatkan derajat kesehatan yang makin baik di masa mendatang juga perlu ditingkatkan.

Tabel 4.1: Perbandingan AKG dengan tingkat konsumsi energi, 2013 - 2014

No	Kelompok Pangan	AKG 2.000 Ideal Kkal	Tahun 2013			Tahun 2014		
			Aktual NTB	Pembandingan %	+/-	Aktual NTB	Pembandingan %	+/-
1	Padi-padian	1.000	1.383	138,30	383,00	1.414	141,40	414,00
2	Umbi-umbian	120	27,9	23,25	(92,10)	24	20,00	(96,00)
3	Pangan Hewani	240	157,5	65,63	(82,50)	153,5	63,96	(86,50)
4	Minyak dan Lemak	200	165,8	82,90	(34,20)	189,7	94,85	(10,30)
5	Buah/Biji Berminyak	60	21,4	35,67	(38,60)	25,8	43,00	(34,20)
6	Kacang-kacangan	100	78,4	78,40	(21,60)	77,7	77,70	(22,30)
7	Gula	100	53,1	53,10	(46,90)	62,7	62,70	(37,30)
8	Sayur dan Buah	120	98,5	82,08	(21,50)	102,6	85,50	(17,40)
9	Lain-lain	60	60,7	101,17	0,70	28,8	48,00	(31,20)
NTB		2.000	2.046	102,3	46,00	2.078	103,9	78,00

Sumber: BKP NTB, 2013 & 2014

Tingkat kerawanan pangan suatu wilayah juga dapat diketahui dari tingkat kecukupan gizi masyarakatnya yang diukur dari pemenuhan AKG. Angka kecukupan konsumsi kalori penduduk Indonesia per kapita per hari berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (WNPG) 2004 adalah 2000 kkal. Untuk mempertimbangkan penduduk yang tidak memenuhi standar konsumsi kilo kalori yang ditargetkan, maka dilakukan analisis dengan membagi menjadi tiga kelompok yaitu persentase penduduk yang memiliki tingkat konsumsi lebih dari 1.800 kkal/kapita/hari (mencapai 90 persen dari standar minimal yang ditargetkan), persentase konsumsi kalori penduduk pada tingkat sedang yaitu 1.400-1.800 kkal/kapita/hari (70-90 persen dari standar minimal yang ditargetkan) dan persentase konsumsi kalori penduduk pada tingkat defisit yaitu kurang dari 1.400 kkal/kapita/hari (kurang dari 70 persen dari standar minimal yang ditargetkan). Persentase rawan pangan AKG suatu daerah dihitung dengan menjumlahkan penduduk dengan konsumsi kalori kurang dari 1.400 kkal (70% AKG) perkapita dibagi dengan jumlah penduduk pada golongan pengeluaran tertentu. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2013, hanya 63,70 persen penduduk NTB yang memiliki tingkat konsumsi ≥ 90 persen AKG, 27,03 persen untuk kategori 70 - 90 persen dan masih ada 9,27 persen atau 430,5 ribu penduduk yang hanya mampu memenuhi < 70 persen AKG (< 1.400 kkal/kapita/hari). Pada tingkat kabupaten, terjadi kesenjangan yang cukup besar dimana Kabupaten Lombok Tengah dengan 82,25 persen penduduk yang memenuhi ≥ 90 persen AKG, sedangkan Kabupaten Lombok Utara hanya 45,84 persen penduduk yang memenuhi ≥ 90 persen AKG.

Tabel 4.2: Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan jumlah penduduk menurut kabupaten, 2013

No	Kabupaten / Kota	< 70% AKG		70%-<90% AKG		>= 90% AKG		Total	
		Penduduk	%	Penduduk	%	Penduduk	%	Penduduk	%
1	Lombok Barat	63.741,59	10,20	188.923,50	30,23	372.297,85	59,57	624.962,94	100,00
2	Lombok Tengah	15.090,43	1,71	141.198,09	16,04	724.261,49	82,25	880.550,00	100,00
3	Lombok Timur	60.657,62	5,38	301.450,69	26,76	764.392,69	67,86	1.126.501,00	100,00
4	Sumbawa	80.003,89	18,77	147.073,68	34,51	199.058,58	46,71	426.136,15	100,00
5	Dompu	20.880,17	9,17	62.091,33	27,27	144.698,85	63,56	227.670,36	100,00
6	Bima	82.263,55	18,20	145.478,15	32,19	224.248,93	49,61	451.990,63	100,00
7	Sumbawa Barat	11.275,95	8,99	18.435,57	14,70	95.671,61	76,30	125.383,13	100,00
8	Lombok Utara	32.081,28	15,52	79.859,47	38,64	94.743,77	45,84	206.684,52	100,00
9	Kota Mataram	45.222,15	10,63	138.388,79	32,53	241.844,06	56,84	425.455,00	100,00
10	Kota Bima	19.356,77	12,77	33.146,86	21,86	99.112,68	65,37	151.616,30	100,00

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Indonesia, 2014

Tabel 4.3: Jumlah dan persentase penduduk menurut golongan pengeluaran dan kriteria AKG, 2013

Golongan Pengeluaran (Rupiah/bulan)	< 70% AKG		70%-<90% AKG		>= 90% AKG		Total	
	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%
kurang dari 100.000	523.459	100	0	0	0	0	523.459	0
100.000 - 149.999	18.946	73,182	6.936	26,789	7	0,027	25.889	100,00
150.000 - 199.999	115.380	54,966	82.008	39,068	12.521	5,965	209.910	100,00
200.000 - 299.999	207.805	17,435	495.380	41,562	488.700	41,002	1.191.885	100,00
300.000 - 499.999	110.532	6,538	489.550	28,957	1.090.482	64,504	1.690.564	100,00
500.000 - 749.999	32.071	3,432	154.787	16,565	747.544	80,002	934.402	100,00
750.000 - 999.999	9.139	2,002	64.698	14,175	382.577	83,822	456.414	100,00
1.000.000 dan lebih	6.660	1,341	55.270	11,133	434.483	87,524	496.413	100,00
Total	501.056	258.898	1.348.629	178.253	3.156.315	362.848	5.006.000	100,00

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Indonesia, 2014

Tabel 4.3 menunjukkan hubungan antara kemiskinan dengan asupan energi makanan dengan menggunakan data golongan pengeluaran per kapita, jumlah dan persentase penduduk di berbagai klasifikasi AKG di NTB pada tahun 2013. Berdasarkan tabel ini, terlihat bahwa rumah tangga miskin sangat tidak mungkin untuk mencapai asupan kilokalori yang cukup. Dari tabel dapat dilihat bahwa lebih dari 50 persen penduduk pada tiga golongan pengeluaran paling rendah, hanya mampu memenuhi < 70 persen dan sebaliknya, lebih dari 80 persen penduduk pada tiga golongan terbesar mampu memenuhi >= 90 AKG. Hal ini mungkin disebabkan karena kompleksitas pengukuran konsumsi kilo kalori pada survei rumah tangga. Akan tetapi, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga miskin memiliki hambatan yang signifikan dalam mencapai asupan kilo kalori yang cukup. Sehingga perlu usaha untuk memperbaikinya misalnya dengan program perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga, disamping peningkatan ketersediaan bahan pangan berkualitas (khususnya pangan hewani) yang terdistribusi merata dengan harga terjangkau oleh seluruh masyarakat. Menjaga stabilitas harga pangan dan tingkat inflasi adalah dua hal yang juga penting karena pengaruhnya yang signifikan terhadap daya beli rumah tangga berpendapatan rendah. Paritas daya beli yang terjaga menjamin kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi meskipun dalam standar minimum.

4.2 Akses terhadap fasilitas kesehatan

Pada tingkat provinsi, secara keseluruhan penyediaan fasilitas kesehatan di NTB cukup baik, walaupun kesenjangan antar wilayah masih banyak terjadi. Menurut Profil Kesehatan NTB tahun 2012, NTB memiliki 21 unit rumah sakit umum dan 157 unit puskesmas yang terdiri dari 109 puskesmas non perawatan dan 48 puskesmas perawatan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2009 yang hanya berjumlah 147 puskesmas. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk di NTB sebesar 3,4, dimana rasio tertinggi terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat dan rasio terendah terdapat di Kabupaten Lombok Timur (Pusdatin Kemenkes, 2013).

Lain halnya dengan rasio tempat tidur Rumah Sakit (RS) terhadap penduduk yang masih belum terpenuhi. Ketersediaan tempat tidur di RS di Kota Mataram sudah terpenuhi sedangkan di 9 kabupaten/kota lainnya masih mengalami kekurangan (Dinas Kesehatan NTB, 2014).

Untuk tenaga kesehatan, rasio dokter umum di NTB sebesar 13,4 per 100.000 penduduk, dimana rasio tertinggi di Kota Mataram (44,2) dan rasio terendah di Kabupaten Lombok Tengah (6,9). Rasio bidan terhadap penduduk mencapai 43 persen dan rasio perawat terhadap penduduk mencapai 75 per 100.000 penduduk (Dinas Kesehatan NTB, 2014).

Dari sisi akses terhadap fasilitas kesehatan, pada tahun 2013, seluruh desa di semua kabupaten di NTB memiliki akses ke fasilitas kesehatan terdekat dalam jangkauan kurang dari 5 km (Tabel 4.4). Kondisi ini terutama terjadi karena meningkatnya investasi pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur kesehatan. Meskipun demikian, masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di desa-desa terpencil masih mengalami kendala untuk mengakses fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas menurut jarak, transportasi maupun ekonomi. Sebagian besar puskesmas yang adajuga belum memiliki tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya yang belum merata sehingga pelayanan menjadi belum maksimal (Dinas Kesehatan NTB, 2015).

Tabel 4.4: Persentase rumah tangga dengan akses yang sangat terbatas terhadap air bersih dan persentase desa dengan akses terbatas terhadap sarana pelayanan kesehatan per kabupaten

No	Kabupaten / Kota	Fasilitas Kesehatan			Desa dengan Jarak > 5 Km dari Fasilitas Kesehatan	% RT dengan akses yang sangat terbatas ke sumber air bersih yang aman (≥ 10 m dari septic tank)
		Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu		
1	Lombok Barat	1	16	57	0,00	25,34
2	Lombok Tengah	1	25	95	0,00	23,81
3	Lombok Timur	2	29	87	0,00	25,42
4	Sumbawa	1	25	93	0,00	29,47
5	Dompu	1	9	47	0,00	20,79
6	Bima	1	20	90	0,00	18,65
7	Sumbawa Barat	1	9	27	0,00	38,42
8	Lombok Utara	1	8	27	0,00	33,45
9	Kota Mataram	1	11	17	0,00	39,66
10	Kota Bima	0	5	19	0,00	40,67
NTB		10	157	559	0,00	29,57

Sumber: *Profil Kesehatan, 2012, Dinkes NTB** Podes 2014, BPS, *** Susenas 2013, SP 2010, PODES 2014, BPS (diolah dengan teknik SAE)

4.3 Rumah tangga dengan akses terhadap air layak minum dan fasilitas sanitasi yang kurang memadai

Akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting dalam mengurangi masalah penyakit yang ditularkan oleh air (*waterborne disease*). Dengan berkurangnya penyakit, diharapkan status gizi akan mengalami perbaikan melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh. Penyakit diare merupakan salah satu penyakit berbasis lingkungan dan masih menjadi masalah besar di Provinsi NTB karena masih buruknya kondisi sanitasi dasar, lingkungan fisik maupun rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat (PHBS). Di Provinsi NTB, kemiskinan adalah salah satu penyebab rendahnya kemampuan penduduk mengakses air minum yang layak. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang sehat, rendahnya kualitas bangunan septic tank dan masih buruknya sistem pembuangan limbah juga mempengaruhi ketersedian sumber air minum.

Pada tahun 2014, masih terdapat 29,57 persen rumah tangga di Provinsi NTB dengan akses yang sangat terbatas ke sumber air bersih dan layak minum (sumur terlindung/sumur bor/mata air, air ledeng dan air hujan) dan dengan jarak lebih dari 10 m ke tempat penampungan akhir tinja (*septic tank*) (Tabel 4.4). Walaupun angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 15,92 persen (BPS, 2009), namun perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan definisi operasional yang digunakan untuk indikator rumah tangga tanpa akses ke air bersih yang terdapat dalam FSVA provinsi tahun 2015 dengan FSVA provinsi tahun 2010.

Pada tingkat kabupaten, akses terhadap air bersih terbaik terdapat di Kabupaten Bima dimana hanya 18,65 persen rumah tangganya dengan akses sangat terbatas ke sumber air bersih dan layak minum. Akses terburuk dimana setidaknya 30 persen rumah tangga memiliki akses yang sangat terbatas ke sumber air bersih dan layak minum terdapat di 4 kabupaten/kota yaitu Kota Bima (40,67 persen), Kota Mataram (39,66 persen), Kabupaten Sumbawa Barat (38,42 persen) dan Kabupaten Lombok Utara (33,45 persen).

Sedangkan pada tingkat kecamatan, sebanyak 28,57 persen atau 30 kecamatan yang tersebar di 6 kabupaten yaitu di Kabupaten Sumbawa (13 kecamatan), Sumbawa Barat (8 kecamatan), Lombok Barat dan Lombok Timur masing-masing (3 kecamatan), Lombok Utara (2 kecamatan) dan Lombok Tengah (1 kecamatan) yang masih mengalami hambatan untuk mengakses air bersih dan layak minum. Kondisi ini memerlukan perhatian dan upaya peningkatan cakupan layanan air bersih terutama investasi pada perluasan jaringan penyediaan air bersih, konservasi sumberdaya air dan penyediaan sarana dan prasarana air minum berbasis partisipasi masyarakat oleh PDAM dan pemerintah kabupaten/provinsi. Optimalisasi Kelompok Pengelola Air Minum Desa (PAMDES) dapat dijadikan sebagai salah satu potensi untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di pedesaan. Termasuk juga upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air bersih.

Rumah sehat dan jamban keluarga

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu memiliki jamban sehat, tempat pembuangan sampah, sarana air bersih, sarana pembuangan air limbah, ventilasi baik, kepadatan hunian rumah sesuai dan lantai rumah tidak terbuat dari tanah. Dalam kurun waktu lima tahun cakupan Kepala Keluarga (KK) dengan kondisi rumah sehat mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2009, KK dengan kondisi rumah sehat tercatat sebesar 61,07 persen,

dan pada tahun 2014 naik menjadi 64,74 persen (Dinas Kesehatan, 2014). Untuk mencapai target 78 persen KK pada tahun 2018, dibutuhkan program pengembangan infrastruktur sanitasi lingkungan yang lebih intensif lintas sektor yang terkait dengan program perumahan, air bersih dan sanitasi dasar/akses jamban yang merupakan kriteria minimal dari persyaratan rumah sehat, dan yang lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan budaya sehat pada tingkat rumah tangga sehingga pengadaan sanitasi dasar ini menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi.

Sedangkan cakupan jamban keluarga cukup meningkat meskipun masih dibawah target nasional (75 persen), dimana pada tahun 2009 hanya sebesar 61,53 persen, pada tahun 2014 mencapai 74,02 persen (72,32 persen jamban sehat, 1,7 persen jamban kurang sehat/tidak memenuhi syarat). Capaian ini lebih tinggi dibanding pada tahun 2013 yaitu sebesar 72,35 persen (69,27 persen jamban sehat dan 3,08 persen jamban kurang sehat). Meningkatnya cakupan jamban sehat disebabkan adanya kegiatan pemicuan setiap tahun dan pada tahun 2014 pemicuan dilaksanakan di 58 desa di 14 kecamatan di 10 kabupaten/kota. Disamping itu melalui Gerakan BASNO (Buang Air Besar Sembarangan menuju Nol), jumlah desa yang telah bebas buang air besar sembarangan pada tahun 2014 sebanyak 297 desa/kelurahan, meningkat jika dibanding tahun 2013 yang berjumlah 238 desa/kelurahan. Jumlah kecamatan yang telah mencapai BASNO juga meningkat menjadi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Wawo dan Wer, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Batulayar dan Kecamatan Sekongkang. Pencapaian ini menempatkan NTB masuk ke dalam 3 besar dengan proporsi terbanyak desa yang BASNO.

4.4 Perempuan buta huruf

Melek huruf perempuan terutama ibu dan pengasuh anak balita, diketahui menjadi faktor penentu yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan dan sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi setiap anggota keluarga. Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa di negara berkembang, tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu tentang gizi berkorelasi kuat dengan status gizi anaknya.

Salah satu indikator untuk mengukur pendidikan ibu adalah angka buta huruf. Pada tahun 2013, sebanyak 19,41 persen perempuan berusia di atas 15 tahun di Provinsi NTB diklasifikasikan sebagai buta huruf. Hal ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 27,03 persen (BPS, 2009). Tabel 4.5 menunjukkan persentase perempuan buta huruf di setiap kabupaten. Meskipun terjadi penurunan angka buta huruf di semua kabupaten, angka buta huruf tertinggi berada di Kabupaten Lombok Tengah, dimana lebih dari 30 persen perempuan berusia di atas 15 tahun yang buta huruf (31,10 persen) dan terendah di Kota Bima (6,27 persen). Pada tingkat kecamatan, sebanyak 28 dari 105 kecamatan mempunyai sedikitnya 20 persen perempuan berusia di atas 15 tahun yang buta huruf (Lampiran 1). Angka buta huruf tertinggi terdapat di Kecamatan Pujut di Kabupaten Lombok Tengah (35,28 persen) diikuti oleh Kecamatan Kayangan di Kabupaten Lombok Utara (34,05 persen).

Sejak program unggulan ABSANO (Angka Buta Aksara menuju Nol) dan ADONO (Angka Drop Out menuju Nol) dilaksanakan, kinerja sektor pendidikan NTB mengalami peningkatan. Sejumlah keberhasilan di bidang pelayanan pendidikan telah dicapai yang ditunjukkan oleh indikator angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah, angka melanjutkan sekolah dan angka melek huruf.

Tabel 4.5: Persentase perempuan buta huruf berusia diatas 15 tahun (persen), 2013

No	Kabupaten / Kota	% Perempuan Buta Huruf
1	Lombok Barat	27,19
2	Lombok Tengah	31,10
3	Lombok Timur	17,31
4	Sumbawa	10,63
5	Dompu	13,76
6	Bima	11,82
7	Sumbawa Barat	9,52
8	Lombok Utara	29,86
9	Kota Mataram	9,68
10	Kota Bima	6,27
	NTB	19,41

Sumber: SUSENAS, 2013; SP, 2010; PODES, 2014. BPS (diolah dengan teknik SAE)

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) disemua jenjang pendidikan menunjukkan peningkatan. Demikian pula dengan angka drop out dari semua jenjang pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan (Dikpora NTB, 2013). Sementara rata-rata lama sekolah di NTB mengalami peningkatan dalam periode 2009-2013. Pada tahun 2009 tercatat rata-rata lama sekolah di NTB selama 6,73 tahun naik menjadi 7,2 tahun pada 2013. Perhatian pemerintah yang cukup besar dalam memberikan bantuan operasional sekolah ditingkat dasar dan menengah dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan siswa miskin (BSM) baik dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota secara sharing telah memberikan dampak terhadap peningkatan APK dan APM pada semua jenjang pendidikan disamping adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar 9 tahun. Capaian APM sekolah menengah (SMP/MTs) dan rasio APM antara laki-laki dan perempuan di sekolah menengah merupakan 2 dari 12 indikator yang telah mengantarkan NTB untuk meraih penghargaan MDGs terbanyak tahun 2011-2013. Selain itu kegiatan sertifikasi guru juga memberikan dampak yang besar terhadap siswa, dimana guru menjemput siswa yang tidak hadir di sekolah maupun yang tidak ikut ujian. Sedangkan kontribusi bidang sosial yang mendukung program pendidikan adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang wajibkan orangtua yang memiliki anak usia sekolah wajib untuk bersekolah. Apabila anak tidak sekolah maka dana PKH akan dikurangi.

4.5 Strategi untuk peningkatan akses terhadap pemanfaatan pangan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2013-2018 menetapkan beberapa program terkait pembangunan bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi, sinkronisasi, edukasi, fasilitasi dan mobilisasi Generasi Emas 2025 yang diarahkan pada pendidikan pra nikah, kesehatan anak dan ibu melahirkan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, gizi buruk, sanitasi, air bersih layak minum, penderita gangguan jiwa, penyandang cacat, PAUD, pendidikan universal, pendidikan non formal, keaksaraan usaha mandiri dan keluarga berencana di lokasi yang teridentifikasi sebagai kantong-kantong masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Edukasi tenaga pelayanan sosial dasar yang diarahkan pada tenaga medis, tenaga pendidik dan pekerja sosial.

3. Revitalisasi dan fasilitasi sarana dan prasarana layanan sosial dasar yang diarahkan pada pendidikan dan kesehatan termasuk RSU Provinsi dan UPT sosial dan tenaga kerja.
4. Sosialisasi dan edukasi perempuan di pedesaan yang diarahkan pada PHBS.

Strategi yang terkait dengan peningkatan keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah:

1. Konsultasi, fasilitasi, advokasi dan visitasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas.
2. Edukasi dan mobilisasi petugas kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
3. Koordinasi, konsultasi dan supervisi pelayanan kesehatan.
4. Konsultasi, advokasi, fasilitasi dan visitasi penyediaan obat dan perbekalan kesehatan.
5. Sosialisasi, koordinasi dan kemitraan penyelenggaraan jaminan kesehatan.

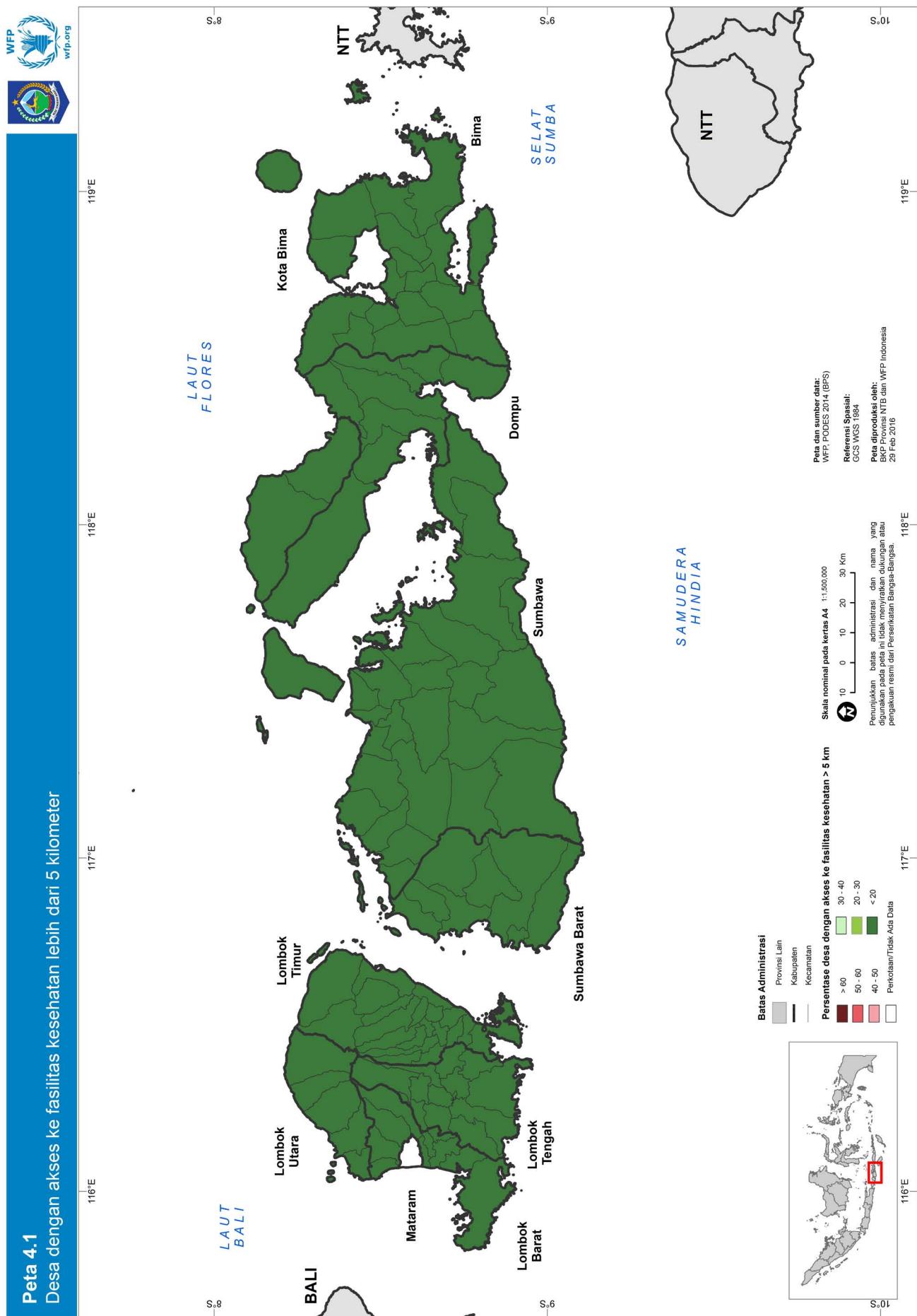
Di dalam dokumen Roadmap Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di NTB (Pemerintah Provinsi NTB, 2012) disusun strategi untuk peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal melalui:

1. Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui pengkajian berbagai teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya.
2. Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, gizi dan mutu ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi seimbang melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta.
3. Pengembangan materi dan cara ajar diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
4. Pengembangan aspek kuliner dan daya terima konsumen, melalui berbagai pendidikan gizi, penyuluhan, dan kampanye gizi untuk peningkatan citra pangan lokal, serta peningkatan pendapatan dan pendidikan umum.
5. Pengembangan program perbaikan gizi yang *cost effective*, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A.

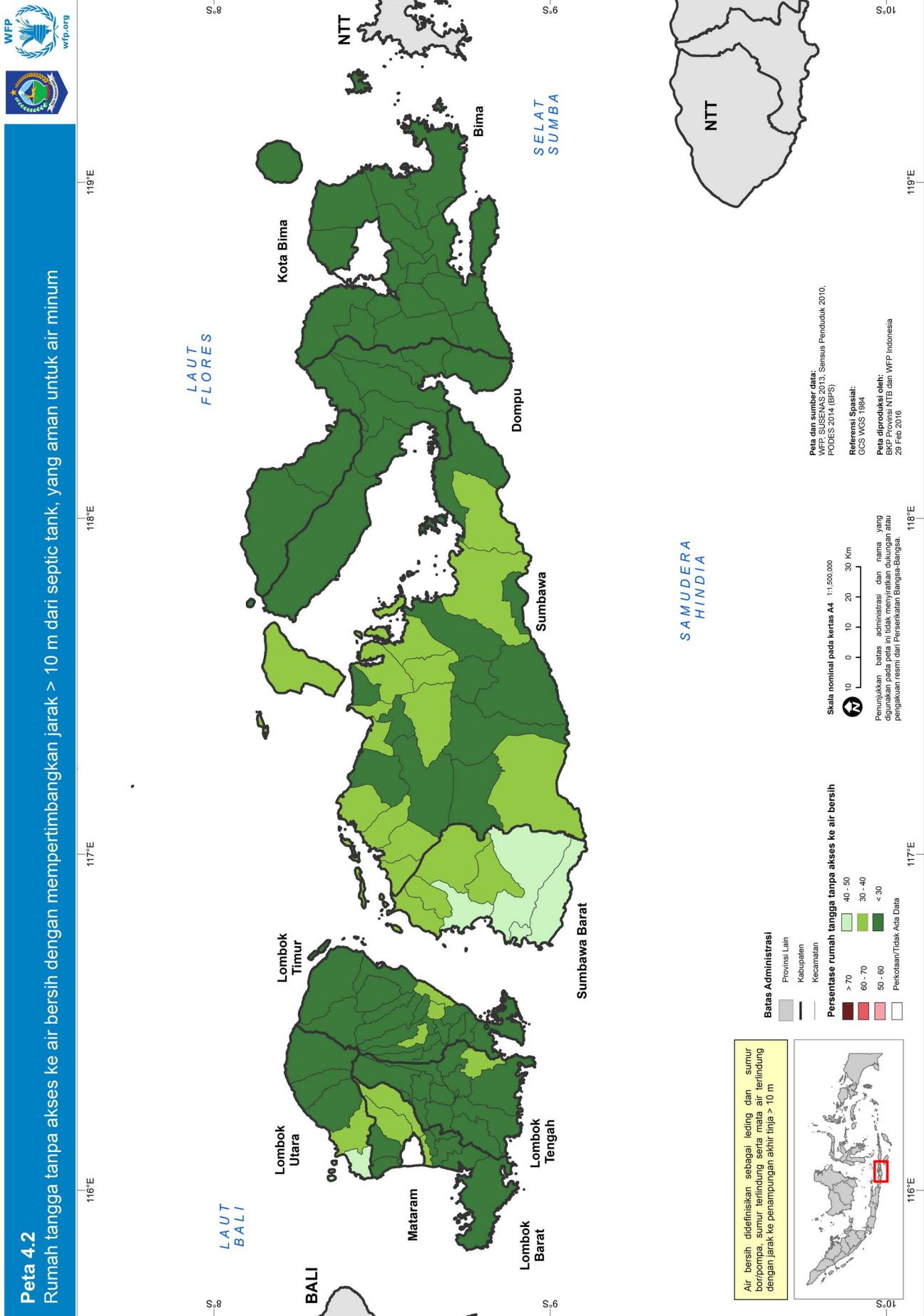
DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2012 dan 2013. *Statistik Indonesia*. Jakarta.
- BPS. 2015. *Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi September 2014*. Jakarta.
- BKP Provinsi NTB. 2015. *Analisis situasi konsumsi pangan berbasis PPH tahun 2015*. Mataram
- Dewan Ketahanan Pangan & World Food Programme. 2010. *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2009*. Jakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan & World Food Programme. 2010. *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan NTB 2010*. Mataram.
- Dinas Kesehatan Provinsi NTB. *Profil Kesehatan Provinsi NTB tahun 2012*. Mataram.
- Dinas Kesehatan Provinsi NTB. 2015. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014*. Mataram.
- Dinas Kesehatan Provinsi NTB. 2014. *Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2013-2018*. Mataram.
- Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi NTB. 2014. *LAKIP Dikpora Provinsi NTB Tahun 2013*. Mataram.
<http://bppsdm.kemkes.go.id> tanggal 1 Desember 2014
- Kementerian Kesehatan. 2013. *Profil Kesehatan Indonesia 2013*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2013. *Riset Kesehatan Dasar 2013*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2013. *Data dan Informasi Kesehatan Provinsi NTB 2013*. Jakarta
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2010. *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015 (RANPG 2011-2015)*. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS (2007). *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006-2010 (RANPG 2006-2010)*. Jakarta.
- Pemerintah Provinsi NTB. 2012. *Roadmap Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di NTB*. Mataram.
- WFP. 2009. *Emergency Food Security Assessment Handbook, Edisi ke-2*.
- WFP dan Dutch Life serta Materials Sciences Company (DSM). 2008. *Ten Minutes to Learn About Nutrition Programming*. Sight and Life Magazine Issue No. 3/2008 Supplement. Rome.
- WHO. 2007. *World Health Report*. Geneva: WHO.
- WHO. 2013. *Health Financing: Per capita total expenditure on health at average exchange rate (US\$) in 2011, updated October 2013*: http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/health_financing/atlas.html?indicator=i3&date=2011

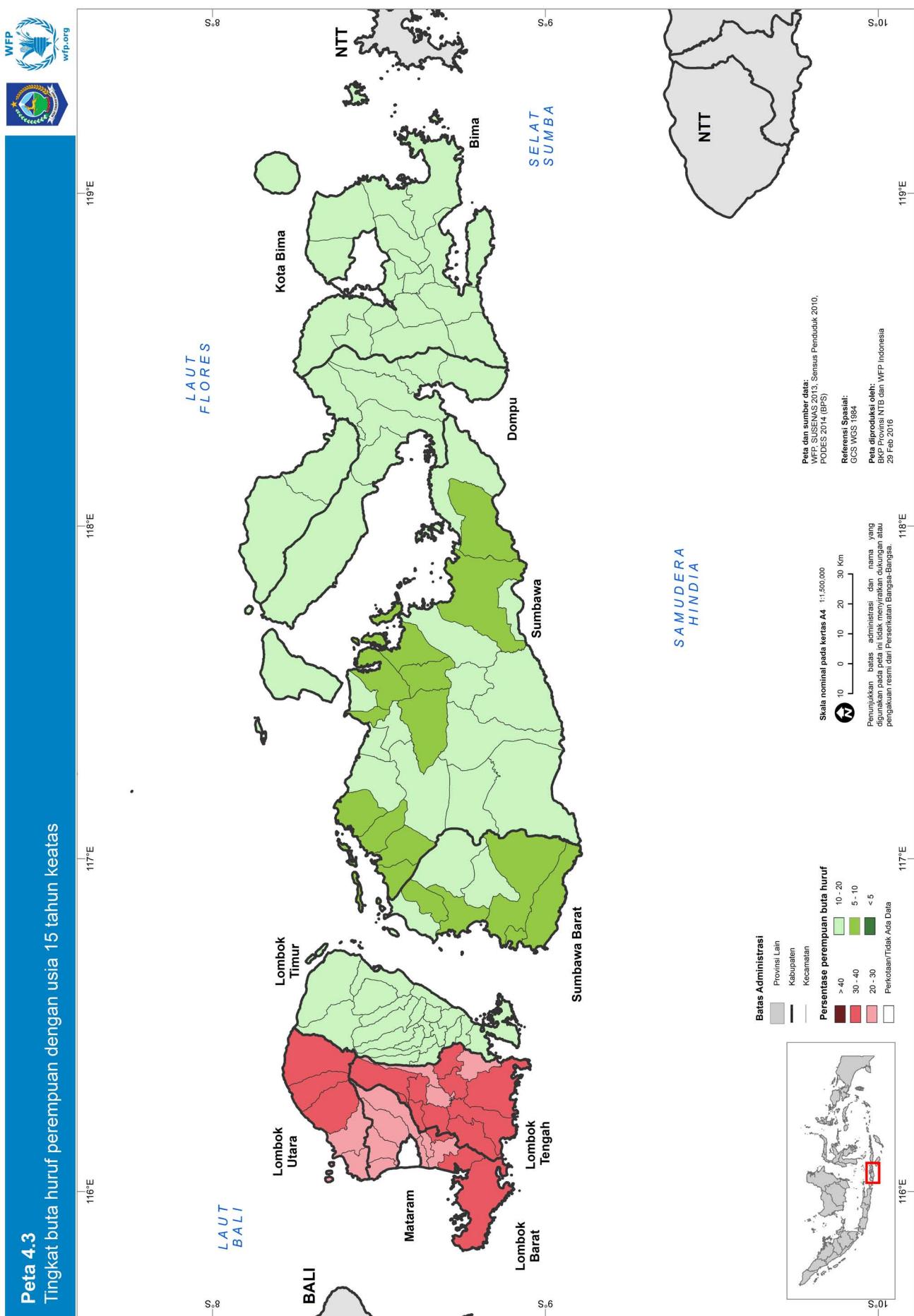
Peta 4.1
Desa dengan akses ke fasilitas kesehatan lebih dari 5 kilometer



Peta 4.2



Peta 4.3
Tingkat buta huruf perempuan dengan usia 15 tahun keatas



BAB 5

Dampak dari Status Gizi dan Kesehatan



Gizi, morbiditas (angka kesakitan) dan mortalitas (angka kematian) mencerminkan suatu permasalahan yang kompleks dari berbagai faktor termasuk ketersediaan dan akses terhadap pangan bergizi, penggunaan zat-zat gizi makanan oleh tubuh, penyakit dan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat serta status kesehatan individu. Status gizi suatu populasi sering tercermin pada status gizi anak usia di bawah lima tahun (balita) yang diukur dengan prevalensi angka *stunting* (tinggi badan menurut umur), *underweight* (berat badan menurut umur) dan *wasting* (berat badan menurut tinggi badan). Kekurangan zat gizi mikro merupakan suatu indikator penting lainnya dalam mengukur status gizi suatu populasi, tetapi sering lebih sulit untuk diukur dan dipantau.

5.1 Status gizi

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek kunci penentu status kesehatan dan gizi yang baik seperti yang dijelaskan pada kerangka konseptual ketahanan pangan dan gizi (Gambar 1.1 pada Bab 1). Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan, status kesehatan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

- Gizi kurang dan buruk atau *underweight*: rasio berat badan menurut umur -BB/U- di bawah - 2 standar deviasi dari median referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kekurangan gizi secara umum¹.

¹ http://www.who.int/childgrowth/standards/weight_for_age/en/

- Kependekan atau *stunting*: rasio tinggi badan menurut umur -TB/U- di bawah - 2 standar deviasi dari median referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara terus-menerus, dalam jangka panjang dan kronis².
- Kekurusan atau *wasting*: rasio berat badan menurut tinggi badan -BB/TB- di bawah - 2 standar deviasi dari median referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara akut atau baru terjadi³.

Kurang gizi kronis (*stunting*) berhubungan dengan pertumbuhan janin yang buruk dan pertumbuhan yang terhambat selama dua tahun pertama kehidupan (1.000 Hari Pertama Kehidupan), umumnya disebabkan oleh kombinasi asupan zat gizi yang kurang, keterpaparan yang tinggi terhadap penyakit dan praktek pola asuh yang kurang baik. Disamping meningkatnya resiko kematian anak, kurang gizi kronis dapat menyebabkan kegagalan pertumbuhan yang tidak dapat diperbaiki termasuk terhambatnya perkembangan mental dan fisik, yang dapat mempengaruhi kehadiran dan prestasi anak di sekolah, kapasitas untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi saat dewasa, sehingga berpotensi untuk meningkatkan kemiskinan. Selain itu, anak kurang gizi yang mengalami peningkatan berat badan secara cepat pada akhir masa kanak-kanak dan remaja lebih cenderung untuk menderita penyakit kronis yang berhubungan dengan masalah gizi (obesitas, diabetes, hipertensi dan penyakit jantung). Penemuan yang dipublikasikan oleh The Lancet (Black et al., 2013) juga mendukung hubungan antara *stunting*, obesitas dan penyakit kronis dalam siklus kehidupan. Kerusakan jangka panjang yang disebabkan oleh kekurangan gizi pada awal masa kanak-kanak juga termasuk orang dewasa dengan tubuh lebih pendek dan khusus untuk wanita pendek akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, sehingga permasalahan kurang gizi akan terus berulang pada generasi berikutnya.

WHO mengklasifikasikan masalah gizi sebagai masalah kesehatan masyarakat di suatu negara, provinsi atau kabupaten berdasarkan prevalensi *underweight*, *stunting* dan *wasting* seperti pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1: Klasifikasi WHO tentang masalah kesehatan masyarakat untuk prevalensi kurang gizi (klasifikasi *wasting* ada di bawah kolom *wasting*)

Klasifikasi	<i>Underweight</i>	<i>Stunting</i>	<i>Wasting</i>
Rendah	< 10%	< 20%	< 5% (Baik)
Sedang	10 - 19%	20 - 29%	5 - 9% (Kurang)
Tinggi	20 - 29%	30 - 39%	10 - 14% (Buruk)
Sangat Tinggi	≥ 30%	≥ 40%	≥ 15% (Sangat Buruk)

Sumber: WHO, 2000

Pada FSVA NTB 2010, data *underweight* dan *stunting* tersedia, namun disepakati tetap menggunakan data *underweight* pada indikator komposit. Hal ini untuk memfasilitasi perbandingan dengan program-program pemerintah serta untuk memantau pengurangan angka *stunting*, dimana secara global *stunting* dipertimbangkan sebagai satu-satunya masalah gizi terpenting di Indonesia dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut data Pemantauan Status Gizi (PSG) NTB, prevalensi balita *stunting* pada tahun 2014 adalah sebesar 36,43 persen, lebih rendah dari capaian NTB pada tahun 2013 (37,23 persen). Secara

² http://www.who.int/childgrowth/standards/height_for_age/en/

³ http://www.who.int/childgrowth/standards/weight_for_height/en/

keseluruhan dari tahun 2013-2014, terjadi penurunan prevalensi *stunting* sebesar 0,8 persen. Walaupun NTB sudah mencapai target penurunan prevalensi *stunting* yang ditetapkan provinsi namun belum mencapai target yang ditetapkan secara nasional dalam RPJMN (32 persen). Artinya masih diperlukan kerja keras dan perhatian khusus dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Pada tingkat kabupaten (Tabel 5.2), menurut klasifikasi WHO, dari 10 kabupaten/kota, 2 kabupaten memiliki prevalensi *stunting* pada tingkat sedang (20-29 persen), 6 kabupaten memiliki prevalensi *stunting* pada tingkat tinggi (30-39 persen), dan 2 kabupaten lainnya memiliki prevalensi *stunting* pada tingkat sangat tinggi (>40 persen). Kabupaten yang memiliki prevalensi *stunting* sangat tinggi yaitu Kabupaten Lombok Utara (43,43 persen) dan Bima (41,19 persen). Sedangkan Kota Mataram memiliki angka prevalensi *stunting* terendah yaitu sebesar 29,31 persen.

Pada tingkat kecamatan, dari 105 kecamatan yang dianalisis di FSVA, terdapat 5 kecamatan (4,8 persen) di NTB yang termasuk dalam klasifikasi rendah, 12 kecamatan (11,4 persen) dalam klasifikasi sedang, 42 kecamatan (40 persen) dalam klasifikasi tinggi dan 46 kecamatan (43,80 persen) dalam klasifikasi sangat sangat tinggi. Jumlah kecamatan yang berada dalam klasifikasi rendah dan klasifikasi sangat sangat tinggi berkurang dibandingkan tahun 2013 masing-masing sebanyak 6 kecamatan dan 5 kecamatan. Sedangkan jumlah kecamatan yang masuk dalam klasifikasi sedang dan klasifikasi tinggi bertambah masing-masing sebanyak 1 kecamatan dan 9 kecamatan.

Prevalensi *underweight* pada tingkat kabupaten mengalami peningkatan dari 18,27 persen (2013) menjadi 21,61 persen (2014). Pada tingkat kecamatan terdapat 5 kecamatan (4,31 persen) yang termasuk dalam klasifikasi rendah (<10 persen), 34 kecamatan (29,31 persen) dalam klasifikasi sedang, 69 kecamatan (59,48 persen) dalam klasifikasi tinggi (20-29 persen) dan 8 kecamatan (6,9 persen) dalam klasifikasi sangat sangat tinggi (≥ 30 persen). Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, terjadi peningkatan pada kecamatan dalam klasifikasi buruk dan sangat buruk.

Untuk indikator status gizi anak balita kurus (*wasting*), pada tahun 2014 sebanyak 11,37 persen balita yang mengalami *wasting* (kurus) atau naik sebesar 1,04 persen dari tahun 2013, dan masih menunjukkan masalah kesehatan masyarakat pada tingkat buruk (menurut klasifikasi WHO). Gizi kurang akut pada tingkat ini berkaitan dengan angka kematian anak dan umumnya menandakan adanya kejadian darurat. Lima kabupaten termasuk Kota Mataram memiliki prevalensi *wasting* kurang (5-9 persen), dua kabupaten/kota memiliki prevalensi buruk (10-14 persen), dan dua kabupaten dengan prevalensi sangat buruk ($>=15$ persen). Perhatian serius perlu diberikan pada dua kabupaten dengan prevalensi *wasting* sangat buruk yaitu Kabupaten Bima (16,21 persen) dan Dompu (17,68 persen) mengingat tingginya resiko kematian yang akan dialami oleh anak. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah tingginya prevalensi *stunting* dan *wasting* umumnya diikuti dengan tingginya tingkat penyakit infeksi diantara anak balita.

Kerawanan gizi yang ditunjukkan oleh 3 parameter (*underweight*, *stunting* dan *wasting*) diatas menggambarkan bahwa persoalan gizi di NTB bersifat kronis dan akut, sekaligus mengisyaratkan pentingnya perbaikan gizi ibu hamil dan neonatal di semua kabupaten/kota di NTB. Karena itu perlu ada upaya yang lebih terpadu untuk mengurangi permasalahan ini, baik secara lintas sektoral maupun dengan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 5.2: Prevalensi *underweight* dan *stunting* menurut kabupaten, 2014

No	Kabupaten / Kota	Status Gizi	
		<i>Underweight</i>	<i>Stunting</i>
		Berat badan dibawah standard	Tinggi badan dibawah standard
1	Lombok Barat	21,45	37,85
2	Lombok Tengah	20,46	36,8
3	Lombok Timur	19,56	37,52
4	Bima	29,07	41,19
5	Dompu	25,06	38,04
6	Sumbawa	18,74	34,88
7	Sumbawa Barat	17,24	26,43
8	Lombok Utara	23,44	43,43
9	Kota Mataram	18,69	29,31
10	Kota Bima	24,03	38,48
	NTB	21,61	36,43

Sumber: PSG Dinas Kesehatan NTB, 2014

Kekurangan zat gizi mikro penting (yodium, vitamin A, zinc dan zat besi) yang juga dikenal dengan ‘kelaparan tersembunyi’ dapat merusak perkembangan fisik dan mental. Kekurangan zat gizi mikro ini disebabkan jeleknya kualitas pola makan dan/atau ketidakmampuan individu secara fisik untuk menyerap zat-zat gizi. Berdasarkan RISKESDAS (2013), terdapat 22,9 persen rumah tangga yang tidak memiliki cukup garam beryodium untuk dikonsumsi. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2007 yang tercatat sebesar 37,7 persen. Tetapi kesenjangan antar provinsi masih cukup besar, dimana di 22 provinsi paling tidak terdapat 80 persen rumah tangga yang memiliki cukup garam beryodium, sementara di empat provinsi (Aceh, Bali, NTT dan NTB), kurang dari 60 persen rumah tangga memiliki cukup garam beryodium.

Data lengkap tentang kekurangan zat gizi mikro masih terbatas dan data terbaru menunjukkan bahwa kekurangan zat gizi mikro masih perlu mendapat perhatian di Indonesia. Di Provinsi NTB, informasi mengenai penggunaan garam beryodium dikumpulkan hingga tingkat kecamatan. Selain itu data tingkat desa juga dikumpulkan melalui kegiatan pemantauan garam beryodium tingkat masyarakat yang dilaksanakan 2 kali per tahun. Pengumpulan data tersebut ditujukan untuk intervensi spesifik. Penggunaan garam beryodium di tingkat rumah tangga pada tahun 2013 sebesar 54,67 persen, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 52,95 persen, dimana cakupan tertinggi terdapat di Kabupaten Lombok Timur (75,79 persen), dan terendah di Kabupaten Dompu (34,42 persen). Jika dilihat dari trend cakupan konsumsi garam beryodium dalam 3 tahun terakhir beberapa kabupaten/kota mengalami peningkatan diantaranya Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima dan Kota Bima. Trend penurunan terjadi di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Bima (Dinkes NTB 2015).

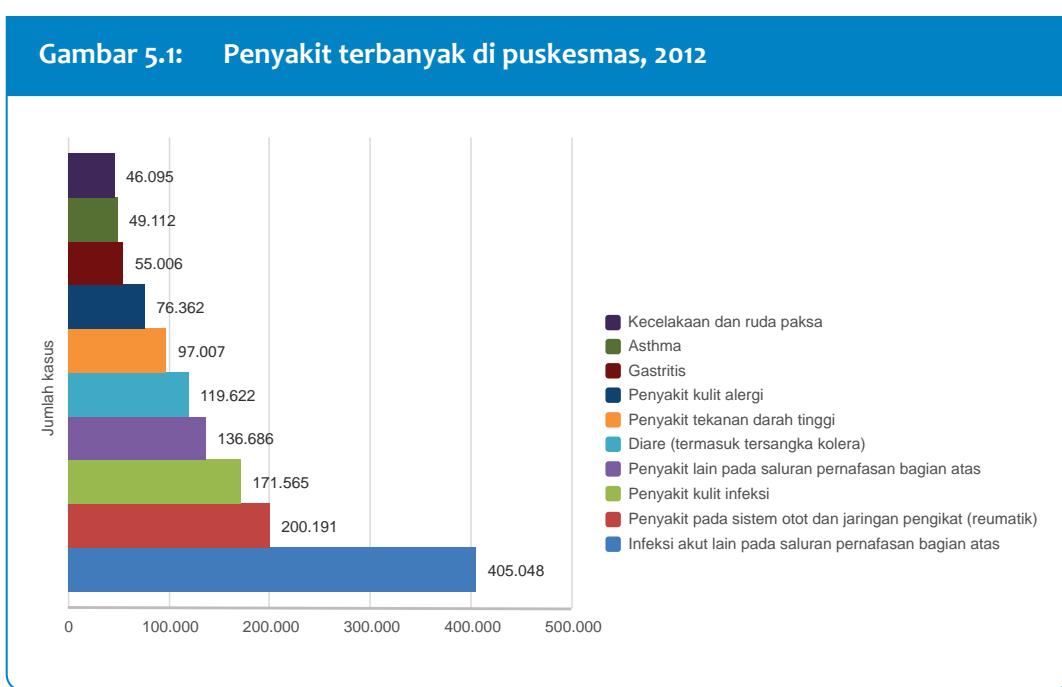
Selain yodium, zat mikro penting lainnya adalah zat besi (Fe) dan vitamin A. Hasil PSG Kadarzi pada tahun 2014 menunjukkan, rata-rata ibu hamil yang mendapat tablet Fe secara rutin adalah sebesar 70,43 persen dan yang tidak mendapat tablet Fe sebesar 29,57 persen. Pada tingkat kabupaten persentase tertinggi terdapat di Kota Bima (83,61 persen) dan terendah di Kabupaten Lombok Utara (50,0 persen). Sedangkan ibu hamil yang patuh mengkonsumsi tablet Fe secara rutin pada waktu hamil sebesar 32,06 persen dan 67,49 persen tidak patuh mengkonsumsi tablet Fe. Pada tingkat kabupaten persentase tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bima (43,59 persen) dan terendah oleh

Kabupaten Lombok Barat (12,50 persen). Untuk mengatasi rendahnya perilaku ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet Fe selama masa kehamilannya diperlukan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil.

Persentase ibu nifas yang mengkonsumsi vitamin A untuk tingkat provinsi rata-rata sebesar 81,83 persen, yang terdiri dari 16,98 persen yang mengkonsumsi baru 1 kali, dan 64,85 persen yang telah mengkonsumsi 2 kali. Pada tingkat kabupaten, persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat (98,1 persen) yang mengkonsumsi 1 kali dan 82,7 persen yang mengkonsumsi 2 kali. Persentase terendah di Kabupaten Lombok Tengah (67,5 persen) yang terdiri dari 26,60 persen yang mengkonsumsi 1 kali dan 40,9 persen yang mengkonsumsi 2 kali (Dinas Kesehatan, 2015). Selain ibu nifas, kelompok Balita juga merupakan kelompok rawan yang memerlukan suplementasi vitamin A dosis tinggi, karena asupan yang berasal dari makanan sehari-hari yang kaya vitamin A masih rendah. Kebijakan pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan balita relatif lebih lama dibandingkan kebijakan untuk ibu nifas.

5.2 Status kesehatan

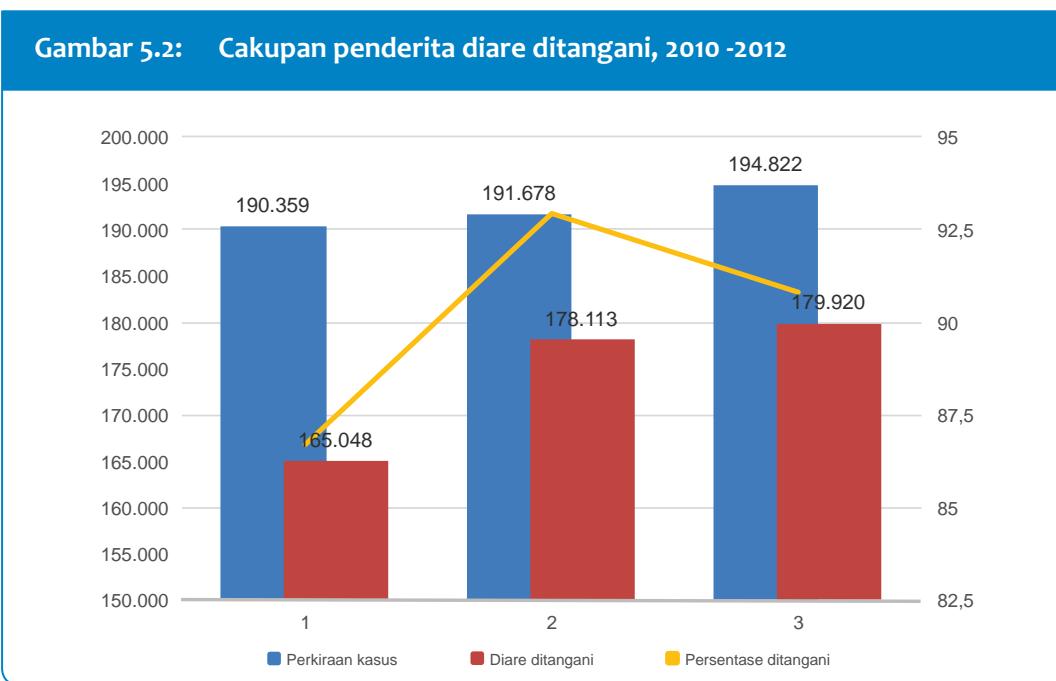
Buruknya status kesehatan meningkatkan keterpaparan terhadap penyakit menular, sedangkan *stunting* pada balita meningkatkan kerentanan terhadap penyakit tidak menular pada usia dewasa. Kasus penyakit yang paling banyak diderita masyarakat di NTB berdasarkan laporan bulanan kesakitan di puskesmas dan jaringannya dapat dilihat pada Gambar 5.1.



Sumber: Dinas kesehatan NTB, 2012

Gambar 5.1 memperlihatkan bahwa penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat adalah infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian atas. Menurut data Riskedas (2013), NTB termasuk ke dalam lima provinsi dengan kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) tertinggi (28,3 persen) setelah Provinsi NTT, Papua, dan Aceh. Penyakit diare menduduki peringkat ke 5 dari 10 kelompok yang paling banyak diderita oleh masyarakat yang berkunjung ke puskesmas, setelah penyakit

kulit infeksi dan penyakit lain pada saluran pernafasan. Data dari profil pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Kemenkes (2015), melaporkan bahwa cakupan pelayanan diare di Provinsi NTB mencapai 191.289 kasus diare (188 persen), tertinggi secara nasional. Diare dan ISPA, adalah salah satu penyebab masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) di NTB selain karena masih tingginya angka Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Pneumonia. Diare dan ISPA merupakan salah satu penyakit berbasis lingkungan dan masih menjadi masalah karena masih buruknya kondisi sanitasi dasar, lingkungan fisik maupun rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Menurut Profil Dinas Kesehatan NTB (2012) cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tingkat kabupaten masih rendah. Terdapat 4 kabupaten dengan capain PHBS dikisaran angka 20-30 persen dari rumah tangga yang dipantau yaitu di Kabupaten Sumbawa Barat (18,22 persen), Bima (20,77 persen), Kota Mataram (25,57 persen) dan Lombok Timur (27,81 persen). Pencapaian tertinggi terdapat di Kota Bima yaitu sebesar 55,71 persen. Capaian ini masih belum dapat memenuhi target yang ditetapkan di dalam dokumen RAD-PG Provinsi NTB Tahun 2011-2015 yaitu sebesar 65 persen PHBS. Untuk itu upaya yang telah dilakukan melalui sinergitas program PHBS dalam berbagai agenda dan program pembangunan sanitasi perlu lebih diintensifkan dengan memperkuat sisi perubahan perilaku masyarakatnya.



Rendahnya sanitasi dan kebersihan lingkungan memicu gangguan saluran pencernaan, sehingga energi untuk pertumbuhan teralihkan untuk perlawanannya tubuh menghadapi infeksi (Scmidt, Charles W, 2014). Penelitian lain menemukan bahwa semakin sering seorang anak menderita diare, maka semakin besar pula ancaman *stunting* untuknya (Cairncross, Sandy, 2013). Selain itu, saat anak sakit lazimnya selera makan mereka pun berkurang sehingga asupan gizi makin rendah. Akibatnya pertumbuhan sel otak yang seharusnya sangat pesat dalam dua tahun pertama kehidupan seorang anak menjadi terhambat. Dampaknya anak tersebut terancam menderita *stunting* yang mengakibatkan pertumbuhan fisik dan kognitifnya terganggu sehingga potensinya tidak dapat berkembang dengan maksimal. Untuk memotong rantai buruknya sanitasi dan kebersihan serta kaitannya dengan *stunting*, ibu hamil dan anak harus hidup dalam lingkungan yang bersih. Dua cara utama adalah dengan tidak buang air besar sembarangan dan mencuci tangan dengan sabun.

Angka Harapan Hidup (AHH)

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan; meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi; mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Angka harapan hidup merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka rata-rata angka harapan hidup di NTB pada tahun 2013 adalah 63,21 tahun, mengalami peningkatan dari 61,50 tahun (2010). Walaupun demikian angka harapan hidup di NTB masih dibawah angka rata-rata nasional (70,07 tahun). Kabupaten Bima memiliki angka rata-rata harapan hidup tertinggi (64,69 tahun) dan terendah terdapat di Kabupaten Dompu (62,14 tahun) (Tabel 5.3). Pada tingkat kecamatan hanya 41 kecamatan (39,05 persen) yang memiliki angka rata-rata harapan hidup diatas rata-rata provinsi (Lampiran 1). Tidak ada satupun kecamatan dengan angka rata-rata harapan hidup diatas rata-rata nasional (70,07 tahun).

Tabel 5.3: Angka harapan hidup menurut kabupaten (tahun), 2013

No	Kabupaten / Kota	Angka Harapan Hidup
1	Lombok Barat	62,13
2	Lombok Tengah	62,44
3	Lombok Timur	62,14
4	Bima	63,95
5	Dompu	61,68
6	Sumbawa	61,43
7	Sumbawa Barat	62,13
8	Lombok Utara	61,72
9	Kota Mataram	68,12
10	Kota Bima	63,62
	NTB	63,21

Sumber: SUSENAS, 2013; SP, 2010; PODES, 2014. BPS (diolah dengan teknik SAE)

5.3 Pencapaian bidang kesehatan

Disamping rencana aksi pangan dan gizi (RADPG) provinsi NTB, terdapat beberapa pencapaian di bidang kesehatan yang juga mempengaruhi ketahanan pangan dan gizi di Provinsi NTB, yaitu:

- Peluncuran "Gerakan Nasional untuk Percepatan Perbaikan Gizi di Indonesia" pada Oktober 2013 yang diikuti oleh keluarnya Peraturan Presiden no. 42/2013, menunjukkan partisipasi Indonesia dalam Gerakan *Scale up Nutrition* (SUN) global. Gerakan ini bertujuan untuk menyatukan pemerintah, mitra pembangunan, masyarakat sipil, swasta dan warga negara dalam upaya global peningkatan intervensi spesifik gizi yang difokuskan pada 1,000 hari pertama kehidupan (terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun).
- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan pada Januari 2014 menyediakan akses ke pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia yang juga dapat meningkatkan cakupan penyediaan intervensi spesifik gizi, seperti pemberian multivitamin yang berkontribusi terhadap status

kesehatan secara keseluruhan. Integrasi Jamkesda Provinsi NTB ke JKN-BPJS Kesehatan di tahun 2015 berjumlah 85.571 jiwa. Jumlah tersebut bertambah dari jumlah peserta tahun 2014. Selain itu, JKN di NTB juga memiliki program untuk mendukung penurunan angka kematian ibu dengan menjamin pembiayaan bagi seluruh ibu hamil dan bayi resiko tinggi yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan kuota sebesar 90.632 jiwa.

- Melalui program AKINO (Angka Kematian Ibu menuju Nol), Angka Kematian Ibu (AKI) mampu ditekan dari 320/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2008 menjadi 107/100.000 pada tahun 2014. Dari 1.031 desa di NTB, sebanyak 900 desa (87,29 persen) dinyatakan memiliki angka kematian ibu menuju nol.
- Peningkatan perilaku masyarakat untuk selalu buang air besar di Jamban Sehat sebesar 61,53 persen pada tahun 2009 menjadi 69,83 persen di tahun 2013.
- Disusunnya dokumen: 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Sanitasi Provinsi NTB Tahun 2015-2019; 2) Roadmap Sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun strategi, pembangunan dan pengelolaan sanitasi dan sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi di provinsi NTB.
- Dikeluarkannya sejumlah Peraturan Gubernur (Pergub) NTB yang terkait dengan peningkatan kesehatan yaitu: i) Pergub NTB Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi; ii) Pergub NTB nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; iii) Pergub Nomor 31 Tahun 2014 tentang Roadmap Sanitasi Provinsi NTB Tahun 2015-2019; iv) Pergub Nomor 9 tahun 2013 tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO).
- Dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak balita sebagai wujud komitmen terhadap status gizi dan kesehatan masyarakat.
- Penghargaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) pada tahun 2013 yang diberikan sebagai penghargaan terhadap komitmen daerah menuju buang air besar nol.

5.4 Strategi untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan kelompok rentan

Untuk mempercepat penurunan angka *underweight* dan *stunting* yang masih cukup tinggi, maka sangatlah penting untuk merencanakan dan mengimplementasikan intervensi gizi secara lebih efektif pada semua tingkat, mulai dari rumah tangga sampai tingkat masyarakat. Penting untuk pentargetan kelompok rentan terhadap gizi, peningkatan pemahaman tentang penyebab dasar kurang gizi yang multidimensi, pemilihan intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya dan peningkatan komitmen serta investasi di bidang gizi.

Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Program Intervensi Spesifik pada kelompok rentan masalah gizi:
 - a. Memberikan prioritas kepada kelompok sasaran pada seribu hari pertama sejak konsepsi (kehamilan) hingga dua tahun pertama kehidupan karena periode ini merupakan "jendela peluang (window of opportunity)" dalam mencegah masalah gizi, yang memberikan dampak terbaik bagi tumbuh kembang di usia selanjutnya. Revolusi KIA harus dilanjutkan dengan lebih meningkatkan penanganan kurang gizi pada ibu hamil termasuk; (i) pemberian tambahan zat

- besi (Fe); (ii) konseling menyusui; (iii) penerapan inisiasi menyusu dini (IMD); (iv) pemberian ASI Eksklusif untuk bayi hingga usia 6 bulan; (v) pemberian makan yang tepat mulai usia 6 bulan; (vi) dilanjutkan dengan pemberian ASI sampai usia 2 tahun termasuk pemberian tambahan vitamin A.
- b. Meningkatkan kualitas penanganan anak-anak gizi kurang dan gizi buruk melalui peningkatan monitoring, pelayanan di posyandu dan peningkatan kapasitas tim asuhan gizi, beserta sarana pendukungnya di fasilitas kesehatan.
 - c. Meningkatkan kualitas penanganan penyakit yang mengakibatkan terjadinya kurang gizi, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), tuberkulosis, pneumonia dan diare kronis.
 - d. Melakukan pengkajian tentang alternatif-alternatif intervensi pada kelompok sasaran lain seperti anak sekolah, remaja perempuan dan pekerja.
 - e. Pemberian bantuan sosial/kedaruratan.
 - f. Peningkatan jumlah, mutu dan sebaran tenaga gizi di semua puskesmas.
2. Program Intervensi Sensitif Multi-Sektoral untuk mengatasi penyebab dasar multi-dimensi kekurangan gizi (ketahanan pangan, status kesehatan dan akses terhadap layanan).
 - a. Mempromosikan konsumsi makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
 - b. Meningkatkan upaya-upaya ekonomi produktif seperti optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan tidur dengan cara menanam sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, memelihara unggas (ayam, bebek) dan ikan melalui budidaya perairan.
 - c. Mendorong tumbuhnya industri pangan lokal.
 - d. Meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, terutama yang berdampak terhadap penguatan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program di tingkat desa melalui kegiatan fasilitasi/pendampingan lintas sektor beserta unsur swasta dan kelompok masyarakat.
 - e. Memperbaiki akses ke air minum dengan meningkatkan akses rumah tangga dan organisasi (sekolah-sekolah) terhadap sumber air bersih, mempromosikan minum air matang sebelum diminum, membuat tangki penampung air untuk menyimpan air hujan serta membudayakan kebiasaan membawa air minum ke sekolah.
 - f. Memperbaiki higiene dan sanitasi dengan cara mempromosikan mencuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet, memperbaiki sistem pembuangan limbah serta mempromosikan pembuangan sampah/limbah yang tepat dan benar.
 - g. Meningkatkan status kaum perempuan melalui pemberian kesempatan meningkatkan pendidikan, memperbaiki pengetahuan/kemampuan pengasuhan dan pemberian makan anak, menciptakan kondisi pembagian tanggung jawab suami dan anggota keluarga dalam pengasuhan dan pemberian makan anak, serta pemberian kesempatan perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan dimulai dari musrenbang desa.
 - h. Menyebarluaskan informasi tentang peraturan terkait pangan, gizi dan kesehatan.
 - i. Memperkuat kapasitas pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten dalam rangka peningkatan sinergisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian program-program intervensi gizi baik yang bersifat spesifik (sektoral) dan sensitif (lintas sektoral) secara progresif termasuk dalam hal pengendalian berbagai bantuan dari luar pemerintah.

Perlu dipahami bahwa intervensi tidak langsung ini hanya bersifat melengkapi intervensi langsung, bukan pengganti intervensi gizi langsung.

3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi

Investasi dalam bidang gizi merupakan hal yang penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*). Di negara berkembang, intervensi untuk mengatasi masalah gizi saat ini telah menjadi investasi yang paling efektif dalam menyokong pembangunan. Intervensi yang terkoordinasi baik dan bersifat multi-sektoral dapat membantu mengurangi masalah gizi, sekaligus menyelamatkan hidup dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sesuai Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan yang terkait dengan Rencana Tindak Lanjut untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), telah disusun dokumen Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2011-2015. Penyusunan RAN-PG di tingkat nasional diikuti dengan penyusunan RAD-PG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di NTB, telah disusun RAD-PG Provinsi NTB 2012-2015 pada tahun 2012, diikuti dengan RAD-PG ditingkat kabupaten oleh seluruh kabupaten yang ada. Rencana aksi ini disusun sebagai panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dan kota, baik bagi institusi pemerintah maupun masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam perbaikan pangan dan gizi.

Dalam RAD-PG, kebijakan pangan dan gizi disusun melalui pendekatan lima pilar pembangunan pangan dan gizi yang meliputi:

- (1) Perbaikan gizi masyarakat, melalui peningkatkan ketersediaan dan jangkauan pelayanan kesehatan berkelanjutan yang difokuskan pada layanan gizi efektif bagi ibu pra-hamil, ibu hamil, dan anak usia di bawah dua tahun.
- (2) Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam melalui promosi produksi sayur-sayuran, buah-buahan dan komoditi yang kaya zat gizi dan membantu keluarga rawan pangan dan miskin.
- (3) Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan difokuskan pada promosi makanan jajanan sehat dan produk industri rumah tangga (PIRT) tersertifikasi.
- (4) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui pemberdayaan masyarakat dan peran pimpinan formal serta non formal, terutama dalam perubahan perilaku atau budaya konsumsi pangan yang difokuskan pada penganekaragaman konsumsi pangan, berbasis sumber daya lokal, perilaku hidup bersih dan sehat serta merevitalisasi posyandu.
- (5) Penguatan kelembagaan pangan dan gizi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota termasuk melalui peningkatan sumber daya dan penelitian

Strategi yang terkait dengan peningkatan status gizi dan derajat kesehatan keluarga yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan NTB tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- Untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan gizi bagi kelompok rawan gizi: 1) fasilitasi dan edukasi gizi seimbang bagi ibu, ibu nifas dan balita; 2) suplementasi zat gizi mikro bagi ibu hamil, ibu nifas dan balita; 3) fasilitasi dan koordinasi perbaikan gizi.

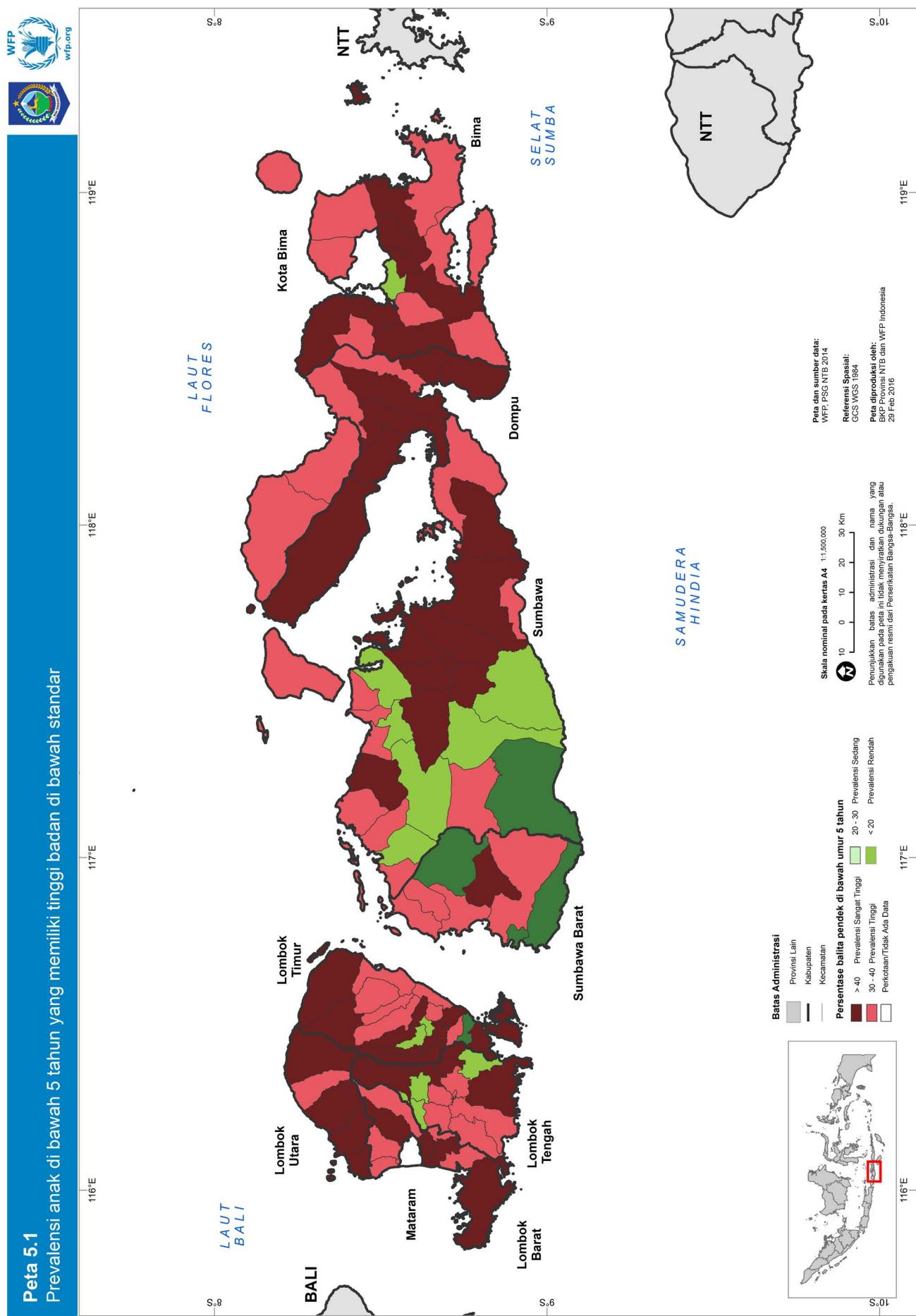
- Untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana (KB): 1) memfasilitasi penyediaan sarana prasarana dan prosedur operasi standar untuk layanan kesehatan ibu, anak, dan KB; 2) peningkatan kapasitas dan standarisasi tenaga kesehatan ibu, anak dan KB.
- Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan remaja dan lanjut usia: 1) koordinasi dan menstandarisasi pelayanan kesehatan remaja dan lanjut usia; 2) mengkoordinasi dan memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

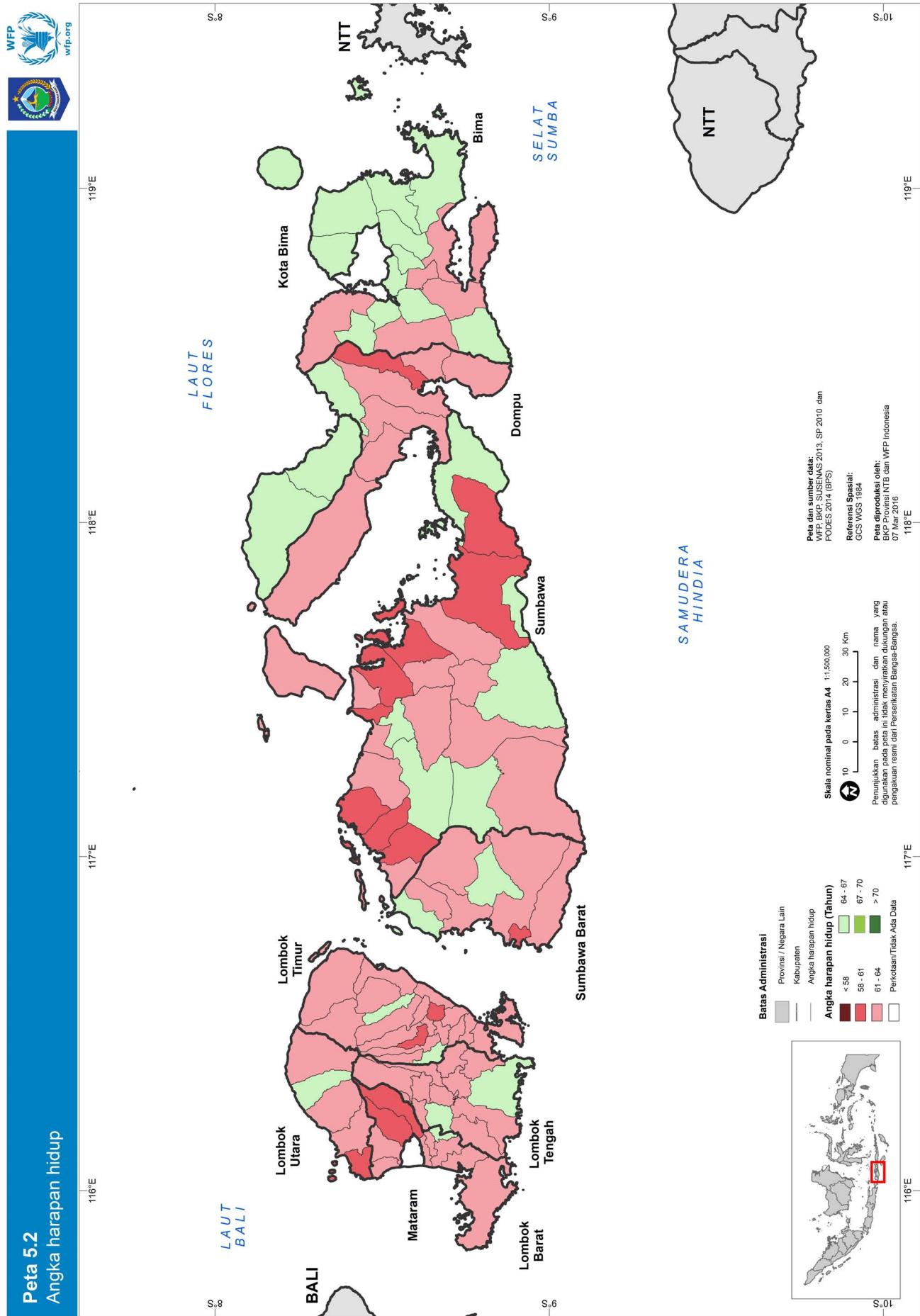
- Black, Robert E., et al. 2013. *Maternal and Child Undernutrition and Overweight in Low-Income and Middle-Income Countries*. The Lancet 382.9890 (2013): 427-451.
- BPS. 2012 dan 2013. *Statistik Indonesia*. Jakarta.
- BPS. 2011. *Konsumsi Kalori dan Protein untuk Tingkat Indonesia dan Provinsi 2011*. Jakarta.
- Bappeda Prov. NTB, 2013. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah NTB 2013-2018*.
- Bappeda Prov. NTB, 2011. *Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi NTB 2011-2015*
- Cairncross, Sandy. 2013. *Linking toilets to stunting*. UNICEF ROSA 'Stop Stunting' Conference. New Delhi.
- Dewan Ketahanan Pangan dan WFP. 2010. *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2009*. Jakarta.
- Dinas Kesehatan Provinsi NTB. 2012. *Laporan Kesakitan Kabupaten/Kota 2012*. Mataram.
- Dinas Kesehatan Provinsi NTB. 2014. *Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2013-2018*. Mataram.
- Dinas Kesehatan Provinsi NTB. 2014. *Laporan Pemantauan Status Gizi (PSG)-Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) 2013*. Mataram
- Dinas Kesehatan Provinsi NTB. 2015. *Laporan Pemantauan Status Gizi (PSG)-Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) 2014*. Mataram.
- Dinas Kesehatan Provinsi NTB. 2012. *Profil Kesehatan Provinsi NTB 2012*.
- Kementerian Kesehatan. 2007. *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2007*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2013. *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2015. *Profil Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015*. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2010. *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015 (RAN-PG 2011-2015)*. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2007. *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006-2010 (RAN-PG 2006-2010)*. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2015. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019)*. Jakarta.
- Schmidt, Charles W. 2014. *Beyond malnutrition: the role of sanitation in stunted growth*. Environmental health perspectives 122.11.
- Shrimpton, Roger; Rokx, Claudia. 2012. *The Double Burden of Malnutrition: A Review of Global Evidence*. Health, Nutrition and Population (HNP) Discussion Paper. World Bank. Washington DC.

- WFP. 2009. *Emergency Food Security Assessment Handbook, Edisi ke-2*. Roma.
- World Food Programme (WFP) dan Dutch Life serta Materials Sciences Company (DSM). *Ten Minutes to Learn About Nutrition Programming*. Sight and Life Magazine Issue No. 3/2008 Supplement. Roma.
- WHO. 2000. *Classification of Severity of Malnutrition in a Community for Children Under 5 Years of Age from 'The Management of Nutrition in Major Emergencies'*. Genewa.
- WHO. 2006. *WHO Child Growth Standards Based on Length/Height, Weight and Age*. Genewa.
- WHO. 2007. *World Health Report 2007*. Genewa.

Peta 5.1
Prevalensi anak di bawah 5 tahun yang memiliki tinggi badan di bawah standar



Peta 5.2 Angka harapan hidup



Faktor Iklim dan Lingkungan yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan



Kerentanan terhadap bencana alam dan gangguan mendadak lainnya dapat mempengaruhi ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah baik bersifat sementara maupun jangka waktu panjang. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara sementara dikenal sebagai kerawanan pangan sementara (*transient food insecurity*). Bencana alam yang terjadi tiba-tiba, maupun perubahan harga atau goncangan terhadap pasar, epidemik penyakit, konflik sosial dan lain-lain dapat menyebabkan terjadinya kerawanan pangan transien (sementara). Kerawanan pangan transien dapat berpengaruh terhadap satu atau semua aspek ketahanan pangan seperti ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan.

Kerawanan pangan transien dapat juga dibagi menjadi dua yaitu: Berulang (*cyclical*), di mana terdapat suatu pola yang berulang terhadap kondisi rawan pangan, misalnya, "musim paceklik" yang terjadi dalam periode sebelum panen, dan Temporal (*temporary*), yang merupakan hasil dari suatu gangguan mendadak dari luar pada jangka pendek seperti kekeringan atau banjir. Konflik sipil juga termasuk dalam kategori goncangan (*shock*) temporal walaupun dampak negatifnya terhadap ketahanan pangan dapat berlanjut untuk jangka waktu lama. Dengan kata lain, kerawanan pangan transien dapat mempengaruhi orang-orang yang berada pada kondisi rawan pangan kronis dan juga orang-orang yang berada pada keadaan tahan pangan.

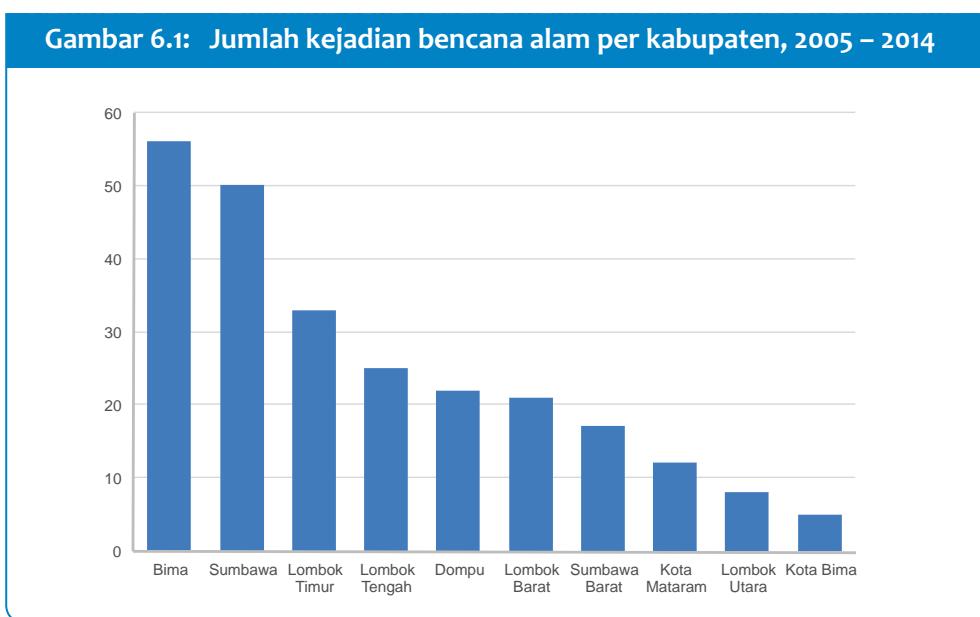
Di dalam bab ini kerawanan pangan dianalisa dari segi iklim dan lingkungan. Faktor iklim dan lingkungan serta kemampuan masyarakat untuk mengatasi goncangan sangat menentukan apakah suatu negara atau wilayah dapat mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan dan gizinya.

Tinjauan ketahanan pangan dan gizi ini berdasarkan pada dampak dari berbagai bencana alam dan degradasi lingkungan terhadap ketersediaan dan akses pangan. Deforestasi hutan, variabilitas curah hujan dan daerah yang terkena banjir dan kekeringan, merupakan beberapa indikator yang digunakan dalam bab ini untuk menjelaskan kerawanan pangan transien di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kondisi iklim yang mempengaruhi kerawanan pangan transien, empat faktor utama dianalisa dalam FSVA NTB 2015 yaitu: i) data kejadian bencana alam yang terjadi di tingkat kabupaten; ii) estimasi kehilangan produksi padi akibat banjir dan kekeringan; iii) kekuatan pengaruh *El Niño/Southern Oscillation* (ENSO) yang menyebabkan variabilitas curah hujan; dan iv) tingkat deforestasi hutan.

6.1. Bencana alam

Provinsi NTB sebagai salah satu provinsi yang rawan terhadap bencana di Indonesia khususnya bencana banjir dan kekeringan. Bencana alam merupakan faktor utama kerawanan pangan transien di NTB. Pada periode 2005 sampai 2014, kejadian bencana alam yang paling sering terjadi adalah banjir, angin puting beliung dan kekeringan (Tabel 6.1). Pada periode yang sama, kabupaten yang paling sering mengalami bencana alam adalah Kabupaten Bima, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Dompu (Gambar 6.1).



Sumber: BPBD NTB, 2015

Tabel 6.1 menggambarkan jumlah kejadian bencana alam yang berhubungan dengan faktor iklim, aktivitas gunung berapi dan seismik (tsunami dan gempa bumi) dan lain-lain. Tabel 6.1 menunjukkan kabupaten-kabupaten yang paling terkena dampak iklim: termasuk beberapa kabupaten yang mungkin bertambah dengan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang makin umum terjadi dan yang dilaporkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB. Dari data diatas terlihat bahwa jenis bencana yang paling sering terjadi pada kurun waktu 2005 – 2014 adalah banjir sebanyak 84 kejadian diikuti puting beliung sebanyak 47 kejadian, kekeringan sebanyak 44 kejadian, gelombang pasang 16 kejadian dan tanah longsor sebanyak 12 kejadian.

Tabel 6.1: Ringkasan tabel bencana alam yang terjadi di NTB, 2005 – 2014

Kejadian	Meninggal (Jiwa)	Luka-luka (Jiwa)	Mengungsi (KK)	Rumah Rusak (Unit)	Fasilitas Umum Rusak (Unit)	Fasilitas Pendidikan Rusak (Unit)	Lahan Pertanian (Ha)
Banjir	1	5	2.870	5.732	63	-	1.590,10
Tanah Longsor	0	4	99	17	8	-	0
Angin Puting Beliung	1	2	0	898	5	-	0
Angin Kencang	0	0	0	0	0	-	0
Gelombang Pasang	0	0	65	171	2	-	0
Gempa Bumi	0	29	0	8.076	0	-	0
Gunung Meletus	0	0	4.988	0	0	-	973
Kebakaran	0	0	0	1	0	-	0
Kecelakaan Perahu/Kapal	0	2	0	0	0	-	0
Total	2	42	8.022	14.895	78	-	2.563,10

Sumber: BPBD NTB

Peta 6.1 menggambarkan jumlah kejadian bencana alam yang berhubungan dengan faktor iklim: bencana yang berhubungan dengan aktivitas gunung berapi dan seismik (Tsunami dan gempa bumi) tidak dimasukkan. Dengan demikian peta ini menggambarkan kabupaten-kabupaten yang paling terkena dampak iklim: termasuk beberapa kabupaten yang mungkin bertambah dengan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang makin umum terjadi. Sebagai contoh, beberapa kabupaten melaporkan kejadian banjir dan angin puting beliung yang paling banyak terjadi pada tahun 2013-2015. Namun harus dicatat bahwa mungkin kabupaten-kabupaten ini melaporkan data lebih sering dari kabupaten lainnya kepada Instansi terkait/BPBD. Kejadian bencana di Provinsi NTB dengan jumlah terbanyak sebagaimana dalam Tabel 6.1 diatas, sering terjadi pada musim penghujan di awal tahun sangat dipengaruhi oleh sirkulasi angin monsun (Asia-Australia).

Kejadian bencana alam lain tanah longsor dan gempa bumi juga cukup sering terjadi tapi tidak diikuti dengan tsunami. Keseluruhan kejadian bencana ini cukup berpengaruh terhadap ketersediaan pangan jika dihubungkan dengan kehilangan produksi pangan yang ditimbulkan, kurangnya pendapatan rumah tangga yang tergantung pada pertanian, mengurangi akses pangan secara fisik dan menyebabkan kenaikan harga pangan karena kurangnya pasokan dan volatilitas pangan yang tinggi.

6.2 Variabilitas curah hujan

Variabilitas iklim secara langsung mempengaruhi berbagai aspek ketahanan pangan dan gizi, khususnya ketersediaan dan akses pangan. Variasi curah hujan merupakan salah satu elemen yang berkaitan dengan berbagai kejadian bencana alam seperti kekeringan, banjir, banjir bandang dan longsor. Variasi curah hujan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik global, regional maupun lokal. Faktor iklim global antara lain fenomena El Niño, La Niña, *Dipole Mode* dan *Madden Julian Oscillation* (MJO); sedangkan faktor regional diantaranya sirkulasi monsun Asia-Australia, daerah pertemuan angin tropis atau *Inter Tropical Convergence Zone* (ITCZ) dan suhu permukaan laut perairan Indonesia; dan faktor lokal yang berpengaruh adalah ketinggian tempat, posisi bentangan suatu pulau, sirkulasi angin darat dan angin laut serta tutupan lahan suatu wilayah.

Pengaruh cuaca ekstrim pada musim hujan menyebabkan banjir, sedangkan pada musim kemarau menyebabkan kekeringan. Kondisi ini juga dapat menyebabkan perkembangan organisme

penganggu tanaman (OPT) secara eksplisit: OPT yang berbeda dapat berkembang pada kondisi yang lebih basah atau lebih kering, yang menganggu pertumbuhan tanaman sehingga kemungkinan terjadi gagal panen. Di NTB, kejadian ini menyebabkan kegagalan produksi tanaman pangan yang lebih banyak terkait dengan kejadian *El Niño/Southern Oscillation* (ENSO). Tahun *El Niño* biasanya berhubungan dengan kekeringan, sedangkan tahun *La-Niña* berhubungan dengan tingginya curah hujan yang dapat menyebabkan banjir. Dampak *El Niño* terhadap sektor pertanian di NTB cukup besar, seperti kasus penurunan produksi padi di NTB pada *El Niño* tahun 1986/1987 dan 1997/1998 adalah sekitar 20-60 persen dari rata-rata panen tahunannya.

Umumnya wilayah NTB sangat dipengaruhi oleh posisi geografis dan pengaruh monsun (Qian et.all., 2010) artinya wilayah ini sangat dipengaruhi oleh angin Timuran dan Baratan. Ketika angin Baratan bertiup akan banyak membawa masa udara dari kawasan Asia dan Pasifik sedangkan ketika angin Timuran datang dari benua Australia, angin dingin dari Selatan memiliki masa udara relatif lebih kering sehingga angin Timuran identik dengan musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia khususnya NTB (Qian et.all., 2010; Aldrian et.all., 2007; Haylock dan McBride 2001). Pulau Lombok yang berada di bagian barat mendapatkan curah hujan relatif lebih banyak dibandingkan Pulau Sumbawa.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap variasi curah hujan NTB adalah fluktuasi suhu permukaan laut (SPL) baik di perairan Indonesia maupun SPL Samudera Pasifik Tengah. Apabila SPL perairan Indonesia panas maka uap air yang terangkat (penguapan) ke permukaan akan lebih banyak. Dalam waktu bersamaan, jika SPL Samudera Pasifik Tengah dingin (anomali negatif) dan terjadi *La Niña* maka sirkulasi global (Walker) akan membawa uap air ke wilayah Indonesia. Dengan demikian uap air akan terakumulasi di wilayah ini, pembentukan awan semakin banyak dan potensi turunnya akan lebih besar. Sebaliknya curah hujan di seluruh wilayah NTB akan relatif rendah ketika suhu perairannya lebih dingin dari keadaan normal. Pada periode *El Niño*, SPL di Samudera Pasifik Tengah lebih hangat dari biasanya akan menyebabkan kegagalan pola angin normal yang biasanya membawa arus hangat ke Indonesia.

Fenomena ini terlihat dari hubungan yang kuat antara kenaikan SPL di Samudera Pasifik Tengah (ukuran standar sinyal ENSO) dengan kekeringan di Indonesia. Dampak kekeringan di NTB menyebabkan penurunan produksi pangan, mengingat sebagian besar wilayah NTB merupakan daerah pertanian tanpa irigasi (tadah hujan). Wilayah yang mengalami penurunan curah hujan karena perubahan SPL mungkin akan mengalami penurunan produksi yang signifikan khususnya daerah-daerah tanpa irigasi/tadah hujan. Daerah-daerah tersebut membutuhkan pemantauan situasi ketahanan pangan khususnya selama musim kemarau, terutama di tahun *El Niño*.

Peta 6.2 menggambarkan perubahan curah hujan bulanan yang disebabkan oleh perubahan suhu permukaan laut (SPL) sebesar 1°C di Samudera Pasifik Tengah pada Niño 3.4. Daerah yang berwarna merah menunjukkan resiko berkurangnya curah hujan yang sangat tinggi sedangkan warna kuning muda menunjukkan resiko berkurangnya curah hujan yang sangat rendah. Setiap piksel pada peta mewakili daerah seluas 5,6 x 5,6 km. Hampir seluruh kabupaten di NTB memiliki resiko berkurangnya curah hujan yang berkaitan dengan kejadian *El Niño*. Kabupaten yang memiliki resiko penurunan curah hujan yang cukup tinggi adalah Kabupaten Lombok Utara, Sumbawa Barat dan Sumbawa.

Peta 6.3 mengklasifikasikan kecamatan-kecamatan berdasarkan rata-rata penurunan curah hujan bulanan yang berhubungan dengan perubahan SPL di Samudera Pasifik Tengah. Kecamatan-kecamatan berwarna merah gelap memiliki perubahan curah hujan terbesar yang berhubungan

dengan kenaikan SPL yaitu Kabupaten Lombok Timur, Sumbawa dan Dompu. Kabupaten-kabupaten ini membutuhkan pemantauan situasi ketahanan pangan khususnya yang berhubungan dengan produksi pangan pada tahun-tahun *El Niño* (tahun kering). Variasi curah hujan cenderung akan merugikan pertanian berkelanjutan kecuali sistem irigasi dan penyimpanan air (waduk atau dam) diperbaiki karena dampaknya terhadap gagal tanam dan gagal panen. Berkaitan dengan produksi padi baik di lahan sawah beririgasi maupun tada hujan di Provinsi NTB, maka pengaturan pola tanam dan jadwal tanam yang tepat juga perlu dilakukan agar air hujan dapat dimanfaatkan oleh tanaman padi secara efektif. Kajian mengenai dampak perubahan iklim terhadap produktivitas padi di NTB memproyeksikan bahwa produktivitas padi akan turun sekitar 7-10 persen di Pulau Lombok dan 8-10 persen di Pulau Sumbawa pada periode 2040-2069. Sedangkan untuk jangka panjang (periode 2070- 2099), akan terjadi penurunan sekitar 12-15 persen baik untuk pulau Lombok dan pulau Sumbawa (Ripaldi, 2014).

6.3 Kehilangan produksi yang disebabkan oleh kekeringan, banjir dan organisme pengganggu tanaman (OPT)

Daerah yang rusak didefinisikan sebagai suatu daerah yang produksi pangannya menurun akibat bencana alam (banjir, kekeringan) dan atau penularan hama oleh Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Tabel 6.2 menunjukkan luas kerusakan tanaman padi yang disebabkan oleh banjir, kekeringan dan organisme pengganggu tanaman (OPT) di setiap kabupaten pada periode 2013-2015. Kerusakan areal tanaman padi tahun 2013 (2.020 ha) dan 2015 (1.280) lebih kecil dari pada tahun 2014 (4.098 ha). Pada tahun 2013 tingkat kerusakan terparah tanaman padi ditemukan di Kabupaten Bima (1.067 ha), Sumbawa Barat (745 ha) dan (170 ha).

Tabel 6.2: Luas area puso akibat banjir, kekeringan dan organisme pengganggu tanaman (Ha), 2013 - 2015

No	Kabupaten / Kota	Total Padi (Ha)		
		2013	2014	2015
1	Lombok Barat	0	62	0
2	Lombok Tengah	1	2.887	30
3	Lombok Timur	0	15	7
4	Sumbawa	170	258	378
5	Dompu	0	35	0
6	Bima	1.067	782	625
7	Sumbawa Barat	745	17	183
8	Lombok Utara	0	0	0
9	Kota Mataram	0	0	0
10	Kota Bima	37	42	57
NTB		2.020	4.098	1.280

Sumber: BPS NTB, 2013 - 2015

Peta 6.4 menunjukkan rata-rata kehilangan produksi padi tahunan yang disebabkan oleh kekeringan pada tahun 1990 sampai 2014. Wilayah berwarna merah tua mengalami kehilangan produksi paling tinggi (30.000 Ton/tahun). Kabupaten Lombok Tengah dan Bima secara rata-rata mengalami kehilangan paling tinggi karena kekeringan pada periode ini.

Sebaliknya, peta 6.5 menunjukkan rata-rata kehilangan produksi padi tahunan yang disebabkan oleh banjir pada tahun 1990 sampai 2014. Sekali lagi, wilayah berwarna merah tua mengalami kehilangan produksi paling tinggi (1.000 Ton/tahun). Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Bima secara rata-rata mengalami kehilangan paling tinggi karena banjir pada periode ini.

6.4 Deforestasi hutan

Deforestasi dan degradasi hutan di NTB berdampak sangat luas bukan saja terhadap penghidupan penduduk setempat tetapi juga alih fungsi hutan berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon sebagai penyebab utama perubahan iklim global. Degradasi hutan – khususnya di daerah hulu – juga memiliki dampak terhadap sumber-sumber air. Penggundulan tutupan hutan di daerah hulu mempercepat kehilangan air, meningkatkan resiko banjir di daerah hilir pada musim hujan, mengeringkan dasar sungai pada musim kemarau, meningkatkan erosi tanah yang menyebabkan sedimentasi pada jalan-jalan air, juga meningkatkan resiko longsor. Kekurangan air selanjutnya mempengaruhi suplai irigasi pada wilayah-wilayah pertanian dan perikanan sehingga memicu penurunan ketahanan pangan dan peningkatan kerentanan melalui penurunan produktivitas ekonomi. Dampak ini diperparah dengan kecenderungan perubahan curah hujan yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Laju deforestasi tahun 2012 pada tingkat nasional mencapai 352.532,2 Ha/tahun untuk kawasan hutan dan sebesar 260.948,4 Ha/tahun di luar kawasan hutan, sedangkan laju deforestasi provinsi NTB adalah 1.183,4 Ha/tahun untuk kawasan hutan dan 316,7 Ha/tahun di luar kawasan hutan (Kementerian Kehutanan, 2014)). Dampak dari deforestasi adalah terbentuknya lahan kritis. Luasan lahan kritis yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi sebagai media pengatur tata air dan tidak produktif lagi di Provinsi NTB sampai dengan tahun 2013 adalah seluas 239.815,95 Ha yang terdiri dari sangat kritis seluas 18.905,24 Ha dan kritis 220.910,71 Ha (Tabel 6.3) (Dinas Kehutanan NTB, 2014).

Table 6.3: Luas lahan kritis pada kawasan hutan berdasarkan fungsi hutan (ha), 2013

No	Fungsi Hutan	Luas Lahan Kritis (Ha)		Total (Ha)
		Sangat Kritis	Kritis	
1	Cagar Alam	10.806,64	7.070,48	17.877,12
2	Suaka Margasatwa	1.084,65	19.594,25	20.678,90
3	Taman Buru	0	16.154,88	16.154,88
4	Taman Nasional	1.132,79	10.674,67	11.807,46
5	Taman Wisata Alam	0	5.053,31	5.053,31
6	Taman Hutan Raya	0	754,57	754,57
7	Kawasan Suaka Alam	0	923,29	923,29
8	Hutan Lindung	1.779,24	42.116,74	43.895,98
9	Hutan Produksi Terbatas	1.563,78	70.330,93	71.894,71

Sumber: Balai DAS Dodokan Moyosari NTB, 2013

Deforestasi di Provinsi NTB disebabkan oleh pengangkutan hasil hutan tanpa disertai dokumen legalitas kayu, penebangan liar, penggembalaan dan lain sebagainya. Permintaan atau kebutuhan kayu yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaannya menyebabkan terbukanya pasar untuk kayu yang berasal dari sumber yang tidak sah. Gangguan keamanan hutan juga belum terpetakan dalam bentuk konsentrasi, lokasi dan intensitas gangguan sehingga perencanaan dalam rangka

pengendalian dan pengamanan hutan belum dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Selain itu, persoalan terkait tenurial masih cukup tinggi mengingat banyak desa di beberapa kabupaten yang letaknya berbatasan dengan kawasan hutan turut memberikan tekanan sosial dan ekonomi terhadap kawasan hutan tersebut. Kurangnya koordinasi antar sektor juga menyebabkan belum optimalnya pengelolaan kawasan (Dinas Kehutan Provinsi NTB, 2014). Sejalan dengan perkembangan ekonomi regional, berbagai aktifitas pembangunan juga menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang berdampak pada perubahan penutupan lahan pada kawasan hutan yang dapat menurunkan kondisi hutan dan berkurangnya luas hutan.

Dinas Kehutanan Provinsi NTB telah berupaya untuk merehabilitasi kawasan hutan yang kritis yang berada di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan melalui penghijauan dan reboisasi yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipatif. Selama kurun waktu 2010-2014, luas lahan yang ditanami melalui reboisasi mencapai 16.649 Ha dan melalui penghijauan mencapai 26.811,47 Ha. Masyarakat yang tinggal di desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan yaitu di 461 desa (41,27 persen), diberikan hak kelola kawasan hutan melalui program Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan serta pengembangan hasil hutan bukan kayu (Dinas Kehutanan Provinsi NTB, 2014). Kegiatan tersebut ditujukan sebagai alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan sumber pangan sekaligus unetuk memenuhi kebutuhan ruang yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi NTB.

6.5 Perubahan iklim dan ketahanan pangan

Perubahan iklim membawa resiko yang besar terhadap semua aspek ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat. Dampak perubahan iklim dapat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan atau permanen (Boer dan Kartikasari, 2014). Dampak yang berkesinambungan terutama berkaitan dengan perubahan produksi pangan yang disebabkan oleh perubahan curah hujan (pola, panjang dan terjadinya musim), evaporasi, *surface water run off*, intrusi air laut, peningkatan konsentrasi CO₂ di atmosfir dan tingkat kelembaban tanah. Dampak yang tidak berkesinambungan adalah yang disebabkan oleh peningkatan kejadian iklim ekstrim, yang dapat menyebabkan gagal panen. Dampak permanen adalah kondisi yang tidak dapat diperbaiki seperti kehilangan tanah subur di daerah pesisir pantai karena naiknya permukaan air laut. Kajian kerentanan dan resiko perubahan iklim yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan GTZ (2010) menjelaskan bahwa pesisir pantai di wilayah utara dan selatan Pulau Lombok akan mengalami kenaikan muka air laut berkisar antara 10,5 - 24 cm pada tahun 2030. Wilayah pesisir Pulau Lombok lainnya seperti di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur serta lahan-lahan pertanian dataran rendah terancam akan tergenang air laut secara permanen. Perubahan tersebut akan mengancam sektor pendukung ketahanan pangan yaitu pertanian, sumberdaya hutan dan air, perikanan darat dan laut bahkan peternakan. Di sektor pertanian akan mengancam produksi dan produktivitas pertanian. Sedangkan pada sektor peternakan, perubahan suhu diperkirakan dapat mempengaruhi produktivitas daging akibat cekaman iklim (*physiologocal stress*) dan menurunkan harga jual ternak.

Kecenderungan peningkatan suhu rata-rata telah diamati di Indonesia. Pada periode tahun 1965 - 2009, tingkat kenaikan suhu rata-rata sekitar 0,016°C/tahun. Peta Jalan Sektoral Perubahan Iklim Indonesia Tahun 2009 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2009) menyebutkan bahwa kenaikan suhu yang tinggi akan menurunkan hasil produksi padi sebesar 20,3-27,1 persen, jagung sebesar 13,6 persen, kedelai sebesar 12,4 persen dan tebu sebesar 7,6 persen. Proses penyerbukan dan bulir akan mengalami kendala apabila sering terkena suhu pada ambang

batas tinggi. Suhu yang tinggi juga meningkatkan tingkat respirasi tanaman dan mengurangi daya tangkap karbon. Hasil analisis proyeksi peningkatan suhu di NTB di masa depan memprediksi akan terjadi kenaikan suhu sekitar (1,1-1,7)°C pada periode (2040-2069) yang terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Sumbawa bagian barat. Pada periode (2070-2099) perubahan suhu semakin meluas dan berkisar antara sekitar (2,6-3,7)°C baik di pulau Lombok maupun pulau Sumbawa terutama bagian barat dan timur. Kenaikan suhu tertinggi terjadi di wilayah Lombok bagian utara dan Sumbawa bagian tengah dan barat (Ripaldi, 2014). Dengan kenaikan temperatur yang relatif tinggi dan merata diseluruh wilayah NTB akan mempengaruhi tingkat kesesuaian agroklimat dan produktivitas padi dimasa depan.

Dampak berkesinambungan penting yang kedua adalah perubahan awal musim yang menyebabkan perubahan intensitas curah hujan, dimulainya dan panjangnya musim. Naylor et al., (2007) memproyeksikan peningkatan probabilitas keterlambatan siklus hujan di Jawa dan Bali, yang merupakan sentra produksi padi utama di Indonesia. Kajian ini mengindikasikan peningkatan probabilitas keterlambatan awal musim pada tahun 2050 sebanyak 30 hari yang berpotensi menurunkan 14 persen produksi padi di Indonesia. Implikasi dari awal musim hujan dan musim kemarau sangat menentukan saat untuk memulai musim tanam dan musim panen serta jenis komoditas pertanian yang diusahakan oleh petani di NTB. Terjadinya pergeseran awal musim hujan mengakibatkan terganggunya ketersediaan air irigasi (*water balance*) karena terjadi defisit air untuk lahan sawah beririgasi. Sedangkan untuk daerah sawah tada hujan seperti di daerah Lombok Selatan terancam akan gagal tanam dan atau gagal panen.

Perubahan suhu dan curah hujan juga meningkatkan serangan hama dan penyakit pada tanaman. Kementerian Lingkungan Hidup (2007) melaporkan peningkatan populasi hama wereng padi yang signifikan ketika curah hujan meningkat pada musim pancaroba. Peningkatan serangan hama dan penyakit jenis baru mungkin juga terjadi pada saat perubahan iklim. Pengamatan lapangan oleh Nastari Bogor dan Klinik Tanaman IPB (2007) dan Wiyono (2007) telah mengidentifikasi resiko ini, dan kondisi ini juga terjadi pada beberapa sentra produksi padi di Indonesia. Perubahan suhu dan curah hujan juga akan mempengaruhi kesehatan manusia melalui dampaknya terhadap krisis air bersih, buruknya kualitas udara, meningkatnya perkembangbiakan nyamuk, kurangnya asupan makanan bergizi, dan terganggunya akses ke fasilitas dan layanan kesehatan. Munculnya penyakit yang ditularkan oleh nyamuk (*vector borne deseases*), kolera (*diarrheal deseases*) dan kurangnya ketersediaan air bersih karena kekeringan yang dapat menyebabkan wabah penyakit menular. Terganggunya kesehatan akan menurunkan kemampuan individu untuk dapat memanfaatkan pangan. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dan infrastruktur sanitasi yang kurang memadai.

Sementara sebagian besar literatur sepakat terhadap dampak berkesinambungan dari perubahan iklim, akan tetapi ada beberapa perbedaan pendapat tentang dampak perubahan iklim yang tidak berkesinambungan terhadap terjadinya kejadian ekstrim. Beberapa kajian seperti Knutson et al., (2010) memprediksi peningkatan intensitas rata-rata siklon tropis secara global sebesar 2-11 persen pada tahun 2100. Tetapi di sisi lain, model mengindikasikan penurunan frekuensi siklon secara substansial sekitar 6-30 persen, yang berarti bahwa dampak peningkatan kejadian ekstrim tidak harus meningkatkan intensitas siklon. Walaupun demikian, apabila siklon tropis terjadi di belahan bumi selatan bisa menyebabkan hujan lebat berhari-hari dan berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya curah hujan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini dapat mengganggu distribusi pangan baik karena terganggunya ketersediaan pangan lokal ataupun jaringan/infrastruktur

logistik sehingga harga pangan meningkat. Harga pangan yang meningkat dapat menurunkan konsumsi kalori dan protein dan meningkatkan potensi terjadinya kasus gizi buruk pada anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Keadaaan akan menjadi lebih parah dengan menurunnya bahkan hilangnya sumber pendapatan dan penghidupan masyarakat terutama dalam upaya untuk mengakses pangan yang pada gilirannya akan mempengaruhi pola konsumsi dan kondisi nutrisi keluarga.

6.6 Strategi untuk ketahanan pangan berkelanjutan

Daerah yang saat ini tahan pangan mungkin tidak selamanya berada dalam kondisi tahan pangan apabila tidak ada strategi dan upaya yang dilakukan oleh petani, sektor swasta dan pengambil kebijakan secara berkelanjutan. Selain itu, dampak bencana dapat berpengaruh terhadap situasi pangan dan gizi, apabila mekanisme kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana kurang memadai. Strategi berikut ini perlu direkomendasikan untuk seluruh kabupaten untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan:

1. Menjamin kepastian panen tanaman pangan tanpa hanya mengandalkan tanaman padi sebagai tanaman utamanya misalnya dengan diversifikasi tanaman non padi yang bernilai ekonomi tinggi, membangun tampungan air hujan, usaha budidaya padi Tanpa Olah Tanah (TOT) di lahan tadah hujan dan menanam varietas yang berumur genjah, untuk mengatasi resiko gagal tanam.
2. Menjamin ketersediaan air irigasi pada saat tidak terjadi hujan dengan memfasilitasi petani untuk membuat embung rakyat atau meningkatkan kapasitas embung yang sudah mengatur dan menerapkan pola tanam, jadwal tanam serta pengaturan jadwal pembagian air untuk kawasan hulu, tengah dan hilir pada setiap daerah irigasi berdasarkan climate forecasting BMKG, untuk mengatasi gagal panen. Hal ini membutuhkan perbaikan dalam sistem diseminasi informasi cuaca.
3. Memperkuat kemampuan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan dan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dan pengembangan ketahanan sosial-ekonomi untuk memperkuat resiliensi dan mengurangi tingkat kerentanan.
4. Menurunkan tingkat deforestasi dan mempromosikan reforestasi (penghutanan kembali): dampak dari perubahan iklim yang sering terjadi di NTB adalah rendahnya curah hujan dan kadang-kadang disertai dengan intensitas curah hujan yang tinggi sehingga beberapa kabupaten perlu memperhatikan tingkat deforestasi hutan yang terus terjadi di dalam kawasan hutan yaitu di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa dan Dompu. Dampak dari perubahan iklim bagi NTB adalah variabilitas curah hujan dan kadang-kadang disertai dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Kabupaten dengan tutupan vegetasi yang sangat sedikit akan memiliki potensi yang tinggi terhadap banjir bandang dan tanah longsor sehingga perlu upaya meningkatkan penutupan vegetasi permukaan tanah (reforestasi) sebagai tindakan pencegahannya.
5. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS): seluruh kabupaten diharapkan memiliki rencana induk pengelolaan DAS yang terintegrasi dengan strategi adaptasi perubahan iklim. Pada satu sisi, hal ini akan meningkatkan produktivitas lahan dengan naiknya hasil panen sedangkan di sisi yang lain, memasukkan resiko iklim sesuai dengan kondisi agroklimat lokal akan menciptakan pertanian yang berkelanjutan bagi penghidupan masyarakat.

6. Kesiapsiagaan bencana dan rencana kontijensi: kabupaten-kabupaten yang sering mengalami kejadian bencana harus menyusun rencana kontijensi tingkat masyarakat dan membentuk kelembagaan dan struktur badan penanggulangan bencana untuk pengurangan resiko bencana dan meningkatkan kemandirian.
7. Terkait dengan pemanasan global, perubahan iklim dan dampaknya terhadap pulau-pulau kecil, maka prioritas penanggulangan bencana di NTB harus pula sinergis dan terintegrasi dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Lima prioritas penanggulangan bencana yang harus dilakukan adalah :
 - a. Meletakkan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional dan daerah dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk implementasi.
 - b. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau resiko bencana serta meningkatkan sistem peringatan dini.
 - c. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan.
 - d. Mengurangi faktor dan cakupan resiko bencana.
 - e. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana pada semua lapisan masyarakat, agar respon yang dilakukan lebih efektif.
8. Sistem kesiapsiagaan dini dan kewaspadaan: sistem kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang inovatif untuk pangan dan gizi perlu dibentuk di seluruh kabupaten yang rawan bencana untuk mengidentifikasi resiko dan dapat secara cepat mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mitigasi dampak bencana yang terjadi di masa mendatang.
9. Meningkatkan sistem deteksi dini untuk analisis yang luas secara terpisah serta meningkatkan desiminasi data citra satelit seperti penggunaan lahan, kebakaran hutan, banjir, tutupan vegetasi, air tanah dan parameter kunci lainnya untuk manajemen sumberdaya alam secara ilmiah pada tingkat lokal.
10. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan sebagai tindakan jangka panjang melalui pendidikan usia dini serta kampanye kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Ripaldi. 2014. *Kajian Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesesuaian Agroklimat dan Produktivitas Padi di NTB*. Thesis ITB. Bogor.
- Aldrian, E., Gates, L.D., and Widodo, F.H. (2007): *Seasonal variability of Indonesian rainfall in ECHAM4 simulations and in the reanalyses, The role of ENSO*. Theoretical and Applied Climatology, 87, 41–59.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB. 2014. *Data dan Informasi - Jenis dan Jumlah Bencana Alam dan Kerusakannya, 2012 – 2014*. Mataram.
- Boer, R, and Kartikasari, K. 2014. *Climate Change Impact on Food Security in Southeast Asia*. On Special Policy Report of RSIS Center for Non-Traditional Security (NTS) Studies, Expert Group Meeting on the Impact of Climate change on ASEAN Food security, 6-7 June 2013.
- Boer, R., A. Buono, Sumaryanto, E. Surmaini, A. Rakhman, W. Estiningtyas, K. Kartikasari, and Fitriyani. 2009b. Agriculture Sector. *Technical Report on Vulnerability and Adaptation Assessment to Climate Change for Indonesia's Second National Communication*. Ministry of Environment and United Nations Development Programme, Jakarta.
- Dinas Kehutanan Provinsi NTB. 2014. *Statistik Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2014*. Mataram.
- Dinas Kehutanan Provinsi NTB. 2014. *Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2013-2018*. Mataram.
- Dinas Kehutanan Provinsi NTB. 2015. *Statistik Kehutanan Tahun 2015*. Mataram.
- Forster, H., Sterzel, T, Pape, C.A, Moneo-Lain, M., Niemeyer, I, Boer, R, and Kropp, J.P. 2011. *Sea-level rise in Indonesia: on adaptation priorities in the agricultural sector*. Regional Environmental Change 11, 4893-904.
- Haylock, M. and McBride, J. L. (2001): *Spatial Coherence and Predictability of Indonesian Wet Season Rainfall*. Journal of Climate, 14, 3882-3887.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)*. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2007. *Indonesia Country Report: Climate Variability and Climate Change, and their Implication*. Ministry of Environment, Republic of Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan GTZ. 2010. *Kajian Resiko dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Pulau Lombok Provinsi NTB – Sektor Pertanian*. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2014. *Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013*. Jakarta.
- Knutson, R.R., McBride, J.L., Chan, J., Emanuel, K., Holland, G., Landsea, C., Held, I., Kossin, J.P., Srivastava, A.K., & Sugi, M. (2011). *Tropical cyclones and climate change*. Nature Geoscience 3, 157 – 163.

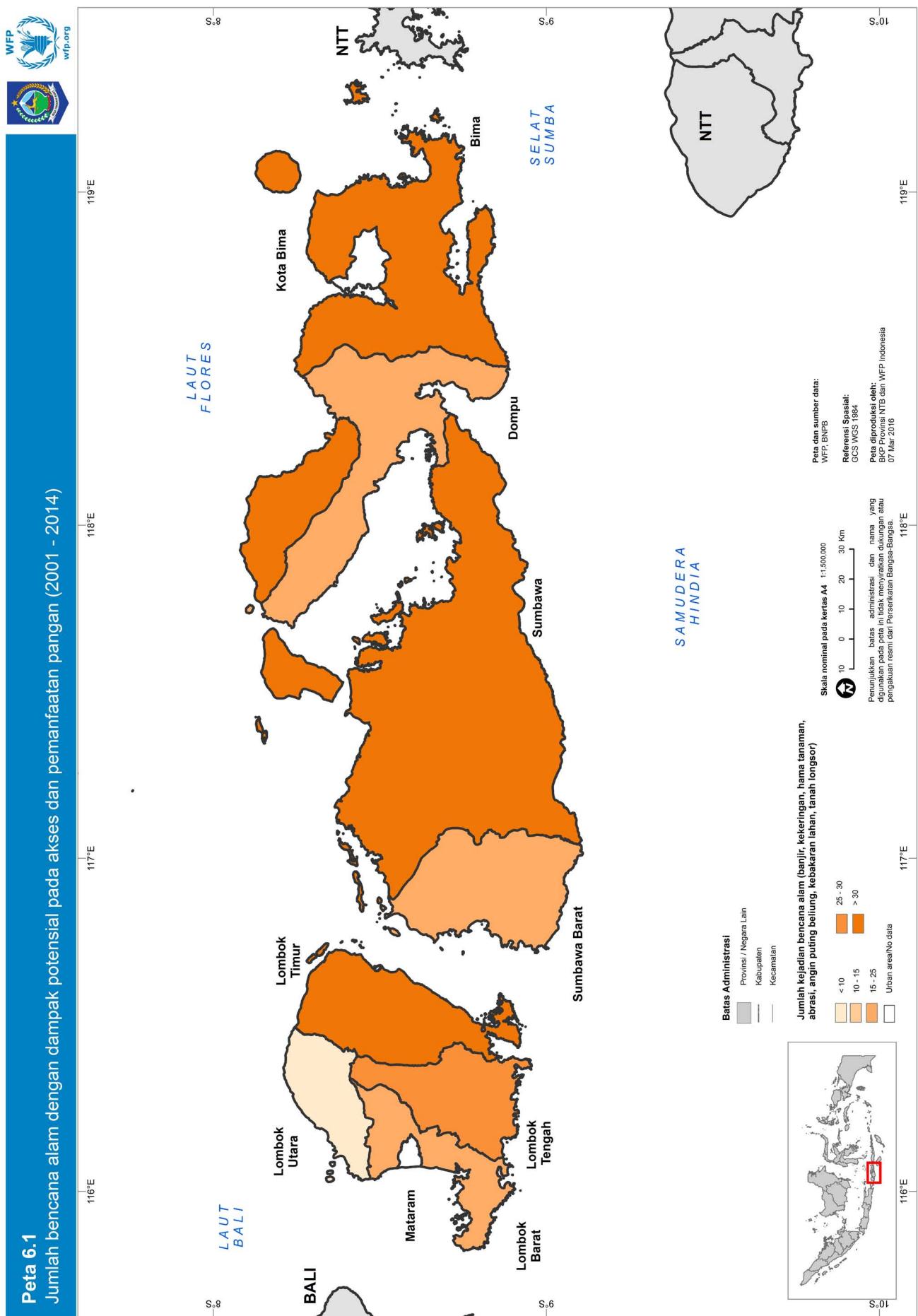
Nastari Bogor dan Klinik Tanaman IPB. 2007. *Laporan Safari Gotong Royong Sambung Keperluan untuk Petani Indonesia di 24 Kabupaten-Kota di Pulau Jawa 4 April-2 Mei 2007*. Yayasan Nastari Bogor- Klinik Tanaman IPB. Bogor.

Naylor R, Battisti D, Vimont D, Falcon W, Burke M. (2007). *Assessing risks of climate variability and climate change for Indonesian rice agriculture*. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 104: 7752–7757.

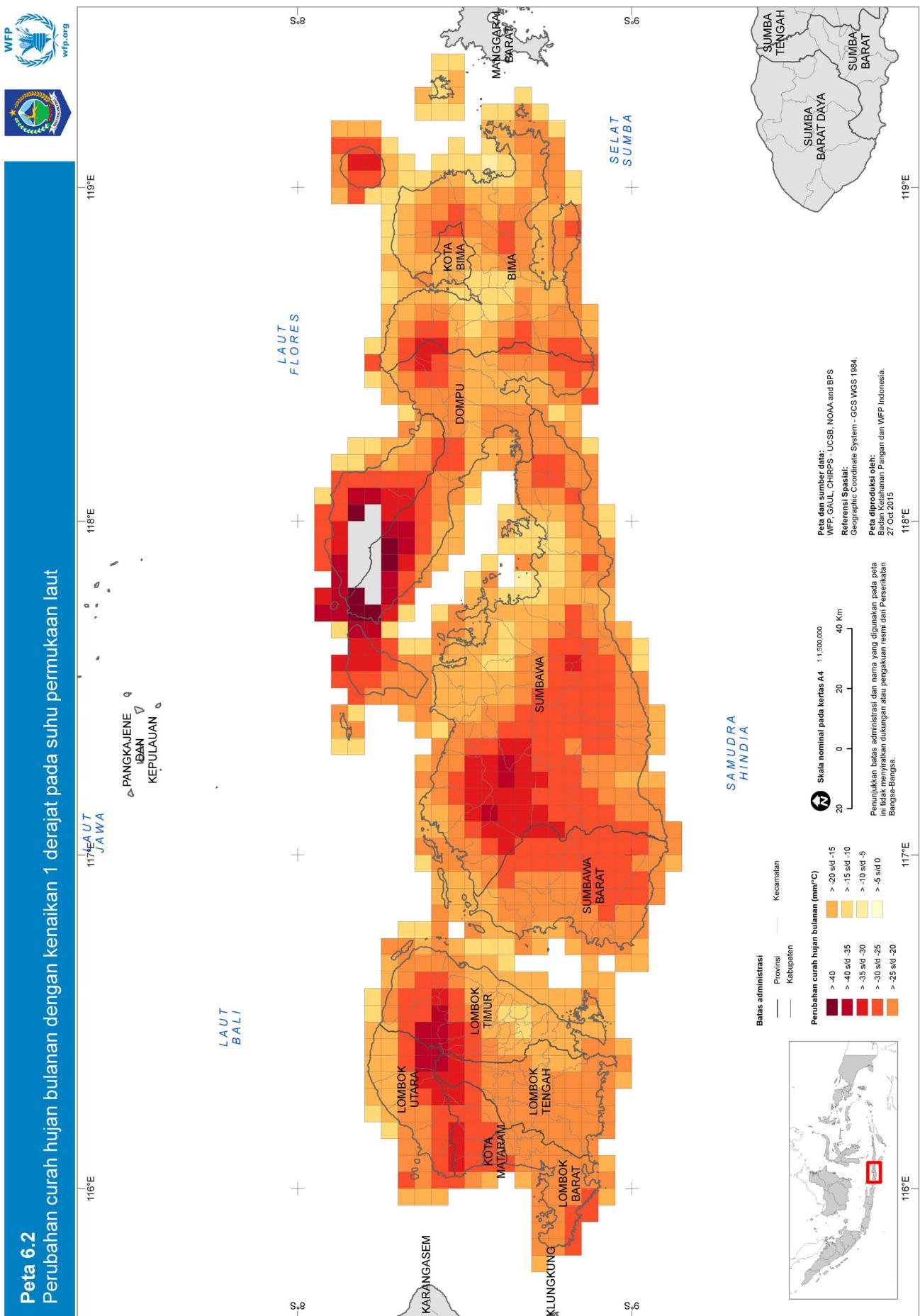
Qian, J. H., A. W. Robertson, and Moron, V. (2010) : *Interactions between ENSO, monsoon and diurnal cycle in rainfall variability over Java, Indonesia*. Journal of Atmospheric Science, 67, 3509-3524.

Wiyono, S. 2009. *Perubahan Iklim, Pemicu Ledakan Hama dan Penyakit Tanaman*. Majalah Salam Edisi 26 Januari 2009.

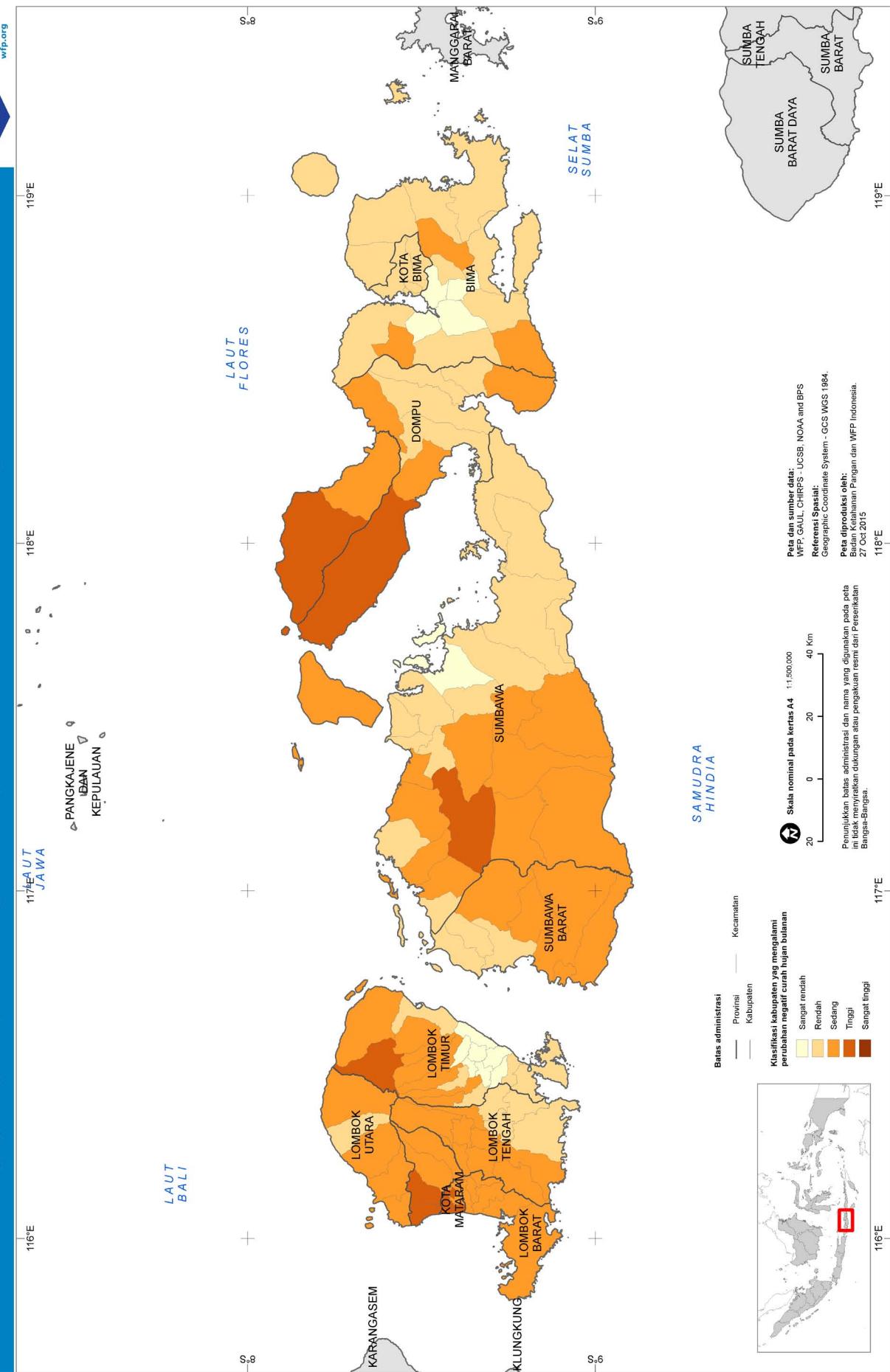
Peta 6.1
Jumlah bencana alam dengan dampak potensial pada akses dan pemanfaatan pangan (2001 - 2014)



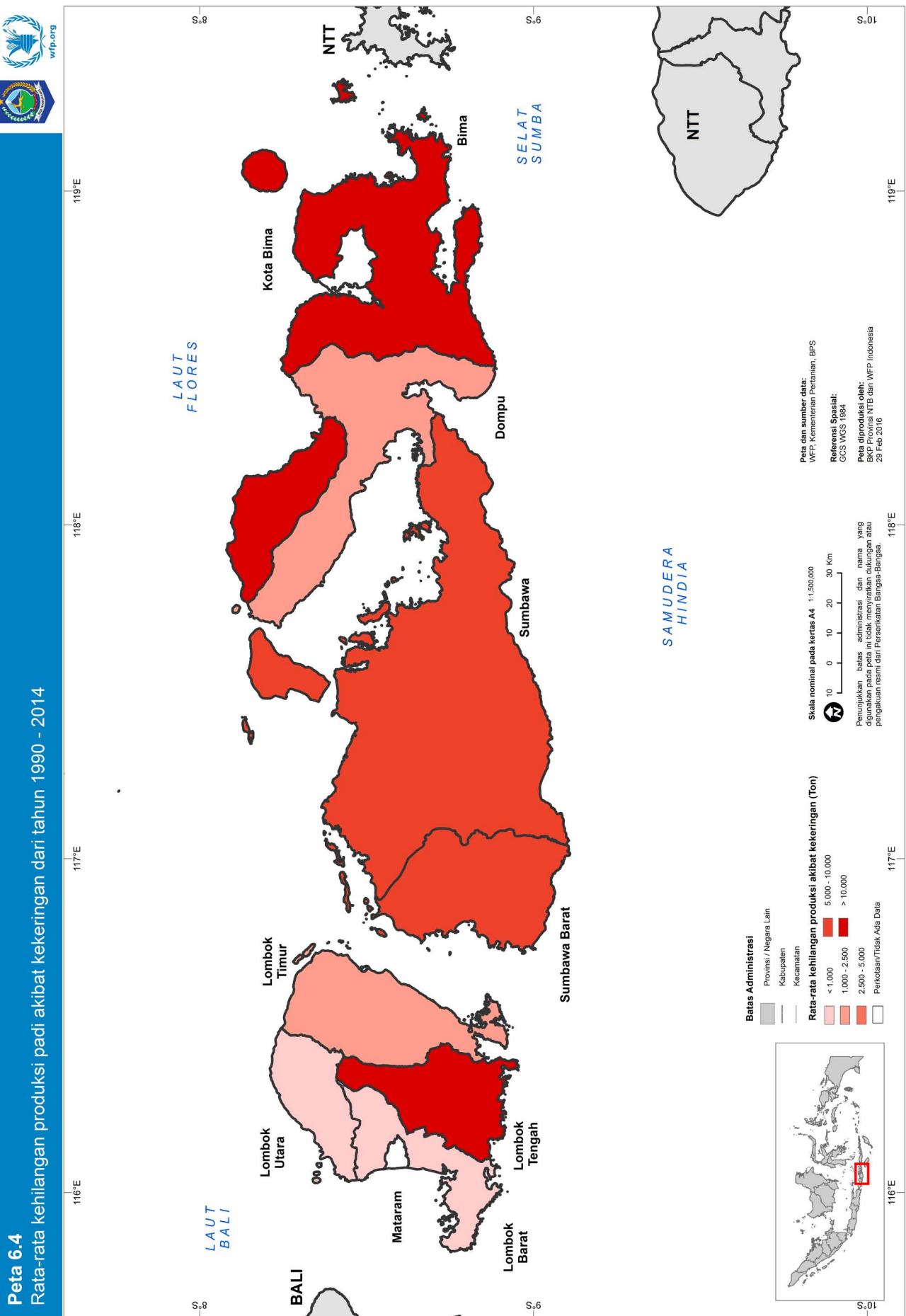
Peta 6.2
Perubahan curah hujan bulanan dengan kenaikan 1 derajat pada suhu permukaan laut



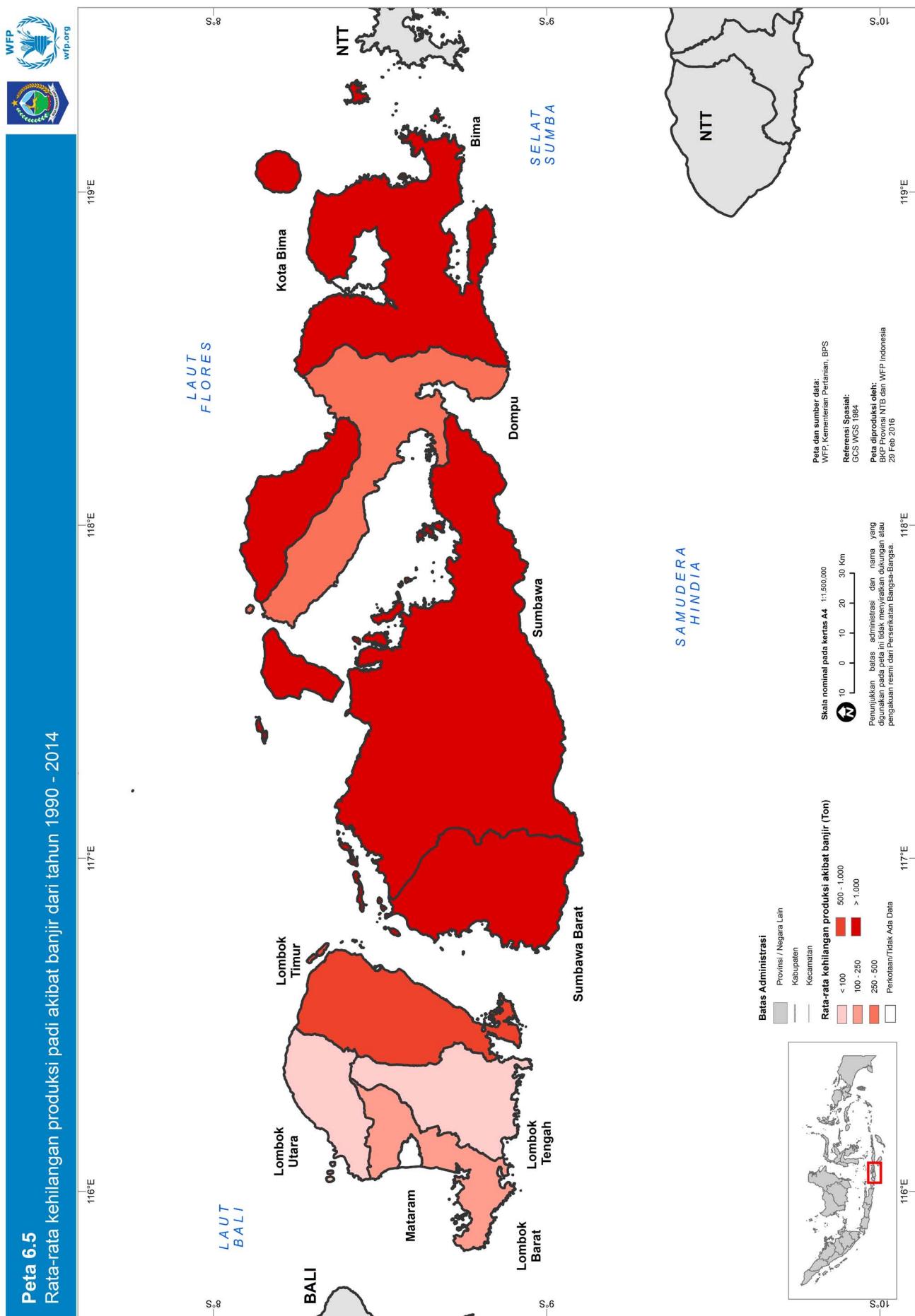
Peta 6.3
Klasifikasi kecamatan yang mengalami perubahan negatif curah hujan bulanan berdasarkan kekuatan sinyal El Niño Southern Oscillation



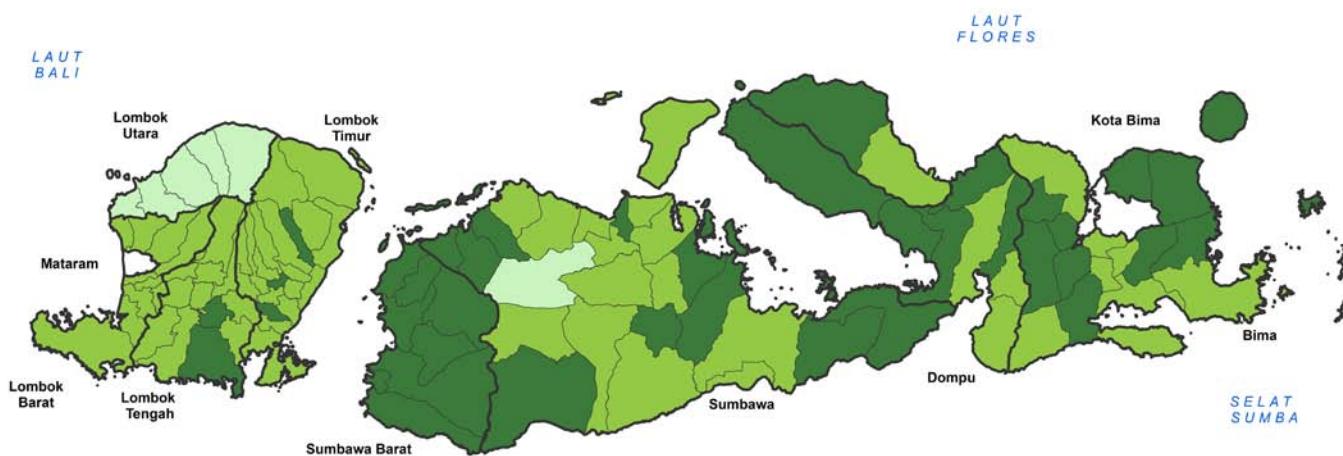
Peta 6.4
Rata-rata kehilangan produksi padi akibat kekeringan dari tahun 1990 - 2014



Peta 6.5
Rata-rata kehilangan produksi padi akibat banjir dari tahun 1990 - 2014



Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Komposit



7.1 Ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat

Banyak faktor dapat mempengaruhi kerentanan rumah tangga terhadap kerawanan pangan. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menurut keterkaitannya dengan tiga dimensi ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan serta pemanfaatan zat-zat gizi dalam pangan. Berdasarkan literatur yang ada, peta ini menetapkan sembilan indikator yang mencakup setiap tiga dimensi ketahanan pangan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang ada. Definisi, perhitungan dan sumber data setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 1.1. Hubungan antar indikator dan ketahanan pangan, dijelaskan secara rinci pada Bab 2 sampai 6.

Sesuai dengan kesepakatan Tim Penyusun FSVA, metodologi untuk penyusunan peringkat dan pengelompokan kecamatan ke dalam prioritas-prioritas pada FSVA NTB 2015 ini berbeda dengan FSVA Nasional 2015 dan FSVA NTB 2010. FSVA NTB 2010 menggunakan metode Analisa Kluster (*Cluster Analysis*) dan Analisis Diskriminan (*Discriminant Analysis*), sedangkan FSVA NTB 2015 menggunakan metode *cut-off point* (ambang batas). Kecamatan-kecamatan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi.

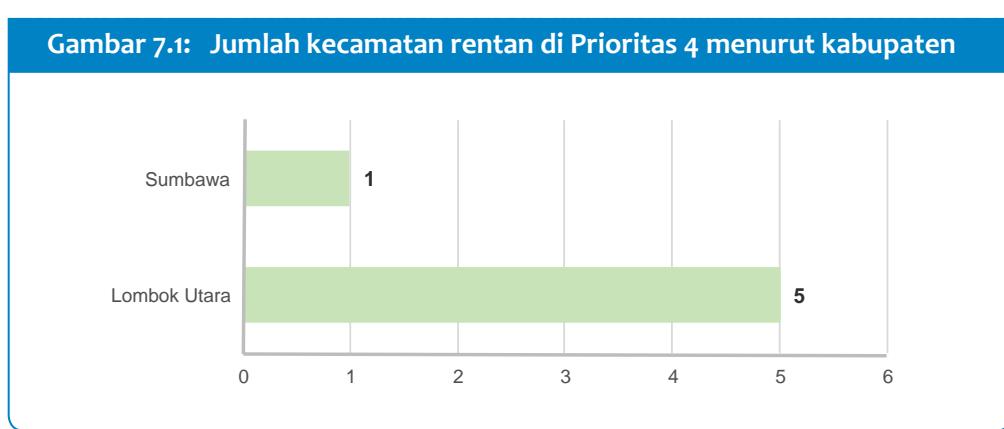
Pengelompokan kecamatan dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan, dimana masing-masing Prioritas akan memiliki *cut-off point* (ambang batas) yang tetap berdasarkan pembobotan pada 9 indikator kerawanan pangan kronis. *Cut-off point* tersebut diperoleh

berdasarkan hasil pengkalian antara bobot indikator dari hasil Analisis Komponen Utama (*Principal Component Analysis – PCA*) pada data gabungan FSVA Nasional dari tahun 2005, 2009 dan 2015 dengan cut-off point indikator individu yang bersangkutan, kemudian hasil dari 9 indikator tersebut dijumlahkan. Kelebihan dari metode *cut-off point* adalah dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan target kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang akan dicapai oleh pemerintah serta memudahkan melihat trend perubahan situasi ketahanan pangan antar wilayah di Indonesia. Penjelasan lebih detail tentang metode komposit ini tersedia di Lampiran 3.

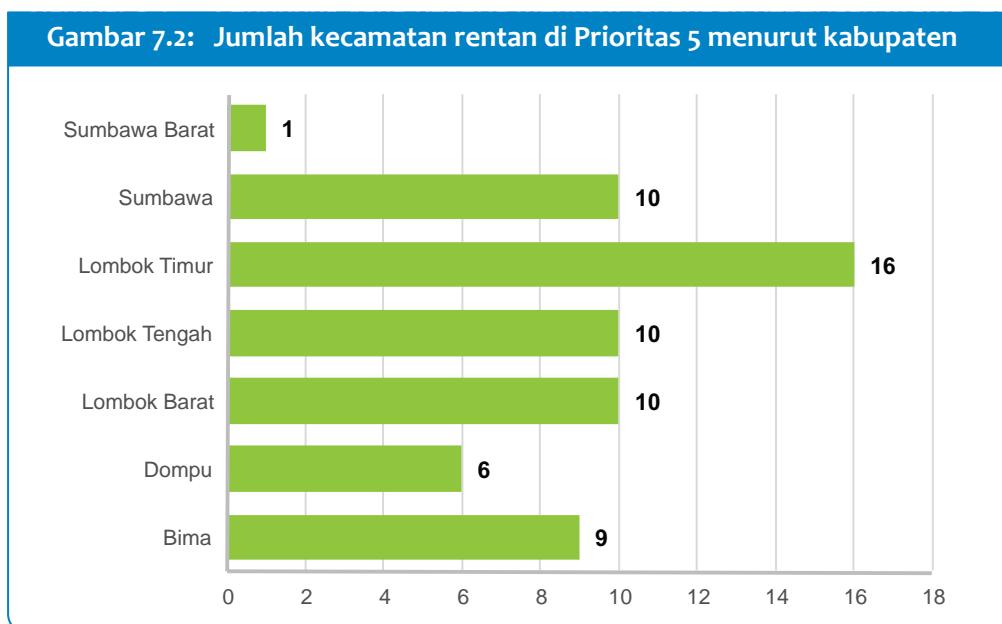
Kecamatan yang masuk dalam Prioritas 1 adalah kecamatan-kecamatan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kecamatan dengan prioritas di atasnya. Dengan demikian, Prioritas 6 adalah kecamatan-kecamatan yang cenderung lebih tahan pangan. Kecamatan-kecamatan di Prioritas 1, 2 dan 3 cenderung sangat rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi, sedangkan kecamatan-kecamatan Prioritas 4, 5 dan 6 termasuk kategori lebih tahan pangan. Kecamatan dipetakan dalam gradasi warna merah untuk kelompok prioritas I, 2 dan 3 dan gradasi warna hijau untuk Prioritas 4, 5 dan 6 (Peta 7.1).

Penting untuk diingat, bahwa tidak semua rumah tangga di kecamatan-kecamatan prioritas tinggi (Prioritas 1 – 3) tergolong rawan pangan, demikian juga tidak semua rumah tangga di kecamatan-kecamatan prioritas rendah (Prioritas 4-6) tergolong tahan pangan. Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk mengidentifikasi dimanakah kecamatan yang lebih rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi berdasarkan ketersediaan data sekunder.

Berdasarkan analisis komposit ketahanan pangan, 105 kecamatan dikelompokkan ke dalam enam kelompok prioritas sebagai berikut: enam kecamatan pada Prioritas 4 (6 persen), 62 kecamatan pada Prioritas 5 (59 persen), dan 37 kecamatan pada Prioritas 6 (35 persen). Tidak ada satupun kecamatan di Provinsi NTB yang tergolong dalam kecamatan yang rentan pangan (Prioritas 1-3). Sebaran enam kecamatan Prioritas 4 yaitu lima kecamatan di Kabupaten Lombok Utara (Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan) dan satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa (Kecamatan Batulan teh) (Gambar 7.1).

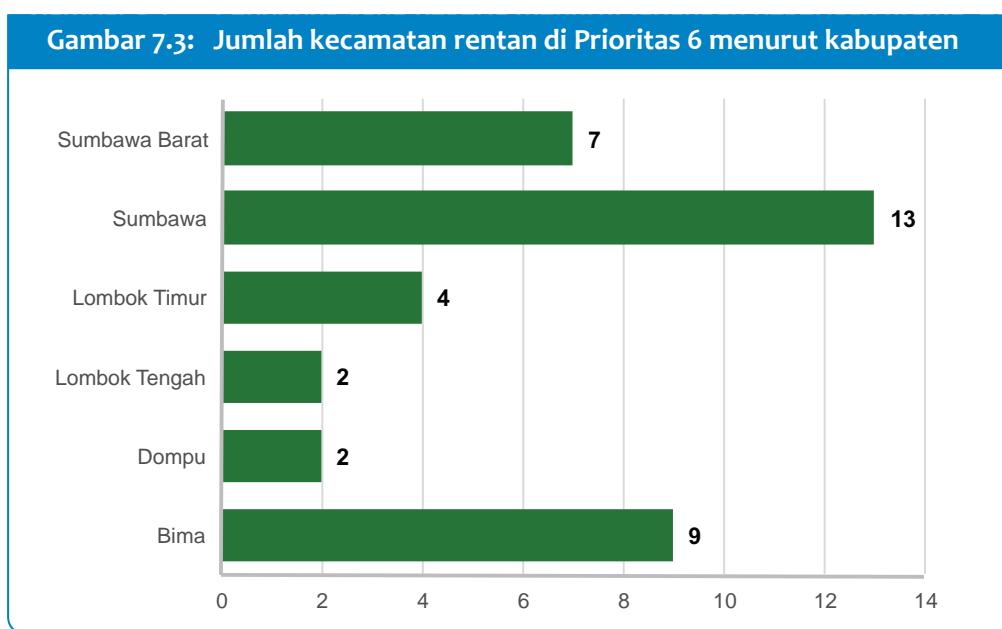


Selanjutnya kecamatan pada Prioritas 5 tersebar di Kabupaten Lombok Timur (16 kecamatan), Lombok Barat, Lombok Tengah dan Sumbawa masing-masing 10 kecamatan, Bima (sembilan kecamatan), Dompu (enam kecamatan), dan Sumbawa Barat (satu kecamatan) (Gambar 7.2).



Sumber: FSVA NTB, 2015

Kecamatan pada Prioritas 6 tersebar di Kabupaten Sumbawa (13 kecamatan), Bima (sembilan kecamatan), Sumbawa Barat (tujuh kecamatan), Lombok Timur (empat kecamatan), Lombok Tengah dan Dompu masing-masing dua kecamatan (Gambar 7.3).



Sumber: FSVA NTB, 2015

Tabel 7.1 menunjukkan sebaran kabupaten di tiap kelompok prioritas, sedangkan Tabel 7.2 menunjukkan sebaran kelompok prioritas di tiap kabupaten. Kedua tabel ini menyoroti konsentrasi kecamatan Prioritas 4 yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Utara dan satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Sedangkan kecamatan Prioritas 5 dan Prioritas 6 tersebar di 7 kabupaten di NTB. Tidak terdapat kecamatan dalam kelompok Prioritas 1-3.

Tabel 7.1: Sebaran kelompok prioritas antar kabupaten (persen)

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan Pada Prioritas					
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6
1	Bima	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,5%	24,3%
2	Dompu	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,7%	5,4%
3	Lombok Barat	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,1%	0,0%
4	Lombok Tengah	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,1%	5,4%
5	Lombok Timur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,8%	10,8%
6	Lombok Utara	0,0%	0,0%	0,0%	83,3%	0,0%	0,0%
7	Sumbawa	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	16,1%	35,1%
8	Sumbawa Barat	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	18,9%
NTB		0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber: FSVA NTB, 2015

Tabel 7.2: Sebaran kelompok prioritas di dalam tiap kabupaten (persen)

Kabupaten	Jumlah Kecamatan Pada Prioritas						Total
	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6	
Bima	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	100%
Dompu	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	25,0%	100%
Lombok Barat	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100%
Lombok Tengah	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	83,3%	16,7%	100%
Lombok Timur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	80,0%	20,0%	100%
Lombok Utara	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100%
Sumbawa	0,0%	0,0%	0,0%	4,2%	41,7%	54,2%	100%
Sumbawa Barat	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	87,5%	100%

Sumber: FSVA NTB, 2015

Karakteristik utama dari kerentanan terhadap kerawanan pangan di tiap daerah berbeda-beda, maka pendekatan-pendekatan khusus untuk mengurangi kerentanan juga akan berbeda-beda pada setiap kecamatan. Dengan menentukan karakteristik utama dari kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kecamatan, maka peta ini dapat memberikan petunjuk yang lebih baik kepada para pengambil kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan penentuan program ketahanan pangan.

Dari seluruh kecamatan, karakteristik utama yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerawanan pangan adalah: i) tingginya prevalensi *stunting* pada balita; ii) tingginya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan; iii) tingginya angka perempuan buta huruf; dan iv) rendahnya angka harapan hidup.

Seperti dijelaskan sebelumnya, berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa tidak ada satupun kecamatan di NTB yang termasuk kelompok rentan pangan. Namun jika lebih diperinci, kecamatan-kecamatan yang memiliki nilai terendah yang tergolong dalam Prioritas 4 masih memiliki permasalahan yang cukup besar di sejumlah indikator secara berturut-turut sebagai berikut:

i) tingginya prevalensi *stunting* pada balita, ii) tingginya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, iii) tingginya angka perempuan buta huruf; iv) angka harapan hidup; v) tingginya rasio konsumsi terhadap produksi. Mayoritas kecamatan-kecamatan di Prioritas 4 merupakan daerah surplus produksi serealia, kecuali 1 kecamatan di Kabupaten Lombok Utara (Kecamatan Pemenang) yang mengalami defisit tinggi. Hal ini disebabkan karena tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi daerah sentra perekonomian dan perdagangan.

Prioritas 4	
Rasio konsumsi terhadap produksi	0,81
Angka Kemiskinan	33,91
Terbatasnya akses ke jalan/transportasi air	13,89
Terbatasnya akses ke listrik	7,30
Terbatasnya akses ke air bersih	30,55
Angka harapan hidup	62,92
Terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan	0
Angka Perempuan buta huruf	27,54
<i>Stunting</i> pada Balita	42,61

Prioritas 5	
Rasio konsumsi terhadap produksi	0,38
Angka Kemiskinan	17,06
Terbatasnya akses ke jalan/transportasi air	2,09
Terbatasnya akses ke listrik	3,72
Terbatasnya akses ke air bersih	24,84
Angka harapan hidup	62,88
Terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan	0
Angka Perempuan buta huruf	18,80
<i>Stunting</i> pada Balita	41,60

Pencapaian utama kecamatan pada Prioritas 5 adalah rata-rata kecamatan memiliki akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar yang baik, angka kemiskinan dan perempuan buta huruf yang lebih rendah. Walaupun demikian, kecamatan pada Prioritas 5 masih memiliki prevalensi *stunting* balita yang sangat tinggi (> 40 persen), angka perempuan buta huruf yang tinggi (18,8 persen), serta rendahnya angka harapan hidup.

Prioritas 6	
Rasio konsumsi terhadap produksi	0,28
Angka Kemiskinan	16,92
Terbatasnya akses ke jalan/transportasi air	0
Terbatasnya akses ke listrik	3,35
Terbatasnya akses ke air bersih	27,15
Angka harapan hidup	63,11
Terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan	0
Angka Perempuan buta huruf	12,67
<i>Stunting</i> pada Balita	29,93

Kecamatan-kecamatan Prioritas 6 merupakan kecamatan-kecamatan paling tahan pangan dan gizi, dimana rata-rata kecamatan memiliki pencapaian yang sangat baik pada sejumlah indikator berikut: i) akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar yang sangat baik, ii) rendahnya angka perempuan buta huruf, dan v) prevalensi *stunting* dibawah 30 persen.

7.2 Perubahan kerentanan terhadap ketahanan pangan kronis, 2010-2015

Untuk menentukan perubahan dalam ketahanan pangan dan gizi antara tahun 2010 dan 2015, data-data indikator pada FSVA NTB 2010 dan 2015 dianalisa untuk mendapatkan indikator komposit dengan metode yang sama yaitu metode *cut-off* (ambang batas) sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 3. Tidak terjadi pemekaran kecamatan antara tahun 2010 dan 2015, sehingga jumlah kecamatan yang dianalisis tetap sama yaitu 105 kecamatan. Jumlah kecamatan tiap kelompok prioritas pada FSVA NTB 2010 dan 2015 disajikan pada Tabel 7.3.

Tabel 7.3: Jumlah kecamatan per kelompok prioritas pada FSVA NTB 2010 dan 2015 berdasarkan hasil perhitungan dengan metode cut-off

Prioritas	FSVA NTB 2010		FSVA NTB 2015	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	0	0%	0	0%
2	0	0%	0	0%
3	1	1%	0	0%
4	8	8%	6	6%
5	72	69%	62	59%
6	24	23%	37	35%

Sumber: FSVA NTB 2010 dan 2015

Pada FSVA NTB 2015 ini juga dijelaskan perubahan status prioritas kecamatan antara FSVA NTB 2010 dan 2015 (Peta 7.2 dan Tabel 7.4). Perubahan prioritas tersebut dibagi menjadi lima kategori, dimana:

1. Warna hijau tua menunjukkan peningkatan prioritas sebanyak dua tingkat atau lebih, misalnya dari Prioritas 3 menjadi 5.
2. Warna hijau muda menunjukkan peningkatan prioritas sebanyak satu tingkat, misalnya dari Prioritas 3 menjadi 4.
3. Warna kuning menunjukkan tidak adanya perubahan prioritas misalnya dari prioritas 3 tetap di Prioritas 3.
4. Warna merah muda menunjukkan penurunan sebanyak satu tingkat, misalnya dari Prioritas 3 menjadi 2.
5. Warna merah tua menunjukkan penurunan prioritas sebanyak dua tingkat atau lebih, misalnya dari Prioritas 3 menjadi 1.

Tabel 7.4: Perubahan tingkat prioritas kecamatan menurut kabupaten, 2010 – 2015

Kabupaten	Penurunan Prioritas 2 Tingkat atau Lebih	Penurunan Prioritas 1 Tingkat	Tidak ada perubahan	Peningkatan Prioritas 1 Tingkat	Peningkatan Prioritas 2 Tingkat atau Lebih
Bima	0%	11.1%	44.4%	44.4%	0.0%
Dompu	0%	0.0%	75.0%	25.0%	0.0%
Lombok Barat	0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
Lombok Tengah	0%	0.0%	83.3%	16.7%	0.0%
Lombok Timur	0%	5.0%	65.0%	20.0%	10.0%
Lombok Utara	0%	80.0%	0.0%	20.0%	0.0%
Sumbawa	0%	16.7%	66.7%	16.7%	0.0%
Sumbawa Barat	0%	0.0%	62.5%	37.5%	0.0%
NTB	0%	10.5%	64.8%	22.9%	1.9%

Sumber: FSVA NTB, 2015

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode dan indikator yang sama untuk data tahun 2010 dan 2015

Berdasarkan hasil analisis, terlihat 2 kecamatan (1,9 persen) telah berhasil meningkatkan status prioritasnya sebanyak dua tingkat atau lebih dan terdapat 24 kecamatan (22,9 persen) yang menunjukkan perbaikan satu tingkat, yang tersebar di sebagian besar kabupaten kecuali Kabupaten Lombok Barat.

Sementara 68 kecamatan (64,8 persen) tidak mengalami perubahan pada status prioritas dari tahun 2010 dan 2015, sedangkan 11 kecamatan (10,5 persen) mengalami penurunan status sebanyak satu tingkat yang berada di Kabupaten Bima, Lombok Timur, Lombok Utara dan Sumbawa. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa situasi pada tahun 2015 meningkat dibandingkan 2010. Kecamatan-kecamatan yang mengalami penurunan tingkat prioritas perlu mendapatkan perhatian dan prioritas program untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi.

Strategi intervensi berdasarkan kelompok prioritas

Definisi ketahanan pangan mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 2012, dengan ditetapkannya Undang Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menggantikan UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan. Dalam UU Pangan yang baru, ketahanan pangan didefinisikan sebagai "kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan". Selanjutnya terdapat penekanan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: i) kedaulatan; ii) kemandirian; iii) ketahanan; iv) keamanan; v) manfaat; vi) pemerataan; vii) berkelanjutan; dan viii) keadilan.

1. Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pengurangan kerawanan pangan harus ditekankan pada penyelesaian akar utama penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan dengan mengacu kepada perubahan paradigma ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan Pemerintah NTB dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pengurangan kerwanan pangan antara lain: Memberdayakan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses terhadap faktor produksi (lahan dan modal), termasuk perbaikan infrastruktur. Pemerintah perlu untuk: i) menyusun skema baru subsidi bunga kredit dan penjaminan; ii) mengeluarkan regulasi untuk mempercepat dan mempermudah realisasi KUR untuk petani/nelayan; iii) rehabilitasi infrastruktur termasuk jaringan irigasi.
2. Mengadaptasi program pengentasan kemiskinan yang sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan intervensi gizi sebagai pengakuan dekatnya hubungan antara kemiskinan dan gizi, misalnya dengan memasukkan indikator gizi seperti prevalensi *stunting* sebagai salah satu indikator dampak dari program tersebut.
3. Perubahan pola konsumsi pangan secara tidak langsung tergantung pada kemampuan daya beli masyarakat dan kestabilan harga pangan. Karena itu, kebijakan pangan yang mencakup optimalisasi produksi bahan pangan lokal, pemerataan distribusi pangan, efisiensi perdagangan, dan peningkatan daya beli masyarakat menjadi sesuatu yang mendesak untuk segera diupayakan.
4. Melihat pola konsumsi pangan sumber karbohidrat (beras) maka Pemerintah harus melakukan reorientasi program yang berbasis kemandirian pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal yang menjadi pangan pokok masyarakat. Kearifan lokal perlu dikembalikan melalui intervensi sosial oleh pemerintah. Diantaranya adalah dengan mempromosikan makanan lokal yang menggunakan bahan lokal.
5. Memfasilitasi diversifikasi usaha dan konsumsi pangan melalui pengembangan teknologi dan industri pengolahan komoditas unggulan lokal sesuai dengan sumberdaya, kelembagaan, budaya yang dilakukan melalui konsep *Public-Private-Partnership* (PPPs). Untuk itu diperlukan: i) penguatan regulasi terhadap program kemitraan, insentif fiskal bagi pelaku usaha yang

memiliki program kemitraan yang baik dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah misalnya: iklim investasi yang ‘ramah’ di pedesaan, peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah; ii) perhatian pada upaya pengembangan kemampuan masyarakat, pengentasan kemiskinan secara terarah, serta perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil; iii) pengembangan industri pengolahan tersebut tetap harus memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sehingga tidak menciptakan alih fungsi lahan pertanian produktif di NTB.

6. Untuk mengatasi masalah *stunting*, maka pemerintah harus meningkatkan dan menjamin pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas dapat diakses oleh masyarakat miskin dan rentan sesuai dengan *continuum of care*, terfokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dimana intervensi gizi mempunyai efek yang lebih besar dan *cost effective*. Penanganan *stunting* di titikberatkan kepada kerjasama pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan.
7. Untuk meningkatkan manajemen program perbaikan gizi, pemerintah perlu: i) meningkatkan fungsi posyandu dan partisipasi masyarakat dalam memantau dan menanggulangi secara dini gangguan pertumbuhan pada balita; ii) mengembangkan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan surveilans berbasis masyarakat, Sistem Kewaspadaan Dini-Kejadian Luar Biasa Gizi Buruk dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); ii) mengembangkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan konseling gizi keluarga yang efektif, spesifik lokal yang berbasis *evidence* untuk memberdayakan masyarakat Kadarzi.
8. Peningkatan ruang fiskal untuk menaikkan alokasi dana sektor kesehatan dan penyesuaian biaya yang lebih baik bagi pembiayaan pelayanan kesehatan dasar untuk mendorong ekuitas. Untuk penyesuaian biaya, faktor kepadatan penduduk dan jarak tempuh ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang rendah perlu diberi alokasi yang lebih besar untuk menjamin investasi pelayanan kesehatan yang dapat melayani kebutuhan masyarakat pedesaan, masyarakat miskin, seperti program jangkauan, transportasi pasien dan kebutuhan rujukan lainnya.
9. Memadukan program perbaikan gizi dengan program Keluarga Berencana (KB) untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk. Pengalaman kerjasama dan sinergi Gizi-KB dari program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) dimasa lalu dapat menjadi bahan pembelajaran. Mencantumkan pesan tentang pentingnya KB dan sebaliknya di dalam setiap kegiatan pendidikan atau Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Gizi.
10. Mengintegrasikan resiko dan realitas perubahan iklim ke dalam setiap program dan kebijakan pembangunan daerah untuk memastikan efektivitas dan memperkuat hubungan antara perencanaan dan tindakan di tingkat lokal. Kebijakan terkait perubahan iklim perlu dimandatkan secara tegas dalam bentuk peraturan perundang-undangan termasuk mekanisme pembiayaan yang jelas. Mekanisme pembiayaan upaya adaptasi perubahan iklim perlu menjadi salah satu pos dalam APBD, atau setidaknya terintegrasi dalam anggaran masing-masing dinas/lembaga.
11. Dukungan dari tingkat nasional, Pemerintah pusat dapat melakukan sistem pangan terpadu, melalui:
 - a. Pendekatan multi dimensi; (i) meningkatkan produksi pangan primer; (ii) mengurangi kehilangan pasca panen dan konsumsi; dan (iii) pengembangan budaya konsumsi pangan lokal.

- b. Pengembangan sistem pertanian ekologis multi komoditas, seperti Integrasi Tanaman Pangan-Hortikultura-Perkebunan-Ternak-Ikan-Perhutanan.
- c. Pengembangan rantai pasok pangan berbasis ilmu dan pengetahuan serta sensitif gizi.

7.3 Kesimpulan

Penurunan angka kemiskinan secara bertahap dan kemajuan program-program pemerintah lainnya telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan di sebagian besar kabupaten di Provinsi NTB. Namun demikian, kemajuan ini memiliki resiko stagnasi jika tantangan utama tidak ditangani. Permasalahan dan tantangan yang terus dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut pertambahan penduduk, semakin terbatasnya daya dukung sumberdaya alam, masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha dibidang pangan dan semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor serta masih cukup besarnya proporsi penduduk miskin. Terkait permasalahan tersebut, yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi di NTB yaitu: i) meningkatkan akses ekonomi dan distribusi pangan yang belum merata melalui program pengurangan kemiskinan; ii) mengurangi angka perempuan buta huruf; iii) akselerasi intervensi untuk pencegahan kekurangan gizi khususnya gizi kronis (*stunting*); iv) meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat; v) meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai; vi) mengatasi kerentanan terhadap resiko perubahan iklim yang semakin meningkat, khususnya berfokus pada peningkatan ketahanan terhadap kekeringan dan banjir.

Sub Bab di bawah ini akan menjelaskan tentang rekomendasi yang terkait dengan enam faktor utama di atas. Ke enam faktor tersebut saling terkait dan meletakkan aspek gizi menjadi tema sentral yang bersinggungan erat dengan ketiga aspek lainnya. Hal ini mencerminkan pentingnya pengarusutamaan pendekatan yang berbasis gizi ke dalam program dan kebijakan ketahanan pangan dan gizi.

Akses ekonomi dan distribusi pangan

Kemiskinan menjadi penyebab penting kekurangan gizi karena rendahnya asupan makanan, akibat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga tidak memadai. Hal ini terkait dengan kemampuan rumah tangga untuk menyediakan pangan yang ditentukan oleh faktor ekonomi. Tingginya angka prevalensi *underweight* dan *stunting* di NTB akibat kekurangan gizi erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Oleh karena itu mengatasi masalah gizi adalah bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan persentase penduduk miskin di NTB sebesar 16,54 persen (802,29 ribu orang) pada September 2015, maka program bantuan sosial dan jaring pengaman sosial masih menjadi hal yang cukup penting untuk mendukung rumah tangga miskin dan rentan dalam mendapatkan akses pangan yang memadai. Program jangka panjang juga telah dilakukan yang mencakup penguatan dan diversifikasi mata pencaharian serta perluasan infrastruktur dasar dan pelayanan. Selain itu, perlu peningkatan alokasi anggaran untuk program bantuan sosial dan reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan sensitivitas gizi dari program, sehingga program tersebut dapat memiliki dampak penting pada akses pangan. Ulasan Bank Dunia pada tahun 2012 tentang program bantuan sosial menemukan ruang untuk perbaikan program bantuan sosial dengan cara menyempurnakan sistem pentargetan sasaran (World Bank, 2012).

Program jaring pengaman sosial dapat menjadi program utama untuk meningkatkan outcome gizi. Program bantuan sosial terbesar di Indonesia juga NTB sekarang ini adalah Raskin. Raskin merupakan program beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin yang berperan sebagai transfer pendapatan dengan menggunakan bahan pangan sebagai modalitas utamanya. Namun, dengan adanya pergeseran penyediaan beras terfortifikasi, maka Raskin merupakan cara yang hemat biaya untuk meningkatkan asupan zat gizi mikro bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Selain penurunan angka kemiskinan, peningkatan efektivitas dan sensitivitas dari program bantuan sosial, menjamin kelancaran akses dan distribusi pangan perlu menjadi prioritas. Hambatan percepatan distribusi pangan sampai ke tingkat rumah tangga yang terjadi baik karena infrastruktur distribusi, sarana dan prasarana pasca panen, pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah, sistem informasi pasar, keterbatasan lembaga pemasaran daerah, penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, dan hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi harus segera diatasi. Tingginya arus ekspor dan impor komoditas strategis pangan di Provinsi NTB juga menuntut adanya pengawasan yang ketat, terutama untuk komoditas pangan pokok. Menjamin stabilitas harga pangan menjadi strategi yang sangat penting karena masa panen yang tidak merata dan harga pangan yang semakin tidak menentu. Stabilitas harga pangan yang terjamin juga akan menguatkan posisi tawar petani.

Pencegahan kurang gizi

Meskipun telah terjadi perbaikan situasi ketahanan pangan dan gizi, tetapi masih terdapat kekurangan pada pencapaian indikator ketahanan gizi seperti terlihat pada data-data yang ada yaitu; (i) prevalensi *stunting* yang masih tinggi pada tahun 2014; (ii) penurunan angka kematian ibu melahirkan belum mencapai target; (iii) angka kematian bayi yang masih cukup tinggi; dan (iv) usia harapan hidup yang masih rendah. Walaupun secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namun penularan infeksi penyakit menular utamanya ISPA, Pneumonia dan diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu upaya keras untuk mengatasinya. Ditambah lagi, pencapaian NTB untuk target MDGs dalam hal proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum dan sanitasi yang layak masih perlu ditingkatkan, mengingat sanitasi yang buruk dan gizi buruk akan membentuk lingkaran setan. Sanitasi yang buruk dapat mengundang penyakit, terutama di lingkungan dimana anak-anak memiliki sistem kekebalan tubuh lemah karena gizi yang tidak memadai dan penyakit yang menyebabkan hilangnya nafsu makan serta penyerapan nutrisi yang buruk, sehingga meningkatkan kejadian kurang gizi. Membangun prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan khususnya pada daerah terpencil dan kawasan rawan bencana kekeringan memegang peranan penting dalam mengurangi kejadian penyakit menular yang berkaitan erat dengan penurunan kejadian kurang gizi. Disamping itu sinergitas STBM dalam berbagai agenda dan program pembangunan sanitasi baik di pedesaan maupun di perkotaan dengan memperkuat sisi perubahan perilaku masyarakatnya masih perlu diintensifkan.

Tidak kalah pentingnya adalah mengoptimalkan berbagai strategi intervensi spesifik gizi yang sudah ada tetapi cakupannya belum maksimal seperti: Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI eksklusif, meneruskan ASI sampai usia 12 bulan, suplementasi vitamin A, imunisasi bayi, pemberian TTD bagi ibu hamil. Dan untuk strategi intervensi sensitif gizi misalnya: Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Posyandu, Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), suplai energi dari diet per kapita (kcal), proporsi sumber energi dari non-makanan pokok. Potensi lain yang dapat dioptimalkan adalah Program JKN/Jamkesda dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).

Di Provinsi NTB, permasalahan kekurangan gizi bukan hanya masalah orang miskin. Proporsi anak-anak NTB yang *stunting* juga cenderung lebih besar dari proporsi penduduk miskin. Untuk penduduk tidak-miskin tetapi kurang gizi, hambatan untuk mencapai status yang lebih bergizi belum tentu terkait pada akses ekonomi atau program pengentasan kemiskinan pemerintah, akan tetapi juga berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap praktik pola makan dan gizi yang baik. Sebaliknya, untuk penduduk miskin yang kurang gizi akan menghadapi tambahan permasalahan untuk akses ekonomi dan sosial.

Pendekatan multi-sektoral untuk mengurangi dan mencegah kekurangan gizi di Provinsi NTB sangat penting dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga PBB, masyarakat sipil serta sektor swasta. Untuk lembaga pemerintah, koordinasi lintas sektor sangat perlu ditingkatkan guna mengatasi hambatan kelembagaan dalam pembuatan kebijakan dan program pemerintah yang sensitif gizi. Mengingat pendeknya waktu "jendela peluang 1000 hari pertama kehidupan" untuk intervensi, perbaikan dalam hal kualitas dan waktu pengumpulan data status gizi akan meningkatkan kemampuan seluruh sektor untuk memberikan intervensi.

Di luar program-program pemerintah, peran sektor swasta dalam meningkatkan status gizi di NTB semakin penting mengingat sektor swasta dapat meningkatkan ketersediaan bahan pangan olahan – yang umumnya tinggi lemak dan gula – dengan harga yang relatif murah. Untuk melengkapi strategi program gizi tersebut, pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk membuat dan mendistribusikan pangan bergizi dengan harga terjangkau. Berkaitan dengan pendidikan, keterjangkauan dan peningkatan kesadaran tentang makanan bergizi dan seimbang harus terus menjadi strategi utama untuk mengatasi kesenjangan gizi di NTB. Program jaring pengaman sosial dan program pencegahan gizi juga dapat berperan penting dalam merangsang sektor swasta untuk memproduksi makanan bergizi yang sesuai standar internasional yang dirancang khusus untuk kelompok rentan, disamping terus menjalankan fungsi pengawasan keamanan pangan. Selain itu, perlunya menambahkan komponen gizi ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya dalam bentuk kupon gizi untuk membantu memberikan insentif untuk gizi yang baik bagi rumah tangga miskin. Dari sudut pandang ketahanan gizi, terdapat peluang untuk memperbaiki program-program bantuan sosial untuk meningkatkan efektivitas program tersebut dalam mengurangi atau mencegah kekurangan gizi.

Rendahnya angka perempuan melek huruf di NTB akan membatasi peluang mereka dan sebagai pengasuh utama anak-anak mereka nantinya akan menghambat perkembangan generasi berikutnya. Untuk meningkatkan angka melek huruf, pemerintah harus meningkatkan efektivitas program ABSANO (Gerakan Angka Buta Aksara menuju Nol) dan ADONO (Gerakan Angka *Drop Out* menuju Nol) melalui peningkatan pemantauan dan evaluasi program tersebut.

Diversifikasi pangan

Konsumsi pangan masyarakat NTB sudah mulai membaik, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk menjamin pola pangan ideal. Hingga saat ini konsumsi pangan pokok masyarakat NTB dari 3 kelompok padi-padian (beras, jagung, tepung terigu) masih didominasi oleh beras. Salah satu penyebabnya adalah saat ini proses produksi dan distribusi pangan banyak difokuskan pada beras, sehingga ketersediaan pangan alternatif seringkali dianggap sebagai pelengkap saja. Konsumsi beras tahun 2014 mencapai 117,5 kg/kapita/tahun, melampaui konsumsi beras ideal

sebesar 100,3 kg/kapita/tahun, hal ini merupakan salah satu penyebab lambannya peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Fakta lain menunjukkan tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap terigu dan hasil olahannya khususnya mie instan yang menyumbang energi secara signifikan bukan saja pada rumah tangga berpendapatan tinggi tetapi juga berpendapatan rendah terutama di pedesaan. Kondisi ini perlu diwaspadai karena gandum adalah komoditas impor dan tidak di produksi di Indonesia.

Secara umum di NTB juga terlihat adanya defisit konsumsi protein baik yang berasal dari pangan hewani (daging dan ikan) maupun yang berasal dari pangan nabati (umbi-umbian dan kacang-kacangan), meskipun ketersediaan bahan pangan tersebut cukup untuk memenuhi konsumsi dan berperan sangat penting sebagai penyedia protein dalam asupan gizi masyarakat. Dengan pola konsumsi seperti ini, dalam jangka panjang, maka kemungkinan akan terjadi masalah kekurangan gizi mikro (*Hidden Hunger*). Tingkat pendapatan yang terkait dengan daya beli serta pengetahuan tentang pangan dan gizi yang relatif masih rendah adalah pemicu kurang beragamnya diversifikasi pangan masyarakat. Selain itu, masih banyak masalah yang dihadapi dalam distribusi pangan untuk menjamin upaya penganekaragaman konsumsi pangan, antara lain menyangkut sarana transportasi (jalan, angkutan), pergudangan, sarana penyimpanan dan teknologi pengolahan untuk memudahkan distribusi pangan antar wilayah. Perbaikan diversifikasi pangan masyarakat dilakukan tidak hanya dengan meningkatkan daya beli masyarakat, akan tetapi juga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pangan yang bergizi dan seimbang bagi kesehatan, ketersediaan, dukungan kebijakan dan faktor sosial budaya.

Diversifikasi pangan tidak dimaksudkan untuk menggantikan beras, tetapi mengubah pola konsumsi masyarakat sehingga masyarakat akan mengkonsumsi lebih banyak jenis pangan dan lebih baik gizinya. Pelaksanaan diversifikasi pangan harus dilakukan secara serentak, dapat dimulai di pedesaan dengan memperhatikan perilaku rumah tangga termasuk rumah tangga petani sebagai produsen sekaligus konsumen pangan. Selain itu juga dengan memberdayakan kelembagaan lokal sebagai modal sosial dalam upaya percepatan. Teknologi informasi serta strategi komunikasi publik dapat memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran masyarakat menuju pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Program-program pengentasan kemiskinan juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kuantitas maupun kualitas konsumsi pangan.

Perubahan iklim

Provinsi NTB merupakan salah satu wilayah Indonesia bagian timur yang sangat rentan terhadap perubahan iklim (Butler et.all., 2009; GTZ, 2010). Beberapa indikasi terjadinya perubahan iklim seperti, musim hujan yang berlangsung lebih pendek dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrim, membuat tanaman padi sebagai sumber pangan bagi penduduk NTB menjadi beresiko (Butler et.all., 2009) karena pertumbuhan vegetatif dan produktivitas komoditas pertanian sangat rentan terhadap variabilitas iklim yang sangat tajam atau ekstrim (IPCC, 2007; FAO, 2007). Daerah-daerah yang rentan terhadap perubahan iklim adalah yang berada di wilayah pesisir, pertanian lahan kering dan lahan basah dimana ketersediaan pangan dan gizi masyarakat sangat bergantung pada daerah tersebut. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan produksi pangan melemah, harga pangan cenderung meningkat dan semakin berfluktuasi. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim juga berdampak negatif terhadap aspek akses dan konsumsi pangan hingga penghidupan masyarakat

di NTB yang sebagian besar masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan kelautan yang sensitif terhadap perubahan iklim, sehingga membuat mereka lebih rentan dan semakin beresiko mengalami kerawanan pangan. Pada akhirnya kondisi tersebut akan menyebabkan laju penurunan angka kemiskinan menjadi lebih lambat dan berpotensi membentuk barisan kelompok miskin yang baru. Hal ini merupakan tantangan serius bagi pembangunan ketahanan pangan dan gizi, sehingga membutuhkan tanggap darurat yang menyerap sumber daya keuangan dan sumber daya manusia baik di tingkat lokal, kabupaten maupun di tingkat provinsi.

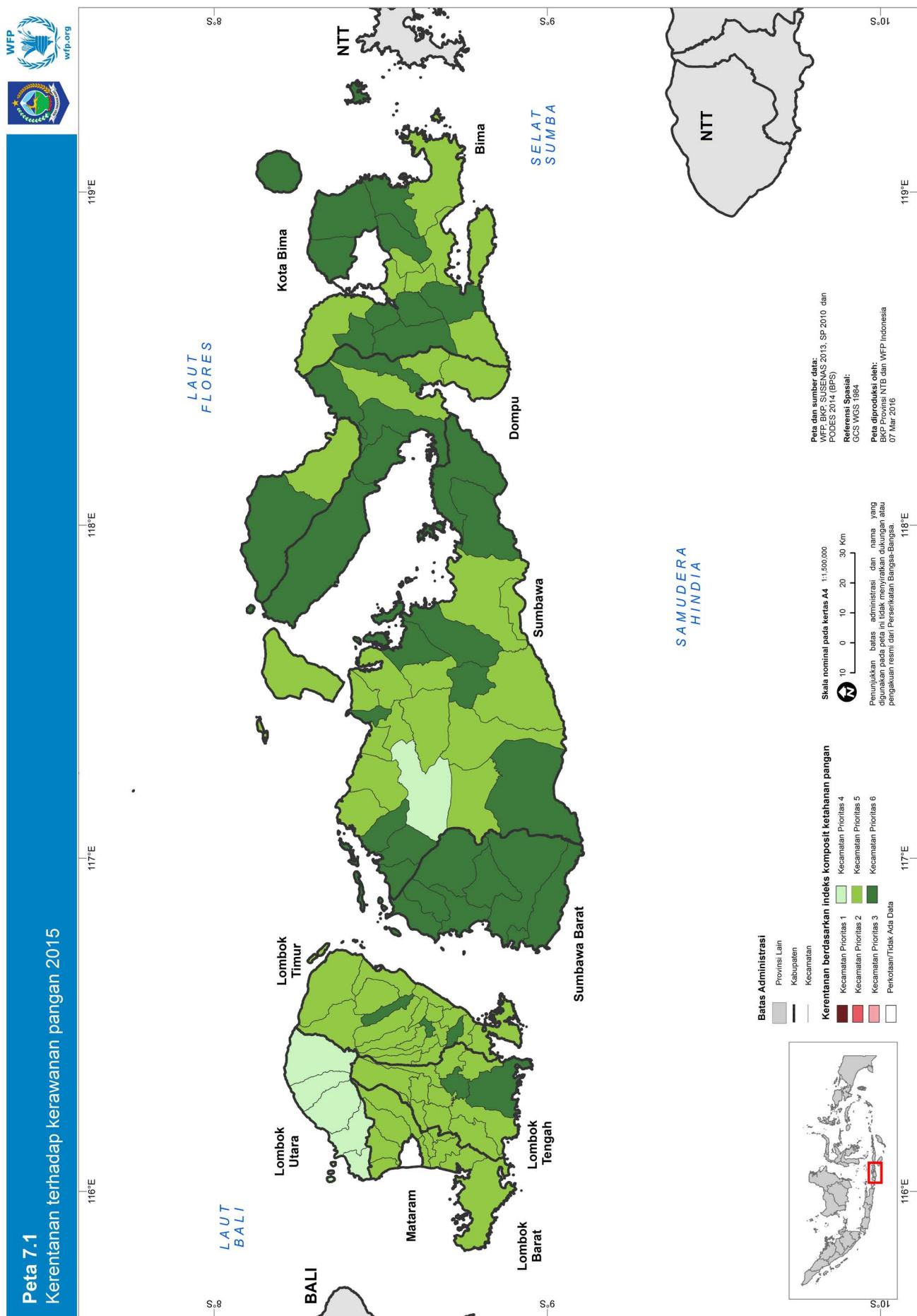
Penanganan masalah perubahan iklim dalam konteks pembangunan ketahanan pangan dan gizi membutuhkan manajemen resiko iklim yang efektif dan sekaligus harus mampu mengembangkan sistem ketahanan pangan yang tahan terhadap dampak perubahan iklim jangka panjang. Implementasi strategi adaptasi harus disertai juga dengan strategi mitigasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Keberlanjutan pasokan air dan jasa lingkungan lainnya merupakan modal penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam beradaptasi dengan perubahan iklim khususnya untuk wilayah lahan kering seperti di NTB. Pengelolaan air dapat diperkuat melalui peningkatan perencanaan tata ruang dan sistem penggunaan lahan terpadu berbasis bentang lahan ataupun daerah aliran sungai, pengelolaan dan konservasi kawasan ekosistem penting, rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi, dan percepatan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pertanian (termasuk irigasi, bendungan, dam) dengan menggunakan teknologi iklim yang sudah terbukti. Mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan dengan mengakses pertumbuhan ekonomi tanpa mengganggu kelestarian lingkungan hidup penting menjadi prioritas mengingat rendahnya daya dukung sumberdaya alam (pertanian) dan masih tetap tingginya laju pertumbuhan penduduk di NTB. Peluang lainnya adalah meningkatkan sistem peringatan dini untuk bencana yang terprediksi (*slow-onset*) dan mendadak (*sudden-onset*) terkait dengan perubahan iklim, menciptakan program insentif untuk penelitian dan pengembangan daya tahan tanaman terhadap kondisi iklim dan hama tanaman yang baru.

Akses ekonomi, pola konsumsi pangan, masalah kesehatan masyarakat dan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim merupakan empat faktor utama yang mempengaruhi pencapaian pembangunan ketahanan pangan dan gizi di NTB. Dengan kondisi pertumbuhan penduduk seperti sekarang ini, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian iklim, maka Provinsi NTB akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Hal ini membutuhkan program-program pemerintah yang tidak saja fokus pada pengurangan kemiskinan berdasarkan pendapatan saja melainkan juga terintegrasi dengan program gizi-sensitif, diversifikasi pangan dan strategi adaptasi perubahan iklim. Melalui peningkatan dialog dan efektivitas fungsi koordinasi lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi sehingga keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan terjamin, maka Provinsi NTB dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD yaitu Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera dan visi Badan Ketahanan Pangan NTB yaitu Terwujudnya Ketahanan Pangan Menuju Masyarakat Sejahtera Berbasis Pangan Lokal.

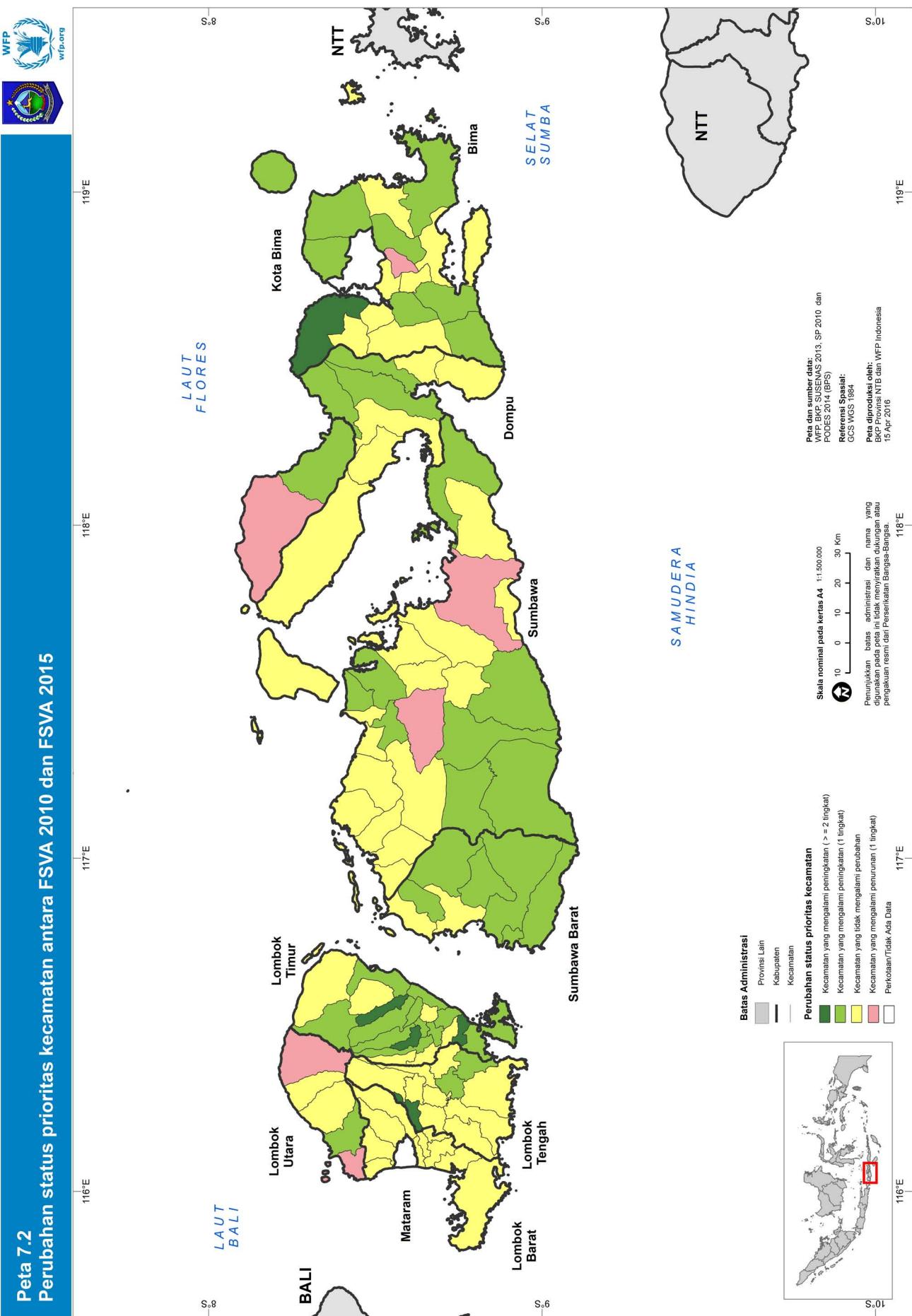
DAFTAR PUSTAKA

- Butler, J., Kirono, D.G.C., Katzfey, J., and Nguyen, K. 2009. *Climate Adaptation Strategies for Rural Livelihoods in West Nusa Tenggara Province*. CSIRO-AusAID Report. 2009.
- Dewan Ketahanan Pangan NTB dan World Food Programme. 2010. *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) NTB 2010*. Mataram.
- FAO. 2007. *Adaptation to climate change in agriculture, forestry and fisheries: Perspective, framework and priorities*. Interdepartmental Working Group on Climate Change, Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Rome.
- GTZ. 2010. *Risk and Adaptation Assessment on Climate Change in Lombok Island, West Nusa Tenggara Province*. Synthesis Report, 97p.
- IPCC. 2007. Summary for Policymakers. In *Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Parry, M.L., O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden, and C.E. Hanson (eds), Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 7-22.
- World Bank. 2012. *Public expenditure review summary*. Public expenditure review (PER); Social assistance program and public expenditure review; no. 1. Washington, DC.

Peta 7.1
Kerentanan terhadap kerawanan pangan 2015



Peta 7.2
Perubahan status prioritas kecamatan antara FSVA 2010 dan FSVA 2015



Lampiran 1

Peringkat kecamatan berdasarkan indikator individu dan kelompok prioritas ketahanan pangan

Lampiran 1: Peringkat Kecamatan Berdasarkan Hasil Analisis Komposit

No	Kecamatan	NCPR (%)	Miskin (%)	Jalan (%)	Listrik (%)	Air (%)	AHH (%)	Stunting(%)	Buta (%)	Kesehatan (%)	Rank	Prioritas	Penduduk
LOMBOK BARAT													
1	Sekotong Tengah	0,44	19,56	11,11	8,40	18,64	63,79	42,3	30,51	0,00	7	5	57.476
2	Lembar	0,48	19,54	0,00	8,39	18,72	63,71	31,5	30,47	0,00	26	5	45.461
3	Gerung	0,38	16,98	0,00	7,29	26,76	63,54	44,5	26,48	0,00	11	5	76.102
4	Labu Api	0,65	15,64	0,00	6,71	30,97	62,71	42,8	24,39	0,00	16	5	62.183
5	Kediri	0,57	18,01	0,00	7,73	23,50	62,60	43,7	28,10	0,00	10	5	55.414
6	Kuripan	0,46	20,05	0,00	8,60	17,11	65,37	32,8	31,27	0,00	22	5	34.804
7	Narmada	0,53	14,82	0,00	6,36	33,56	60,73	30,4	23,11	0,00	48	5	89.976
8	Lingsar	0,45	14,82	0,00	6,36	33,56	60,73	42,6	23,11	0,00	19	5	64.909
9	Gunung Sari	1,17	17,52	6,25	7,52	25,07	62,43	33,6	27,32	0,00	13	5	80.409
10	Batu Layar	2,30	17,31	0,00	7,43	25,70	62,33	32,5	27,01	0,00	24	5	46.427
LOMBOK TENGAH													
11	Praya Barat	0,25	16,79	0,00	1,09	21,76	63,10	39,8	32,23	0,00	31	5	70.418
12	Praya Barat Daya	0,23	16,53	0,00	1,07	22,64	63,73	38,1	31,74	0,00	37	5	52.135
13	Pujut	0,38	18,37	0,00	1,19	16,24	64,82	45,3	35,28	0,00	18	5	98.554
14	Praya Timur	0,22	13,77	0,00	0,89	32,26	61,04	27,0	26,43	0,00	86	6	63.653
15	Janapria	0,34	16,23	0,00	1,05	23,70	62,57	42,7	31,16	0,00	23	5	71.501
16	Kopang	0,40	15,41	0,00	1,00	26,56	62,36	49,5	29,58	0,00	14	5	76.639
17	Praya	0,73	14,52	0,00	0,94	29,64	62,98	35,5	27,88	0,00	51	5	105.518
18	Praya Tengah	0,26	17,36	0,00	1,13	19,78	63,23	33,7	33,32	0,00	47	5	60.984
19	Jonggat	0,30	17,62	0,00	1,14	18,88	64,18	34,8	33,82	0,00	45	5	90.555
20	Pringgarata	0,45	15,76	0,00	1,02	25,33	63,80	24,1	30,26	0,00	89	6	64.492
21	Batukliang	0,58	16,17	0,00	1,05	23,91	62,95	29,7	31,04	0,00	65	5	72.468
22	Batukliang Utara	0,45	16,55	0,00	1,07	22,59	63,79	41,4	31,77	0,00	28	5	48.304

Catatan:

NCPR: Rasio Konsumsi Normalatif Terhadap Ketersediaan Bersih Serealia

Miskin: Penduduk Hidup di bawah Garis Kemiskinan (%)

Jalan: Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung yang Memadai (%)

Listrik: Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik (%)

Air: Rumah Tangga tanpa Akses ke Air Bersih (%)

AHH: Angka Harapan Hidup pada Saat Lahir (tahun)

Stunting: Tinggi Badan Balita di Bawah Standar /stunting (%)

Buta Perempuan Buta Huruf (%)

Kesehatan: Desa dengan Jarak > 5 Km dari Fasilitas Kesehatan (%)

Rank: Peringkat Kecamatan

Prioritas: Prioritas Kecamatan

Penduduk: Jumlah Penduduk tahun 2012

Lampiran 1: Peringkat Kecamatan Berdasarkan Hasil Analisis Komposit

No	Kecamatan	NCPR (%)	Miskin (%)	Jalan (%)	Listrik (%)	Air (%)	AHH (%)	Stunting(%)	Buta (%)	Kesehatan (%)	Rank	Prioritas	Penduduk
LOMBOK TIMUR													
23	Keruak	0,80	21,09	0,00	0,79	19,92	62,57	9,5	19,05	0,00	102	6	49.090
24	Jerowaru	0,27	18,52	13,33	0,69	27,24	63,08	41,6	16,74	0,00	12	5	54.864
25	Sakra	0,81	19,06	0,00	0,71	25,72	62,42	41,7	17,22	0,00	40	5	53.688
26	Sakra Barat	0,46	19,11	0,00	0,71	25,57	62,59	35,5	17,26	0,00	59	5	47.793
27	Sakra Timur	0,50	20,16	0,00	0,75	22,56	61,79	44,4	18,22	0,00	30	5	41.676
28	Terara	0,43	22,03	12,50	0,82	17,21	65,38	43,2	19,91	0,00	9	5	65.348
29	Montong Gading	0,32	19,10	0,00	0,71	25,61	62,55	49,3	17,25	0,00	21	5	41.818
30	Sikur	0,49	18,12	0,00	0,68	28,40	63,16	47,4	16,37	0,00	29	5	67.970
31	Masbagik	0,82	16,29	0,00	0,61	33,63	60,74	27,9	14,71	0,00	93	6	95.392
32	Pringgasela	0,60	20,26	0,00	0,76	22,28	62,10	43,3	18,31	0,00	32	5	50.817
33	Sukamulia	0,80	21,09	0,00	0,79	19,91	62,58	29,9	19,05	0,00	73	6	30.735
34	Suralaga	0,73	18,80	0,00	0,70	26,45	61,58	51,5	16,98	0,00	17	5	52.933
35	Selong	1,20	16,29	0,00	0,61	33,63	60,74	35,6	14,71	0,00	64	5	85.166
36	Labuhan Hajji	0,54	16,54	0,00	0,62	32,90	61,69	37,4	14,94	0,00	60	5	53.820
37	Pringgabaya	0,30	19,18	0,00	0,72	25,38	62,19	37,2	17,33	0,00	54	5	91.402
38	Suela	0,23	18,30	0,00	0,68	27,87	62,33	39,7	16,54	0,00	49	5	37.895
39	Aikmel	0,33	19,47	0,00	0,73	24,54	63,14	35,4	17,59	0,00	61	5	94.238
40	Wanasaba	0,25	20,94	0,00	0,78	20,35	64,16	30,8	18,91	0,00	76	6	59.617
41	Sembalun	0,49	20,66	0,00	0,77	21,15	63,31	46,2	18,66	0,00	25	5	19.051
42	Sambelia	0,17	20,48	0,00	0,76	21,64	62,78	42,6	18,51	0,00	36	5	30.175
SUMBAWA													
43	Lunyuk	0,04	16,18	0,00	2,62	32,02	62,71	15,0	10,09	0,00	103	6	18.424
44	Orong Telu	0,12	19,59	0,00	3,17	21,87	64,64	34,9	12,22	0,00	78	6	4.664

Catatan:
 NCPR: Rasio Konsumsi Normatif Terhadap Ketersediaan Bersih Serealia
 Miskin: Penduduk Hidup di bawah Garis Kemiskinan (%)
 Jalan: Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung yang Memadai (%)
 Listrik: Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik (%)
 Air: Rumah Tangga tanpa Akses ke Air Bersih (%)
 AHH: Angka Harapan Hidup pada Saat Lahir (tahun)

Stunting: Tinggi Badan Balita di Bawah Standar /stunting (%)
Buta: Perempuan Buta Hunuf (%)
Kesehatan: Desa dengan Jarak > 5 Km dari Fasilitas Kesehatan (%)
Rank: Peringkat Kecamatan
Prioritas: Prioritas Kecamatan
Penduduk: Jumlah Penduduk tahun 2012

Lampiran 1: Peringkat Kecamatan Berdasarkan Hasil Analisis Komposit

No	Kabupaten	NCPR (%)	Miskin (%)	Jalan (%)	Listrik (%)	Air (%)	AHH (%)	Stunting(%)	Buta (%)	Kesehatan (%)	Rank	Prioritas	Penduduk
45	Alas	0,36	14,61	0,00	2,36	36,70	60,57	23,8	9,11	0,00	99	6	28.611
46	Alas Barat	0,13	15,57	0,00	2,52	33,83	61,76	38,0	9,71	0,00	74	6	18.702
47	Buer	0,21	14,99	0,00	2,43	35,55	60,82	38,7	9,35	0,00	71	6	13.858
48	Utan	0,12	14,92	0,00	2,41	35,76	60,53	37,1	9,31	0,00	75	6	29.245
49	Rhee	0,12	18,32	0,00	2,96	25,66	62,41	45,4	11,42	0,00	41	5	7.019
50	Batulan teh	0,35	19,59	83,33	3,17	21,87	64,64	28,2	12,22	0,00	2	4	10.333
51	Sumbawa	1,00	14,48	0,00	2,34	37,07	60,05	34,7	9,03	0,00	80	6	57.318
52	Labuhan Badas	0,57	16,46	28,57	2,66	31,18	62,33	39,1	10,27	0,00	8	5	29.598
53	Unter Iwes	0,24	19,59	0,00	3,17	21,87	64,64	29,3	12,22	0,00	94	6	18.466
54	Moyohilir	0,09	14,48	0,00	2,34	37,07	60,05	25,4	9,03	0,00	98	6	22.484
55	Moyo Utara	0,09	17,26	0,00	2,79	28,79	62,25	31,6	10,77	0,00	92	6	9.288
56	Moyohulu	0,11	15,47	0,00	2,50	34,14	61,34	41,3	9,65	0,00	58	5	20.258
57	Ropang	0,11	19,59	20,00	3,17	21,87	64,64	25,2	12,22	0,00	39	5	5.101
58	Lenangguar	0,13	19,11	0,00	3,09	23,29	63,06	25,7	11,92	0,00	97	6	6.430
59	Lantung	0,15	17,44	0,00	2,82	28,27	62,89	47,2	10,88	0,00	38	5	2.816
60	Lape	0,10	14,48	0,00	2,34	37,07	60,05	40,7	9,03	0,00	63	5	16.401
61	Lopok	0,10	15,33	0,00	2,48	34,54	62,19	50,4	9,56	0,00	33	5	17.870
62	Plampoang	0,06	14,71	0,00	2,38	36,39	61,00	46,0	9,18	0,00	46	5	28.319
63	Labangka	0,02	19,59	0,00	3,17	21,87	64,64	31,3	12,22	0,00	91	6	10.390
64	Maronge	0,08	17,53	0,00	2,84	27,99	61,64	41,4	10,94	0,00	53	5	9.941
65	Empang	0,07	14,48	0,00	2,34	37,07	60,05	41,8	9,03	0,00	57	5	22.032
66	Tarano	0,12	19,59	0,00	3,17	21,87	64,64	33,7	12,22	0,00	83	6	15.461

Catatan:

NCPR: Rasio Konsumsi Normatif Terhadap Ketersediaan Bersih Serealia

Miskin: Penduduk Hidup di bawah Garis Kemiskinan (%)

Jalan: Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung yang Memadai (%)

Listrik: Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik (%)

Air: Rumah Tangga tanpa Akses ke Air Bersih (%)

AHH: Angka Harapan Hidup pada Saat Lahir (tahun)

Stunting: Tinggi Badan Balita di Bawah Standar /stunting (%)

Buta: Perempuan Buta Huruf (%)

Kesehatan: Desa dengan Jarak > 5 Km dari Fasilitas Kesehatan (%)

Rank: Peringkat Kecamatan

Prioritas: Prioritas Kecamatan

Penduduk: Jumlah Penduduk tahun 2012

Lampiran 1: Peringkat Kecamatan Berdasarkan Hasil Analisis Komposit

No	Kabupaten	NCPR (%)	Miskin (%)	Jalan (%)	Listrik (%)	Air (%)	AHH (%)	Stunting(%)	Buta (%)	Kesehatan (%)	Rank	Prioritas	Penduduk
DOMPU													
67	Hulu	0,10	14,03	0,00	8,36	21,70	61,34	40,7	13,55	0,00	62	5	16.395
68	Pajo	0,11	12,80	0,00	7,63	26,82	62,35	56,6	12,36	0,00	20	5	12.814
69	Dompu	0,24	12,11	0,00	7,22	29,69	60,29	34,4	11,69	0,00	88	6	50.924
70	Wojas	0,16	13,68	0,00	8,16	23,13	62,21	59,1	13,21	0,00	15	5	52.815
71	Kilo	0,06	16,38	0,00	9,77	11,89	64,90	30,1	15,82	0,00	95	6	12.228
72	Kempo	0,06	13,49	0,00	8,06	23,93	62,80	40,9	13,03	0,00	68	5	18.576
73	Manggalewa	0,11	15,01	0,00	8,95	17,60	61,42	42,1	14,50	0,00	52	5	28.374
74	Pekat	0,13	14,64	0,00	8,73	19,13	61,82	42,3	14,14	0,00	55	5	31.552
BIMA													
75	Monta	0,17	13,80	0,00	5,32	27,88	62,51	42,4	10,05	0,00	70	6	34.064
76	Parado	0,10	17,51	0,00	6,75	13,85	65,16	38,0	12,74	0,00	82	6	8.820
77	Bolo	0,37	18,18	7,14	7,01	11,30	65,52	41,4	13,23	0,00	42	5	45.136
78	Mada Pangga	0,11	15,05	0,00	5,80	23,16	63,71	43,1	10,95	0,00	67	5	27.554
79	Woha	0,23	17,68	0,00	6,81	13,19	65,80	35,6	12,87	0,00	90	6	45.025
80	Belo	0,38	13,80	0,00	5,32	27,88	62,51	47,2	10,05	0,00	50	5	25.260
81	Palibelo	0,22	15,23	0,00	5,87	22,45	64,50	26,2	11,09	0,00	100	6	25.200
82	Wawo	0,14	16,94	0,00	6,53	15,99	65,05	52,0	12,33	0,00	35	5	16.424
83	Langgudu	0,23	15,07	20,00	5,81	23,08	63,80	34,8	10,97	0,00	27	5	26.646
84	Lambitu	0,10	18,38	0,00	7,08	10,56	66,22	48,8	13,37	0,00	44	5	5.116
85	Sape	0,32	14,88	0,00	5,74	23,79	64,48	43,9	10,83	0,00	66	5	53.991
86	Lambu	0,22	16,50	0,00	6,36	17,64	65,00	38,1	12,01	0,00	85	6	34.881
87	Wera	0,22	17,85	0,00	6,88	12,53	66,45	38,5	12,99	0,00	81	6	28.353
88	Ambalawi	0,21	17,52	0,00	6,75	13,79	65,21	36,4	12,75	0,00	87	6	18.370

Catatan:

NCPR: Rasio Konsumsi Normatif Terhadap Ketersediaan Bersih Serealia

Miskin: Penduduk Hidup di bawah Garis Kemiskinan (%)

Jalan: Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung yang Memadai (%)

Listrik: Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik (%)

Air: Rumah Tangga tanpa Akses ke Air Bersih (%)

AHH: Angka Harapan Hidup pada Saat Lahir (tahun)

Stunting: Tinggi Badan Balita di Bawah Standar /stunting (%)

Buta: Perempuan Buta Huruf (%)

Kesehatan: Desa dengan Jarak > 5 Km dari Fasilitas Kesehatan (%)

Rank: Peringkat Kecamatan

Prioritas: Prioritas Kecamatan

Penduduk: Jumlah Penduduk tahun 2012

Lampiran 1: Peringkat Kecamatan Berdasarkan Hasil Analisis Komposit

No	Kabupaten	NCPR (%)	Miskin (%)	Jalan (%)	Listrik (%)	Air (%)	AHH (%)	Stunting(%)	Buta (%)	Kesehatan (%)	Rank	Prioritas	Penduduk
89	Donggo	0,08	17,54	0,00	6,76	13,72	65,29	37,8	12,77	0,00	84	6	16.973
90	Soromandi	0,11	13,80	0,00	5,32	27,88	62,51	45,9	10,05	0,00	56	5	16.117
91	Sanggar	0,05	16,77	0,00	6,46	16,62	64,41	31,1	12,21	0,00	96	6	12.114
92	Tambora	0,06	18,38	11,11	7,08	10,56	66,22	37,7	13,37	0,00	43	5	7.242
SUMBAWA BARAT													
93	Sekongkang	0,29	15,62	0,00	1,13	42,04	62,42	18,6	8,69	0,00	101	6	8.839
94	Jereweh	0,36	16,16	0,00	1,17	40,71	63,13	36,4	8,99	0,00	69	6	8.237
95	Maluk	1,43	14,54	0,00	1,05	44,68	60,73	5,9	8,09	0,00	105	6	13.267
96	Taliwang	0,27	15,92	0,00	1,15	41,31	62,16	34,4	8,86	0,00	77	6	45.764
97	Brang Ene	0,15	19,67	0,00	1,42	32,17	65,37	45,0	10,94	0,00	34	5	5.067
98	Brang Rea	0,09	18,97	0,00	1,37	33,86	63,07	7,7	10,56	0,00	104	6	12.678
99	Seteluk	0,14	17,45	0,00	1,26	37,58	63,39	33,3	9,71	0,00	79	6	15.582
LOMBOK UTARA													
100	Poto Tano	0,05	19,67	0,00	1,42	32,17	65,37	34,2	10,94	0,00	72	6	9.174
101	Pemenang	2,52	30,50	0,00	6,74	40,45	60,33	44,6	25,38	0,00	6	4	33.434
102	Tanjung	0,88	33,40	0,00	7,38	36,68	61,75	51,2	27,79	0,00	4	4	45.424
103	Gangga	0,71	39,19	0,00	8,66	29,15	63,69	58,8	32,61	0,00	1	4	41.162
104	Kayangan	0,28	40,92	0,00	9,04	26,89	64,40	32,1	34,05	0,00	5	4	37.958
105	Bayan	0,12	39,87	0,00	8,81	28,25	62,75	40,8	33,18	0,00	3	4	45.586

Catatan:

NCPR: Rasio Konsumsi Normatif Terhadap Ketersediaan Bersih Sereal
Miskin: Penduduk Hidup di bawah Garis Kemiskinan (%)
Jalan: Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung yang Memadai (%)
Listrik: Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik (%)
Air: Rumah Tangga tanpa Akses ke Air Bersih (%)
Angka Harapan Hidup pada Saat Lahir (tahun)

Stunting: Tinggi Badan Balita di Bawah Standar /stunting (%)
Buta: Perempuan Buta Huruf (%)
Kesehatan: Desa dengan Jarak > 5 Km dari Fasilitas Kesehatan (%)
Rank: Peringkat Kecamatan
Prioritas: Prioritas Kecamatan
Penduduk: Jumlah Penduduk tahun 2012

Lampiran 2

Catatan Teknis mengenai Metode *Small Area Estimation (SAE)*

Lampiran 2

Catatan Teknis mengenai Metode *Small Area Estimation (SAE)*

1. Pendahuluan

Catatan teknis ini menyediakan informasi mengenai latar belakang metode *Small Area Estimation (SAE)*. Metode ini digunakan untuk mengestimasi beberapa indikator yang digunakan dalam pengembangan FSVA provinsi pada tingkat kecamatan.

SAE merupakan suatu metode matematika yang menggunakan modeling untuk mengestimasi karakteristik suatu data sosial ekonomi yang memiliki tingkat agregasi tinggi (provinsi atau kabupaten) ke tingkat agregasi yang lebih rendah (tingkat kecamatan atau desa) karena terbatasnya ketersediaan data primer pada tingkat agregasi rendah. Modeling menggunakan dan menggabungkan kelebihan data survei dan sensus sebagai dasar dari model peramalan untuk wilayah administratif yang kecil. Suatu survei (sampel), walaupun tidak dapat mengestimasi pada tingkat yang lebih rendah, tetapi dapat menyediakan data yang dibutuhkan untuk pemodelan. Di lain pihak, suatu sensus tidak dapat mengumpulkan data yang diperlukan secara langsung, tapi dapat menyediakan data mengenai karakteristik dasar penduduk/rumah tangga secara individu yang dapat digunakan untuk melakukan estimasi sampai dengan tingkat administratif yang paling rendah.

Di Indonesia, metode SAE telah digunakan oleh BPS, Bank Dunia dan SMERU untuk menghitung angka kemiskinan pada tahun 2000, pengembangan Peta Gizi (*Nutrition Map*) oleh BPS dan WFP pada tahun 2006 serta pembuatan FSVA provinsi sebelumnya pada tahun 2010/2011.

Untuk FSVA provinsi 2015, metode SAE menjadi hal yang sangat penting untuk mengestimasi beberapa indikator pada tingkat kecamatan, karena beberapa indikator hanya tersedia pada tingkat kabupaten seperti indikator angka kemiskinan, angka harapan hidup dan perempuan buta huruf. Fokus utama dalam pengembangan indikator FSVA provinsi 2015 adalah untuk mendapatkan estimasi terbaik untuk variabel Y berdasarkan variabel penjelas (X₁, .., X_n) yang signifikan secara statistik. Analisis SAE ini tidak membahas hubungan kausalitas dari Y dan X berdasarkan perspektif sosial dan ekonomi.

Indikator-indikator FSVA provinsi 2015 yang menggunakan pendekatan dengan metode SAE adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan;
- 2) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik;
- 3) Perempuan Buta Huruf;
- 4) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih; dan
- 5) Angka harapan hidup.

Metode SAE tidak digunakan untuk menghitung indikator-indikator FSVA dibawah ini karena indikator-indikator tersebut tersedia pada tingkat kecamatan:

- 1) Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih ‘padi + jagung + ubi kayu + ubi jalar’;
- 2) Persentase desa dengan akses penghubung yang kurang memadai;
- 3) Persentase desa yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan; dan
- 4) Persentase balita stunting.

2. Dataset

Model SAE menggunakan 4 sumber data yaitu:

- Sensus Penduduk (SP) 2010: untuk menyediakan data karakteristik individu dan rumah tangga yang digunakan sebagai peubah independen di dalam proses simulasi dan modeling. Jumlah sampel data SP 2010

- yang digunakan adalah 10% dari total jumlah sampel SP 2010 atau sekitar 23,7 juta penduduk di seluruh Indonesia.
- Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) 2013: untuk menyediakan data tentang karakteristik individu dan rumah tangga. Beberapa variabel atau karakteristik individu dan rumah tangga tersebut selanjutnya digunakan sebagai variabel penjelas (*explanatory variables*) atau variabel dependent dalam model. Kombinasi kedua jenis variabel tersebut digunakan dalam merunning model. Jumlah sampel SUSENAS adalah sekitar 300,000 yang ditujukan untuk estimasi kabupaten/kota dan provinsi. Jumlah sampel masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda.
- Potensi Desa (PODES) 2011: untuk menyediakan data pada tingkat masyarakat (desa/kelurahan) yang digunakan sebagai peubah penjelas dalam menerangkan keragaman informasi lokasi (*locational information*) di dalam proses simulasi dan modeling. PODES mencakup seluruh desa di seluruh Indonesia.

3. Prosedur

Proses analisis SAE untuk FSVA provinsi melalui beberapa tahapan di bawah ini:

1. Pengembangan *Beta model* (lihat persamaan (2));
2. Penghitungan *locational effects* (3);
3. Pernghitungan keragaman estimator (*variance of estimator*) (2);
4. Penyiapan ϵ_{ch} Tsisa residual untuk menghasilkan *Alpha Model* (6); dan
5. Pengembangan GLS estimate model;

$$(1) \ln y_{ch} = E [\ln y_{ch} / x_{ch}] + \mu_{ch}$$

dimana c : subscript untuk cluster desa/kelurahan

h : subscript untuk rumah tangga-h pada cluster c

y_{ch} : besaran indikator y pada rumah tangga-h dan cluster c

x_{ch} : karakteristik rumah tangga pada rumah tangga-h dalam cluster c

Aproksimasi linear dari model (1) kemudian ditulis seperti berikut:

$$(2) \ln y_{ch} = x_{ch} \hat{a} + \mu_{ch} \text{ juga disebut sebagai Beta model}$$

dimana μ_{ch} merupakan variabel residu (*disturbance terms*).

Data survei (SUSENAS) hanya merupakan sub sampel dari keseluruhan populasi, karenanya informasi mengenai lokasi (*locational information*) tidak tersedia untuk semua wilayah dalam data survei, sehingga tidak bisa secara nyata memasukkan locational variable ke dalam model survei. Dengan kata lain, variabel residu seperti pada persamaan 2 diatas, memerlukan informasi mengenai variabel lokasi. Persamaan 3 dibawah ini digunakan untuk mengestimasi efek dari lokasi:

$$(3) \mu_{ch} = \eta_c + \epsilon_{ch}$$

Di sini η_c adalah komponen cluster kecamatan dan ϵ_{ch} adalah komponen desa/kelurahan. Secara rata-rata, pada tingkat desa, variabel residu (*disturbance terms*) menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$(4) \mu_c = \eta_c + \epsilon_c \text{ maka}$$

$$E[\mu_c^2] = \sigma_\eta^2 + \text{var}(\epsilon_c) = \sigma_\eta^2 + \tau_c^2$$

Diasumsikan η_c dan ϵ_{ch} berdistribusi normal dan independen satu sama lain, Elbers et.al memberi suatu estimasi variansi dari distribusi *locational effect*:

$$(5) \text{var}(\hat{\sigma}_\eta^2) = \sum_c [a_c^2 \text{var}(\mu_c)^2 + b_c^2 \text{var}(\hat{\tau}_c)^2]$$

Ketika *locational effect* η_c tidak ada, persamaan (3) kemudian menjadi $\mu_{ch} = + \epsilon_{ch}$.

Sesuai dengan Elbers et.al, sisa residual ϵ_{ch} dapat dijelaskan dengan suatu model logistik yang meregresikan transformasi ϵ_{ch} dengan karakteristik h :

$$(6) \ln \left[\frac{e^{2ch}}{A - e^{2ch}} \right] = Z_{ch}^T \hat{\alpha} + r_{ch} \quad \text{juga disebut } \textit{Alpha model}.$$

Dimana A ekuivalen dengan $1,05 * \max\{\epsilon_{ch}^2\}$.

Estimator variansi untuk ϵ_{ch} dapat dihitung dengan:

$$(7) \quad \hat{\sigma}_{\epsilon, ch}^2 = \left[\frac{AB}{1+B} \right] + \frac{1}{2} \text{Var}(r) \left[\frac{AB(1-B)}{(1+B)^3} \right]$$

Dalam persamaan model (2) metode OLS digunakan untuk mengestimasi parameter model dengan asumsi klasik bahwa sisaan bersifat homocedasticity. Persamaan model (7) dapat mengindikasikan pengingkaran asumsi penggunaan OLS dalam model (2), sehingga diperlukan regresi GLS. Dalam GLS *variance-covariance matrix* merupakan suatu *diagonal block matrix*.

Berdasarkan 5 tahapan analisis SAE tersebut diatas, berikut adalah contoh estimasi persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan pada tingkat kecamatan:

Langkah 1: menentukan variabel karakteristik rumah tangga yang dapat ditemukan baik yang tersedia di data survei rumah tangga (SUSENAS) maupun Sensus Penduduk (SP 2010).

Langkah 2 (Model Tingkat Kabupaten): dengan menggunakan data dari SUSENAS, membuat model pengeluaran konsumsi per kapita (Y) dari karakteristik rumah tangga (X) umum yang terdapat pada SUSENAS dan Sensus Penduduk (SP) untuk masing-masing kabupaten. Variabel X hanya dipilih untuk dimasukkan dalam model jika variabel tersebut memiliki signifikansi statistik yang tinggi. Oleh karena itu variabel dengan signifikansi statistik rendah tidak digunakan dalam pembuatan model kabupaten. Proses pemodelan ini dilakukan untuk setiap kabupaten.

Langkah 3 (Model Tingkat Rumah Tangga): estimasi parameter yang dihasilkan dari Langkah 2 (Model Tingkat Kabupaten) yang kemudian digunakan dalam simulasi untuk memprediksi konsumsi per kapita untuk setiap rumah tangga di Sensus (SP) sesuai dengan model masing-masing kabupaten.

Langkah 4 (Model Tingkat Kecamatan): Hasil Langkah 3 dapat digunakan untuk menentukan rumah tangga yang dikategorikan miskin atau tidak miskin. Kemudian kita dapat menghitung persentase agregat dari penduduk di bawah garis kemiskinan di tingkat kecamatan.

Berikut adalah penjelasan mengenai data dan variabel yang digunakan untuk mengestimasi enam indikator FSVA provinsi dengan metode SAE:

1. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan

Indikator kemiskinan dihitung dengan besaran "Poverty Headcount Index". Besaran ini dihitung dengan terlebih dahulu membuat model pengeluaran rumah tangga berdasarkan variabel-variabel individu maupun rumah tangga dari data survei SUSENAS, ditambah beberapa variabel dari data PODES. Penambahan data PODES bertujuan untuk meningkatkan akurasi dari model.

Data dan Variabel yang digunakan:

- Pengeluaran rumah tangga: data ini diambil dari pengeluaran rumah tangga dari SUSENAS. Pengeluaran rumah tangga adalah indikator paling baik untuk mengukur tingkat konsumsi masyarakat.
- SUSENAS 2013 : berisi data karakteristik individu dan rumah tangga yang digunakan sebagai peubah independen di dalam proses simulasi dan modeling. Karakteristik individu yang digunakan adalah karakteristik kepala rumah tangga dan pasangannya, yang terdiri dari jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan utama. Semakin tinggi pendidikan dan kelayakan status pekerjaan maka pengeluaran rumah tangga akan meningkat sehingga akan memberikan proxy yang lebih baik terhadap prediksi kemiskinan. Variabel rumah tangga diyakini dapat mempengaruhi besaran pengeluaran, karena semakin baik tingkat pendidikan misalnya, maka kondisi perumahan akan semakin baik. Hasil publikasi "Poverty Map & Nutrition Map" menunjukkan variabel perumahan cukup signifikan masuk dalam model.

- Sensus Penduduk 2010: berisi data karakteristik individu dan rumah tangga yang digunakan sebagai peubah independen di dalam proses simulasi dan modeling.
- PODES 2011: berisi data karakteristik desa atau wilayah yang digunakan sebagai peubah penjelas dalam menerangkan keragaman lokasi di dalam proses simulasi dan modeling.

2. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik dan Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih

Ke-2 indikator ini dibangun dengan membuat proporsi rumah tangga dimaksud pada level desa/kelurahan. Langkah ini merupakan pendekatan untuk membuat perkiraan model pada level desa, dan selanjutnya melalui proses simulasi akan diperkirakan dengan menggunakan data sensus (SP2010). Indikator ini akan dievaluasi menggunakan angka dari aggregate data sensus (SP2010).

Data dan variabel yang digunakan sama dengan indikator persentase kemiskinan diatas, kecuali data pengeluaran rumah tangga. Ke-2 ini lebih ditekankan pada kondisi perumahan rumah tangga, yang erat kaitannya dengan status pekerjaan serta tingkat pendidikan.

3. Persentase perempuan buta huruf dan angka harapan hidup

Indikator perempuan buta huruf ini juga dibangun dengan membuat model pada level desa/kelurahan, sedangkan indikator angka harapan hidup menggunakan model pada level rumah tangga. Khusus angka harapan hidup perlu pengkajian secara teliti karena belum ada pembandingnya.

Data dan variabel yang digunakan sama dengan indikator point 2. Variabel individu seperti tingkat pendidikan dan status pekerjaan memiliki keterkaitannya yang jelas dengan indikator ini. Wilayah-wilayah yang tingkat persentase buta hurufnya tinggi akan tercermin dari bagaimana status sosial penduduknya, begitu juga besaran angka harapan hidup. Status sosial penduduk terlihat dari variabel tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kondisi perumahan.

4. Hasil dan reabilitas SAE

Sampling Error (Standard Error) dan Non Sampling Error dalam Survei/Sensus

Ada beberapa kesalahan (*Error*) dalam kegiatan survei atau sensus, seperti:

- a. Pada sensus terjadi adanya kesalahan seperti salah isian dan pengolahan atau karena responden dan petugas yang cukup banyak; dan
- b. Pada survei sampel terjadi kesalahan antara lain karena metode sampling yang tidak tepat (*sampling error*) dan kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia seperti kesalahan yang disebut pada butir a (*non sampling error*).

Daftar isian yang kurang baik atau variabel yang terlalu rinci pada kuesioner survei atau sensus dapat menyebabkan tingginya angka kesalahan akibat faktor manusia.

Pada registrasi dan sensus lengkap tidak dijumpai kesalahan yang disebabkan karena penarikan sampel, sedangkan pada survei sampel terjadi kesalahan yang bersumber dari *sampling error (standard error)* dan *non sampling error*. Keseimbangan antara keduanya perlu dipertimbangkan dalam mendesain suatu survei terutama dalam penentuan besarnya sampel sehingga dapat menggambarkan populasi. Kenaikan besaran sampel akan menurunkan sampling error tetapi sebaliknya akan memperbesar non sampling error. Makin besar sampel berarti makin banyak responden dan petugas sehingga kemungkinan makin besar kesalahan pada pengumpulan informasi.

Sampling Error (Standard Error) dalam SAE

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam tahap simulasi sebagian besar proses menjalankan bootstrapping dengan menggunakan model yang telah diestimasi pada tahap pertama dan menjalankan pengambilan berulang komponen random yang berbeda untuk mem-*bootstrap dependent variables*. Proses pengambilan berulang ini dalam teknik penarikan sampel dapat disamakan dengan proses membuat *all possible sample* (seluruh kemungkinan sampel yang terpilih).

Variabel yang dibootstrap adalah variabel *dependent* atau variabel indikator yang diestimasi. Dalam hal ini indikator tersebut seperti persentase rumah tangga yang tidak ada akses listrik dan persentase rumah tangga tanpa air bersih. Penduga untuk nilai *Standard Error* yang merupakan indikator untuk *Sampling Error* diperoleh dari nilai standard deviasi dari indikator seluruh kemungkinan sampel yang disimulasi. Nilai indikator sendiri diperoleh dari rata-rata seluruh indikator kemungkinan sampel tersebut.

Lampiran 3

Metode pembobotan untuk analisa hubungan antar indikator ketahanan pangan FSVA provinsi

Lampiran 3

Metode pembobotan untuk analisa hubungan antar indikator ketahanan pangan FSVA provinsi

Dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) provinsi kita memiliki 9 variabel (indikator) yang digunakan untuk mewakili tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Dengan variabel yang banyak tersebut kita menemui kesulitan dalam mengelompokkan satu kecamatan dengan kecamatan yang lain, sehingga kecamatan-kecamatan dalam satu kelompok memiliki karakteristik yang sama dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang berada dalam kelompok lain.

Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, diperlukan suatu metode indeks gabungan (komposit) yang berguna dalam merangkum data dari 9 indikator kerawanan pangan kronis sehingga menjadi satu kesatuan kesimpulan yang berguna dalam pengambilan kebijakan. Indeks komposit juga akan memberikan kemudahan dalam mengkomunikasikan hasil analisis dibandingkan dengan mengkomunikasikan setiap indikator satu per satu. Oleh karena itu, analisis komposit FSVA provinsi dilakukan dengan metode pembobotan, dimana masing-masing prioritas akan memiliki cut-off (ambang batas) yang tetap berdasarkan pembobotan pada masing-masing indikator. Dengan adanya cut-off point yang tetap ini, selain dapat menggambarkan kondisi ketahanan pangan dan gizi, FSVA juga akan dapat memberikan kemudahan dalam melihat trend/kecenderungan perubahan yang terjadi.

Adapun range untuk masing-masing kelompok Prioritas FSVA provinsi adalah sebagai berikut:

Prioritas	Nilai komposit
Prioritas 1	≥ 140
Prioritas 2	114 - < 140
Prioritas 3	91 - < 114
Prioritas 4	68 - < 91
Prioritas 5	47 - < 68
Prioritas 6	0 - < 47

Prioritas 1 adalah kecamatan-kecamatan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kecamatan-kecamatan dengan prioritas diatasnya. Begitu sebaliknya, Prioritas 6 adalah kecamatan yang cenderung lebih tahan pangan.

Cut-off point tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengkalian antara bobot indikator dari hasil Analisis Komponen Utama (*Principal Component Analysis – PCA*) pada data gabungan FSVA Nasional dari tahun 2005, 2009 dan 2015 dengan Cut-off point indikator individu yang bersangkutan, kemudian hasil dari 9 indikator tersebut dijumlahkan.

Sementara bobot masing-masing indikator adalah:

Keterangan	Bobot
Rasio Konsumsi Normatif terhadap Ketersediaan Bersih Serealia	0,54
Persentase Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan	0,74
Persentase Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung yang Memadai	0,42
Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,46
Persentase Rumah Tangga tanpa Akses ke Air Bersih	0,23
Angka Harapan Hidup pada Saat Lahir	0,22
Persentase Desa dengan Jarak > 5 Km dari Fasilitas Kesehatan	0,40
Persentase perempuan buta huruf	0,31
Persentase Balita Pendek (<i>Stunting</i>)	0,40

Penghitungan komposit dilakukan dengan rumus:

$$Y_j = a_1 X_{1j} + a_2 X_{2j} + \dots + a_8 X_{8j} + a_9 X_{9j}$$

Keterangan:

Y_j : Skor komposit kecamatan ke-j

a_1, a_2, \dots, a_9 : Bobot masing-masing indikator

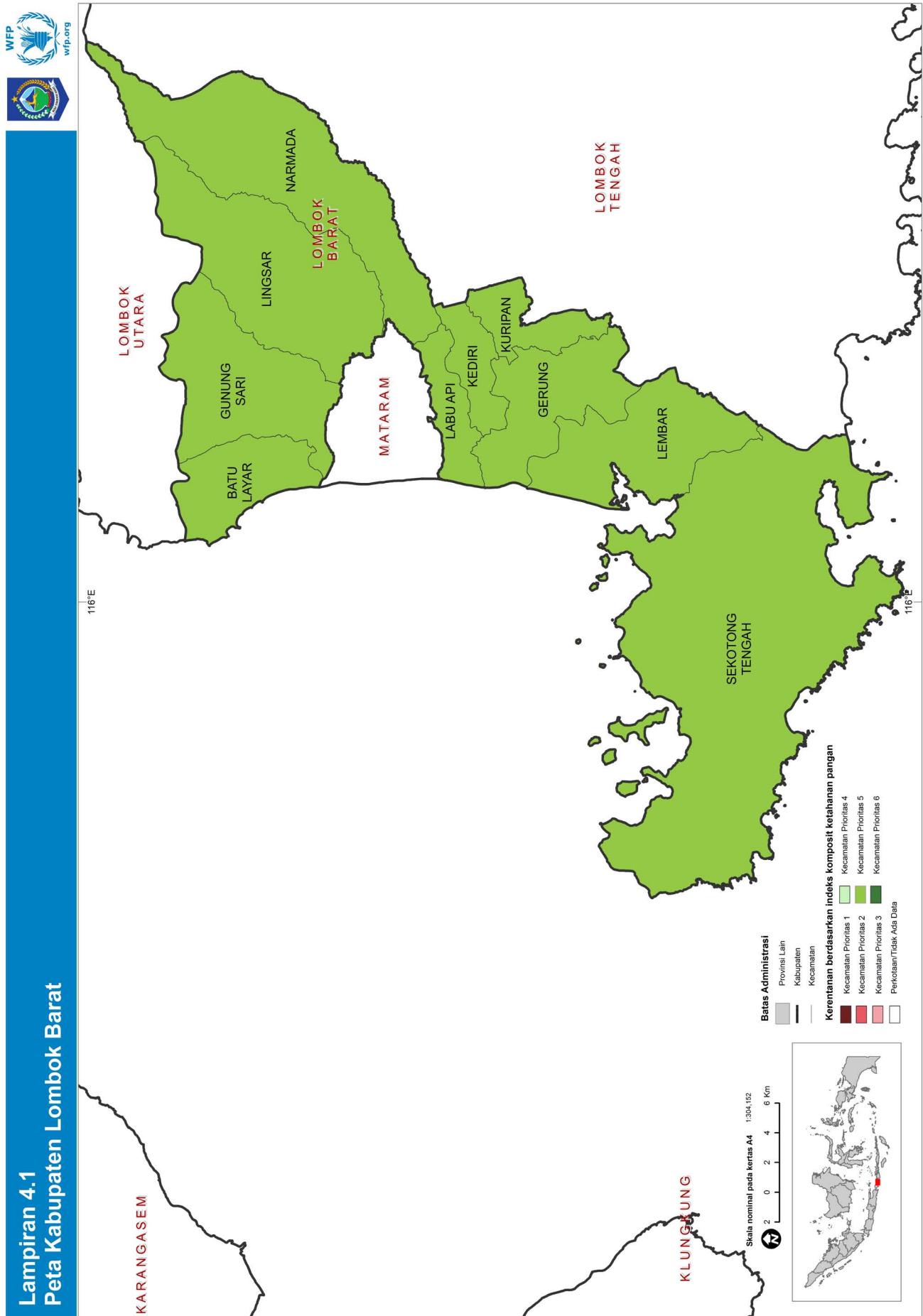
$X_{1j}, X_{2j}, \dots, X_{9j}$: Nilai masing-masing indicator pada kecamatan ke-j

Metode komposit yang digunakan di FSVA provinsi 2015 ini berbeda dengan FSVA provinsi 2010 dan FSVA nasional sebelumnya sehingga hasil komposit FSVA provinsi 2015 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan FSVA provinsi 2010 dan FSVA nasional. Analisis perbandingan untuk melihat kecenderungan perubahan situasi kerawanan pangan suatu kecamatan pada tahun 2010 dengan 2015 dilakukan dengan menghitung ulang indeks komposit FSVA 2010 dengan menggunakan metode komposit pembobotan (sama dengan FSVA provinsi 2015).

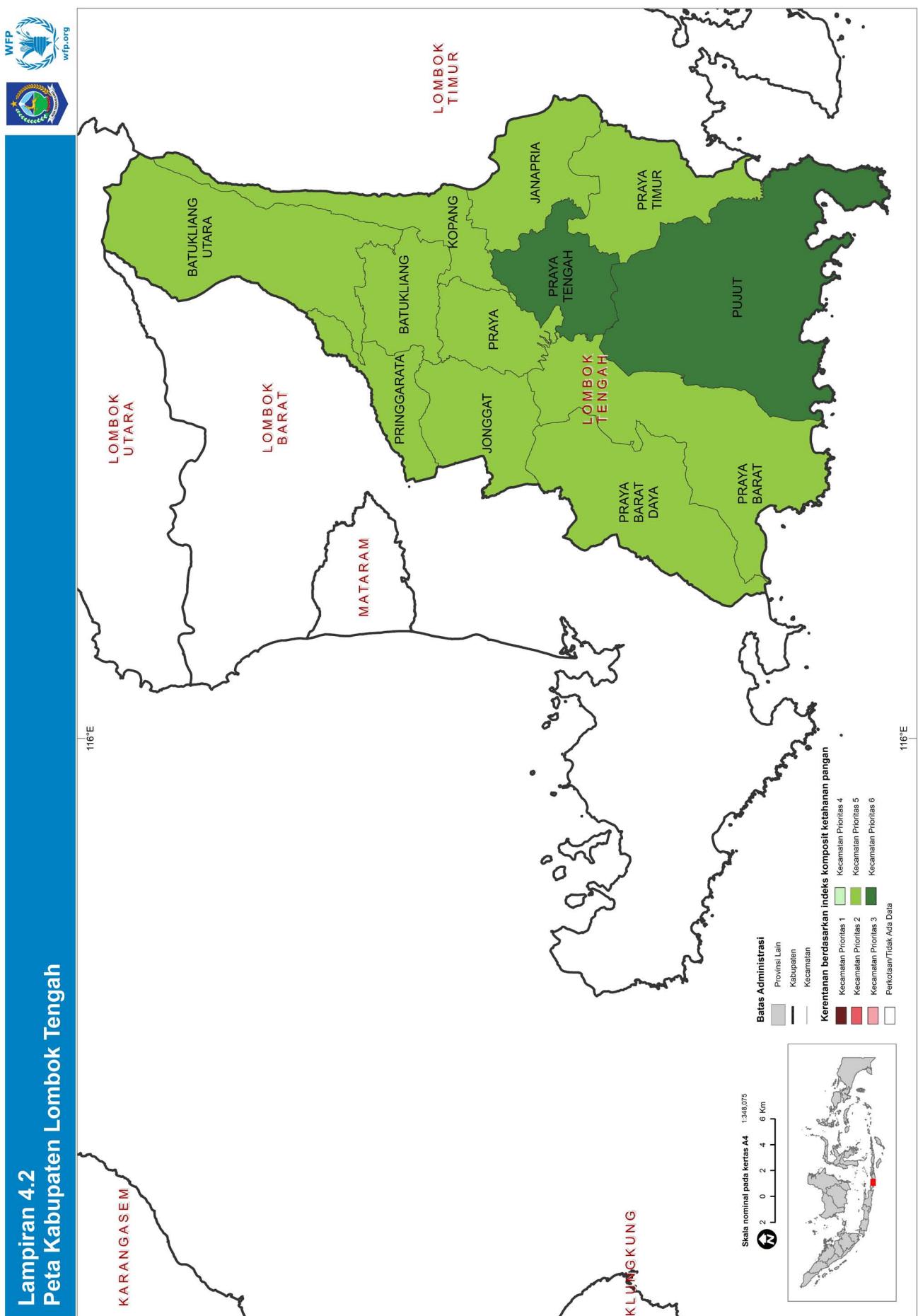
Lampiran 4

Peta kabupaten di
Nusa Tenggara Barat

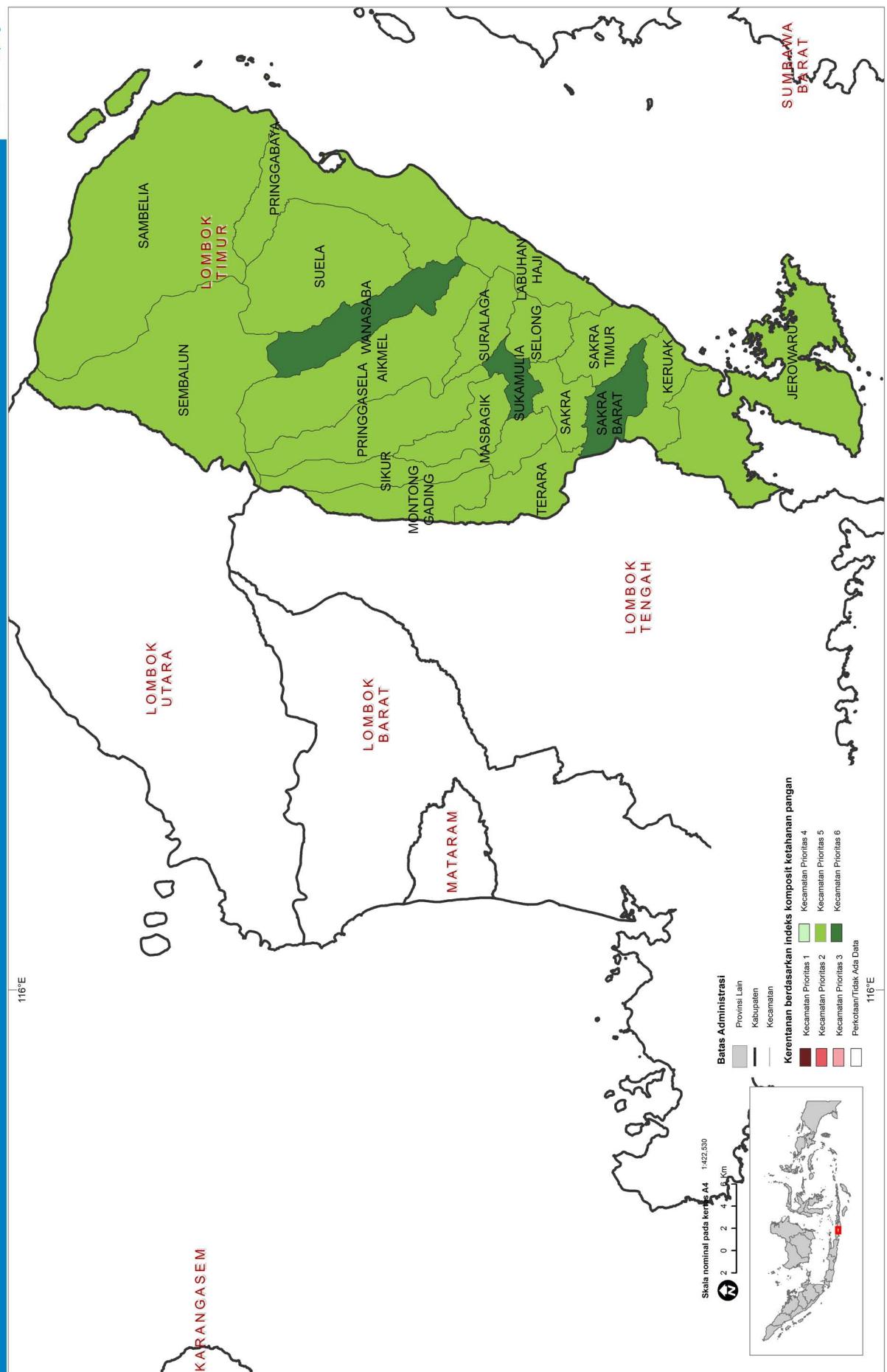
Lampiran 4.1 Peta Kabupaten Lombok Barat



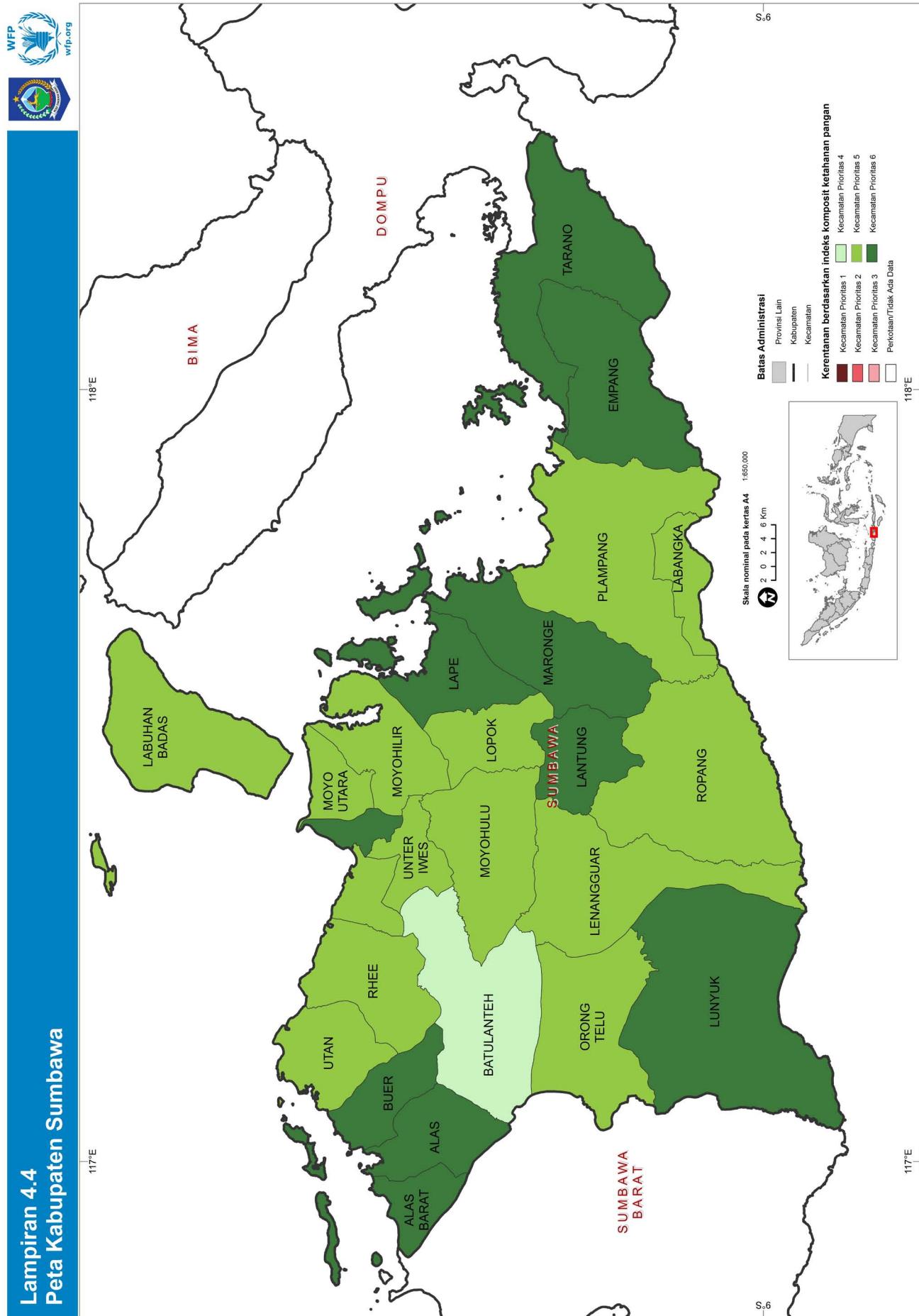
Lampiran 4.2 Peta Kabupaten Lombok Tengah



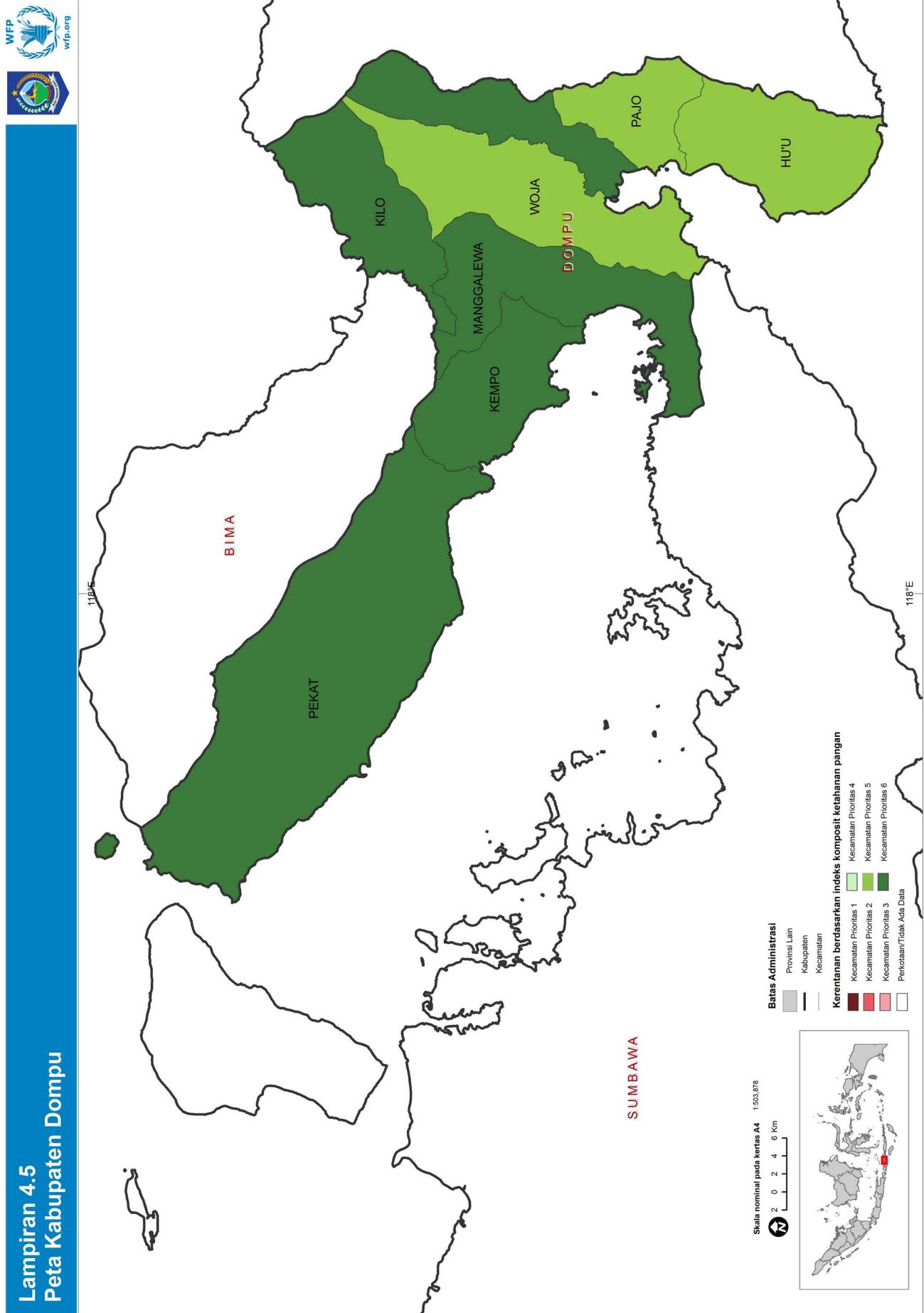
Lampiran 4.3
Peta Kabupaten Lombok Timur



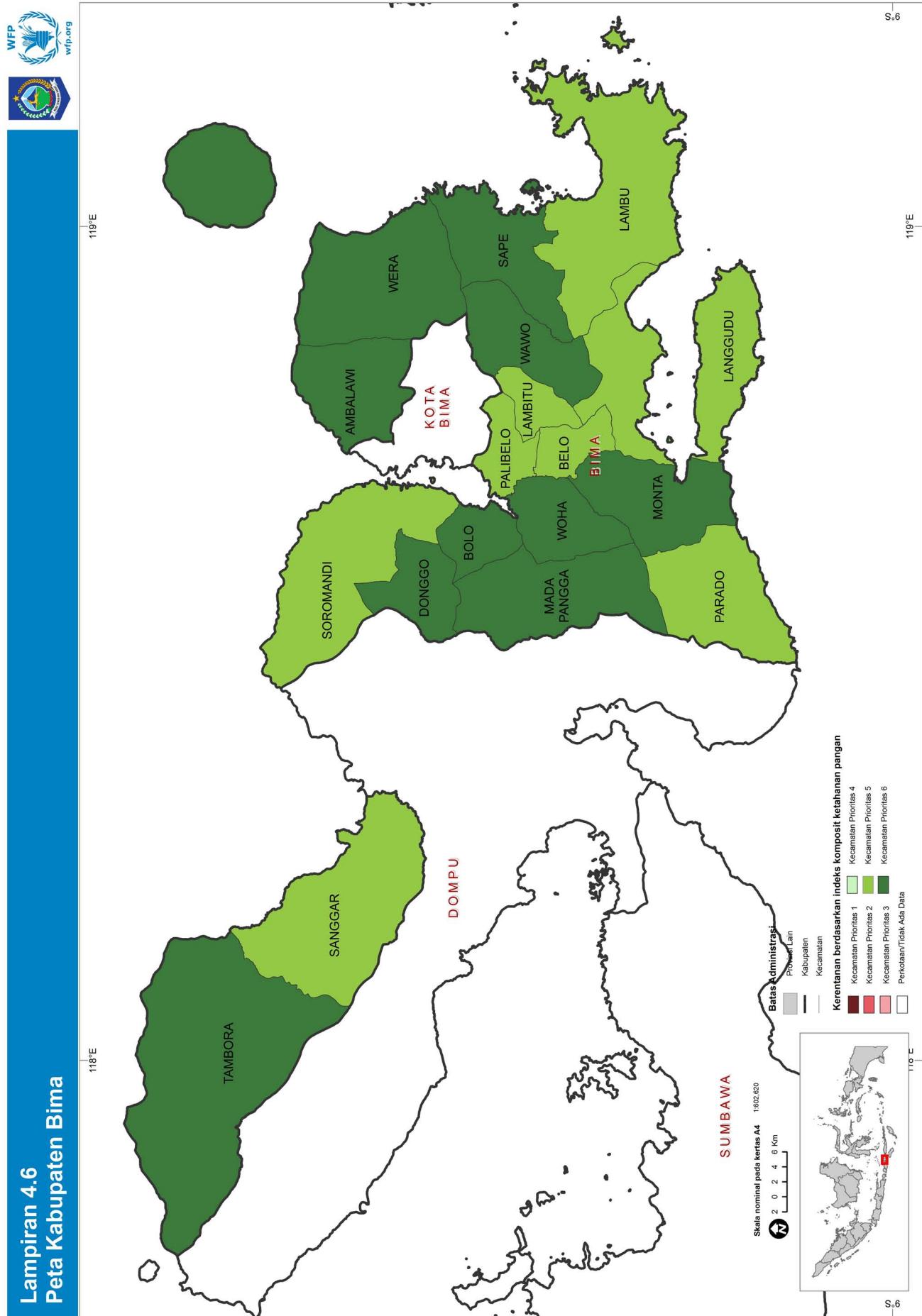
Lampiran 4.4 Peta Kabupaten Sumbawa



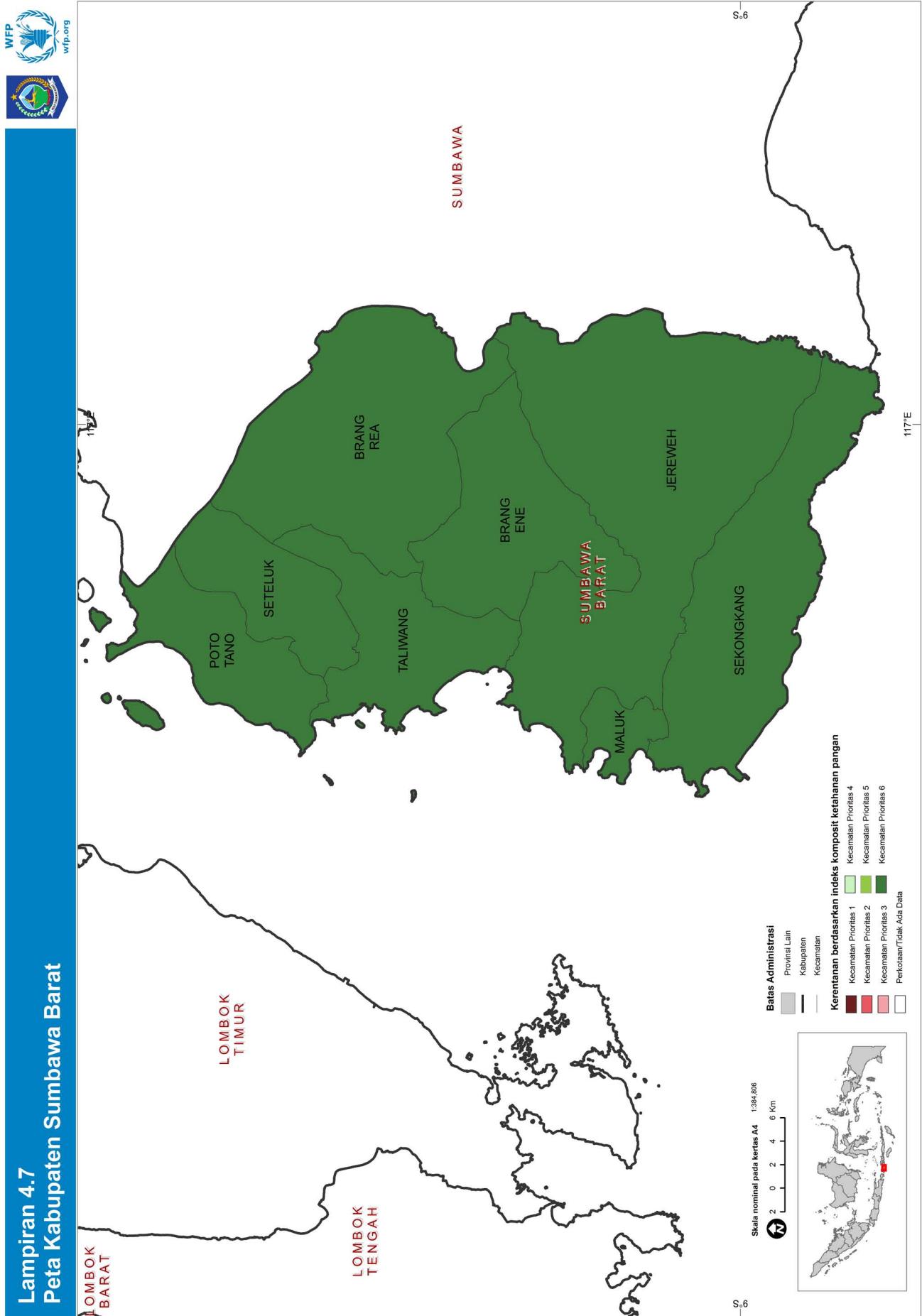
Lampiran 4.5 Peta Kabupaten Dompu



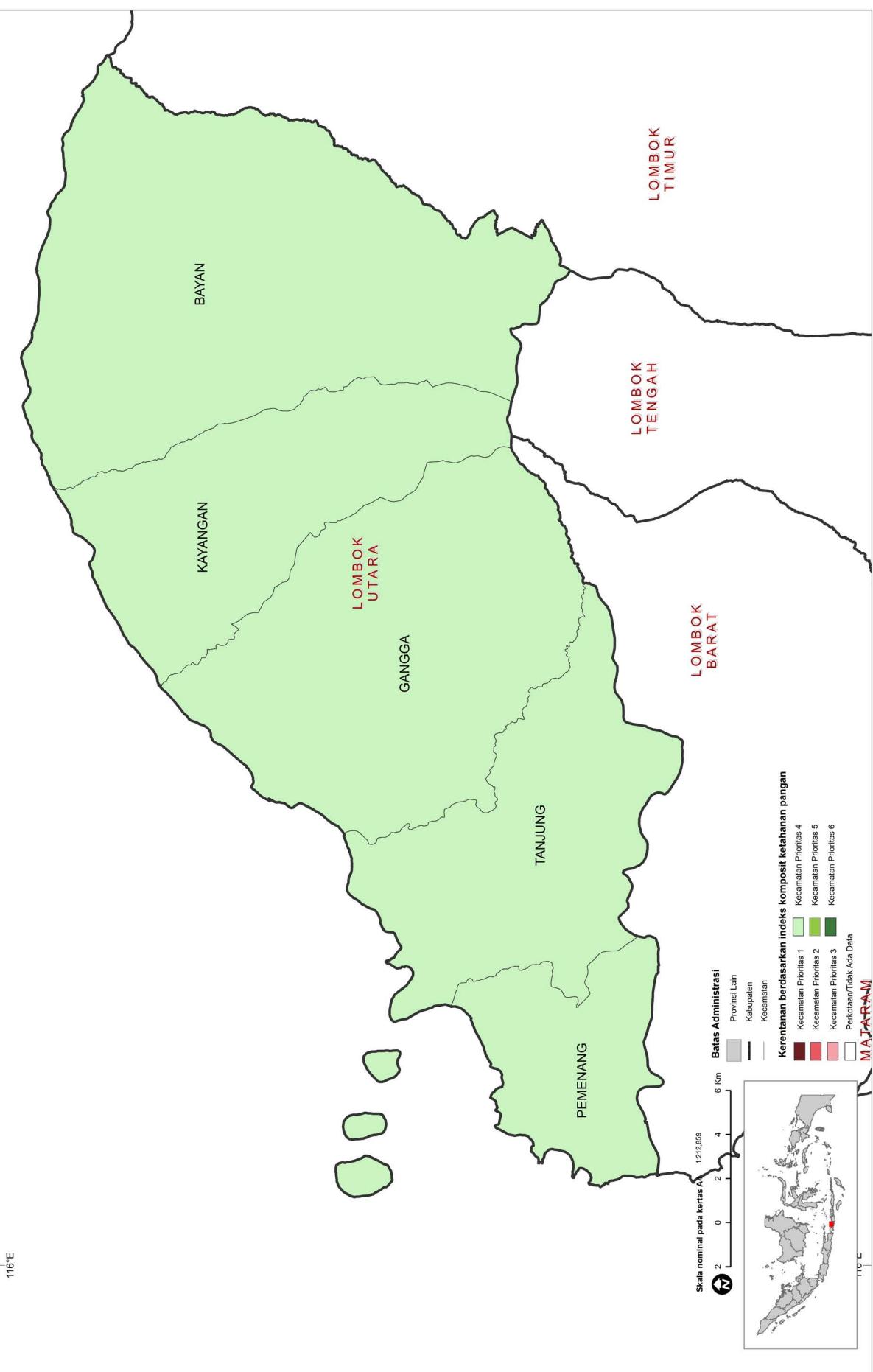
Lampiran 4.6 Peta Kabupaten Bima



Lampiran 4.7 Peta Kabupaten Sumbawa Barat



Lampiran 4.8 Peta Kabupaten Lombok Utara





PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

Badan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. Majapahit No. 29, Mataram
Nusa Tenggara Barat
INDONESIA
Tel. : (62) 370 - 623935
Fax.: (62) 370 - 636005



World Food Programme
Wisma Keiai, 9th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3 Jakarta
INDONESIA
Tel. : (62) 21 - 5709004
Fax.: (62) 21 - 5709001
www.wfp.org



Pengembangan FSVA NTB ini mendapat dukungan dari Pemerintah Australia